



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI DARI KRISIS MENUJU PEMULIHAN

Editor

Irsyad Zamjani
Lukman Solihin
Diyan Nur Rakhmah



PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI DARI KRISIS MENUJU PEMULIHAN

Editor

Irsyad Zamjani

Lukman Solihin

Diyana Nur Rakhmah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Pembelajaran di Masa Pandemi Dari Krisis Menuju Pemulihan

Editor

Irsyad Zamjani
Lukman Solihin
Diyan Nur Rakhmah

Penulis

Ais Irmawati, Amaliah Fitriah, Diyan Nur Rakhmah, Dyah Suryawati, Erni Hariyanti, Ety Sisdiana, George Adam Sukoco, Gustaff H. Iskandar, Ika Hijriani, Indah Pratiwi, Indri Sri Sembadra, Irsyad Zamjani, Kaisar Julizar, Lanny Octavia, Luhur Bima, Lukman Solihin, Mayla Safura Putri, Mia Amalia, Misyah, Noviyanti, Nur Listiawati, Petra Wiyakti Bodrogini, Rasita Ekawati Purba, Relisa, Senza Arsendy, Siswantari, Siti Nur Azizah, Sri Fajar Martono, Yunita Murdiyningrum

ISBN

978-602-244-916-4 (PDF)

Desain Sampul dan Isi

Dwi Pengkik

Pemeriksa Akhir

Lukman Solihin
Diyan Nur Rakhmah

Kredit foto

Ibar Warsita
Lukman Solihin
Tim INOVASI NTB

Penerbit

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dikeluarkan oleh:

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kompleks Kemendikbudristek, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365 | Faks. +6221-5741664
Website: <https://pskp.kemdikbud.go.id/>
Email: pskp.kemdikbudristek@gmail.com

Cetakan pertama, 2022

PERNYATAAN HAK CIPTA © PSKP/Copyright@2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Melalui karunia akal budi, manusia senantiasa beradaptasi. Dalam segala rona dan kemelut sejarah, peradaban kita kerap kali seperti lahir kembali melalui serangkaian penyesuaian diri, baik disengaja atau tidak. Banyak hal berubah sejak pandemi COVID-19 meruyak pada awal 2020, sebagian terkesan bimbang dan getir, sementara lainnya tetap optimistis.

Studi yang dilakukan Pew Research Center terhadap warga Amerika Serikat misalnya, menunjukkan beberapa akibat yang timbul selama pandemi, mulai dari relasi sosial yang merenggang, tetapi menguat dalam lingkup keluarga dan melalui media digital; perubahan dalam rutinitas sehari-hari; dampak kesehatan seperti kematian orang-orang terdekat, depresi, dan penurunan kesehatan fisik; pandangan negatif terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap lamban menangani pandemi; kerawanan dalam karier dan lapangan kerja; hingga ancaman finansial (Kessel, dkk. 2021. *"In Their Own Words, Americans Describe the Struggles and Silver Linings of the COVID-19 Pandemic"* dalam www.pewresearch.org). Dalam mengatasi kepelikan persoalan yang dihadapi itu, sebagian masyarakat mulai bangkit, sementara lainnya masih mengalami kesulitan.

Di tengah situasi muram itu, muncul pula optimisme bahwa kita dapat melewati masa darurat dengan pengetahuan dan pengalaman baru sebagai bekal menjalani kehidupan selanjutnya. Di masa pandemi, banyak orang menghabiskan waktu di rumah, mengisinya dengan bekerja dari rumah, membantu dan mendampingi anak belajar, atau mengisi waktu luang dengan bermacam kegiatan dan hobi (Casselmann dan Koeze. 2021. *"The Pandemic Changed How We Spent Our Time"* dalam www.nytimes.com). Kegiatan di luar rumah dibatasi dan dilakukan dengan berbagai protokol kesehatan: menjaga jarak, menghindari persentuhan fisik dengan orang lain, memakai masker, dan membersihkan tangan. Interaksi melalui perangkat digital pun

meningkat drastis, baik untuk bekerja, belajar, maupun kegiatan lainnya. Melalui perubahan-perubahan itu, banyak pihak menganggap, kehidupan normal pascapandemi bukanlah kehidupan yang sama dengan sebelumnya. Itulah mengapa menjamur frasa “kenormalan baru” untuk menggantikan normalitas lama.

Survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 16-25 Februari 2022 menunjukkan bahwa perilaku masyarakat Indonesia terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan selama pandemi mulai membaik, meskipun dari data yang dirilis, kepatuhan di wilayah luar Jawa-Bali ternyata lebih rendah dibandingkan masyarakat di Jawa-Bali. Begitu pula berdasarkan tingkat pendidikan, mereka yang berpendidikan tinggi lebih mematuhi protokol kesehatan dibandingkan masyarakat dengan jenjang pendidikan menengah ke bawah (BPS. 2022. *Perilaku Masyarakat pada Masa Pandemi COVID-19*).

Di sisi lain, persentase pengguna internet meningkat dari 53,73% pada 2020 menjadi 62,10% pada 2021. Banyaknya desa/kelurahan yang menerima sinyal internet telepon seluler, khususnya jaringan 4G/LTE juga beranjak naik, yakni dari 56.307 desa pada 2020, menjadi 61.926 pada 2021. Secara umum, terjadi penurunan desa/kelurahan yang tidak terjangkau sinyal internet (baik sinyal GPRS, 3G, maupun 4G) , yaitu dari 3.981 pada 2020 menjadi 3.045 pada 2021 (BPS. 2022. *Statistik Indonesia 2022*).

Orientasi kebijakan dalam dunia pendidikan pun mengalami penyesuaian. Kesenjangan terhadap akses dan sumber belajar selama pandemi, menurunnya intensitas dan kualitas pembelajaran, dan risiko kesehatan psikologis bagi siswa, guru, dan orang tua mendorong pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan untuk mengatasinya. Mulai dari kebijakan yang mengatur proses belajar dari rumah, penyederhanaan kurikulum, bantuan kuota data internet, penyesuaian penggunaan Biaya Operasional Sekolah (BOS), penyediaan sumber belajar daring, hingga kebijakan pembukaan kembali sekolah secara terbatas. Berbagai kebijakan itu mungkin belum optimal, namun setidaknya dapat mengurangi dampak krisis agar tidak lebih buruk lagi.

Konteks pandemi pula yang mendorong para peneliti beradaptasi dalam melakukan penelitian. Pengumpulan data yang sebelumnya biasa dilakukan secara langsung (tatap muka), kini mulai mengoptimalkan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi. Survei secara daring maupun via telepon dilakukan untuk menggantikan pengumpulan data langsung di lapangan.

Begitu pula proses wawancara dan diskusi kelompok terpumpun (DKT) melalui aplikasi konferensi daring menjadi alternatif di tengah keterbatasan untuk berkunjung ke lokasi penelitian. Kolaborasi antara peneliti pada lembaga pemerintah dan mitra pembangunan di bidang pendidikan juga kian erat seturut dengan kebutuhan mendesak untuk mendukung kebijakan berbasis bukti guna meminimalkan dampak pandemi.

Penerbitan buku ini dapat dikatakan sebagai “berkah” dari kolaborasi tersebut. Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak), yang kini bersulih nama menjadi Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), telah lama berkolaborasi dengan pelbagai lembaga, baik dalam hal pendanaan penelitian, kerja sama pelaksanaan penelitian, serta diskusi dan diseminasi hasil penelitian. Dari serangkaian komunikasi yang dilakukan, tercetus gagasan untuk menghimpun hasil-hasil penelitian ke dalam buku bunga rampai yang dapat menampilkan tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia selama pandemi, sekaligus menunjukkan beragam peluang, adaptasi, dan inovasi yang telah dilakukan.

Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi para penulis baik dari internal PSKP, maupun dari program kemitraan Indonesia- Australia INOVASI, SMERU Research Institute, dan Digital Access Programme (DAP) yang disponsori Kerajaan Inggris. Terima kasih pula kami sampaikan kepada tim penerbitan buku serta pihak-pihak yang telah membantu kelancaran penerbitan buku ini.

Hadirnya buku ini kami harapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi studi-studi kebijakan pendidikan di masa pandemi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh para peneliti, akademisi, maupun pengambil kebijakan baik sebagai referensi akademis, maupun pertimbangan dalam menentukan kebijakan bagi pendidikan di Indonesia agar lebih baik lagi.

Selamat membaca.

Jakarta, Maret 2022

Tim Editor

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi | vi |
| Prolog | |
| Pembelajaran di Masa Pandemi | |
| Dari Krisis Menuju Pemulihan | |
| <i>Irsyad Zamjani</i> | 1 |
| Bertahan Tetap Belajar Selama Pandemi | |
| Bagaimana Kita Bisa? | |
| <i>Diyah Nur Rakhmah, Irsyad Zamjani, Indah Pratiwi, Siti Nur Azizah, Ika Hijriani</i> | 22 |
| Kolaborasi Guru dan Orang Tua | |
| Menghadapi Tantangan Pembelajaran PAUD | |
| di Masa Pandemi | |
| <i>Nur Listiawati, Siswantari, Dyah Suryawati, Yunita Murdianingrum</i> | 46 |
| Merawat Semangat Belajar | |
| Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi | |
| Praktik Pembelajaran di SD Mutiara Bunda Bandung | |
| <i>Etty Sisdiana, Relisa</i> | 66 |
| Belajar Selama Pandemi | |
| Peran Orang Tua Murid di Jenjang Sekolah Dasar | |
| <i>Luhur Bima</i> | 96 |
| Menurunnya Partisipasi Sekolah Selama Pandemi | |
| Ancaman untuk Kesetaraan Akses Pendidikan | |
| <i>Senza Arsendy, George Adam Sukoco, Rasita Ekawati Purba</i> | 110 |

| | |
|---|-----|
| Kondisi Psikologis Siswa pada Masa Pandemi COVID-19 <i>Ais Irmawati, Sri Fajar Martono, Noviyanti</i> | 132 |
| Pembelajaran Tatap Muka yang Aman Mengatasi Dilema Keselamatan dan Kehilangan Pembelajaran <i>Lukman Solihin, Amaliah Fitriah, Kaisar Julizar, Sri Fajar Martono</i> | 155 |
| Menonton adalah Belajar Catatan dari Transformasi Tayangan Program Belajar dari Rumah <i>Diyan Nur Rakhmah, Siti Nur Azizah, Erni Hariyanti, Ais Irmawati</i> | 180 |
| Inisiatif Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Masyarakat di Wilayah Terpencil <i>Petra Wiyakti Bodrogini, Mayla Safura Putri, Gustaff</i> <i>H. Iskandar, Indri Sri Sembadra, Misiyah</i> | 210 |
| Relawan Literasi (RELASI) Program Kolaborasi untuk Mendukung Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 <i>Lanny Octavia, Rasita Ekawati Purba, Mia Amalia</i> | 230 |
| Epilog Belajar dari Krisis Belajar Sepanjang Hayat <i>Irsyad Zamjani</i> | 256 |



Prolog
Pembelajaran di Masa Pandemi
Dari Krisis Menuju Pemulihan

Prolog
Pembelajaran di Masa Pandemi
Dari Krisis Menuju Pemulihan

~•~
Irsyad Zamjani

Dari Krisis Kesehatan hingga Krisis Pembelajaran

Pandemi COVID-19 merupakan salah satu krisis kesehatan paling berat sepanjang sejarah modern. Meskipun jumlah korban nyawanya belum sebesar pandemi flu Spanyol pada 1918-1920 (sekitar 50 juta), namun hingga dua tahun ini jumlah korban tewas akibat COVID-19 secara global telah menyentuh angka 6,3 juta, melebihi korban pandemi flu Asia pada 1956-1958 (2 juta) dan flu Hong Kong pada 1968 (1 juta) (SinoBiological, tt). Saat tulisan ini dibuat, pandemi COVID-19 di Indonesia sendiri telah mengakibatkan 157 ribu korban meninggal dari 6,1 juta kasus penularan. Angka-angka ini diperkirakan akan terus meningkat. Kita pernah mengalami periode di mana penularan COVID-19 mencapai puncaknya, yang membuat beban layanan fasilitas kesehatan bertambah sangat berat. Kapasitas rumah sakit dalam memberikan layanan semakin menurun.

Akan tetapi, pandemi COVID-19 tidak hanya berakibat pada krisis kesehatan, namun juga telah mendorong munculnya berbagai krisis sosial ekonomi, termasuk di bidang pendidikan. Menurut catatan UNESCO, pada 20 April 2020 terdapat 151 negara di dunia yang menerapkan penutupan sekolah untuk mencegah penularan COVID-19 yang membuat 1,4 miliar pelajar harus belajar dari rumah (UNESCO, 2020). Indonesia sendiri telah memberlakukan penutupan sekolah sejak Maret 2020 dan membuat lebih dari 50 juta pelajar belajar dari rumah (BDR). Hal ini tentu saja merupakan cara belajar yang tidak ideal dan diprediksi memengaruhi kualitas hasil belajar secara umum. Guru dan sekolah diharapkan dapat jauh lebih kreatif dan inovatif dalam memfasilitasi

pembelajaran selama pandemi. Padahal, sebelum pandemi sejumlah data menunjukkan kompetensi dan kreativitas guru dalam pembelajaran belum optimal (Kemendikbud, 2020a).

Studi Andrabi dkk. (2020) tentang dampak penutupan sekolah akibat gempa yang terjadi di Pakistan pada 2005 menjadi salah satu referensi perlunya mengantisipasi terjadinya kehilangan pembelajaran (*learning loss*) selama masa pandemi ini. Kehilangan dalam pembelajaran ini bukan hanya menyangkut menurunnya kualitas proses pembelajaran yang mengakibatkan capaian pembelajaran juga lebih menurun dibandingkan masa normal. Selain itu, meningkatnya risiko putus sekolah juga menjadi bentuk lain dari kehilangan belajar akibat penutupan sekolah. UNESCO (2021) mengestimasi terdapat lebih dari 100 juta anak di seluruh dunia yang memiliki kemampuan membaca di bawah standar kompetensi minimum dan tidak kurang dari 24 juta anak di seluruh dunia yang berisiko putus sekolah karena penutupan sekolah yang semakin lama. Untuk kasus Indonesia, Bank Dunia juga membuat simulasi berdasarkan hasil PISA 2018 dan mengestimasi adanya penurunan skor membaca siswa Indonesia hingga 35 poin dengan skenario penutupan sekolah dari Januari 2020 hingga Juni 2021 dan efektivitas pembelajaran jarak jauh hanya 10% dibandingkan pembelajaran tatap muka (skenario pesimis). Jika menggunakan skenario optimis, di mana efektivitas pembelajaran jarak jauh sebesar 40% dibandingkan pembelajaran tatap muka, maka penurunan skornya berkisar 25 poin (Afkari dan Yarrow, 2021).

Studi INOVASI dan PSKP (2021) menyajikan fakta bahwa *learning loss* memang nyata. Studi ini menganalisis data panel hasil belajar literasi dan numerasi 3.391 siswa kelas awal di 69 sekolah dasar dari 7 kabupaten mitra INOVASI sebelum dan sesudah pandemi (Januari 2020 dan April-Mei 2021). Dari analisis tersebut ditemukan bahwa terjadi penurunan kemajuan belajar literasi sebesar 0,47 standar deviasi (sd) yang setara dengan 6 bulan belajar dan penurunan kemajuan belajar numerasi sebesar 0,44 sd yang setara dengan 5 bulan belajar. Selain itu, data dari studi kesenjangan belajar (*learning gap*) selama pandemi oleh INOVASI dan PSKP yang merekam hasil belajar 18.000 siswa SD kelas awal di 8 provinsi juga menunjukkan fakta lain tentang kesenjangan antara hasil belajar dan kompetensi yang semestinya dicapai dalam kurikulum. Kesenjangan belajar terakumulasi makin melebar saat siswa duduk di kelas-kelas yang lebih tinggi. Untuk hasil belajar numerasi, misalnya, pada

siswa kelas 1 kesenjangan hasil belajar dan target capaian kompetensi dalam kurikulum adalah sebesar 0,84 sd (setara dengan 10 bulan belajar), sedangkan pada siswa kelas 2 kesenjangan tersebut lebih lebar menjadi 1,55 sd (setara 18 bulan belajar), dan semakin melebar pada siswa kelas 3 yaitu sebesar 2,19 sd (setara 27 bulan belajar) (Randall dkk., 2022). Penerapan kurikulum yang terlalu ambisius di masa pandemi akan membuat kondisi ini semakin rumit.

Meskipun demikian, pandemi juga memberi kesempatan besar bagi terjadinya transformasi penting dalam pendidikan, yaitu pemanfaatan teknologi. Selama penutupan sekolah, teknologi menjadi penyelamat utama sehingga proses pembelajaran masih dapat berlangsung. Ketergantungan yang tinggi pada teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), membuat pertumbuhannya meningkat sangat pesat sepanjang pandemi. Berkat teknologi, kita berharap dampak yang lebih buruk dari penutupan sekolah tidak lagi sama seperti yang terjadi di wilayah-wilayah bencana di masa lalu ketika perkembangan TIK belum semaju saat ini. Namun, pekerjaan rumah terbesar dari teknologi ini adalah kesenjangan akses dan literasi. Terdapat guru dan siswa dari wilayah dan kelompok sosial ekonomi tertentu yang tidak memiliki akses yang baik terhadap teknologi, sehingga tidak dapat melakukan pembelajaran jarak jauh secara optimal. Namun, kesenjangan digital semacam ini tidak hanya menjadi tantangan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Banyak guru dan siswa di negara maju seperti Amerika dan Inggris juga mengalaminya dan lebih-lebih merasakan dampaknya selama pandemi ini (Greenhow dkk., 2021).

Krisis pembelajaran ini juga disadari oleh pemerintah, sehingga dilahirkan berbagai inisiatif untuk mengantisipasi agar pandemi tidak membuat krisis semakin dalam. Berbagai inisiatif seperti relaksasi dana biaya operasional sekolah (BOS), pembuatan tayangan program pembelajaran di stasiun TV dan media sosial, penerapan kurikulum darurat, pelatihan guru, distribusi modul belajar, dan pembagian kuota data internet diharapkan dapat membantu sekolah, guru, siswa, dan orang tua dalam mengarungi proses pembelajaran selama pandemi. Namun, selain dari kebijakan-kebijakan yang bersifat jangka pendek, strategi jangka panjang untuk pemulihan pembelajaran pasca-pandemi juga perlu disiapkan.

Tulisan ini mengulas kondisi pembelajaran selama pandemi, bagaimana dinamika proses pembelajaran, seberapa jauh kebijakan pemerintah dapat

membantu, siapa yang mampu bertahan, dan siapa yang tertinggal karena kondisi ini. Memahami krisis pembelajaran sebagai dampak COVID-19 ini penting untuk menavigasi arah kebijakan pendidikan agar proses-proses pemulihan dapat segera dilakukan, baik saat pandemi masih berlangsung maupun sesudahnya. Sebagian besar informasi dikembangkan berdasarkan sejumlah hasil kajian tentang pembelajaran di masa pandemi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak)—saat ini Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP)—sepanjang tahun 2020-2021. Kajian-kajian tersebut umumnya dilakukan melalui survei, diskusi kelompok terpusat, dan wawancara kepada kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua siswa.

Yang Berubah dari Rutinitas dan Cara Belajar Mengajar Selama Pandemi

Pandemi membuat kegiatan belajar dan mengajar tidak lagi sama. Kita tidak melihat lagi anak-anak berseragam berkumpul dalam satu ruangan fisik, berinteraksi satu sama lain, dengan sosok yang lebih dewasa berada di depan atau di tengah-tengah menjadi pemandu dari seluruh aktivitas dan interaksi di ruangan tersebut. Kita juga tidak melihat lagi halaman sekolah yang ramai dengan anak-anak yang bermain, berolahraga, bercakap-cakap satu sama lain, atau melakukan kegiatan literasi selama pagi atau siang hari di masa pandemi ini. Semua aktivitas ini beralih ke ruang-ruang maya yang disediakan oleh teknologi media digital dan diakses dari rumah masing-masing. Jika pun kegiatan tatap muka fisik dilakukan, maka itu dilakukan dengan penuh pembatasan yang ketat. Tidak ada lagi keceriaan yang sama khas anak-anak.

Pembatasan aktivitas persekolahan secara fisik tentu mengubah rutinitas belajar mengajar. Di masa lalu, intensitas keterpaparan guru dan siswa pada kegiatan belajar mengajar terjadi secara rutin. Survei Kemendikbud pada April 2020 menemukan, guru berinteraksi dengan siswa dalam pembelajaran hanya 9 jam seminggu. Padahal dalam masa normal, guru biasanya mengajar tatap muka rata-rata 18 jam seminggu. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahkan menuntut 24 jam mengajar dalam seminggu. Seiring waktu, dengan adanya pembukaan sekolah secara bertahap, durasi mengajar ini semakin meningkat, meskipun belum mencapai rata-rata waktu normal. Pada survei bulan Desember 2020, durasi mengajar guru meningkat menjadi 14 jam per minggu.

Menurunnya intensitas mengajar juga berjalan seiring dengan rendahnya intensitas belajar di kalangan siswa. Pada awal pandemi, hanya 39% siswa secara nasional yang belajar setiap hari. Sejumlah 44% siswa belajar 2-4 hari seminggu, sedangkan 17% sisanya belajar seminggu sekali atau tidak tentu (Kemendikbud, 2020b). Rendahnya intensitas ini muncul karena sekolah dan guru masih mencari format pembelajaran yang baku di masa awal. Belum semua siswa terbiasa dengan belajar jarak jauh tanpa kehadiran langsung guru. Ketika kondisi kenormalan baru mulai terbentuk, sebagaimana terekam dari hasil survei bulan Desember 2020, para siswa yang kembali belajar setiap hari sudah mencapai angka 70% (Balitbang dan Perbukuan, 2021). Kebijakan pembukaan sekolah secara terbatas yang sudah dimulai sejak Juli 2020 diperkirakan juga berkontribusi pada meningkatnya intensitas belajar ini. Saat tulisan ini dibuat, penularan pandemi gelombang kedua akibat munculnya varian baru dari virus ini membuat banyak sekolah kembali ditutup. Rencana pemerintah memperluas pembukaan sekolah pada semester baru 2021/2022 juga tidak terealisasi karena kebijakan pembatasan mobilitas yang baru. Oleh karena itu, baik intensitas mengajar guru maupun belajar siswa diperkirakan juga menurun kembali.

Banyak kalangan yang mengatakan bahwa pandemi memang melumpuhkan aktivitas-aktivitas lama dalam belajar, namun mendorong lahirnya cara-cara belajar yang lebih baru. Akan tetapi, sebagian besar praktik yang terjadi bukan cara belajar yang benar-benar baru, tetapi cara-cara konvensional yang dihidupkan kembali dengan sarana baru. Selama pandemi, media sosial Whatsapp menjadi sarana interaksi dan pertukaran pengetahuan yang paling banyak digunakan. Sebagian besar praktik pembelajaran dilakukan dengan mendistribusikan materi pelajaran dan terutama latihan soal melalui media Whatsapp ini. Dalam beberapa kasus yang ditemukan, soal-soal latihan yang sudah dikerjakan akan ditangkap layar lalu dikirimkan kembali ke guru atau pada siswa jenjang dasar orang tua akan datang ke sekolah atau rumah guru untuk mengumpulkan secara fisik latihan yang sudah dikerjakan anak. Praktik ini biasanya dilakukan karena para guru tidak ingin “ketinggalan setoran” pencapaian target kurikulum, sehingga transaksi materi dan soal latihan melalui Whatsapp merupakan cara yang instan.

Cara-cara belajar yang lebih interaktif pada awal pembelajaran jarak jauh juga lebih banyak memanfaatkan aplikasi Whatsapp yang hanya dapat

mengakomodasi jumlah peserta yang terbatas, meski teknologi konferensi video seperti Zoom dan Google Meet yang dapat memuat peserta yang lebih banyak sudah mulai populer. Hal ini terutama karena pertimbangan beban biaya kuota yang tinggi. Namun, pada perkembangannya penggunaan aplikasi konferensi video ini mulai intensif seiring dengan adanya kebijakan relaksasi dana BOS dan subsidi kuota data internet. Dengan cara ini siswa dapat bertatap muka dengan guru dan siswa lainnya serta berinteraksi layaknya dalam kelas fisik. Aplikasi konferensi video ini belakangan mulai mengalahkan penggunaan aplikasi kelas daring seperti Google Classroom, Moodle, atau Microsoft Teams yang pada awalnya lebih populer. Aplikasi kelas daring ini membantu guru dalam pengelolaan administrasi dan aktivitas pembelajaran di kelas. Melalui aplikasi kelas daring ini, guru juga dapat menerapkan metode *flipped classroom*: membagikan materi pelajarannya dahulu untuk dipelajari dan mendiskusikannya saat pertemuan berikutnya.

Meskipun sumber-sumber pembelajaran di masa pandemi sangat diperkaya dengan materi-materi berbasis digital untuk melengkapi buku teks pelajaran, praktik pembelajarannya masih didominasi oleh cara-cara konvensional. Pembelajaran kreatif berbasis proyek tidak banyak dilakukan oleh guru, lebih-lebih pada awal pandemi. Pembatasan mobilitas dan pertemuan fisik memang membatasi akses pada sarana atau lokasi yang memungkinkan proyek kreatif dilakukan. Akan tetapi, terdapat sebagian guru yang tetap menerapkan praktik pembelajaran kreatif berbasis proyek ini meski sederhana. Proyek ini umumnya dikaitkan dengan topik pengetahuan atau keterampilan kecakapan hidup mengenai COVID-19. Beberapa guru, misalnya, meminta siswa membuat infografik berisi karakteristik virus, cara menghindari penularannya, hingga dampak sosial ekonominya. Sementara guru lain meminta siswa membantu orang tua melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan membuat laporan reflektif tentang hal tersebut. Sepanjang tahun selama pembelajaran jarak jauh berlangsung, para guru senantiasa belajar satu sama lain untuk mencari cara-cara kreatif dalam mengajar. Pada survei yang dilakukan bulan Desember 2020, terlihat bahwa jumlah guru yang mengajar berbasis proyek meningkat dibandingkan semester sebelumnya, dari 22% menjadi 34% (Balitbang dan Perbukuan, 2021).

Tantangan lain dalam pembelajaran selama pandemi, khususnya bagi siswa SMK, adalah berkurangnya pembelajaran praktikum. Padahal, dalam

kurikulum vokasi, pembelajaran mata pelajaran produktif yang di antaranya membutuhkan praktik dibandingkan mata pelajaran non-produktif adalah 70% berbanding 30%. Pembelajaran praktikum sangat esensial dalam melatih keterampilan vokasional para siswa SMK. Namun, berdasarkan survei pada Desember 2020, kurang dari separuh siswa SMK (47,6%) yang mengaku masih memperoleh pembelajaran praktikum selama belajar di masa pandemi (Balitbang dan Perbukuan, 2021). Hal ini tentu dapat berpengaruh pada pencapaian kompetensi mereka dan peluang keterserapan mereka di dunia kerja selepas lulus sekolah. Apalagi di tengah situasi pandemi yang menurunkan kinerja ekonomi dan permintaan tenaga kerja baru yang membuat pasar kerja semakin kompetitif. Namun, sebagian guru tetap berinovasi dalam pembelajaran praktik. Seperti yang ditulis oleh seorang kepala SMK di blog pribadinya (Djumiko, 2021), pembelajaran SMK di sekolahnya selama BDR dilakukan dengan dua cara: praktik di lembaga kerja yang berada di sekitar rumah atau praktik di rumah menggunakan bahan yang dipinjam dari sekolah.

Mencari Keselarasan Agenda Kebijakan Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Sebelum pandemi merebak, Kemendikbud tengah mempersiapkan suatu agenda reformasi pendidikan yang bernaung di bawah *tagline* “Merdeka Belajar.” Agenda ini menysasar pemerataan pendidikan berkualitas yang berbasis pada pemberdayaan siswa, guru, dan kepemimpinan lokal. Namun, penutupan sekolah akibat pandemi harus mengubah berbagai strategi yang telah disusun. Prioritas utama pasca-penutupan sekolah adalah menormalisasi pembelajaran. Tidak ada satu pun pemerintahan di berbagai negara yang siap dengan kondisi ini, sehingga proses belajar memahami kompleksitas dampak pandemi dan proses pengambilan kebijakan berjalan beriringan. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan yang bersifat jangka panjang dan jangka pendek harus disiapkan pada tarikan napas yang sama. Pada batas-batas tertentu, kondisi pandemi justru menjadi berkah tersembunyi karena memberi legitimasi bahkan memaksa sejumlah agenda perubahan berjalan lebih cepat dari yang direncanakan.

Salah satu agenda jangka panjang yang pada gilirannya dilegitimasi dan dipercepat oleh adanya pandemi adalah penyederhanaan desain pembelajaran, baik dari aspek persiapan maupun kurikulum. Dibandingkan sejumlah negara lain, desain kurikulum di Indonesia dikenal cukup kompleks.

Guru dituntut untuk mengajarkan target materi yang cukup banyak yang membebani baik siswa maupun guru sendiri. Alih-alih menunggu siswa untuk memahami setiap materi yang diajarkan, sebagian guru memilih untuk menyelesaikan target materi yang harus diajarkan. Akibatnya, siswa tidak punya cukup waktu untuk mengasah potensinya dan melakukan refleksi atas kemampuannya. Merdeka Belajar episode 1 melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sudah mulai mendorong penyederhanaan RPP dari 13 komponen menjadi 3 komponen. Pemerintah bahkan menyatakan bahwa RPP dapat diringkas hingga 1 lembar saja.

Kurikulum yang kompleks, jika untuk masa normal saja tidak relevan, apalagi pada masa krisis ketika pembelajaran normal di sekolah tidak lagi dilakukan. Pada awal pandemi, Kemendikbud melalui SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 juga lebih jauh lagi mendorong agar guru tidak lagi mengejar target ketuntasan kurikulum dalam pembelajaran selama pandemi. Guru diarahkan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, berfokus pada pendidikan kecakapan hidup, menggunakan pendekatan dan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai konteks, dan memberi umpan balik secara kualitatif. SE Nomor 4 Tahun 2020 ini meski ditujukan untuk pelaksanaan pembelajaran selama pandemi, tetapi dapat dikatakan menjadi arah kebijakan jangka panjang dalam pengembangan desain pembelajaran yang dapat memerdekakan guru dan siswa. Memang butuh penyesuaian yang tidak mudah terhadap kebijakan ini. Banyak guru yang belum mampu membuat desain pembelajaran yang lebih sederhana sehingga tidak dapat keluar dari target-target kurikulum reguler. Pada gilirannya, hal ini membebani siswa dengan berbagai macam tugas yang diberikan melalui media sosial sebagaimana telah kita bahas sebelumnya.

Untuk membantu para guru membuat desain pembelajaran yang lebih sederhana, Kemendikbud meluncurkan platform gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id yang sudah digunakan oleh 1.125.301 guru. Melalui guru belajar, Kemendikbud memberikan materi-materi pelatihan daring dengan berbagai topik untuk membantu guru melakukan pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Sedangkan melalui ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id, para guru dapat berbagi praktik baik pembelajaran: RPP, video, dan artikel inspiratif. Materi-materi yang masuk dikurasi oleh tim Kemendikbud dan

guru-guru lain dapat mengunduhnya secara cuma-cuma untuk digunakan sesuai kebutuhan. Hingga tulisan ini dibuat, platform ayoguruberbagi telah memuat 125.672 RPP, 2.979 artikel, dan 148 video (Kemendikbud, 2021).

Selain platform ini, pemerintah juga merilis Kurikulum Kondisi Khusus atau yang biasa dikenal sebagai kurikulum darurat sebagai acuan bagi penyederhanaan kurikulum selama pembelajaran di masa pandemi. Kurikulum darurat ini merupakan penyederhanaan dari Kurikulum 2013, terutama pada ranah kompetensi dasar. Dalam Peraturan Kepala Balitbang dan Perbukuan Nomor 018/H/KR/2020 yang menjadi turunan dari Kepmendikbud Nomor 719/P/2020 tentang kurikulum kondisi khusus ini, misalnya, kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 SD disederhanakan dari semula berjumlah 11 sesuai Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 menjadi 6 dalam kurikulum darurat ini. Kompetensi-kompetensi dasar yang diambil hanya merupakan kompetensi esensial dari suatu mata pelajaran. Perilisan kurikulum darurat ini juga dilengkapi dengan dokumen modul pembelajaran literasi dan numerasi yang diperuntukkan bagi guru, orang tua, dan siswa PAUD dan SD.

Kurikulum darurat memang hanya menjadi salah satu opsi di antara tiga opsi lain yang diberikan oleh Kemendikbud sebagai kurikulum yang diterapkan oleh satuan pendidikan selama pandemi. Selain kurikulum darurat, satuan pendidikan dapat memilih untuk tetap menggunakan Kurikulum 2013 secara penuh atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri sesuai kondisi masing-masing. Berdasarkan hasil survei Kemendikbud bulan Desember 2020, sejak perilisan kurikulum darurat pada Agustus 2020, baru 7% sekolah yang menerapkannya secara penuh. Namun, terdapat 42% lain yang mengombinasikannya dengan Kurikulum 2013 (Balitbang dan Perbukuan, 2021). Cara kombinasi ini biasanya dilakukan secara eklektik berdasarkan mata pelajaran. Beberapa mata pelajaran mengacu pada Kurikulum 2013 penuh, sementara pelajaran lainnya mengacu pada penyederhanaan kompetensi dasar dalam kurikulum darurat. Namun, umumnya proporsi mata pelajaran yang mengacu pada Kurikulum 2013 masih lebih besar dibandingkan yang mengacu pada kurikulum darurat di antara sekolah yang melakukan kombinasi ini. Penyederhanaan kurikulum di masa pandemi ini menjadi momentum dan memberi landasan bagi agenda reformasi kurikulum dalam kerangka jangka panjang. Pada Maret 2022, Kemendikbudristek kemudian merilis Kurikulum

Merdeka yang merupakan pengembangan lebih lanjut dan komprehensif dari kurikulum darurat. Meskipun masih diterapkan secara terbatas, kurikulum baru ini diharapkan akan menjadi kurikulum nasional secara penuh pada 2024.

Selain modul pembelajaran, penerapan penyederhanaan kurikulum dalam pembelajaran juga diwujudkan melalui konten-konten program Belajar dari Rumah (BDR) yang ditayangkan di TVRI dan kemudian dialihkan ke kanal YouTube. Program tayangan ini dirilis sejak awal pandemi, namun materinya merupakan kontribusi dari berbagai sumber. Setelah adanya kurikulum darurat, pemerintah mengembangkan materi video pembelajaran sendiri yang mengacu pada kerangka Kurikulum 2013 yang disederhanakan tersebut. Pada bulan April 2021, penayangan program ini dialihkan dari TVRI ke kanal YouTube TV Edukasi Kemendikbud agar dapat menjangkau lebih banyak siswa dan dengan jam menonton yang lebih fleksibel sesuai kondisi siswa. Bagi guru, tayangan ini dinilai menambah wawasan dan meningkatkan kreativitas serta menambah keterampilan mengajar. Sedangkan bagi orang tua siswa, tayangan ini juga membantu anak memahami materi, menambah referensi, dan meningkatkan kreativitas belajar (Rakhmah dkk., 2021). Program tayangan video BDR ini memang didesain sebagai program jangka pendek untuk membantu menormalisasi pembelajaran di masa pandemi, namun menjadi salah satu basis bagi transformasi jangka panjang menyangkut digitalisasi pembelajaran.

Skenario ini juga sejalan dengan kebijakan subsidi kuota data internet yang dirilis pemerintah sejak Oktober 2020. Akses pada internet merupakan kebutuhan esensial dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Namun, jika sistem pendidikan kita hendak beradaptasi dengan transformasi digital melalui penerapan blended learning, akses pada internet juga menjadi kebutuhan esensial dalam jangka panjang. Bantuan kuota data internet ini didistribusikan kepada pendidik dan peserta didik dari semua jenjang pendidikan. Sejumlah negara seperti Malaysia dan Turki juga telah memiliki kebijakan subsidi kuota ini dengan konsep dan implementasi yang bervariasi (Sajida dan Ranjani, 2020). Berdasarkan kajian cepat yang dilakukan oleh Puslitjak, bantuan ini cukup membantu siswa dan guru dalam melakukan pembelajaran yang lebih kontekstual selama pandemi. Dibandingkan siswa yang tidak menerima bantuan kuota internet, siswa yang menerima bantuan kuota dapat belajar lebih intensif, memiliki pilihan strategi belajar yang lebih variatif, dan menggunakan alternatif media serta sumber belajar yang lebih

beragam. Demikian halnya dengan guru yang memperoleh bantuan kuota, mereka memiliki jam mengajar lebih lama dan dapat menggunakan media ajar yang lebih interaktif dibandingkan guru yang belum memperoleh bantuan kuota (Zamjani dkk., 2021). Memang belum semua pihak terjangkau oleh bantuan kuota ini, terutama mereka yang ada pada jalur pendidikan non-formal. Namun, informasi yang diperoleh tentang implikasi dari bantuan kuota terhadap pembelajaran menjadi sinyal pentingnya akses internet yang inklusif agar sistem pendidikan kita dapat segera beradaptasi dengan transformasi digital baik selama pandemi maupun sesudahnya.

Yang Bertahan dan Tertinggal Selama Pandemi

Pandemi memberikan kesempatan lahirnya berbagai perubahan penting dalam dunia pendidikan. Perubahan kurikulum dan transformasi teknologi digital adalah di antara hal-hal penting yang merupakan berkah tersembunyi dari pandemi. Namun, risiko yang ditimbulkan dari penutupan sekolah selama pandemi juga membentang di depan mata. Kehilangan pembelajaran, meningkatnya putus sekolah, dan menurunnya kesejahteraan psikologis merupakan risiko-risiko yang mengancam. Kesenjangan dalam hal kondisi geografis dan sosial ekonomi dapat menjadi musabab adanya perbedaan kemampuan setiap orang dalam menghadapi dan memitigasi berbagai risiko tersebut. Risiko-risiko ini berpotensi mewujudkan secara berlipat bagi mereka yang tidak mampu beradaptasi dengan cara pembelajaran baru dan tidak memiliki akses pada perangkat teknologi yang memadai. Mereka inilah yang akan tertinggal dalam krisis dan jika dibiarkan berlarut-larut ketertinggalan tersebut akan semakin dalam.

Para guru dan siswa yang berada di daerah tertinggal dan terpencil memiliki tantangan terbesar dalam menjalankan pembelajaran di masa pandemi. Berbagai indikator yang diperoleh dari hasil-hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan dalam hampir semua hal antara guru dan siswa yang berada di wilayah tertinggal di satu sisi dan mereka yang berada di wilayah non-tertinggal di sisi yang lain. Salah satu kesenjangan terjadi dalam hal akses pada internet dan perangkat teknologi. Berdasarkan survei Kemendikbud Mei 2020, terdapat 18,4% siswa yang tidak dapat sama sekali mengakses internet di daerah tertinggal, berbanding 4% di non-tertinggal. Survei yang sama juga melaporkan 27,9% siswa di daerah tertinggal tidak

memiliki telepon pintar untuk belajar, sedangkan di daerah non-tertinggal “hanya” 6,2% siswa (Kemendikbud, 2020a). Kondisi ini tentu berpengaruh pada kesenjangan dalam hal intensitas maupun kualitas belajar mereka. Dari sisi intensitas belajar, survei Kemendikbud Desember 2020 mencatat anak-anak di daerah tertinggal yang belajar setiap hari selama pandemi hanya 47,2%, sedangkan anak-anak di daerah non-tertinggal mencapai 70,5%. Selain itu, dalam survei tersebut para guru di daerah tertinggal juga melaporkan rata-rata proporsi siswa yang tidak aktif mengikuti pelajaran selama BDR adalah 38,8%, berbanding rata-rata proporsi siswa di daerah non-tertinggal sebesar 28,8% (Balitbang dan Perbukuan, 2021).

Hal ini membuat pembelajaran jarak jauh di daerah tertinggal lebih tidak efektif dibandingkan di daerah non-tertinggal. Oleh karena itu, selama masih memungkinkan sekolah-sekolah di daerah tertinggal akan tetap membuka pembelajaran tatap muka. Dari survei ke survei, proporsi sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka di daerah tertinggal secara konsisten selalu lebih tinggi dibandingkan di daerah non-tertinggal. Jika sekolah tidak mungkin dibuka, para guru atau kepala sekolah biasanya mendatangi siswa ke rumah-rumah mereka untuk mengajar atau sekadar memastikan mereka belajar. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh seorang kepala sekolah di Sulawesi Tengah:

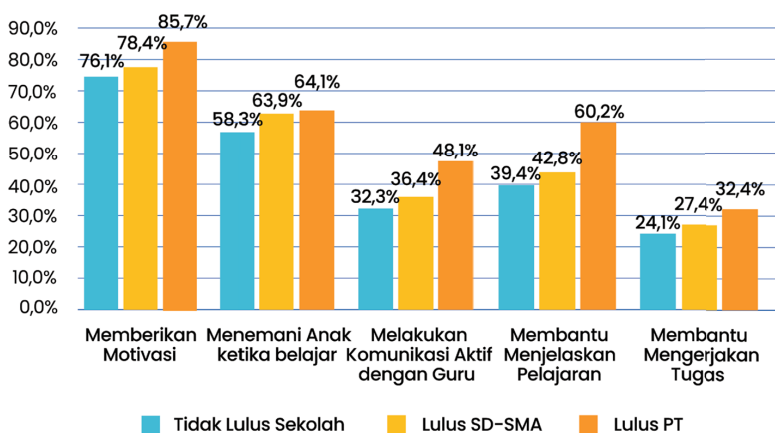
Anak-anak di sini tidak punya HP android. Saya datang ke rumah siswa ke rumah siswa saja. Melihat sebentar sekitar 10- 20 menit. Pergi lagi keliling.... Saya keliling-keliling sampe jam 1 siang... Berangkat jam 7 (pagi)

(Kepala Sekolah SD Katolik Santa Theresia, Tolitoli, Sulawesi Tengah, wawancara April 2020)

Bagi para guru, memastikan bahwa anak-anak dapat berinteraksi dengan guru setiap hari sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pendidikan mereka. Anak-anak di daerah-daerah sulit perlu terpapar dengan kegiatan pembelajaran rutin untuk menjaga motivasi dan semangat belajar mereka. Jika tidak, mereka rentan terdistraksi dengan kegiatan-kegiatan lain, seperti bekerja membantu ekonomi orang tua yang pada gilirannya membuat mereka putus sekolah. Di beberapa daerah seperti Papua di mana terdapat banyak sekolah menggunakan sistem asrama karena sebaran sekolah yang tidak setara dengan sebaran permukiman, pembelajaran jarak jauh menjadi tantangan yang lebih serius. Penutupan sekolah membuat anak dipulangkan untuk belajar di rumah masing-masing yang umumnya berlokasi sangat jauh dari

sekolah. Hal ini membuat guru kesulitan memantau belajar mereka. Apalagi dengan kondisi akses pada perangkat TIK dan jaringan internet yang terbatas. Hal ini juga menjadi ancaman bagi terjadinya putus sekolah.

Pembelajaran jarak jauh juga menghadirkan tantangan bagi orang tua yang saat ini memiliki peran paling sentral karena secara fisik harus mendampingi anak-anak belajar di rumah. Berdasarkan hasil survei Desember 2020, anggota keluarga yang paling banyak mendampingi anak belajar adalah ibu (72%). Pendampingan oleh ayah hanya 7,6%, lebih sedikit dari pendampingan oleh saudara perempuan (9,1%). Tantangan terbesar akan dialami oleh orang tua siswa sekolah dasar yang umumnya belum dapat belajar secara mandiri. Lebih-lebih mereka yang memiliki anak siswa SD kelas awal yang mulai dituntut untuk menguasai kompetensi dasar seperti membaca dan berhitung. Berdasarkan hasil survei, orang tua SD lebih aktif dibandingkan orang tua siswa satuan pendidikan lain saat BDR, terutama dalam mendampingi anak belajar (82,6%), membantu menjelaskan pelajaran (66,9%), bahkan membantu mengerjakan tugas sekolah (41,1%) (Grafik 1) (Balitbang dan Perbukuan, 2021).



Grafik 1 Persentase Orang Tua menurut Cara Membimbing Anak Belajar dan Latar Belakang Pendidikan Orang Tua

Sebagian besar orang tua tidak mengalami pendidikan atau pelatihan menjadi pendidik profesional. Namun, mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi lebih diuntungkan karena memiliki pengalaman belajar yang lebih lama sebagai referensi penting untuk membantu anak mereka belajar. Survei

menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan orang tua semakin aktif melakukan pendampingan belajar kepada anak. Hal ini berarti anak-anak yang memiliki orang tua dengan latar belakang pendidikan yang rendah lebih rentan memiliki kualitas belajar yang juga rendah karena kualitas pendampingan orang tua yang juga kurang optimal.

Penutupan sekolah selama pandemi bukan hanya menimbulkan risiko hilangnya kemampuan dan tidak tercapainya target-target kompetensi sebagai hasil dari proses pembelajaran yang tidak optimal. Lebih dari itu, pembatasan sosial yang berkepanjangan, rutinitas belajar yang monoton, serta aktivitas belajar di rumah di mana tidak semua rumah dapat menjadi tempat belajar yang layak juga dapat berdampak pada menurunnya kualitas kondisi psikologis warga sekolah. Hasil survei Kemendikbud tentang kondisi psikologis siswa selama pandemi juga mencatat terdapat 16,6% siswa yang mengalami tingkat kesulitan psikologis abnormal. Pendampingan orang tua berperan penting dalam mengatasi kesulitan psikologis ini karena kondisi abnormal lebih banyak dialami oleh mereka yang tidak didampingi orang tua selama belajar (18,9%) dibandingkan mereka yang didampingi orang tua selama belajar (14,5%) (Irmawati dkk., 2021). Akan tetapi, bagi orang tua sendiri pendampingan yang intensif dengan berbagai tantangannya juga tidak dengan “biaya” psikologis yang rendah. Berdasarkan hasil survei bulan Desember 2020, lebih dari separuh orang tua (55,4%) mengaku mengalami kelelahan yang menguras energi (*burnout*) selama mendampingi anak belajar di rumah (Balitbang dan Perbukuan, 2021).

Kepemimpinan perempuan dalam pembelajaran selama pandemi bukan hanya ditunjukkan dalam dukungan ibu dan saudara perempuan dalam pendampingan siswa selama belajar di rumah, namun juga terlihat dalam kinerja para siswa perempuan selama belajar. Jika menilik frekuensi belajar, berdasarkan survei bulan Desember 2020, sebanyak 71,4% siswa perempuan belajar setiap hari selama pandemi, sedangkan siswa laki-laki yang belajar setiap hari adalah 66,7%. Dari sisi intensitas belajar per hari, siswa perempuan juga belajar lebih lama. Terdapat 45% siswa perempuan yang belajar rata-rata lebih dari 3 jam per hari, di mana hanya 39,4% siswa laki-laki yang melakukannya (Balitbang dan Perbukuan, 2021). Namun, segmen demografis lain dari sistem pendidikan yang hampir selalu terabaikan dan memiliki potensi tertinggal dalam pembelajaran di masa pandemi ini adalah anak-

anak dengan disabilitas dan kebutuhan khusus. Anak-anak dengan disabilitas lebih memiliki kerentanan secara kesehatan karena selain kondisi fisiknya, umumnya juga belum mandiri sehingga membutuhkan pendampingan intensif dari orang lain untuk dapat mengikuti protokol pencegahan penularan COVID-19. Keterbatasan guru pendamping khusus di sekolah- sekolah inklusi meningkatkan risiko anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak memperoleh pendampingan yang semestinya selama belajar di masa pandemi.

Menuju Pemulihan Pembelajaran

Beberapa kali rencana pembukaan sekolah secara terbatas karena estimasi meredanya pandemi belum dapat terealisasi. Alih-alih mereda, yang terjadi justru adalah virus yang terus bermutasi dengan kekuatan penularan yang semakin mengkhawatirkan. Saat ini wacana publik telah diwarnai oleh “optimisme” bahwa ke depan kita akan hidup berdampingan dengan virus ini dalam waktu yang cukup lama. Hal ini berarti kita tidak akan kembali ke masa normal seperti sebelum pandemi ini terjadi, setidaknya dalam waktu dekat. Artinya, kita harus mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan era kenormalan baru. Penerapan protokol kesehatan adalah salah satu aktivitas yang akan melembaga dalam masa kenormalan baru ini. Pembukaan sekolah tentu akan dilakukan, namun dengan penerapan protokol kesehatan yang menghalangi kembalinya proses interaksi dan sosialisasi ala normalitas lama. Begitu pula, pembelajaran jarak jauh mungkin akan tetap berlanjut, setidaknya untuk sebagian guru atau siswa yang terinfeksi oleh virus demi mencegah penularan. Namun, apa pun skenarionya pembelajaran harus dipulihkan. Pemulihan dalam hal ini bermakna bukan mengembalikan cara-cara pembelajaran lama seperti sebelum pandemi, namun menjadikan cara-cara pembelajaran yang adaptif untuk mengatasi berbagai kehilangan dan hambatan sebagai bagian dari normalitas baru.

Langkah pertama dari pemulihan pembelajaran adalah mendorong pemerataan fasilitas dasar dan sumber belajar yang berkualitas. Hal ini akan menjadi investasi terbesar yang perlu dikeluarkan untuk pemulihan pembelajaran. Tersedianya fasilitas dan sumber belajar yang merata dan berkualitas merupakan prasyarat utama agar guru dan siswa dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Pandemi mengajarkan bahwa penutupan sekolah membuat guru dan anak-anak tidak dapat belajar optimal terutama karena

mereka tidak memiliki akses pada fasilitas dan sumber belajar yang selayaknya yang selama ini tersedia di sekolah. Yang paling beruntung selama pandemi ini adalah mereka yang dapat “mengubah” rumahnya sedemikian rupa menjadi tempat layak belajar dan mereka yang memiliki akses pada sarana belajar esensial seperti buku, internet, dan perangkat TIK. Bahan-bahan ini adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi untuk memulihkan pembelajaran. Setiap siswa, apa pun latar belakang sosial ekonominya, bagaimanapun kondisi wilayahnya, serta bagaimanapun kondisi fisik dan mentalnya harus memperoleh akses terhadap infrastruktur digital, sumber-sumber belajar yang bervariasi, dukungan orang tua jika harus belajar di rumah, serta pendampingan khusus bagi yang menyandang disabilitas. Dengan adanya fasilitas yang merata, akan ada sebagian orang yang dapat memanfaatkannya untuk pembelajaran yang berkualitas, khususnya, di masa pandemi di mana optimalisasi pemanfaatan teknologi sangat penting. Namun, akan ada sebagian lain yang perlu didorong agar dapat melakukan proses adaptasi secara lebih baik. Inilah yang menjadi langkah selanjutnya dari proses pemulihan pembelajaran.

Langkah kedua dari proses pemulihan adalah adaptasi teknologi digital dalam pembelajaran. Pandemi telah memberi berkah adanya pemanfaatan teknologi digital yang masif dalam pembelajaran. Namun, adaptasi terhadap teknologi digital ini belum menjangkau semua kalangan dan sebagiannya dilakukan tidak secara kontekstual. Adanya kesenjangan dalam akses teknologi ini sebagian karena kompleksitas geografis dan sosial ekonomi, sebagian lagi karena kurangnya literasi digital sementara guru atau orang tua. Sedangkan pemanfaatan teknologi digital yang tidak kontekstual ditunjukkan oleh maraknya praktik pemanfaatan media sosial sebagai sarana transaksi materi pelajaran dan latihan soal, sehingga membebani siswa dengan tumpukan tugas. Padahal ada banyak aplikasi digital yang dapat digunakan untuk pembelajaran yang kreatif, interaktif, dan kolaboratif yang menjadi kerangka kerja dari pedagogi digital (Fleer, 2017; Rivka dan Sarah, 2014). Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru dengan kemampuan pedagogi digital perlu ditingkatkan. Teknologi tidak hanya digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam *setting* pembelajaran tatap muka. Inilah yang disebut dengan *blended learning*. Kemampuan ini juga perlu dimiliki oleh setiap guru dan dibiasakan praktiknya pada setiap anak. Proses adaptasi dengan teknologi dan cara belajar baru akan mengarah pada satu titik di mana setiap

orang memiliki kemampuan dan pencapaian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu memastikan suatu desain pembelajaran yang dapat mengakomodir variasi kemampuan dan pencapaian ini. Hal ini adalah langkah ketiga dari tahap pemulihan.

Langkah ketiga dalam pemulihan pembelajaran ini adalah mendorong penggunaan desain pembelajaran yang kontekstual dan terdiferensiasi di sekolah. Pembelajaran pada masa pandemi dan sesudahnya tidak dapat dilakukan dengan prinsip *business as usual*. Kita menghadapi krisis yang membuat banyak anak kehilangan periode emas dalam proses tumbuh kembangnya dan kehilangan kemampuan yang mungkin dapat mereka capai jika krisis ini tidak terjadi. Oleh karena itu, desain pembelajaran perlu dibuat berbeda, sesuatu yang dapat mengeksplorasi secara optimal potensi-potensi kreatif dari anak-anak berdasarkan variasi kecepatan dan cara belajar mereka, sehingga mereka dapat lebih terlibat dalam pembelajaran dan mampu mengejar berbagai ketertinggalan yang dialami. Pembelajaran tidak dapat lagi dilakukan secara seragam untuk semua siswa karena mereka memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda (Morgan, 2013). Apalagi, selama pandemi, kesenjangan kemampuan belajar mungkin makin lebar antarsiswa dari berbagai latar belakang. Berbagai studi menunjukkan efektivitas pembelajaran terdiferensiasi ini di sekolah dengan karakteristik siswa yang beragam (Reis dkk., 2011; Morgan, 2013).

Untuk memperoleh informasi yang menjadi dasar strategi pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan dan cara belajar siswa, praktik asesmen formatif yang sering kali disebut asesmen diagnostik perlu dilakukan oleh guru di sekolah. Asesmen diagnostik dilakukan secara rutin baik pada awal maupun tengah pembelajaran untuk mengetahui profil dan preferensi belajar siswa (Gregory dan Chapman, 2013). Para guru juga dapat memanfaatkan informasi lain dari hasil-hasil asesmen formatif dan sumatif yang dilakukan, data registrasi yang memuat kondisi sosial ekonomi siswa, atau hasil diskusi dengan orang tua dan guru bimbingan konseling. Berdasarkan berbagai informasi tersebut, guru dapat mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan atau memberikan remedial untuk siswa-siswa yang tertinggal. Guru juga dapat melibatkan siswa-siswa yang lebih mampu untuk membantu teman-teman mereka yang tertinggal, sehingga terbangun semangat kemitraan dan gotong royong antarsiswa. Berfokus pada anak-anak yang tertinggal dan

anak-anak rentan lainnya ini menjadi langkah keempat yang merupakan inti dari proses pemulihan pembelajaran selama pandemi. Baik pembelajaran terdiferensiasi maupun asesmen diagnostik telah terlembaga sebagai bagian dari Kurikulum Merdeka yang dirilis pemerintah awal 2022.

Langkah keempat atau paling inti dari proses pemulihan pembelajaran ini adalah afirmasi bagi mereka yang paling rentan. Meskipun semua anak berkesempatan mendapatkan intervensi dari tiga strategi di atas, anak-anak yang paling rentan terdampak selama pandemi perlu memperoleh perhatian lebih melalui kebijakan afirmatif. Mereka terutama adalah anak-anak yang selama pandemi memiliki keterbatasan akses pada sumber dan fasilitas belajar sehingga tidak dapat belajar secara optimal, memiliki orang tua berpendidikan rendah sehingga tidak memperoleh bimbingan belajar yang seharusnya, berada dalam lingkungan atau keluarga yang menghambat berjalannya proses belajar normal seperti kondisi bencana, kompleksitas geografis, atau kesulitan ekonomi sehingga sangat berpeluang untuk terputus dari partisipasi belajar yang berkualitas atau bahkan dari partisipasi pendidikan sepenuhnya. Anak-anak seperti ini banyak ditemukan di daerah tertinggal, kawasan perdesaan, dan kantong-kantong kemiskinan yang ada di setiap kota. Semua pihak perlu memastikan bahwa sumber dan fasilitas belajar, pemanfaatan teknologi digital secara kontekstual dalam pembelajaran, dan strategi pembelajaran yang adaptif sesuai tingkat kemampuan siswa dapat diterapkan pada kelompok-kelompok ini agar mereka mampu mengejar ketertinggalan mereka dibandingkan rekan-rekannya yang lain.

Dalam mendukung keempat upaya pemulihan pembelajaran di atas, kolaborasi semua pemangku kepentingan sangat dibutuhkan. Meskipun kepemimpinan pemerintah sangat penting untuk menavigasi berbagai strategi pemulihan pembelajaran, namun pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Peran serta semua sektor diperlukan agar proses pemulihan pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Pemerintah daerah sebagai pengelola pendidikan di daerah perlu membantu sekolah dalam memetakan potensi putus sekolah, mendukung penguatan kapasitas guru, meningkatkan kualitas infrastruktur pembelajaran, dan membantu sekolah-sekolah yang tertinggal. Sekolah sebagai garda terdepan pembelajaran juga perlu memperkuat kapasitas kepemimpinan, menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, dan membantu orang tua terutama dengan latar pendidikan rendah dalam mendampingi anak belajar. Sedangkan

organisasi masyarakat sipil perlu bersinergi mengonsolidasikan berbagai inisiatif yang telah dilakukan. Organisasi- organisasi yang memiliki praktik baik pendampingan perlu memikirkan bagaimana pengalaman-pengalaman tersebut dapat diperluas dengan kerja sama satu sama lain.

Penutup

Krisis pembelajaran karena pandemi dialami oleh semua anak di semua negara. Yang membedakan adalah tingkat keparahannya karena ada negara-negara yang dapat beradaptasi lebih cepat karena kesiapan infrastruktur, kompetensi guru, dan dukungan kebijakan. Krisis ini telah memberi banyak informasi penting tentang berbagai keterbatasan yang kita miliki dari sisi fasilitas, kurikulum, kapasitas guru, kualitas kepemimpinan sekolah, dan juga kualitas kebijakan. Adanya berbagai informasi tersebut membuat kita tahu apa yang perlu diperbaiki, siapa yang harus dibantu, dan ke mana agenda pembangunan pendidikan diarahkan. Tanpa krisis pandemi ini, mungkin berbagai informasi tentang kesenjangan akses pada sumber dan fasilitas belajar antara daerah tertinggal dan non-tertinggal tidak akan menjadi sedemikian transparannya dan menjadi wacana publik yang meluas. Tanpa pandemi, karakteristik kurikulum kita yang terlalu kompleks dengan berbagai target capaian kompetensi yang membatasi kemerdekaan guru dan siswa dalam belajar mungkin akan menjadi sesuatu yang lumrah dan untuk mengubahnya perlu upaya yang sangat besar.

Selain itu, krisis juga memberi banyak kesempatan baru yang dapat membuat agenda perubahan berjalan lebih cepat. Tanpa adanya pandemi kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar para guru menyadari pentingnya teknologi digital dan mau belajar untuk memanfaatkannya dalam pembelajaran. Tanpa adanya pandemi, keterlibatan orang tua dalam pembelajaran anak-anak mereka tidak akan seintensif saat ini. Tanpa adanya pandemi, berbagai inisiatif untuk berbagi, berinovasi, dan berkolaborasi di antara para guru dan para pemangku kepentingan lain mungkin tidak akan menjamur sebanyak ini, padahal hal-hal tersebut merupakan karakter dan praktik yang sudah lama diharapkan muncul dari dunia pendidikan. Tidak ada momentum yang paling tepat untuk bangkit selain saat kita menghadapi krisis.

Daftar Pustaka

- Andrabi, Tahir, Daniels, Benjamin dan Das, Jishnu. 2020 . Human Capital Accumulation and Disasters: Evidence from the Pakistan Earthquake of 2005. *Rise Working Paper Series*. 20/039. https://doi.org/10.35489/BSG-RISE-WP_2020/039
- Balitbang dan Perbukuan. 2021. *Evaluasi Pelaksanaan Belajar dari Rumah di Masa Pandemi COVID-19*. Paparan Kepala Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud disampaikan dalam RDPU Komisi X DPR RI, 21 Januari 2021
- Djumiko. 2021. Pembelajaran Praktik di Masa Pandemi. https://www.kompasiana.com/ndorokoko/60053483d541df17612dcd74/pembelajaran-praktik-dimasa-pandemi?page=1&page_images=1. Diakses pada 14 Agustus 2021
- Fleer, Marlyn. 2017. Digital Pedagogy: How teachers Support Digital Play in the Early Years dalam Lorna Arnott (ed.). *Digital Technologies and Learning in the Early Years*. London: Sage. Pp: 114-126.
- Greenhow, Christine, Lewyn, Cathy, dan Willet, K Bret Staudt. 2021. The Educational Response to Covid-19 across Two Countries: A Critical Examination of Initial Digital Pedagogy Adoption. *Technology, Pedagogy, and Education*, 30(1): 7-25.
- Gregory, Gayle H dan Chapman, Carolyn. 2013. *Differentiated Instructional Strategies: One Size Doesn't Fit All*. London: Sage.
- Irmawati, Ais, Martono, Sri Fajar, dan Noviyanti. (2021). Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Psikologis Siswa selama Pandemi COVID-19. *Risalah Kebijakan Pusat Penelitian Kebijakan*, No. 5, Juni 2021. https://puslitjkdikbud.kemdikbud.go.id/produk/risalah_kebijakan/detail/313730/mendorong-peningkatan-kesejahteraan-psikologis-siswa-selama-pandemi-covid19.
- Kemendikbud. 2020a. *Peta Jalan Pendidikan 2020-2035*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbud. 2020b. *Survei Belajar dari Rumah terhadap Siswa dan Orang Tua*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kemendikbud. 2021. Ayo Guru Berbagi. <https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada 8 Agustus 2021.
- Morgan, Hani. 2013. Maximizing Student Success with Differentiated Learning. *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues, and Ideas*, 87(1): 34-38.

- Rakhmah, Diyan, Azizah, Siti Nur, Hariyanti, Erni, Irmawati, Ais, dan Solihin, Lukman. (2021). Menakar Efektivitas Tayangan Program Belajar dari Rumah melalui TVRI. *Risalah Kebijakan Pusat Penelitian Kebijakan*, No. 2, April 2021. https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/produk/risalah_kebijakan/detail/313636/menakar-efektivitas-tayangan-program-belajar-dari-rumah-melalui-tvri.
- Randall, Robert, Sukoco, George Adam, Heyward, Mark, Purba, Rasita, Arsendy, Senza, Zamjani, Irsyad, dan Hafiszha, Anisah. 2022. *Reforming Indonesia's Curriculum: How Kurikulum Merdeka Aims to Address Learning Loss and Learning Outcomes in Literacy and Numeracy*. Jakarta: INOVASI
- Reis, Sally M, McCoach, D. Betsy, Little, Catherine A., Muller, Lisa M., dan Kaniskan, R. Burcu. 2011. The Effects of Differentiated Instruction and Enrichment Pedagogy on Reading Achievement in Five Elementary Schools. *American Educational Research Journal*, 48(2): 462-501.
- Rivka, Wadmany dan Kliachko, Sarah. 2014. The Significance of Digital Pedagogy: Teachers' Perceptions and the Factors Influencing Their Abilities as Digital Pedagogues. *Journal of Educational Technology*, 11(3): 22-33.
- SinoBiological. Tt. Hong Kong Flu (1968 Influenza Pandemic). <https://www.sinobiological.com/research/virus/1968-influenza-pandemic-hong-kong-flu>. Diakses pada 9 Agustus 2021.
- UNESCO. 2020. "Global Monitoring of School Closures". <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse#schoolclosures>. Diakses pada 10 Agustus 2021.
- UNESCO. 2021. "One Year into COVID-19 Education Disruption: Where Do We Stand?" <https://en.unesco.org/news/one-year-covid-19-education-disruption-where-do-we-stand>. Diakses pada 10 Agustus 2021.
- Afkar, Rythia dan Yarrow, Noah. 2021. *Rewrite the Future: How Indonesia's Education System Can Overcome the Losses from the COVID-19 Pandemic and Raise Learning Outcomes for All*. Jakarta: World Bank.
- Zamjani, Irsyad, Handayani, Meni, Azizah, Siti Nur, Purnama, Joko, dan Lismayanti, Siska. 2021. Risalah Kebijakan: Bantuan Kuota Internet dan Implikasinya bagi Pengalaman Belajar Mengajar. *Risalah Kebijakan Pusat Penelitian Kebijakan*, No. 1, Februari 2021. https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/produk/risalah_kebijakan/detail/313634/bantuan-kuota-internet-dan-implikasinya-bagi-pengalaman-belajar-mengajar.



Bertahan Tetap Belajar Selama Pandemi
Bagaimana Dunia Pendidikan Kita
Melakukannya?

Bertahan Tetap Belajar Selama Pandemi Bagaimana Dunia Pendidikan Kita Melakukannya?

~•~

*Diyan Nur Rakhmah, Irsyad Zamjani,
Indah Pratiwi, Siti Nur Azizah, Ika Hijriani*

Pandemi, Krisis, dan Transformasi

Ketika pandemi flu burung merebak di daratan China pada 2017 lalu, Bryan Walsh seorang penulis dan editor internasional menulis sebuah artikel dalam majalah *TIME* berjudul *The World is Not Ready for the Next Pandemic* (*TIME*, 2017). Dalam ulasannya, Walsh menyatakan bahwa selain kesehatan, dampak dari adanya pandemi besar adalah perubahan dunia di segala bidang. Masalahnya, karena berbagai faktor, saat ini manusia dapat dikatakan lebih rentan dibandingkan 100 tahun yang lalu. Inilah yang terjadi sejak awal 2020 lalu hingga saat ini. Pandemi COVID-19 menjadi krisis kesehatan terbesar yang pernah terjadi di era modern dengan kecepatan penyebaran yang tinggi dan dampak luar biasa di seluruh dunia.

PBB dalam artikel berjudul *The Virus that Shut Down the World: Education in Crisis* menyatakan bahwa hal utama yang membedakan pandemi COVID-19 dari semua jenis krisis lainnya adalah dampak multisektoral yang terjadi. Pandemi ini berpengaruh langsung pada semua anak di hampir seluruh dunia dalam waktu yang bersamaan, tidak peduli bagaimanapun latar belakang mereka (<https://news.un.org/>, 28 Desember 2020). Sehari sebelum peringatan Hari Anak Internasional pada 20 November 2020, UNICEF dalam laporannya juga memperingatkan kemungkinan terjadinya “*lost generation*” akibat pandemi COVID-19 yang memengaruhi cara siswa di dunia belajar dan mendapatkan hak pendidikan.

Dalam kondisi darurat, penutupan sekolah menjadi pilihan dilematis yang tak terelakkan. Berbagai peristiwa dunia sebelumnya juga telah menggambarkan ironi tersebut. Banjir bandang pada 2010 di Pakistan, misalnya, berimbas pada penutupan sekolah di seluruh wilayah yang terdampak dan menjadikan bangunan sekolah sebagai tempat penampungan (BBC, 2014). Kejadian serupa juga terjadi di Timur Tengah dan Afrika. Setidaknya 2,8 juta anak-anak Suriah putus sekolah selama konflik militer yang menutup sekolah-sekolah di sana, dan 5 juta anak putus sekolah akibat epidemi ebola yang memaksa seluruh wilayah Afrika Barat menghentikan kegiatan persekolahan sejak 2013 (UNICEF, 2021; World Bank, 2015). Dalam kasus yang hampir serupa, UNESCO pada 20 April 2020 mencatat setidaknya 151 negara di dunia melakukan penutupan sekolah untuk menghindari penularan COVID-19 (UNESCO, 2020a). Dari penutupan ini, 1,4 milyar siswa di seluruh dunia harus belajar dari rumah, tidak terkecuali di Indonesia.

Sejak penutupan sekolah diberlakukan pada Maret 2020, lebih dari 50 juta siswa di Indonesia harus belajar dari rumah (BDR) dan melakukan pembatasan sosial berskala besar (UNICEF, 2020a; Zamjani dkk., 2020a). Survei yang dilakukan Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) pada Desember 2020 menunjukkan, 63,9% sekolah masih melakukan BDR, angka ini menurun dibandingkan pada Mei 2020 (96,6%). Penggunaan teknologi dalam pembelajaran menjadi penyelamat siswa untuk tetap mendapatkan hak bersekolah dengan tidak harus hadir secara fisik di sekolah. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran termanifestasi melalui berbagai bentuk, seperti *handphone*, laptop, jaringan internet, platform belajar dan sumber belajar, tayangan belajar, buku elektronik, dan sebagainya. Survei Puslitjak menunjukkan bahwa cara belajar menggunakan teknologi seperti ini mengalami peningkatan persentasenya dibandingkan di awal terjadinya pandemi pada Maret 2020. Peningkatan ini seiring dengan semakin panjangnya pandemi, serta meningkatnya upaya adaptasi yang dilakukan banyak pihak dalam praktik pembelajaran. Guru semakin terbiasa meminta siswa belajar melalui sumber belajar elektronik (70,7% pada Desember 2020) dan memberikan materi secara interaktif melalui media daring (70,3% pada Desember 2020) (Puslitjak, 2020a). Peningkatan ini tidak hanya terjadi di daerah non-tertinggal yang secara akses dan infrastruktur telah mapan, tetapi juga pada daerah-daerah tertinggal yang relatif terbatas pada akses internet, namun tetap mencoba beradaptasi dengan keberadaan teknologi.

Kita tidak pernah membayangkan transformasi besar-besaran dalam bidang pendidikan akan terjadi secepat ini. Di ranah kebijakan, sebelum pandemi sebenarnya pemerintah telah menyiapkan berbagai program untuk mendorong pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Pentingnya penggunaan teknologi telah disadari terutama untuk mendukung inovasi pembelajaran, meskipun belum dirasakan sebagai kebutuhan esensial. Beberapa kebijakan sudah disiapkan, seperti Program Digitalisasi Sekolah, peningkatan kompetensi guru melalui Program PembaTIK, penyediaan portal Rumah Belajar, program kerja sama antarkementerian dalam pemenuhan akses dan infrastruktur internet di daerah tertinggal, dan berbagai program kemitraan lain. Ketika pandemi terjadi, berbagai program tersebut mengalami percepatan, peningkatan inovasi, dan bahkan replikasi melalui berbagai kebijakan lain yang lebih kontekstual.

Namun, berbagai transformasi dan perubahan tidak mudah dilakukan. Latar belakang sosial, ekonomi, wilayah tinggal, menjadi beberapa alasan mengapa adaptasi pada situasi yang sulit tidak semudah yang diteorikan. Di tingkat global, sedikitnya 31% siswa tidak dapat menjangkau program pembelajaran daring, terutama karena tidak adanya dukungan ekonomi keluarga untuk memenuhi akses terhadap internet (UNICEF, 2020b). Kondisi di Indonesia juga tidak jauh berbeda. Akses pada jaringan internet, perangkat belajar, dan keterampilan penggunaan teknologi menjadi hambatan utama pembelajaran selama pandemi (Zamjani dkk., 2020a). Listrik menjadi kebutuhan mendasar dalam aktivitas BDR yang memanfaatkan perangkat teknologi, namun sayangnya masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai di beberapa wilayah Indonesia. Data sebenarnya telah menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah di Indonesia telah teraliri listrik (ESDM, 2019). Namun, beberapa daerah khususnya di wilayah timur belum mendapatkan aliran listrik yang memadai sepanjang hari (Rakhmah, 2021a).

Kondisi internet juga belum sepenuhnya mumpuni. Dari data yang tersedia menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia telah terjangkau jaringan internet, namun jangkauan layanan jaringan 3G dan 4G sampai saat ini baru mencakup 76% wilayah saja (Kemenkominfo, 2019). Kondisi ini bermakna, di beberapa wilayah tertentu akan tetap menghadapi kendala jaringan internet yang memadai, khususnya ketika aktivitas belajar daring dilakukan secara serempak dan berkala oleh siswa-siswa di sana. Padahal,

kondisi internet yang memadai menjadi satu keharusan agar pembelajaran yang dilakukan tetap efektif.

Terlepas dari berbagai krisis yang terjadi, perlu diakui bahwa pandemi juga memicu dampak positif. Beberapa negara mengembangkan pembelajaran multiplatform yang disesuaikan dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki siswa serta guru. Di Argentina, pemerintah menyediakan portal pendidikan yang menyediakan sumber daya digital untuk guru, administrator, siswa, dan keluarga, termasuk di dalamnya pengembangan tayangan pembelajaran di televisi dan radio. Inovasi serupa juga dipraktikkan di India, Bangladesh, Austria, Irlandia, dan beberapa negara lain (Departement of School Education & Literacy Ministry of Human Resource Development India, 2020; World Bank, 2020a).

Pembelajaran berbasis jaringan internet dan siaran (radio dan televisi) juga dilengkapi dengan kebijakan lain yang memungkinkan untuk mendorong prinsip inklusivitas pembelajaran di masa pandemi. Di Argentina, bagi siswa yang tidak memiliki akses internet, disediakan program televisi dan radio yang dilengkapi buku catatan dan sumber belajar lainnya yang sebelumnya telah dikirimkan ke rumah-rumah siswa. *Bitesize Daily* yang ditayangkan melalui siaran BBC Inggris juga melengkapi tayangan pembelajaran mereka dengan modul-modul belajar yang disediakan secara *offline* untuk tetap dapat mengakomodasi siswa yang tidak dapat menonton siaran pembelajaran (BBC, 2020). Di Indonesia, praktik belajar seperti ini juga ditemukan. Keterbatasan akses dan perangkat menyebabkan aktivitas belajar daring perlu juga dilengkapi dengan pembelajaran yang sifatnya luring dan konvensional. Praktik guru kunjung, pengiriman materi belajar melalui orang tua, penggunaan tayangan pembelajaran dan siaran radio pembelajaran melalui pemberdayaan radio komunitas (Rakhmah dkk., 2021a; Zamjani dkk., 2020b), menjadi beberapa strategi yang dipilih dalam rangka menghadapi keterbatasan jika pembelajaran harus dilakukan secara daring.

Selain itu, peningkatan kompetensi dan literasi digital guru juga menjadi program kebijakan yang didorong di banyak wilayah selama pandemi ini. Dengan berbasis komunitas dan kemitraan, program pelatihan guru dibangun dalam ekosistem pemberdayaan sesama guru. Berbagai pelatihan guru mulai memasukkan konten tentang bagaimana guru memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, mengoptimalkan proses pembelajaran, sekaligus mengelola

pembelajaran agar tetap efektif. Laman-laman belajar dan berbagi praktik baik mengajar guru selama masa pandemi bertumbuh, seperti laman Guru Belajar dan Berbagi, Bersama Hadapi Korona, Sekolah dan Guru Penggerak, Akun Pembelajaran (belajar.id), dan berbagai kebijakan berbasis pemberdayaan yang diinisiasi di tingkat pusat maupun daerah. Kemitraan dengan swasta juga dijalankan untuk mempercepat proses adaptasi terhadap transformasi sistem pendidikan, seperti bantuan perangkat pembelajaran, penyediaan akses internet, bantuan dan subsidi kuota internet, akses platform belajar, pelatihan, dan program kemitraan lain (Rakhmah dkk., 2021a; UNICEF, 2020c, Zamjani dkk., 2021a).

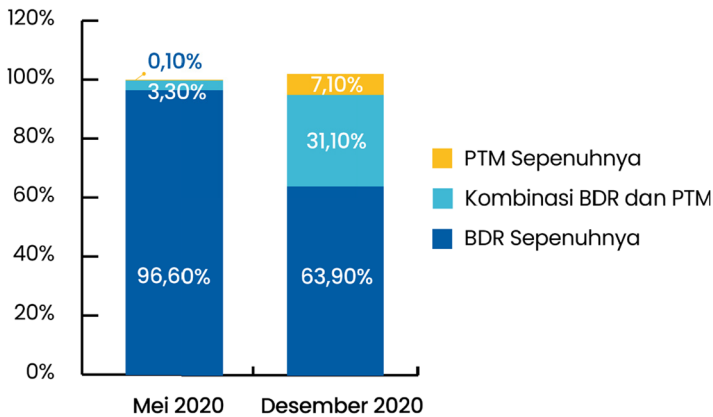
Pandemi telah menyebabkan berbagai kesulitan, namun ada sisi positif yang dapat kita pelajari dari segala perubahan dan penyesuaian sebagai implikasi dari pandemi ini. Artikel ini akan mengulas tentang bagaimana pandemi menciptakan terobosan, inovasi dan kebaruan yang bahkan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Artikel ini ditulis berdasarkan dua studi yang kami lakukan melalui survei pembelajaran di masa pandemi pada Mei dan Desember 2020. Data survei pada Mei 2020 dihimpun dari 988 kepala sekolah, 1.067 responden guru, 38.109 siswa, dan 46.547 orang tua. Sedangkan survei pada Desember 2020 menysasar 3.077 kepala sekolah, 11.306 guru, 24.158 siswa, dan 19.100 orang tua. Survei pada dua periode tersebut tidak menysasar pada responden yang sama. Namun, kriteria responden pada dua survei tersebut relatif sama dan mempertimbangkan keterwakilan responden di daerah tertinggal dan non-tertinggal.

Data pada kedua survei ini tentu tidak sepenuhnya dapat memotret kenyataan pembelajaran di lapangan secara lebih mendalam. Oleh karena itu, telaah terhadap beberapa studi lain dan literatur juga kami gunakan untuk memperdalam analisis dan mempertegas argumentasi dalam artikel. Artikel ini tidak sekadar ditulis sebagai catatan transformasi pembelajaran selama pandemi, namun juga sebagai penegas bahwa sering kali keterbatasan hadir untuk memantik kreativitas, inovasi, dan adaptasi.

Pandemi Mengubah Aktivitas Pembelajaran

Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat COVID-19 mungkin menjadi tonggak pertama bagaimana perubahan fundamental pendidikan Indonesia di

masa pandemi terjadi. Sejak keluarnya surat edaran tersebut, sekolah-sekolah yang ditutup dan ditiadakan aktivitas tatap mukanya, mulai melakukan belajar secara jarak jauh atau belajar dari rumah (BDR). Data survei Puslitjak yang dikumpulkan pada Mei dan Desember 2020 menunjukkan bahwa persentase sekolah yang menerapkan BDR relatif masih tinggi meskipun secara perlahan mulai berkurang (Puslitjak, 2020a; Puslitjak, 2020b). Pada Mei 2020, atau kurang lebih dua bulan setelah kebijakan BDR pertama kali ditetapkan, 96,6% sekolah memilih melakukan BDR secara penuh. Seiring waktu, persentase sekolah yang menerapkan BDR secara penuh mengalami penurunan menjadi 63,9% pada bulan Desember (Grafik 1).



Grafik 1 Pelaksanaan Pembelajaran Selama Pandemi Tahun 2020

Seiring dengan perkembangan kasus COVID-19 yang makin meningkat, pemerintah akhirnya melakukan penyesuaian kebijakan penutupan sekolah dengan pertimbangan status setiap wilayah di Indonesia berdasarkan risiko penyebaran COVID-19. Salah satunya, Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 yang diterbitkan dan diperbarui hingga beberapa kali. Semula, SKB ini mengatur pembukaan sekolah yang hanya diperbolehkan bagi daerah yang berstatus zona hijau dan zona kuning, namun kemudian perkembangan kebijakan mengarahkan pemberian kewenangan pembukaan sekolah pada pemerintah daerah dengan menyesuaikan kondisi, kesiapan, dan kewenangan masing-masing daerah (baca juga artikel “Pembelajaran Tatap Muka yang Aman: Mengatasi Dilema Keselamatan dan Kehilangan Pembelajaran” dalam

buku ini). Aturan ini mendorong sekolah untuk melakukan pembukaan sekolah secara bertahap, utamanya yang berada di wilayah zona penyebaran berisiko sedang dan rendah.

Penurunan Intensitas dan Rutinitas Belajar

Penutupan sekolah sangat berdampak pada penurunan waktu interaksi antara siswa dan guru. UNICEF melalui risetnya pada 100 negara menemukan, lebih dari 214 juta siswa kehilangan tiga perempat waktu untuk interaksi dalam kegiatan belajar mereka sepanjang Mei hingga Juli 2020 karena sekolah ditutup (UNICEF, 2020a). Intensitas dalam berinteraksi juga masih sulit dioptimalkan meskipun pembelajaran dapat diupayakan melalui media daring. Padahal, intensitas dalam berinteraksi memberikan pengaruh pada kualitas pembelajaran dan membantu siswa tetap memiliki motivasi belajar (Hofman & Mühlenweg, 2018; Sadirman, 2021). Semakin tinggi intensitas belajar siswa, maka peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan akan semakin meningkat pula. Mengoptimalkan interaksi yang lebih berkualitas akan membantu guru lebih memahami kondisi siswa. Hal ini terkait dengan penerimaan dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan maupun hal-hal lainnya yang memengaruhi efektivitas kegiatan pembelajaran. Interaksi yang efektif sebenarnya membantu guru untuk dapat merancang model-model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing siswa, sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan optimal. Namun, situasi yang mengharuskan siswa belajar dari rumah secara otomatis akan menurunkan intensitas interaksi guru dan siswa, termasuk interaksi siswa dan siswa lainnya. Kondisi ini kemudian menyebabkan banyak siswa mengalami kejenuhan selama BDR, yang dalam jangka panjang berpotensi menurunkan motivasi belajar.

Hasil survei Puslitjak pada Mei 2020 mencatat, rata-rata lama waktu interaksi guru dengan siswa selama pembelajaran dalam setiap minggunya adalah 9,3 jam. Seiring berjalannya waktu, rata-rata interaksi siswa mengalami tren peningkatan di semua jenjang, yaitu 14,1 jam setiap minggunya pada Desember 2020. Namun, jumlah ini tetap masih lebih rendah jika dibandingkan jam belajar normal sebelum adanya pandemi, yaitu rata-rata 18 jam setiap minggu. Bahkan, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, jumlah minimal jam mengajar guru adalah 24 jam dalam satu minggu.

Selain intensitas waktu belajar, rutinitas belajar juga menurun. Jika di masa normal pembelajaran rutin dilakukan 5-6 hari dalam seminggu, maka tidak demikian halnya ketika pandemi COVID-19 mendera. Keterbatasan dalam menyelenggarakan pembelajaran dan interaksi dengan guru secara langsung membuat frekuensi pembelajaran formal secara rutin juga menjadi berkurang. Data survei bulan Mei juga menunjukkan, kuantitas belajar siswa di awal pandemi mengalami penurunan khususnya pada siswa di jenjang SMP, SMA, maupun SMK. Hanya kurang dari 40% siswa yang masih melakukan pembelajaran setiap hari. Sebagian besar siswa pada tiga jenjang tersebut hanya melakukan pembelajaran selama 2-4 hari dalam seminggu, bahkan beberapa kurang dari itu. Berbeda dengan ketiga jenjang pendidikan tersebut, sebagian besar siswa SD (60,4%) melakukan pembelajaran dari rumah setiap hari. Siswa SD memang masih sangat membutuhkan pendampingan dari orang tua, sehingga pembelajaran dapat lebih rutin dilakukan selama orang tua dapat berkomitmen untuk mendampingi. Berbeda halnya dengan siswa dari jenjang yang lebih tinggi, kemampuan siswa yang dianggap lebih mandiri membuat guru banyak memberikan penugasan atau proyek yang tidak mengharuskan pembelajaran tatap muka secara virtual dilakukan secara rutin dibandingkan siswa lain.

Menjaga intensitas dan rutinitas interaksi antara guru dan siswa penting dilakukan untuk meminimalkan potensi kehilangan semangat belajar pada siswa. Salah satu upaya yang dilakukan guru untuk menjaga interaksi pembelajaran di masa pandemi ini adalah dengan memanfaatkan berbagai pendekatan dan media untuk belajar.

Blended-Learning sebagai Cara Belajar Baru

Di tengah ketidakpastian pandemi yang sepertinya belum akan usai, perubahan cara-cara belajar secara masif terjadi. Bagaimanapun, belajar tidak bisa terhenti meskipun aktivitas persekolahan tidak terjadi. Selain belajar daring, aktivitas belajar tatap muka secara terbatas juga mulai dilakukan. Banyak sekolah mengubah cara belajar mereka, khususnya dengan menerapkan metode kombinasi antara tatap muka dan daring/ BDR (*blended-learning*). Data survei Puslitjak menemukan, pada Desember 2020 sekolah yang melakukan pembelajaran dengan model kombinasi meningkat menjadi 31,1% (Puslitjak, 2020b;).

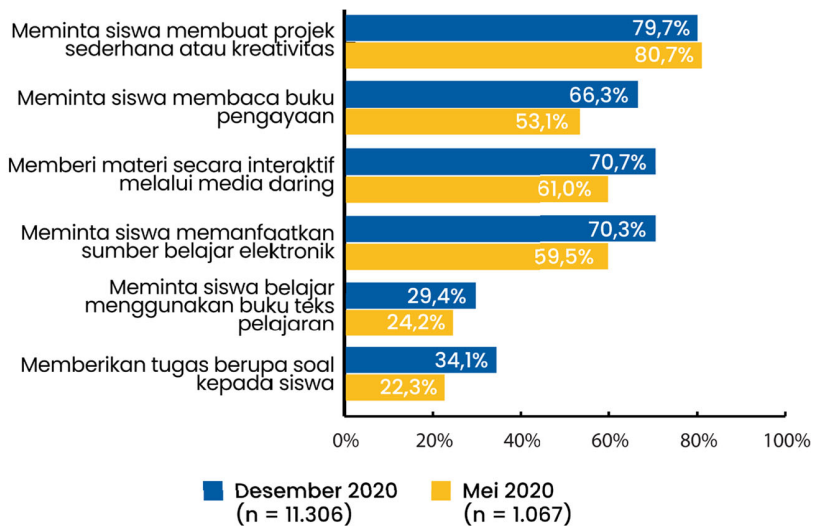
Dalam praktiknya, pembelajaran daring masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kesulitan guru memantau perkembangan siswa. Alasan ini mendorong pelaksanaan pembelajaran kombinasi antara daring dan tatap muka (*blended-learning*) menjadi opsi di berbagai sekolah. Pada Desember 2020, pelaksanaan *blended-learning* meningkat secara pesat, meskipun aktivitas tatap muka di sekolah kembali mengalami penurunan menjadi hanya 5% sekolah, seiring meningkatnya kembali kasus penyebaran COVID-19. Menariknya, sekolah di wilayah tertinggal justru lebih banyak melakukan metode kombinasi dalam pembelajaran mereka dibandingkan sekolah di wilayah non-tertinggal. Data survei Puslitjak di bulan Desember 2020 menunjukkan, 43,2% sekolah di wilayah tertinggal melakukan *blended-learning* ketika hanya 30,6% sekolah di wilayah non-tertinggal yang melakukannya. Data ini sejalan dengan aktivitas tatap muka secara penuh di wilayah tertinggal yang juga lebih tinggi dibandingkan sekolah di wilayah non-tertinggal (wilayah tertinggal 16,1%; non-tertinggal 4,6%).

Penggunaan Multimedia untuk Belajar

McKinsey dalam ulasannya menyatakan bahwa krisis karena pandemi terbukti mendorong adaptasi dan inovasi dalam berbagai sektor (McKinsey, 2020). Di bidang pendidikan, penerapan proses BDR karena terdampak penutupan sekolah mengharuskan guru beradaptasi terhadap cara mengajar mereka. Beberapa riset mencatat, lebih dari 90% kementerian pendidikan di seluruh dunia mengimbau guru melakukan inovasi pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan berbagai pendekatan dan media belajar, seperti radio, televisi ataupun internet (UNESCO, 2020b; UNICEF, 2020a; World Bank, 2020a). Penyesuaian juga dilakukan dengan menggabungkan cara belajar lain yang bersifat penugasan, pemberian materi ajar, dan interaksi terbatas melalui tatap muka siswa-guru.

Di Indonesia, metode mengajar dengan memberikan tugas berupa soal kepada siswa masih menjadi cara paling dominan yang dilakukan guru. Sebanyak 80,7% guru menerapkan metode mengajar tersebut pada Mei 2020, dan pada Desember 2020 cara mengajar dengan penugasan dan pemberian soal masih dilakukan oleh 79,7% guru. Cara belajar seperti ini dianggap lebih mudah dan sudah menjadi kelaziman sebelum pandemi sehingga tidak memerlukan kemampuan adaptasi yang berarti. Sementara itu, aktivitas belajar yang lebih interaktif, misalnya melalui *video conference* baru dilakukan

oleh 22,2% guru pada Mei 2020 (Puslitjak, 2020a). Padahal, tatap muka melalui platform *video conference* dapat dilakukan guru untuk menjelaskan materi secara langsung pada siswa dan membangun interaksi dua arah dalam pembelajaran. Survei Puslitjak berikutnya pada bulan Desember menunjukkan terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap penggunaan media daring dalam pembelajaran, yang semula hanya 59,9% dilakukan guru pada bulan Mei menjadi 70,3% pada bulan Desember (Grafik 2). Selain itu, perubahan signifikan juga terjadi pada penggunaan atau pencarian sumber belajar dari media elektronik yang naik sebesar 9,7% dari angka 61% pada bulan Mei menjadi 70,7% pada bulan Desember 2020.



Grafik 2 Cara Guru dalam Melakukan Pembelajaran

Media Sosial sebagai Media Belajar

Penggunaan pendekatan dan media belajar yang beragam akan mendorong terbangunnya komunikasi antara guru dan siswa, sehingga membantu meningkatkan pemahaman siswa selama proses transfer pengetahuan dan keterampilan yang terjadi dalam pembelajaran. Proses komunikasi guru juga dapat memastikan apakah siswa memahami materi yang dipelajari atau tidak. Seiring berjalannya waktu, terjadinya pergeseran fungsi media sosial yang semula merupakan sarana membangun relasi, menjadi alat komunikasi sekaligus media belajar bagi guru dan siswa. Kondisi ini sudah terjadi sejak

pertama kali BDR dijalankan pada Maret 2020 hingga saat ini. Survei Puslitjak menunjukkan, pemanfaatan media sosial sangat dominan dalam pembelajaran, yaitu digunakan oleh 86,6% guru pada Mei 2020 dan 88% guru pada Desember 2020. Tren peningkatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di tingkat global. Salah satu dampaknya, pertumbuhan sektor *education technology (EduTech)* mengalami peningkatan, termasuk peningkatan pertumbuhan platform pembelajaran daring (Li & Lalani, 2020; Mathur, 2020; World Bank, 2020b) yang memiliki mekanisme kerja selayaknya media sosial—menghubungkan banyak orang dan komunitas di dalamnya.

Namun, media sosial pun memiliki keterbatasan. Salah satu kekurangan penggunaan media sosial dalam pembelajaran adalah keterbatasannya dalam menciptakan suasana belajar selayaknya di dalam kelas. Tidak semua media sosial memungkinkan terjadinya interaksi dua arah yang bersifat *real time*. Seiring berjalannya waktu, guru mulai terbiasa mengombinasikan berbagai media untuk melengkapi aktivitas mengajar mereka agar tetap optimal, salah satunya melalui penggunaan aplikasi *video conference*. *Video conference* menawarkan aktivitas belajar yang tidak sekadar melalui bahasa tulis atau suara, namun juga interaksi melalui tatap muka secara langsung. Dalam praktiknya, penggunaan *video conference* untuk pembelajaran mengalami peningkatan. *Video conference* digunakan oleh 22,2% guru di Bulan Mei, sedangkan di Bulan Desember, digunakan oleh 49,3% guru.

Learning Management System untuk Pengelolaan Kelas

Selain media dan platform belajar, sistem manajemen pembelajaran juga menjadi salah satu perubahan yang dilakukan sekolah dalam mengelola pembelajaran. Sebelum adanya pandemi, beberapa sekolah telah menggunakan *learning management system (LMS)* sebagai media pengelolaan pembelajaran yang memungkinkan sekolah mengombinasikan berbagai komponen aktivitas sekolah dalam satu sistem yang saling terintegrasi. Ketika pandemi terjadi, guru semakin mengenal dan bahkan mencoba untuk lebih terbiasa menggunakan LMS dalam pembelajaran. LMS membantu guru mengelola kelas dan melakukan interaksi melalui perangkat digital termasuk melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran secara lebih sistematis seperti pembelajaran tatap muka di sekolah. Berbagai riset menemukan bahwa penggunaan LMS dalam pembelajaran terbukti meningkatkan capaian akademik siswa (Ebardo et al., 2009; Kim, 2017). Alasannya, selain

menawarkan pengelolaan pembelajaran yang lebih integratif dan sistematis, LMS juga memungkinkan guru untuk membangun pembelajaran berbasis kolaborasi, baik kolaborasi antarsiswa, maupun antarguru dan mata pelajaran.

Pada konteks Indonesia, penggunaan LMS dalam pembelajaran mengalami peningkatan. Survei Puslitjak menunjukkan, penggunaan kuota data internet paling dominan adalah untuk mengakses LMS dalam pembelajaran (78,9%), bahkan 62,1% siswa tetap menggunakan LMS meskipun tidak mendapatkan bantuan kuota data internet atau paket data dari pemerintah atau sekolah (Puslitjak, 2020b).

Upaya Tatap Muka Terbatas dan Fleksibilitas Cara Belajar

Menariknya, di samping penggunaan teknologi, perangkat, dan aplikasi digital yang semakin meningkat, pembelajaran luring secara bersamaan juga meningkat. Dalam praktiknya, penggunaan *video conference* untuk pembelajaran mengalami peningkatan. *Video conference* digunakan oleh 22,2% guru di Bulan Mei, sedangkan di Bulan Desember, digunakan oleh 49,3% guru. Belajar secara luring ini dapat dimaknai sebagai belajar tatap muka secara terbatas yang dilakukan guru pada wilayah- wilayah tertentu. Temuan beberapa studi Puslitjak menunjukkan, guru di beberapa daerah melakukan kunjungan langsung ke rumah siswa, mengumpulkan beberapa siswa di satu titik pertemuan, dan mengadakan pembelajaran secara terbatas di rumah-rumah warga bagi siswa yang sulit mendapatkan akses teknologi (Rakhmah dkk., 2021a; Zamjani dkk., 2020b). Berbagai kondisi ini dapat dimaknai bahwa seiring berjalannya waktu, guru semakin fleksibel mengombinasikan berbagai pendekatan dan media belajar mereka dengan mempertimbangkan kondisi dan sumber daya yang dimiliki siswa.

Selain pendekatan belajar, fleksibilitas juga terlihat pada sistem penilaian capaian hasil pembelajaran siswa. Jika dulu penilaian capaian hasil belajar lebih ditekankan pada capaian-capaian yang bersifat akademis dengan berbagai skema penilaian kuantitatif, maka ketika aktivitas BDR dilakukan, penilaian menjadi lebih fleksibel dan berfokus pada capaian kompetensi dasar siswa. Imbauan pemerintah melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 yang menghapus pelaksanaan ujian nasional yang identik dengan tes dan skoring, serta arahan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi agar lebih bermakna sesuai kondisi siswa, menjadi penegas bahwa belajar tidak lagi dibebankan pada

target pemenuhan ketuntasan kurikulum. Sistem penilaian guru juga semakin inovatif dan beragam, tidak sekadar melakukan penilaian melalui ujian, tetapi juga portofolio. Hasil survei Puslitjak pada Desember 2020 menunjukkan, 63,3% guru di semua jenjang pendidikan melakukan penilaian portofolio.

Seiring dengan hal tersebut, sistem asesmen pembelajaran juga mengalami penyesuaian. Berbagai pihak menyadari pentingnya memahami karakteristik dan kemampuan siswa dalam pembelajaran, karena akan memengaruhi daya tangkap dan penerimaan siswa terhadap materi pembelajaran. Upaya untuk memahami karakteristik siswa tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan asesmen diagnostik. Pada Desember 2020, 49,5% guru telah melakukan asesmen diagnostik dengan mengacu pada panduan yang dibuat Kemendikbud, dan 28% guru lainnya, mengembangkan instrumen asesmen secara mandiri. Hasil asesmen diagnostik digunakan guru untuk menentukan strategi pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kemampuan awal siswa, seperti mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan belajar, memberikan materi tambahan, dan menyediakan sarana serta sumber belajar tambahan. Segala bentuk fleksibilitas pembelajaran tersebut bermanfaat untuk mendorong efektivitas pembelajaran itu sendiri.

Belajar melalui Siaran Pembelajaran

Pembelajaran berbasis siaran seperti televisi dan radio pun menjadi salah satu terobosan dalam mengatasi kesenjangan akses terhadap sumber pembelajaran karena terdampak pandemi. Pada April 2020, atau satu bulan sejak kebijakan penutupan sekolah dikeluarkan, pemerintah mendorong penyediaan sumber belajar bagi siswa selama masa BDR melalui berbagai media. Salah satunya melalui tayangan Program BDR di TVRI. Program pembelajaran berbasis siaran disediakan pemerintah dengan memanfaatkan berbagai sumber tayangan pembelajaran yang terkait dengan kecakapan dasar siswa seperti literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Kajian Puslitjak pada Februari 2021 mencatat, tayangan program BDR di TVRI ditonton oleh 61,4% guru dan 57,5% siswa (Rakhmah dkk., 2021b).

Dari perspektif guru dan siswa, tayangan Program BDR dianggap bermanfaat. Pada bulan-bulan awal ketika Program BDR ditayangkan di TVRI, banyak guru memanfaatkan tayangan program tersebut sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran. Tayangan Program BDR umumnya digunakan

sebagai referensi ketika pembelajaran. Survei Puslitjak pada Desember 2020 menemukan sebanyak 41% guru di semua jenjang, menjadikan tayangan Program BDR TVRI sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran, khususnya pada guru di jejang SD yang persentasenya paling tinggi, yaitu 62,2% (Puslitjak, 2020b). Seiring berjalannya waktu, tayangan Program BDR lebih banyak digunakan sebagai alternatif dan tambahan referensi belajar guru yang penggunaannya dikombinasikan dengan sumber belajar lain yang telah banyak tersedia (Rakhmah dkk., 2021b) (baca juga artikel “Menonton adalah Belajar: Catatan Transformasi Tayangan Program Belajar dari Rumah” dalam buku ini).

Selain tayangan pembelajaran, geliat keterlibatan berbagai pihak dalam menyediakan alternatif sumber dan media belajar juga terlihat di berbagai daerah. Selain televisi, radio seperti RRI juga ikut mengambil peran dalam aktivitas pembelajaran selama pandemi. Di Singaraja, Bali, RRI setempat memiliki “Program Ibu Pertiwi Memanggil: Belajar di RRI” (RRI, 2020). Begitu pun dengan keterlibatan radio komunitas di berbagai wilayah untuk membantu pembelajaran siswa berbasis lokal, seperti Radio Sipurenu di Sulawesi Selatan, dan 35 radio komunitas yang tergabung dalam Jaringan Radio Komunitas Indonesia yang menyediakan siaran pembelajaran di wilayah Jawa Tengah, Karawang, dan Sumatra Selatan (Antara, 2020; Kapal Perempuan, 2021; Kompas, 2021; Republika, 2020) (baca juga artikel “Inisiatif Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Masyarakat di Wilayah Terpencil” dalam buku ini).

Bahu Membahu Bertahan selama Pandemi

Sebuah riset ekonomi di kawasan Asia-Pasifik yang dilakukan pada 2021 menyimpulkan, keterlibatan pemangku kepentingan dan lintas organisasi/ lembaga memainkan peran penting dalam strategi bertahan di masa pandemi (Dave, 2021). Kolaborasi berbagai pemangku kepentingan penting dilakukan karena pandemi berdampak multisektoral. Dampak positifnya, berbagai lini kepentingan serempak melakukan adaptasi agar dapat bertahan dan menjalankan perannya ketika terjadi pandemi. Dalam konteks pendidikan, perubahan sistem, kebijakan, dan iklim pendidikan tidak mampu dilakukan jika hanya dibebankan pada satu pihak saja, misalnya kepada pemerintah. Berbagai kebijakan baru dilahirkan dan direplikasi untuk memberikan dukungan kepada seluruh warga sekolah untuk tetap belajar, meskipun sudah menanggung beban yang tidak ringan akibat pandemi. Selain pemerintah,

sektor swasta, dan komunitas perlu bahu membahu berkontribusi mengurangi potensi kesenjangan pembelajaran yang rentan dialami siswa.

Dari berbagai riset yang kami lakukan, setidaknya terdapat tiga simpulan utama yang dapat menjadi catatan dari berbagai upaya kolaborasi dan inovasi dalam mengentaskan kesenjangan belajar selama pandemi, yaitu: dukungan kebijakan yang kontekstual, peningkatan kapasitas guru, serta kolaborasi dan kemitraan.

Dukungan Kebijakan yang Kontekstual

Selama pandemi di tahun 2020 hingga 2021, setidaknya sudah 4 surat edaran menteri dikeluarkan sebagai payung hukum yang mengatur pelaksanaan pembelajaran (JDIH Kemendikbud, 2020). Jumlah ini belum termasuk beberapa Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan lintas kementerian untuk mendorong pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Selain surat edaran, beberapa kebijakan juga diluncurkan sebagai bentuk dukungan pemerintah pada pembelajaran di masa darurat pandemi.

Berbagai riset berskala global maupun nasional mencoba mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang dapat mendorong pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, seiring krisis kesehatan yang semakin mengkhawatirkan. Temuan survei Puslitjak pada Mei dan Desember 2020 menunjukkan hasil yang konsisten, bahwa bantuan kuota/paket data internet merupakan salah satu bantuan yang paling dibutuhkan oleh guru dan siswa selama BDR. Selain kuota data internet, perangkat TIK, pelatihan, buku, dan beberapa bentuk bantuan lain juga diharapkan guru maupun siswa selama BDR (Puslitjak, 2020a; Zamjani dkk., 2020b). Atas dasar temuan tersebut, sejak satu tahun lebih BDR dijalankan, pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan untuk mengurangi hambatan selama pelaksanaan BDR, misalnya: penyesuaian proses pembelajaran, bantuan kuota data internet, opsi penerapan kurikulum dalam kondisi khusus (kurikulum darurat), penyediaan modul pembelajaran, relaksasi penggunaan dana BOS, dan penyediaan tayangan program BDR.

Berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka meminimalkan hambatan selama BDR ini relatif mendapat sambutan positif. Sebelum keluarnya kebijakan mengenai bantuan kuota data internet, setidaknya 69% sekolah telah lebih dulu melakukan penyesuaian penggunaan anggaran sekolah untuk memberikan bantuan kepada siswa dan guru, seperti pembelian kuota/

pulsa dan penyediaan perangkat TIK (Puslitjak, 2020b). Inisiatif sekolah ini kemudian didukung melalui kebijakan relaksasi dana BOS yang menjadi salah satu poin aturan dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020. Ketentuan dalam surat edaran tersebut disambut positif oleh sekolah karena dana BOS dapat dibelanjakan untuk keperluan yang mendukung pembelajaran selama pandemi. Survei Puslitjak pada Desember 2020 menunjukkan, sebanyak 62% satuan pendidikan mengalokasikan BOS untuk kuota/pulsa bagi guru dan siswa, dan 21% sekolah mengalokasikannya untuk berlangganan aplikasi belajar daring.

Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan bantuan kuota data internet pada Oktober 2020. Kebijakan ini menjadi salah satu angin segar untuk memperlancar proses pembelajaran daring yang dilakukan siswa dan guru, meskipun tidak sepenuhnya menjadi solusi bagi daerah yang memiliki keterbatasan akses internet. Setidaknya 75,2% siswa dan 77% guru telah menerima bantuan kuota/paket data internet hingga Desember 2020 (Puslitjak, 2020b; Zamjani dkk., 2021a). Meskipun begitu, catatan terhadap kebijakan bantuan kuota/paket data internet ini mengemuka selama pelaksanaannya hingga awal tahun 2021. Sebagian guru penerima bantuan kuota menganggap bahwa besaran kuota tidak sesuai kebutuhan terutama terkait pilihan aplikasi yang disediakan dalam kuota belajar yang dinilai kurang variatif (Zamjani dkk., 2021a). Hal ini juga selaras dengan anggapan siswa, yang menyatakan bahwa besaran kuota yang diberikan belum sesuai kebutuhan, salah satunya karena kurangnya porsi “kuota umum”. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah melakukan setidaknya dua kali penyesuaian kebijakan bantuan kuota data internet ini khususnya terkait cakupan dan porsi kuota, termasuk skema distribusi bantuan agar dapat lebih banyak menjangkau guru dan siswa.

Selain terkait perangkat dan infrastruktur pembelajaran, dukungan kebijakan juga mengarah pada bagaimana substansi pembelajaran dapat disampaikan secara optimal kepada siswa. Dalam hal ini, kebijakan kurikulum dalam kondisi khusus menjadi salah satu jawaban. Pelaksanaan kurikulum dalam kondisi khusus bertujuan memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Kurikulum ini merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional dengan melakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan

kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Hingga Desember 2020, kurikulum darurat telah digunakan oleh setidaknya 49,7% sekolah, baik yang digunakan sebagai satu-satunya kurikulum di sekolah, maupun dipadukan dengan Kurikulum 2013 (Puslitjak, 2020b). Bersamaan dengan pemberlakuan kurikulum dalam kondisi khusus, pemerintah juga menyediakan modul-modul pembelajaran untuk siswa PAUD dan SD yang diharapkan dapat membantu proses belajar dari rumah dengan mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan juga siswa.

Peningkatan Kapasitas Guru

Selain melalui jalur kebijakan, upaya mengurangi kesenjangan proses pembelajaran selama BDR juga mendorong berbagai inovasi untuk meningkatkan kapasitas guru. Sebelum pandemi terjadi, pemerintah tengah giat mendorong pelaksanaan program Pembelajaran Berbasis TIK (PembaTIK) yang didukung melalui penyediaan portal Rumah Belajar Kemendikbud. Ketika pandemi mendera, program PembaTIK dan program berbasis pengembangan kompetensi guru makin didorong dan banyak bertumbuh di daerah. Program Guru Penggerak melengkapi berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi guru di daerah yang sebagian besar memasukkan materi pemanfaatan TIK dan pengelolaan pembelajaran selama pandemi (Zamjani dkk., 2020b). Di lingkup komunitas guru, pengembangan kompetensi guru melalui wadah KKG dan MGMP semakin bergeliat, meskipun banyak terkendala akses karena seperti halnya aktivitas belajar, pelatihan dan pertemuan antarguru pun harus dilakukan secara daring (Rakhmah dkk., 2021a; Zamjani dkk., 2020b). Selama ini, aktivitas guru dalam komunitasnya baik melalui KKG ataupun MGMP terbukti efektif meningkatkan inovasi guru dalam melakukan pembelajaran (Solihin dkk., 2020).

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membangun berbagai laman berbagi praktik baik pengajaran dan pengelolaan pembelajaran, seperti laman *Guru Belajar dan Berbagi* (<https://gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id/>), *Bersama Hadapi Korona* (<https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/>), dan *Gerakan Ayo Guru Belajar!* (<https://ayogurubelajar.kemdikbud.go.id/seripandemi/>). Penyediaan sumber belajar dan berbagi ini dapat menjadi contoh bentuk penyebaran inovasi dan praktik baik pembelajaran oleh guru di masa pandemi. Di luar pemerintah, berbagai komunitas guru belajar juga menggeliat melengkapi berbagai media diseminasi praktik baik guru yang telah ada.

Kolaborasi dan Kemitraan

Selain pemerintah, keterlibatan swasta memegang peranan penting, khususnya pada masa krisis. Studi yang dilakukan World Bank pada 2009 menemukan bahwa partisipasi swasta dalam pendidikan meningkat secara signifikan selama dua dekade terakhir di seluruh dunia dan turut berperan memberikan layanan pendidikan yang merata dan menjangkau seluruh masyarakat dari segala latar belakang ekonomi (Patrinos et al., 2009). Di banyak negara, kemitraan pemerintah dan swasta berdampak positif bagi peningkatan akses terhadap pendidikan, peningkatan penyediaan infrastruktur, efisiensi anggaran pendidikan, serta perluasan hak terhadap pendidikan berkualitas. Di Indonesia, kemitraan pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti penyediaan sekolah swasta, sumber belajar, dan infrastruktur untuk belajar.

Dalam konteks pandemi, keterlibatan swasta dan komunitas di luar pemerintah menjadi semakin penting. Studi Pembelajaran Digital untuk Pendidikan Berkualitas yang Inklusif yang dilakukan Puslitjak pada 2020-2021 menemukan keterlibatan swasta, seperti provider telekomunikasi, platform/aplikasi belajar, dan perguruan tinggi dalam mendorong kelancaran praktik pembelajaran berbasis daring selama pandemi meningkat pelaksanaannya (Zamjani dkk., 2021b). Beberapa perusahaan *edutech* misalnya memberikan dukungan berupa bantuan perangkat (*hardware*) dan akses terhadap layanan produk yang mereka miliki. Sebagai contoh, Google for Education menyediakan 1,5 juta akun G-suite untuk guru dan siswa di tingkat SD sampai SMA melalui Program Mengajar dari Rumah (Kemdikbud, 2020; Media Indonesia, 2020). Sementara itu, Microsoft menyediakan akses tanpa membayar Microsoft Office 365 dan Microsoft Teams untuk sekolah di beberapa wilayah (Microsoft, 2020).

Pelatihan guru masih menjadi pekerjaan rumah pendidikan sejak sebelum terjadinya pandemi. Padahal, peran pelatihan guru penting dalam meningkatkan kecakapan guru sehingga dapat menciptakan pembelajaran berkualitas bagi siswa. Ketika pandemi datang, keterbatasan keterampilan guru terkait TIK menjadi salah satu sebab pembelajaran jarak jauh menjadi tidak efektif dan justru memperlebar kesenjangan pendidikan yang sudah ada. Dukungan pelatihan yang diterima guru juga belum optimal. Survei Puslitjak menemukan hanya 36,5% guru yang menganggap bahwa pelatihan

yang diberikan pemerintah sudah memadai selama BDR (Puslitjak, 2020a). Oleh karena itu, selain akses dan infrastruktur, pelatihan guru juga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Kolaborasi peran berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan pelatihan yang berkualitas dan dapat menjangkau lebih banyak guru, menjadi sangat diperlukan.

Selain menyediakan produk teknologi pembelajaran, beberapa platform dan komunitas belajar juga menyediakan pelatihan khusus bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dalam memanfaatkan teknologi selama pembelajaran, baik secara mandiri ataupun melalui skema kerja sama dengan pemerintah dan pemerintah daerah. Misalnya, portal pendidikan digital Indonesia, Pendidikan.id (Pendidikan. id,2020) dan portal Bantu Guru Belajar Lagi (bantugurubelajarlagi. org, 2021). Pelatihan guru dalam pembelajaran berbasis TIK cukup mudah ditemukan di internet. Skema pelatihan secara daring dan gratis, membuat jangkauan pelatihan menjadi lebih luas karena tidak terkendala ruang dan persyaratan teknis pelatihan lainnya. Beberapa komunitas guru juga lahir dari inisiasi swasta, seperti Komunitas Guru Inovatif asuhan Microsoft dan Komunitas Guru Belajar yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Komunitas ini kemudian mendorong terbangunnya inisiatif setiap ekosistem pendidikan, seperti guru, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan swasta untuk mengoptimalkan pengembangan pendidikan di wilayahnya meskipun di tengah keterbatasan.

Mark Heuer melalui artikelnya yang berjudul *Ecosystem Cross-Sector Collaboration: Conceptualizing an Adaptive Approach to Sustainability Governance* menulis tentang bagaimana pendekatan berbasis kolaborasi diperlukan untuk mengembangkan kebijakan dalam pengelolaan masalah kemasyarakatan dan pemerintahan (Heuer, 2011). Kolaborasi ini menurut artikel tersebut akan mampu mengakomodasi kondisi yang sedang bergejolak, sekaligus dapat mendukung upaya adaptasi untuk bertahan dalam kondisi yang serba tidak pasti. Dalam mekanisme kolaborasi, tidak ada ketentuan yang ajek dan seragam yang digunakan setiap aktor yang terlibat di dalamnya. Oleh karena fleksibilitas tersebut, setiap ranah kolaborasi yang belum optimal, dapat disempurnakan oleh kolaborasi pada ranah lainnya. Seluruhnya bergerak dengan serempak.

Dalam konteks pendidikan, berbagai inisiatif dan keterlibatan banyak pihak terbukti mampu mendorong pemulihan pendidikan yang terdampak pandemi agar dapat berjalan lebih cepat. Cara yang ditempuh masing-masing

berbeda, dengan cakupan upaya dan keterlibatan yang juga tidak sama. Dimulai dari skala yang lebih kecil di dalam keluarga, lingkungan rumah dan sekolah, komunitas guru dan pembelajar, kelompok dan organisasi masyarakat, pemerintah daerah, hingga kolaborasi di tingkat nasional. Kejadian pandemi dan berbagai upaya yang telah dilakukan dapat menyadarkan kita bahwa proses pendidikan tidak dapat ditunda atau diperlambat hanya untuk menunggu pandemi benar-benar usai, atau menanti krisis ini benar-benar selesai.

Daftar Pustaka

- Antara. (2020). Tak Butuh Internet, Pelajar di OKU Belajar Lewat Radio. <https://sumsel.inews.id/berita/tak-butuh-internet-pelajar-di-oku-belajar-lewat-radiobantugurubelajarlagi.org>. (2021). Bantu Guru Belajar Lagi – Karena setiap anak berhak atas pendidikan yang layak. <http://www.bantugurubelajarlagi.org/>
- BBC. (2014). Pakistan Children Hit by Floods Missing School . <https://www.bbc.com/news/av/world-asia-29505133>
- BBC. (2020). How to use Bitesize Daily - Our new service to help you learn at home - BBC Bitesize. <https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zfwrcqt>
- Dave, M. (2021). Resilient to Crises: How Cooperatives Are Adapting Sustainably to Overcome COVID-19-induced Challenges. *International Journal of Rural Management*, 17(1S). <https://doi.org/10.1177/0973005221991624>
- Department of School Education & Literacy Ministry of Human Resource Development India. (2020). PRAGYATA: Guidelines for Digital Education.
- Ebardo, R. A., Mae, A., & Valderama, C. (2009). The Effect of Web- Based Learning Management System on Knowledge Acquisition of Information Technology Students at Jose Rizal University. August, 17–18.
- ESDM. (2019). Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2018. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Heuer, M. (2011). Ecosystem Cross-Sector Collaboration: Conceptualizing an Adaptive Approach to Sustainability Governance. *Business Strategy and the Environment*, 20(4), 211–221. <https://doi.org/10.1002/bse.673>
- Hofmann, S., & Mühlenweg, A. (2018). Learning intensity effects in students' mental and physical health – Evidence from a large scale natural experiment in Germany. *Economics of Education Review*, 67, 216–234. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2018.10.001>
- Irmawati, A., Martono, S. F., & Noviyanti. (2021). Mendorong Peningkatan

Kesejahteraan Psikologis Siswa selama Pandemi COVID-19.

- JDIH Kemendikbud. (2020). JDIH Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI <https://jdih.kemdikbud.go.id/?service=srv:00.7d0fa013c6f5be339a83ccc04f706828204c2835&ref=0037fg755f94a9auy2bqsc92d62eab44019n513cfea0ac071dmb61bbd2829wv70ddaufefb8c5i41dczb20e4lcfbc6b3f614a2456c001t2c7xf4h637pfor4bfd5c8k8>
- Kapal Perempuan. (2021). Radio Siperennu FM, Suara Perempuan di Pulau pada Masa Pandemi - KAPAL Perempuan. [https:// kapalperempuan.org/radio-siperennu-fm-suara-perempuan-di-pulau-pada-masa-pandemi/](https://kapalperempuan.org/radio-siperennu-fm-suara-perempuan-di-pulau-pada-masa-pandemi/)
- Kemdikbud. (2020). Google for Education: Mengajar dari Rumah. <https://bersamahadapikورونا.kemdikbud.go.id/google-for-education/>
- Kemenkominfo. (2019). Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018. https://www.kominfo.go.id/content/detail/21396/laporan-kinerja-kementerian-komunikasi-dan-informatika-tahun-2018/o/laporan_kinerja
- Kim, D. (2017). The Impact of Learning Management Systems on Academic Performance: Virtual Competency and student Involvement. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 17(2), 23–35.
- Kompas. (2021). Radio Siperennu FM, Suara Perempuan di Pulau pada Masa Pandemi - Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/01/13/radio-siperennu-fm-suara-perempuan-di-pulau-di-masa-pandemi>
- Li, C., & Lalani, F. (2020). The Rise of Online Learning During the COVID-19 Pandemic. <https://www.weforum.org/agenda/2020/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/>
- Mathur, N. (2020). 'Edtech has untapped potential.' <https://www.livemint.com/companies/people/-edtech-has-untapped-potential-11595813408102.html>
- McKinsey. (2020). Innovation in a Crisis: Why it is More Critical than Ever. <https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/innovation-in-a-crisis-why-it-is-more-critical-than-ever>
- Media Indonesia. (2020). Google Luncurkan Situs Mengajar dari Rumah. <https://mediaindonesia.com/humaniora/304350/google-luncurkan-situs-mengajar-dari-rumah.html>
- Microsoft. (2020). Microsoft Office 365 Gratis untuk Sekolah & Peserta Didik . <https://www.microsoft.com/id-id/education/products/office>

- Patrinós, H. A., Felipe, B.-O., & Guáqueta, J. (2009). The Role and Impact of Public-Private Partnerships in Education. In World Bank. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7866-3>
- Pendidikan.id. (2020). Membangun Pendidikan Indonesia Melalui Sistem Digital. https://www.pendidikan.id/tentang_kami.html
- Puslitjak. (2020a). Survei Belajar dari Rumah dalam Masa Pencegahan COVID-19 (Mei 2020).
- Puslitjak. (2020b). Hasil Survei Belajar dari Rumah dalam Pandemi COVID-19 (Desember 2020).
- Rakhmah, D. N., Azizah, S. N., Irmawati, A., Hariyanti, E., & Solihin, L. (2021a). Menakar efektivitas Tayangan Program Belajar dari Rumah (Vol. 1, Issue April).
- Rakhmah, D. N., Azizah, S. N., Irmawati, A., Hariyanti, E., & Solihin, L. (2021b). Mengoptimalkan Pemanfaatan Tayangan BDR Kemendikbud di Media Sosial: Saran Perbaikan Konten dan Promosi Tayangan.
- Republika. (2020). Terkendala Internet, Siswa di Karawang Belajar Lewat Radio | Republika Online. <https://republika.co.id/berita/qfvrn8327/terkendala-internet-siswa-di-karawang-belajar-lewat-radio>
- RRI. (2020). Belajar di RRI: Ajang Kreatifitas Guru Mengajar dengan Gaya Kekinian - Info Publik |. <https://rri.co.id/humaniora/info-publik/815703/belajar-di-rri-ajang-kreatifitas-guru-mengajar-dengan-gaya-kekinian>
- Sadirman. (2012). Interaksi dan Motivasi Belajar dan Mengajar. Rajawali Press.
- Solihin, L., Pratiwi, I., & Rakhmah, D. N., Teguh, S., Utama, Bakti. (2021). Risalah Kebijakan Nomor 15, Agustus 2021. Penguatan Regulasi untuk Mendorong Peningkatan Kompetensi Guru dalam Jabatan secara Berkelanjutan. Pusat Penelitian Kebijakan.
- The Virus that Shut Down the World: Education in Crisis. (2020). <https://news.un.org/en/story/2020/12/1080732>. 28 December 2020
- TIME. (2017). The World Is Not Ready for the Next Pandemic. <https://time.com/magazine/us/4766607/may-15th-2017-vol-189-no-18-u-s/>
- UNESCO. (2020a). School closures caused by Coronavirus (Covid-19). <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>
- UNESCO. (2020b). Education: From Disruption to Recovery. <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>
- UNICEF. (2020a). COVID-19: Laporan baru UNICEF mengungkap setidaknya

- sepertiga anak sekolah di seluruh dunia tidak dapat mengakses pembelajaran jarak jauh selama sekolah ditutup. <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/covid-19-laporan-baru-unicef-mengungkap-setidaknya-sepertiga-anak-sekolah-di-seluruh>
- UNICEF. (2020b). COVID-19: Are children able to continue learning during school closures. A Global Analysis of the Potential Reach of Remote Learning Policies Using Data From, 100, 17.
- UNICEF. (2020c). Learning Unlimited: a concept for Indonesia.
- UNICEF. (2021). After almost Ten Years of War in Syria, More than Half of Children Continue to be Deprived of Education. <https://www.unicef.org/press-releases/after-almost-ten-years-war-syria-more-half-children-continue-be-deprived-education>
- World Bank. (2015). Back to School After the Ebola Outbreak. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/05/01/back-to-school-after-ebola-outbreak>
- World Bank. (2020a). How Countries are Using EdTech (Including Online Learning, Radio, Television, Texting) to Support Access to Remote Learning During the COVID-19 Pandemic. <https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/brief/how-countries-are-using-edtech-to-support-remote-learning-during-the-covid-19-pandemic>
- World Bank. (2020b). Edtech in Indonesia – Ready for Take-Off? May, 1–84. www.worldbank.org
- Zamjani, I., Handayani, M., Azizah, S. N., Lismayanti, S., & Purnama, (2021a). Bantuan Kuota Internet dan Implikasinya bagi Pengalaman Belajar Mengajar.
- Zamjani, I., Rakhmah, D. N., Azizah, S. N., & Hariyanti, E. (2021b). Pembelajaran Digital untuk Pendidikan Berkualitas yang Inklusif.
- Zamjani, I., Pratiwi, I., Azizah, S. N., & Rakhmah, D. N. (2020a). Survei Belajar dari Rumah (Siswa dan Orang Tua, Mei 2020).
- Zamjani, I., Rakhmah, D. N., Pratiwi, I., & Azizah, S. N. (2020b). Mengatasi Risiko Belajar dari Rumah. 1–7.



Kolaborasi Guru dan Orang Tua
Menghadapi Tantangan
Pembelajaran PAUD di Masa Pandemi

Kolaborasi Guru dan Orang Tua Menghadapi Tantangan Pembelajaran PAUD di Masa Pandemi



Nur Listiawati, Siswantari, Dyah Suryawati, Yunita Murdianingrum

Tantangan bagi PAUD di Masa Pandemi

Pandemi COVID-19 mendorong peserta didik, termasuk di jenjang PAUD, untuk belajar dari rumah dalam upaya menjaga jarak dan mengurangi potensi penyebaran virus. Pembelajaran peserta didik baik secara tatap muka maupun jarak jauh tidak dapat dipisahkan dari peran orang tua. Lazimnya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dijalani anak, maka semakin berkurang peran orang tua. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan yang dilaksanakan, maka peran orang tua semakin diperlukan. Artinya, peran orang tua paling dibutuhkan pada pendidikan di jenjang PAUD.

Kemendikbud menyadari pentingnya pelibatan orang tua dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau biasa dikenal sebagai belajar dari rumah (BDR). Salah satunya, melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19). Melalui surat edaran tersebut, terlihat jelas bahwa seluruh tahapan pembelajaran perlu menghadirkan peran orang tua.

Pembelajaran di masa pandemi memberikan tantangan tersendiri, bukan hanya bagi guru, tetapi juga bagi orang tua. Timmons et. al., (2021) dari hasil risetnya menyampaikan tentang permasalahan di PAUD terkait PJJ di Kanada. Setidaknya terdapat tiga tantangan dalam PJJ, yaitu kesulitan melakukan pembelajaran melalui permainan dan kesulitan untuk membangun komunikasi langsung; kesulitan memantau secara langsung dan fokus pada perkembangan sosial, emosional, dan aspek kognitif anak; dan hilangnya pembelajaran yang

optimal dan perkembangan kesehatan anak. Kondisi ini bertolak belakang dengan beberapa kebutuhan anak dalam proses belajar. Pertama, pembentukan hubungan sosial antarteman biasanya dilakukan melalui saling meminjam benda yang dimiliki anak. Kedua, upaya menyahterakan anak yang fokus pada kesehatan fisik dan mental. Ketiga, kesempatan anak untuk bereksplorasi. Keempat, kesempatan anak untuk berkomunikasi dalam berbagai cara.

Primasari (2020) dari hasil surveinya di Yogyakarta menyatakan bahwa pembelajaran dengan metode pembiasaan untuk anak-anak PAUD yang dilakukan di rumah tidak semudah yang dibayangkan. Selain karena keterbatasan kemampuan orang tua dalam mendampingi anak belajar, sering kali anak-anak kurang semangat belajar. Di samping itu, tidak semua orang tua memiliki ketekunan mengajar seperti guru di sekolah. Banyak orang tua yang tidak sabar dan justru membuat tekanan berlebihan pada anak. Kondisi tersebut diperparah dengan terbatasnya interaksi antarpeserta didik yang membuat anak menjadi semakin jenuh dan kehilangan motivasi belajar. Bagaimanapun, pembelajaran di PAUD secara tatap muka lebih menarik dan menyenangkan. Guru menyampaikan materi pembelajaran dengan diselingi kegiatan bernyanyi, tepuk tangan, bercerita, dan aktivitas kreatif lainnya.

Permasalahan lain yang dihadapi orang tua adalah kebingungan dan kewalahan karena sifat anak-anak PAUD yang masih labil dan belum memiliki kemampuan mengontrol dirinya sendiri dengan baik, menyebabkan pikiran dan suasana hati peserta didik menjadi mudah berubah. Selanjutnya, kebanyakan anak belum mampu berkomunikasi dengan lancar sehingga sulit mengungkapkan perasaannya. Banyak orang tua yang belum memahami cara berkomunikasi dengan anak usia dini secara efektif. Selain itu, kondisi pembelajaran yang seketika berubah dari yang semula tatap muka dengan belajar di rumah tanpa ada teman sepermainan, membuat anak semakin jenuh belajar, proses pembelajaran menjadi kurang kondusif, dan orang tua kewalahan mendampingi anak mereka.

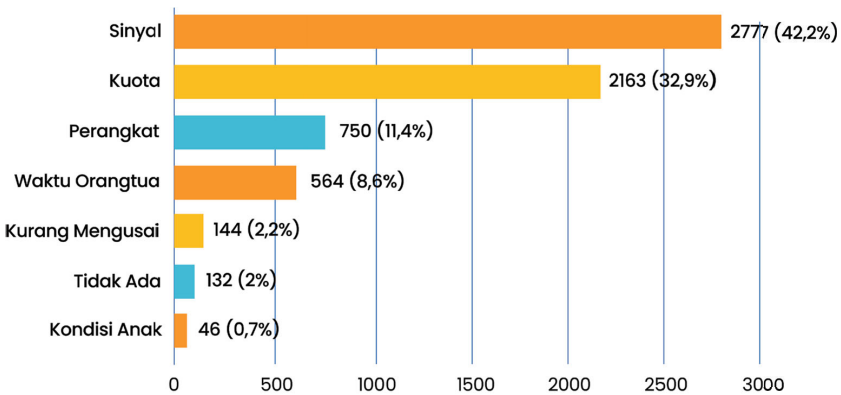
Tantangan lain terkait penerapan materi pembiasaan di rumah adalah pola pikir dan motivasi orang tua. Primasari (2020) menemukan salah satu orang tua yang diwawancarai mengatakan bahwa motivasi menyekolahkan anaknya di PAUD adalah menitipkan anaknya saat ditinggal bekerja. Sehingga, ketika anaknya tidak belajar di sekolah dan harus belajar dari rumah selama

pandemi, orang tua tidak siap untuk mendampingi anaknya belajar atau melakukan kegiatan belajar melalui bermain sesuai arahan dari guru.

Permasalahan lainnya terkait dengan pengamatan dan penilaian yang dilakukan guru. Biasanya, guru hanya dapat melakukan pengamatan dan penilaian untuk membuat catatan anekdot melalui foto dan video yang dikirimkan peserta didik, sehingga sangat terbatas dan tidak mampu memantau proses pembelajaran secara penuh. Berbeda halnya jika pembelajaran dilakukan secara tatap muka di sekolah di mana guru dapat mengamati perkembangan peserta didik secara langsung. Penilaian untuk materi pembiasaan biasanya menggunakan catatan anekdot berdasarkan hasil pengamatan yang dinarasikan dan dituliskan guru berdasarkan apa yang dilakukan peserta didik. Penilaian melalui media pencatatan seperti ini menjadi kurang optimal selama pandemi karena guru tidak mengamati langsung perkembangan peserta didiknya.

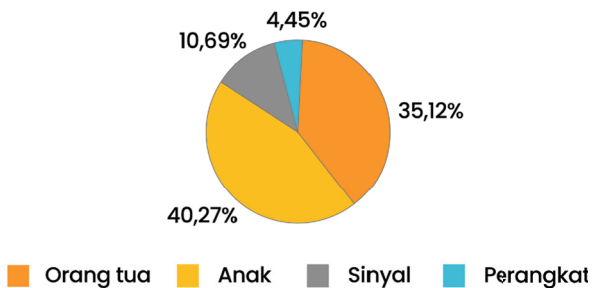
Khadijah dan Gusman (2020) juga mengemukakan sedikitnya terdapat empat kendala yang dihadapi orang tua anak usia dini ketika belajar secara daring, yaitu *mindset*, kompetensi, waktu, dan antusiasme anak. Kendala terkait *mindset* meliputi pemahaman keliru bahwa bermain tidak perlu dikontrol oleh guru dan bermain itu bukan bagian dari belajar. Kendala terkait kompetensi mencakup: kurang terampilnya sebagian orang tua dalam menggunakan teknologi, kurang kreatifnya sebagian orang tua dalam mengeksplorasi pola bermain anak, dan kurang terampilnya orang tua dalam menggunakan alat permainan tertentu sebagai media belajar. Kendala waktu, yaitu terabaikannya waktu dan durasi belajar daring karena waktu kerja orang tua, sehingga kemudian sering mengirimkan laporan ketidakhadiran. Terkait antusiasme, kendalanya adalah sebagian peserta didik hadir belajar tanpa antusiasme yang memadai sehingga tidak aktif dan sekadar ikut belajar daring.

Survei yang dilakukan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada 2020 menemukan, sebagaian besar kesulitan yang dihadapi guru adalah terkait sinyal (42,2%), kuota internet (32,9%), keterbatasan kepemilikan perangkat (11,4%), serta kurangnya penguasaan orang tua dalam mendampingi anak belajar, dan sebagian kecil terkait dengan kondisi anak (Grafik 1).



Grafik 1 Kendala yang Dihadapi Guru PAUD dalam PJJ
(Sumber: Diolah dari Survei Ditjen GTK, 2020)

Selain itu, permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh orang tua dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu permasalahan yang berasal dari orang tua, anak, serta kondisi infrastruktur dan perangkat IT (Grafik 2).



Grafik2. Kendala yang Dihadapi Guru PAUD dalam PJJ
(Sumber: Diolah dari Survei Ditjen GTK, 2020)

Survei yang melibatkan 14.000 orang tua PAUD tersebut memperlihatkan bahwa kendala terbesar PJJ berasal dari anak (40,27%), dari orang tua (35,12%), sinyal internet (10,69%), dan ketersediaan perangkat (4,45%). Sedangkan pada anak, kendala yang banyak dialami adalah anak tidak mau melakukan kegiatan, tidak fokus, rewel, bosan, dan tidak patuh. Selain itu, keterbatasan waktu pendampingan yang dimiliki orang tua juga terjadi karena kebanyakan orang tua sibuk bekerja (51,66%). Sebagian orang tua merasa kesulitan memberikan bimbingan ketika anak belajar melalui permainan, antara lain disebabkan

latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pemahaman tentang psikologi anak yang terbatas. Di salah satu PAUD di Kabupaten Sumba Timur misalnya, sebagian besar orang tua hanya lulusan SD sehingga mengalami kesulitan untuk memahami kegiatan bermain anak sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran. Sejauh ini, peran anggota keluarga lain menjadi sangat penting untuk mengurangi kesenjangan pendampingan belajar pada peserta didik PAUD.

Tulisan ini bertujuan untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan tersebut melalui peningkatan kolaborasi/kemitraan antara guru dan orang tua/keluarga. Kemitraan ini selaras dengan program kemitraan satuan PAUD, keluarga, dan masyarakat sebagai trisentra pendidikan dalam membangun ekosistem pendidikan yang kondusif dalam menumbuhkembangkan karakter peserta didik (Dit. Bindikkel, 2016).

Program kemitraan tersebut berlaku dalam berbagai kondisi. Pandemi menyebabkan kecenderungan ekosistem PAUD menjadi kurang kondusif sehingga dorongan untuk berkolaborasi menjadi semakin kuat. Tulisan ini akan menguraikan strategi kolaborasi antara guru, orang tua dan masyarakat dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh guru dan orang tua peserta didik di jenjang PAUD.

Data yang dianalisis dalam tulisan ini berasal dari hasil penelitian Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) – saat ini Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) – serta data sekunder yang diperoleh dari unit atau lembaga lain yang relevan. Dalam studi yang dilakukan pada Agustus – Oktober 2020, Puslitjak melakukan serangkaian diskusi kelompok terpumpun (DKT) secara daring dan wawancara melalui telepon. Wawancara dilaksanakan kepada guru dan kepala lembaga PAUD yang berlokasi di Kota Jakarta Utara (DKI Jakarta), Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur), Kota Bogor (Jawa Barat), Kabupaten Lahat (Sumatra Selatan), Kabupaten Maluku Tengah (Maluku), Kabupaten Sumba Timur (NTT), dan Kabupaten Tanah Bumbu (Kalimantan Selatan). Lembaga PAUD yang diwawancarai tersebut terdiri dari 8 Taman Kanak-kanak (TK), 2 Kelompok Belajar (KB), dan 2 Satuan PAUD Sejenis (SPS). Sementara data sekunder yang dianalisis merupakan hasil survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada 2020 dengan responden guru PAUD sebanyak 6.580 orang dan orang tua siswa PAUD sebanyak 14.000 orang, masing-masing dengan instrumen yang berbeda. Data diolah dan dianalisis secara deskriptif.

Pelaksanaan BDR oleh Guru/Pendidik PAUD

Pada saat awal pandemi COVID-19, kepala lembaga/satuan dan guru/pendidik PAUD mendapat edaran dari dinas pendidikan masing-masing untuk melaksanakan BDR sesuai SE Sesjen Kemendikbud No. 15 tahun 2020. Dalam SE Sesjen disebutkan bahwa referensi perencanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) baik secara daring maupun luring dapat dilihat pada portal Guru Berbagi <https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/>, namun dinas pendidikan telah proaktif menyosialisasikan SE Sesjen tersebut kepada kepala lembaga/satuan dan guru/pendidik PAUD di daerahnya masing-masing.

Setelah mendapatkan sosialisasi tersebut, setiap lembaga/satuan PAUD mengadakan rapat untuk mengetahui kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran yang dimiliki oleh lembaga/satuan PAUD, guru/pendidik, dan orang tua peserta didik. Dalam menyiapkan rencana pelaksanaan BDR, guru/pendidik PAUD melakukan beberapa tahapan kegiatan. Tahapan tersebut dibagi dalam dua tahapan besar yaitu menyiapkan rencana pelaksanaan BDR, dan memfasilitasi PJJ baik secara daring maupun luring.

Dalam menyiapkan PJJ, semua guru/pendidik PAUD yang diwawancara memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai namun tidak memaksakan ketuntasan kurikulum. Guru/pendidik PAUD melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan konsep belajar melalui bermain (*learning through play*). Oleh sebab itu, terkait fokus pada literasi dan numerasi sebagaimana tercantum dalam SE Sesjen Kemendikbud tersebut dilakukan dengan belajar melalui bermain.

Setelah itu, guru/pendidik menyiapkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik difokuskan pada Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas); kegiatan yang bersifat rekreasi dan aktivitas fisik; kegiatan spiritual keagamaan; serta kegiatan penguatan karakter dan budaya. Selanjutnya guru/pendidik PAUD menentukan metode dan interaksi yang akan dipakai dalam penyampaian pembelajaran, yaitu daring atau luring, atau kombinasi keduanya, serta menentukan jenis media pembelajaran, seperti format teks, audio/video simulasi, multimedia, alat peraga, dan sebagainya yang sesuai dengan metode pembelajaran yang akan digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada guru/pendidik dari 12 lembaga/satuan PAUD, terdapat sembilan lembaga/satuan PAUD yang melaksanakan

BDR secara luring dengan memanfaatkan secara optimal aplikasi Whatsapp dan berbagai layanan di dalamnya. Sedangkan tiga lembaga/satuan PAUD melaksanakan BDR dengan pembelajaran tatap muka (PTM) tidak di gedung sekolah. PTM ini dapat dilaksanakan di titik kumpul, yaitu kantor RW, balai desa, atau rumah orang tua/wali peserta didik atau rumah guru/pendidik. Pada dua TK di Kabupaten Maluku Tengah, PTM dilaksanakan seperti pembelajaran di sekolah, yaitu peserta didik dikelompokkan berdasarkan kelasnya. Namun, PTM dilaksanakan sesuai kesepakatan antara guru/pendidik dengan orang tua/wali peserta didik, yaitu di balai desa atau rumah guru/pendidik atau rumah orang tua peserta didik. Sedangkan pada TK di Kabupaten Sumba Timur, peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil berisi lima orang peserta didik, dan PTM dilakukan di titik kumpul, yaitu kantor RW atau rumah orang tua/wali peserta didik. Guru/pendidik mendatangi kelompok-kelompok tersebut sesuai kesepakatan dengan orang tua/wali peserta didik.

Penyebab mengapa PJJ daring tidak dilakukan oleh lembaga/satuan PAUD cukup beragam. Guru/pendidik pada dua belas lembaga/satuan PAUD di semua kota dan kabupaten yang menjadi responden penelitian ini menyatakan bahwa banyak orang tua peserta didik tidak menguasai aplikasi untuk pembelajaran tatap muka virtual maupun *learning management system*, dan keterbatasan anggaran untuk membeli paket data internet yang mencukupi. Terkait *learning management system*, guru-guru di Kabupaten Maluku Tengah juga menyatakan bahwa mereka (guru/pendidik PAUD dan orang tua peserta didik) belum pernah mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya. Selain itu, lembaga/ satuan PAUD di Kabupaten Maluku Tengah, Sumba, Lahat dan Tanah Bumbu menambahkan penyebab lainnya, yaitu sinyal internet di daerah mereka buruk.

Setelah menentukan metode dan interaksi yang dipakai dalam penyampaian pembelajaran, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh guru/pendidik PAUD adalah memfasilitasi PJJ sesuai kesepakatan yang telah diambil antara lembaga/satuan PAUD dan orang tua peserta didik. Proses PJJ menggunakan metode luring dapat dilaksanakan dengan: menggunakan media buku, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekitar; (b) menggunakan media televisi; dan (c) menggunakan radio.

Dari keterangan guru/pendidik di 9 lembaga/satuan PAUD yang memilih PJJ menggunakan metode luring, mereka menggunakan media buku, modul,

dan bahan ajar dari lingkungan sekitar. Modul pembelajaran PAUD yang mereka susun berisi RPP mingguan, bahan ajar, jadwal, dan penugasan bagi peserta didik untuk pembelajaran selama satu minggu. Waktu pembelajaran dan pengumpulan hasil belajar disepakati antara guru/pendidik dengan orang tua/wali serta disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Namun di lembaga/satuan PAUD yang melaksanakan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Maluku Tengah dan Sumba Timur, guru/pendidik PAUD yang diwawancarai tidak membuat modul pembelajaran seperti di atas, tetapi mereka tetap membuat RPP harian (RPPH) dan pembelajaran dilaksanakan seperti saat di dalam kelas.

Pada 9 lembaga/satuan PAUD yang memilih PJJ menggunakan metode luring, modul pembelajaran dari guru/pendidik diambil oleh orang tua/wali peserta didik sekali seminggu di akhir pekan atau disampaikan melalui media komunikasi yang tersedia. Pertemuan antara guru/pendidik dan orang tua/wali peserta didik dalam penyerahan modul pembelajaran dilakukan dengan mematuhi protokol pencegahan COVID-19.

Saat pembelajaran, guru/pendidik memastikan orang tua/wali dan peserta didik tidak mengalami kesulitan dengan jadwal dan penugasan yang telah diberikan dengan cara menelepon atau melakukan *video call*. Telepon atau *video call* ini juga membantu meningkatkan semangat dan motivasi peserta didik dalam belajar. Dalam melaksanakan PJJ luring, guru TK di Kabupaten Lahat juga menganjurkan agar peserta didik dan orang tuanya memperhatikan acara pembelajaran PAUD di TVRI (baca juga artikel “Menonton adalah Belajar: Catatan Transformasi Tayangan Program Belajar dari Rumah” dalam bunga rampai ini). Peserta didik menyimak materi yang disampaikan di TV didampingi oleh orang tua masing-masing. Kemudian kegiatan ini dilaporkan kepada guru dengan cara orang tua mengambil foto atau merekamnya saat anak menyimak acara tersebut atau mengerjakan tugas. *File* foto atau rekaman videonya dikirim oleh orang tua kepada guru melalui Whatsapp. Selain menyimak tayangan TVRI, guru/pendidik di kota/kabupaten lain ada pula yang membuat video-video pendek tentang tema pembelajaran mingguan mereka dan mengirimkannya kepada orang tua/wali peserta didik melalui aplikasi Whatsapp.

Kadang-kadang guru/pendidik melakukan kunjungan ke rumah peserta didik (*home visit*) untuk melakukan pengecekan dan pendampingan belajar dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. *Home visit* juga dilakukan oleh

guru/pendidik di lembaga/satuan PAUD yang melaksanakan pembelajaran tatap muka jika peserta didik tidak hadir beberapa kali dalam PTM untuk mengetahui kondisi peserta didik. Guru/pendidik juga memastikan peserta didik dijemput oleh orang tua/ walinya di saat selesai pembelajaran.

Di akhir pekan, ketika orang tua/wali peserta didik memberikan hasil penugasan peserta didik, guru/pendidik juga memeriksa kelengkapan administrasi lainnya, yaitu isian lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian, dan tandatangan orang tua/wali peserta didik pada tiap sesi belajar yang telah tuntas di lembar pemantauan harian.

Peran Orang Tua/Keluarga dalam Kegiatan Belajar melalui Bermain

Berbagai tantangan dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PJJ mendorong keterlibatan dan dukungan dari anggota keluarga lainnya. Keterlibatan dan peran keluarga sudah disebutkan dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Direktorat Jenderal PAUDDIKMAS Nomor 127 Tahun 2017. Dalam kedua regulasi itu disebutkan, pelibatan orang tua dilakukan oleh keluarga dalam bentuk menumbuhkan nilai-nilai karakter anak di lingkungan keluarga, memotivasi semangat belajar anak, mendorong budaya literasi, dan memfasilitasi kebutuhan belajar anak. Pada masa pandemi, pelibatan orang tua/keluarga menjadi semakin luas dan dibutuhkan untuk mengatasi berbagai keterbatasan. Keluarga dituntut mampu membimbing anak sesuai perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru. Dalam pelaksanaannya, hambatan yang dihadapi orang tua juga merupakan bagian dari tanggung jawab lembaga pendidikan sehingga perlu upaya untuk mengurangi keterbatasan tersebut untuk kelancaran pembelajaran siswa.

Pemberdayaan bagi orang tua di masa pandemi harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas mereka sebagai pendamping belajar anak-anak. Oleh karena itu, lembaga PAUD berupaya melakukan strategi memberdayakan orang tua untuk dapat membimbing anak-anaknya di rumah melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara daring (Tabel 1).

Tabel 1. Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan untuk Memberdayakan Peran Orang Tua

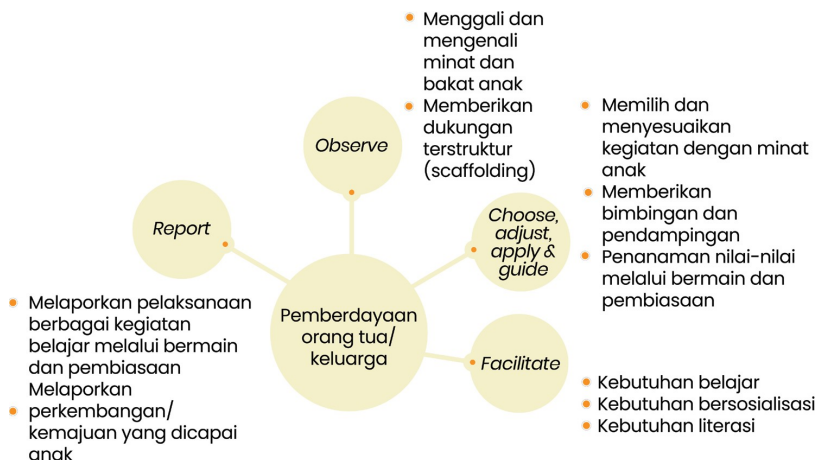
| Jenis Kegiatan | Bentuk dan Tema Kegiatan |
|----------------------------------|--|
| Perencanaan pembelajaran | <ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi rencana pelaksanaan pembelajaran pada masa transisi menuju kenormalan baru• Bimtek BDR untuk orang tua peserta didik• Sosialisasi BDR dan kegiatan sekolah selama pandemi• Strategi menyiapkan pembelajaran BDR• Sosialisasi dan edukasi RPPH dan RPPM |
| Kegiatan belajar melalui bermain | <ul style="list-style-type: none">• Bimtek berkreasi dengan <i>doodle art</i>• Seminar "Rumahku Sekolahku" |
| Tumbuh kembang anak | <ul style="list-style-type: none">• Seminar parenting menjaga kesehatan mental anak di masa pandemi• Webinar orang tua berbagi |

(Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian)

Sebagaimana tergambar pada tabel, kegiatan yang dilaksanakan bagi peningkatan kompetensi orang tua dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan yang terkait dengan perencanaan pembelajaran, kegiatan belajar melalui bermain, dan tumbuh kembang anak. Terlihat bahwa sosialisasi yang dilakukan lembaga lebih banyak pada rencana pembelajaran, sementara pembinaan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang mencakup metode pembelajaran, masih minim, demikian juga pembinaan terkait kesehatan mental (psikologi) anak. Hal ini dapat dipahami bahwa perubahan sistem pembelajaran pada masa pandemi membutuhkan adaptasi secara bertahap melalui perencanaan matang agar proses pembelajaran dengan pendampingan orang tua mencapai hasil optimal. Optimalisasi pencapaian hasil tersebut tentu memerlukan serangkaian upaya yang harus saling terkoneksi antara guru dan orang tua. Kerja sama dengan pihak orang tua dilakukan melalui komunikasi efektif berkaitan dengan kegiatan perencanaan yang telah dirancang dari lembaga ataupun kegiatan yang dilakukan bersama orang tua di rumah (Kristina, 2020). Sehingga, bimbingan kepada orang tua/keluarga dapat disesuaikan dengan pemberdayaannya dalam mendidik anak selama berlangsungnya PJJ.

Pemberdayaan orang tua/keluarga dalam pembelajaran PAUD di masa pandemi meningkatkan peran mereka yang tentu saja menjadi lebih berat bagi mereka yang tidak memiliki kompetensi dan pengalaman membimbing, namun akan menjadi lebih bermakna bagi mereka yang sudah terbiasa membimbing anaknya. Orang tua diharapkan dapat lebih mengenal dan memahami proses

pembelajaran anak, sikap, dan karakternya. Pendampingan dan keaktifan orang tua dalam menemani anak akan menentukan sejauh mana kegiatan belajar di rumah akan bermanfaat dan berdampak positif terhadap perkembangan anak. Peran orang tua yang selama ini terkesan hilang kembali “dipaksakan” secara serentak dan mendadak (Mawar dkk, 2021). Peran yang besar ini tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak ada bantuan dan dukungan dari lembaga, terutama guru, masyarakat, serta para ahli dan praktisi pendidikan.



Gambar 1 Pemberdayaan Orang Tua/Keluarga dalam Mendampingi Anak (Diolah dari Berbagai Sumber)

Terdapat empat tahapan yang dapat dilakukan untuk memberdayakan peran orang tua/keluarga untuk mendampingi anak dalam proses belajar. Pertama, *observe*, yaitu pengamatan yang dilakukan kepada anak sejak usia dini untuk meningkatkan pemahaman orang tua terhadap keterampilan, minat, kemampuan, dan fokus anak (Lorina, 2015). Melalui observasi (yang bisa juga dilakukan dengan asesmen) orang tua akan memahami dan menyadari apa yang diketahui dan dapat dilakukan oleh anak, dan mempergunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk kegiatan dan interaksi semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak (Neaum, 2010).

Selanjutnya tahapan *choose, adjust, apply, dan guide* dilakukan berdasarkan berbagai kegiatan bermain yang sudah dirancang oleh guru, di mana orang tua memilih dan menyesuaikannya dengan minat anak dan kondisi di rumah atau lingkungan rumah, kemudian mencoba mengaplikasikan

rancangan bermain tersebut, serta memberikan bimbingan kepada anak. Sementara itu, pada tahap *facilitate*, orang tua berupaya melayani anak sesuai kebutuhan belajarnya, kebutuhan bersosialisasi, dan kebutuhan untuk menguasai literasi. Kegiatan terakhir, yaitu *report*, dilakukan oleh orang tua dengan cara melaporkan pelaksanaan kegiatan bermain anak dan capaian yang dihasilkan anak kepada guru.

Dalam melaksanakan peran sebagai orang tua dalam membimbing anak, dan guru dalam membimbing orang tua mendampingi kegiatan belajar anak, keduanya terkadang mengalami permasalahan dan kendala, di antaranya karena keterbatasan pemahaman orang tua. Misalnya, dalam memberikan laporan tentang pelaksanaan berbagai kegiatan dan perkembangan/kemajuan yang dicapai anak semestinya berbasis pada tujuan memperbaiki dan meningkatkan kompetensi anak, bukan pada tujuan pencapaian nilai, sehingga laporan akan berisi kejujuran terhadap kondisi perkembangan anak dan refleksi terhadap proses pembimbingan.

Membangun Kolaborasi untuk Mengatasi Tantangan Pembelajaran

Kolaborasi dalam mendampingi anak belajar dalam prosesnya melibatkan negosiasi antara pendidik dan orang tua tentang bagaimana program dilaksanakan, termasuk pembiayaannya (Mitchell & Furness, 2015). Kolaborasi antara guru dan orang tua memiliki persamaan dan perbedaan di berbagai negara. Hal itu dipengaruhi oleh tujuan, nilai, dan budaya di masing-masing komunitas atau negara. Berikut beberapa catatan singkat tentang hal tersebut yang dapat dihimpun dalam tulisan ini.

Tabel 2 Kolaborasi Guru - Orang Tua

| Jenis Kegiatan | Bentuk dan Tema Kegiatan |
|--|--|
| Komunitas Maori dan Pasifika di New Zealand memfokuskan kolaborasi dalam hal literasi keluarga, kurikulum dan penilaian, serta masyarakat yang mengalami keterbelakangan sosial ekonomi (Mitchell & Furness, 2015) | <ul style="list-style-type: none">• Kolaborasi diawali dengan acara saling mengenal antara pendidik dan keluarga (<i>whānau</i>) peserta didik yang dilakukan melalui diskusi atau percakapan informal (minum teh bersama). Acara ini dilakukan untuk memahami asal daerah atau budaya, agama, dan kesamaan yang dimiliki antara keluarga dan pendidik• Dalam pertemuan disepakati bahwa:<ul style="list-style-type: none">- Komunikasi ketika tatap muka (<i>kanohi ki te kanohi</i>) antara orang tua dan guru jika memungkinkan menggunakan bahasa yang digunakan keluarga.- Melakukan doa di awal dan akhir setiap pertemuan sesuai kebiasaan bersama. |

| | |
|--|--|
| <p>Amerika Serikat (Wolf, 2019; Hedeem, et. al, 2011)</p> | <ul style="list-style-type: none">• Keterlibatan orang tua di sekolah dalam rangka membantu kemampuan literasi awal anak.• Keterlibatan orang tua dalam kegiatan-kegiatan di sekolah berhubungan signifikan dengan capaian membaca yang lebih baik di TK dan menurunkan tingkat tinggal kelas pada usia 14 tahun.• Diadakan program <i>Home Instruction Program for Preschool Youngster (HIPPY)</i>, yang merupakan program visitasi bagi orang tua anak usia 4 tahun yang berpenghasilan rendah yang mendukung transisi ke TK. Program ini untuk meningkatkan prestasi akademis siswa di sekolah dasar, dan meningkatkan adaptasi sosial anak.• Pada sekolah bagi anak disabilitas di Tennessee orang tua menginginkan komunikasi yang lebih baik, lebih jelas, dan teratur.• Komunitas orang tua mengembangkan target yang berbeda-beda yang semuanya mengacu pada kepentingan anak. |
| <p>Penelitian pada beberapa negara (Varkey Foundation, 2020)</p> | <ul style="list-style-type: none">• Orang tua merupakan penghubung yang 'krusial' antara anak dan sekolah.• Peran orang tua lebih signifikan dalam pembelajaran dan perkembangan anak di masa pandemi.• Keberhasilan orang tua dalam membimbing anak ditemukan pada orang tua sebagai komunikator yang baik, pengasuh yang aktif, memastikan bahwa anaknya dapat berprestasi dalam pembelajaran, waspada terhadap dampak negatif dari belajar <i>online</i>, dan orang tua diharapkan berperan sebagai guru yang ramah di rumah. |

Keterlibatan orang tua atau keluarga dalam pembelajaran melalui bermain menjadi kebutuhan baik dalam kondisi sebelum pandemi, dan semakin dibutuhkan ketika pandemi. Peran orang tua memiliki dampak positif dalam perkembangan individu anak, baik dari sisi fisik, emosional, maupun kognisinya. Pada komunitas Maori di Selandia Baru misalnya, dapat dilihat bahwa kolaborasi orang tua sangat penting dalam membangun kesalingpahaman antara pendidik dan orang tua (keluarga), dan sangat penting bagi pendidik untuk memahami budaya dan agama keluarga peserta didik agar dapat memberikan informasi, pemahaman, dan konsultasi yang tepat kepada keluarga terkait pembelajaran anak-anak mereka. Sementara penelitian tentang keterlibatan orang tua dan perannya di sekolah di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya menunjukkan dampak yang positif terhadap kemajuan belajar dan perkembangan anak-anaknya.

Kolaborasi antara guru dan orang tua merupakan hubungan yang tidak hanya satu arah antara guru dan orang tua, tetapi merupakan hubungan timbal balik, di mana guru memberikan laporan tentang prestasi dan perilaku anak di sekolah, dan laporan orang tua kepada guru yang mencakup elemen-elemen

pelengkap perkembangan anak di rumah dan lingkungannya (Loughran, 2008). Demikian juga dinyatakan bahwa pendekatan *partnership* antara orang tua dan guru memperlihatkan fakta adanya peningkatan hal-hal positif, seperti perilaku dan nilai anak. Anak-anak juga menunjukkan keterampilan sosial yang lebih baik, permasalahan perilaku lebih sedikit, dan kemampuan beradaptasi yang lebih baik. *Partnership* ini tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak, namun juga orang tua dan guru, di mana komunikasi di antara mereka menjadi lebih efektif, membangun hubungan yang lebih kuat antara satu dengan yang lain, dan membangun keterampilan dalam mendukung peningkatan perilaku dan belajar anak-anak (Sheridan, 2016).

Namun, kolaborasi atau keterlibatan orang tua yang bersifat timbal balik ini ada kalanya belum seideal seperti yang diharapkan. Perlu adanya keterbukaan pihak sekolah maupun orang tua untuk saling memberikan masukan dan dukungan bagi perbaikan layanan pendidikan dan pendampingan perkembangan anak secara menyeluruh. Kolaborasi antara guru dan orang tua terjadi secara bertahap, dan bukan berupa kejadian tunggal (Amendt dalam Hedeem et.al., 2011). Beberapa tahapan dapat mendorong proses kolaborasi yang lebih optimal seperti digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2 Proses kolaborasi guru - orang tua
(sumber: Amendt dalam Hedeem et.al., 2011)

Tahap *informing* merupakan arah komunikasi satu arah dari pihak sekolah kepada orang tua. Kemudian tahap *involving* merupakan undangan kepada orang tua untuk memberikan dukungan terhadap perencanaan agenda yang sudah ditentukan oleh sekolah, sedangkan tahap *engaging* adalah keterlibatan staf, siswa, orang tua, dan anggota masyarakat dalam membuat agenda bersama, membuat keputusan, dan melakukan tindakan. Pada tahap keterlibatan (*involvement*), tingkat kepercayaan antarpihak masih rendah, sedangkan pada tahap *engagement* telah berkembang tingkat kepercayaan yang lebih baik. Setiap pihak memiliki *leadership* di dalam kemitraan ini di bawah satu payung visi yang sama. Peran kepala sekolah dan guru dalam membangun kepercayaan dan dalam kemitraan (kolaborasi dengan orang tua) menjadi keniscayaan untuk meraih keberhasilan. Selain itu, pemahaman bahwa masing-masing memiliki peran yang sangat berarti bagi yang lain dan bagi

keberhasilan program memunculkan kesalingtergantungan yang positif.

Keterlibatan siswa dalam proses perencanaan pembelajaran menjadi tak kalah penting. Stetson et al. (2012) menyatakan bahwa kemitraan tersebut seharusnya melibatkan partisipasi aktif anak. Peran anak dalam hal ini lebih pada *'motivational sense'* (Weir, 2014). Keefektifan kemitraan antara guru-orang tua juga sangat bergantung pada pemahaman guru terhadap kondisi orang tua atau keluarga yang dinamis dan berbeda-beda. Pada orang tua/keluarga yang tidak dapat membimbing anak mereka, maka dibutuhkan keterlibatan komunitas (masyarakat) terdekat. Keterlibatan ini akan lebih terorganisasi jika dilembagakan dalam suatu organisasi yang terdiri dari mereka yang berkompeten untuk membimbing anak-anak usia dini secara individual atau kelompok.

Kolaborasi untuk Mengoptimalkan Peran Orang Tua/Keluarga

Pembelajaran selama pandemi, khususnya ketika dilaksanakan dengan PJJ, membutuhkan peran besar orang tua/keluarga agar pelaksanaannya optimal. Pemberian informasi dan pemahaman dari guru kepada orang tua/keluarga membutuhkan komunikasi dua arah yang efektif, tidak hanya satu arah dari guru kepada orang tua/keluarga saja, namun orang tua/keluarga juga memiliki hak untuk memberikan masukan untuk memperkaya dan memberagamkan kegiatan anak selama belajar. Oleh sebab itu, kolaborasi yang dibangun perlu dilakukan secara proaktif.



Gambar 3 Skema Kolaborasi Orang Tua/Keluarga - Guru dalam Menghadapi Tantangan Pembelajaran PAUD di Masa Pandemi

Pemberdayaan orang tua/keluarga pada pembelajaran PAUD di masa pandemi seperti dihadirkan pada Gambar 3, memunculkan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kapasitas orang tua/keluarga yang mencakup penguasaan dan pemahaman terhadap materi dan aplikasinya, serta kapasitas dalam membimbing yang mencakup penguasaan terhadap psikologi dan perkembangan anak. Kedua, kendala waktu untuk membimbing karena kesibukan bekerja, kondisi anak yang tidak mau melakukan kegiatan, tidak fokus, rewel, dan sebagainya. Ketiga, keterbatasan sinyal dan perangkat TIK di rumah.

Untuk mengatasi hal itu, beberapa solusi berbasis kolaborasi guru dan orang tua/keluarga dapat dilakukan, di antaranya:

1. Peningkatan komunikasi antara orang tua/keluarga – guru yang bersifat dua arah dan proaktif.
2. Perlu dilakukan analisis dan pemecahan masalah dan merumuskan beberapa opsi strategi untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Upaya ini berkaitan dengan pembagian tugas dan peran sesuai dengan kapasitas dan ketersediaan waktu yang dimiliki.
3. Pelibatan masyarakat, lembaga, mitra PAUD dan praktisi ahli dalam hal:
 - a. Peningkatan kapasitas guru dan orang tua/keluarga dalam menggali, mengenali minat dan bakat anak; memberikan dukungan terstruktur; memilih dan menyelesaikan kegiatan dengan minat dan kondisi anak; menanamkan nilai-nilai melalui kegiatan bermain dan pembiasaan; membimbing, dan mendampingi anak, termasuk di dalamnya memberikan motivasi, *feedback*, refleksi, dan evaluasi
 - b. Penyediaan kebutuhan belajar anak, yang mencakup media belajar, kebutuhan bersosialisasi, dan kebutuhan literasi. Kebutuhan akan perangkat dan kuota internet dapat dilakukan melalui program bantuan perangkat IT dengan menggandeng komite sekolah, masyarakat, perusahaan, dan lembaga lain. Salah satu contoh misalnya, penyediaan gawai oleh Pemda DKI melalui program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) kepada 12.649 pendidik dan 171.998 peserta didik yang tidak memiliki

gawai (Tempo, 2020). Selain itu, kebutuhan bersosialisasi dapat difasilitasi oleh orang tua melalui komunikasi dan interaksi dengan teman seusianya di lingkungan rumah dan tetangga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Aktivitas belajar dan bermain juga dapat diarahkan pada kegiatan yang berkaitan dengan literasi (baca, tulis, dan sejenisnya).

Daftar Pustaka

- Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Kemdikbud. 2016. Petunjuk Teknis Kemitraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Keluarga dan Masyarakat. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Kemdikbud
- Dong, C., Cao, S., Li, H. (2020). Young Children's Online Learning During COVID-19 Pandemic: Chinese Parents' Beliefs and Attitudes. *Children and Youth Service Review*, Vol. 118. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105440>
- Hedeen, T., Moses, P., dan Peter, M. (2011). Encouraging Meaningful Parent/Educator Collaboration: A Review of Recent Literature. CADRE. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED536983.pdf>
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.
- Khadijah & Gusman. Juni, 2020. Pola Kerja Sama Guru dan Orangtua Mengelola Bermain AUD Selama Masa Pandemi COVID-19. *Kumara Cendekia* 8 (2) 154 - 171
- Maryani, Penilaian dan Pelaporan Perkembangan Anak Saat Pembelajaran di Rumah di Masa Pandemi Covid-19. Murhum J. Pendidik. *Anak Usia Dini*, vol. 1, no. 1, pp. 41–52, 2020
- Lorina(2015).ObservationsinChildcare.Sumber:<https://aussiechildcarenetwork.com.au/articles/childcare-programming/observations-in-childcare>
- Loughran, S. B.(2008). The Importance of Teacher/Parent Partnerships: Preparing Pre-Service and In-Service Teachers. *Journal of College Teaching & Learning*, Vol. 5 (8), 35-38
- Mawar, Salamah, D.N, Fauziah, A.L., Sosialisasi Peranan Orang Tua dalam Pembelajaran Daring Bagi Anak Usia Dini Di Masa Pandemi Covid 19. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat. LPPM UMJ 2020.
- Mitchell, L.&Furness, J. (2015). Importance of Collaboration among Parents, Early Years Professionals and Communities: Discussion Paper for Goodstart.

- The University of Waikato: Wilf Malcolm Institute of Educational Research. <https://www.goodstart.org.au/getmedia/85cf7a56-07fe-45e3-9707-e6487fd6cdf1/Importance-of-collaboration-among-parents,-early-years-professionals-and-communities.pdf.aspx>
- Neaum, S. (2010). *Child Development for Early Childhood Studies*. Exeter: Learning Matters Ltd. <http://digilib.stiem.ac.id:8080/jspui/bitstream/123456789/263/1/Sally%20Neaum-Child%20Development%20for%20Early%20Childhood%20Studies-Learning%20Matters%20%282010%29.pdf>
- Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan. <http://repositori.kemdikbud.go.id/4814/1/Buku%20Juknis%20PAUD.pdf>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378).
- Primasari, H.P. 2020. Tantangan dalam Pembelajaran PAUD pada Masa Pandemi. <http://news.koranbernas.id/berita/detail/tantangan-dalam-pembelajaran-paud-pada-masa-pandemi>. Diakses 29 Juli 2020.
- Pusat Penelitian Kebijakan (2020). *Adaptasi Pembelajaran pada PAUD di Masa Pandemi*. Laporan Kegiatan.
- Sekretariat jenderal Kemdikbud. 2020. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbud nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Jakarta: Setjen Kemdikbud.
- Sheridan, S. M. (2016). *Establishing Healthy Parent-Teacher Relationship for Early Learning Success*. Nebraska: Institute of Education Sciences. <https://earlylearningnetwork.unl.edu/2018/08/29/parent-teacher-relationships/>
- Stetson, R., Stetson, E., Sinclair, B., & Nix, K. (2012, Spring). Home visits: Teacher reflections about relationships, student behaviour, and achievement. *Issues in Teacher Education*, 21(1).
- Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID.
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar

- dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/05/se-sesjen-pedoman-penyelenggaraan-belajar-dari-rumah-dalam-masa-darurat-penyebaran-covid19>. (Diunduh tanggal 20 Agustus 2020).
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tahun 2020 tentang Penyesuaian Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.
- Tempo (2020). Pemprov DKI Luncurkan KSBB Pendidikan: Bantuan Gawai bagi Pendidik dan Siswa. <https://metro.tempo.co/read/1409163/pemprov-dki-luncurkan-ksbb-pendidikan-bantuan-gawai-bagi-pendidik-dan-siswa>
- Timmons, K., Cooper, A., Bozek, E., & Braund, H. (2021). The Impact of Covid-19 on Early Childhood Education: Capturing the Unique Challenges Associated with Remote Teaching and Learning in K-2. *Early Childhood Education Journal* 49, 887-901. <https://doi.org/10.1007/s10643-021-01207-z>
- UNESCO (2020). New Drive to Protect Early Childhood Education in the Context of the COVID-19 Crisis. <https://en.unesco.org/news/new-drive-protect-early-childhood-education-context-covid-19-crisis>
- Varkey Foundation (2020). Parent-Teacher Partnerships: The Need for Renewed Collaboration in the Time of Covid-19. <https://www.varkeyfoundation.org/what-we-do/research/parent-teacher-partnerships>
- Weir, K. (2014). Partnerships in Early Childhood Education. *Practitioner Researcher*, Vol. 3 (3), 12-17. <https://www.hekupu.ac.nz/article/partnerships-early-childhood-education>
- Wolf, S. (2019). "Me, I don't really discuss anything with them": Parent and Teacher Perception of Early Childhood Education and Parent-teacher Relationship in Ghana. *International Journal of Educational Research*. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/117571576262569820-0090022019/original/ManuscriptAccepted12102019.pdf>



**Merawat Semangat Belajar
Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi**
Praktik Pembelajaran
di SD Mutiara Bunda Bandung

Merawat Semangat Belajar Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi Praktik Pembelajaran di SD Mutiara Bunda Bandung

~•~

Etty Sisdiana, Relisa

Tantangan Pembelajaran di Masa Pandemi

Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) memiliki kesempatan mengakses layanan pendidikan yang makin luas, yakni melalui layanan pendidikan secara khusus maupun inklusi (UU Nomor 8 Tahun 2016). Peserta didik yang memiliki keterbatasan fisik, emosional, mental, dan sosial dapat bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya melakukan aktivitas di sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya (Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009).

Penyelenggaraan pendidikan inklusif diharapkan dapat memperkecil hambatan PDPD dalam mendapatkan layanan pendidikan. Hal tersebut karena penyelenggaraan pendidikan inklusi dilakukan di sekolah- sekolah reguler yang bisa jadi dekat dengan tempat tinggal PDPD. Pada 2019, terdapat 29.317 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif (SPPI) yang artinya terdapat sekitar 57 SPPI di setiap kabupaten/kota (Paparan Dit. PMPK tahun 2020). Di sisi lain, keberadaan sekolah luar biasa (SLB) belum dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Pada 2019, terdapat 2.270 SLB (Kemendikbud, 2020a). Jumlah SLB ini dianggap belum menjawab kebutuhan PDPD terhadap layanan pendidikan karena terdapat 58 kabupaten/kota di Indonesia yang belum memiliki SLB negeri (Permata, 2019). Dengan kondisi ini, dapat dimaknai bahwa PDPD menjadi lebih mudah menjangkau akses layanan pendidikan melalui SPPI daripada SLB.

Adanya penyebaran virus COVID-19 ke semua negara termasuk Indonesia, membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan pembatasan kegiatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Indonesia sejak awal memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus tersebut. Di bidang pendidikan, kebijakan pembatasan sosial diwujudkan melalui pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sistem ini memberikan tantangan belajar tersendiri, yaitu adanya *culture shock* terhadap proses belajar secara menyeluruh. Berbagai kendala muncul selama proses pembelajaran jarak jauh, seperti guru-guru mengalami kesulitan dalam mengelola PJJ dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum (Kemendikbud, 2020). Selain itu, dari sisi orang tua, adanya keterbatasan dalam pendampingan anak belajar di rumah dikarenakan memiliki tanggung jawab lain, seperti bekerja, mengurus rumah tangga, dan lain sebagainya. Hal terpenting lainnya adalah kesulitan siswa untuk berkonsentrasi belajar di rumah dan banyaknya penugasan tambahan dari guru. Perubahan sistem pembelajaran pada masa pandemi COVID juga sangat berpengaruh pada peranan orang tua dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus. Salah satu tantangannya adalah kurangnya waktu yang dimiliki oleh orang tua dalam pendampingan dan membimbing anak ketika belajar (Arsani, 2022).

SD Mutiara Bunda Bandung merupakan salah satu satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi PDPD secara inklusif sejak awal beroperasinya sekolah ini, yakni tahun 2001. Pada 2020, jumlah PDPD di sekolah ini sebanyak 59 anak yang tersebar di 21 rombongan belajar, atau 2-3 PDPD di setiap rombongan belajar. Layanan pendidikan inklusi di sekolah ini semula merupakan “ketidaksengajaan”. Kepala Sekolah menyatakan, pada awalnya sekolah membuka diri terhadap keberagaman siswa, termasuk di antaranya PDPD.

Setelah diterbitkannya Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 dan adanya masukan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi yang memberi perhatian pada pendidikan inklusif, pihak sekolah baru menyadari bahwa sekolah mereka sebetulnya telah memberikan layanan pendidikan inklusi kepada PDPD. Di sekolah, seluruh aktivitas pembelajaran tidak semata-mata berpusat pada hasil semata, melainkan menekankan pada proses yang mencakup usaha yang dilakukan anak, pemahaman anak tentang suatu konsep dan keberanian anak mengemukakan alasan melakukan sesuatu.

Sejak Maret 2020, pandemi COVID-19 yang penyebarannya luar biasa, berdampak sangat serius pada aktivitas pembelajaran di seluruh satuan pendidikan, salah satunya di SD Mutiara Bunda. Dalam kondisi demikian, sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud (2020), sekolah mengalihkan pelaksanaan pembelajaran yang semula berlangsung secara tatap muka (PTM) menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau juga dikenal dengan belajar dari rumah (BDR). Pada aktivitas BDR, PDPD yang memiliki keterbatasan ini tidak dapat belajar secara langsung dengan guru, melainkan berhadapan dengan perangkat teknologi informasi (TI) seperti telepon pintar (*smartphone*) atau komputer. Bagi sebagian PDPD, telepon genggam maupun komputer dianggap bukan sebagai media untuk belajar. Sebagaimana peserta didik pada umumnya, telepon pintar atau komputer merupakan sarana untuk bermain atau mencari informasi.

Dengan kondisi pembelajaran yang demikian, dan dengan terbitnya SKB 4 Menteri (2020) yang menganjurkan PTM terbatas dengan beberapa persyaratan, memungkinkan SD Mutiara Bunda melakukan strategi pembelajaran dengan pendekatan gabungan antara BDR dan PTM. SD Mutiara Bunda melakukan berbagai strategi pembelajaran secara bersamaan dengan tujuan agar pembelajaran dapat memberikan hasil belajar yang diharapkan, sekaligus menghindari PDPD dari penularan COVID-19. Strategi pembelajaran yang ditempuh di SD Mutiara Bunda ini diupayakan memperhatikan karakteristik masing-masing PDPD dengan tujuan untuk memperkecil atau menghilangkan berbagai kendala yang dihadapi selama pembelajaran di masa pandemi COVID-19.

Berbagai strategi yang telah dilakukan tersebut, memberi dampak positif bagi PDPD. Misalnya, PDPD memahami bahwa belajar di masa pandemi harus dilakukan dari rumah atau tatap muka yang “dikondisikan” agar semuanya dapat terhindar dari penularan COVID-19, sehingga mereka termotivasi kembali untuk mengikuti pembelajaran. Melalui proses pembelajaran yang dilakukan, ternyata seluruh PDPD dapat mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Tulisan ini merupakan kajian praktik baik yang telah dilakukan oleh SD Mutiara Bunda dalam memberikan layanan pembelajaran di masa pandemi dalam konteks sekolah inklusi. Sekolah ini memiliki pandangan bahwa setiap anak unik dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga sekolah berupaya memunculkan potensi anak dan meminimalkan kekurangannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, sekolah berupaya melakukan berbagai penyesuaian,

mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penilaian hasil pembelajaran. Seluruh informasi untuk tulisan ini diperoleh melalui wawancara, pengisian angket, dan DKT dengan seluruh komponen sekolah, mencakup kepala sekolah, guru, dan orang tua. Selain itu, data sekunder dan informasi lainnya tentang sekolah ini diperoleh melalui dokumen pendukung yang didapat dari sekolah. Pengumpulan informasi dilakukan pada Juli - November 2020 yang seluruhnya dilakukan secara virtual. Beberapa informasi tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya didapatkan melalui *website* SD Mutiara Bunda.

Profil PDPD dan Guru di SD Mutiara Bunda

Sebagaimana diketahui bahwa hakikat penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah keberadaan siswa berkebutuhan khusus bersama-sama dengan siswa lainnya dalam melakukan seluruh aktivitas di sekolah. Sesuai ketentuan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Bandung (2018), SD Mutiara Bunda berupaya menerima PDPD secara proposional dalam hal jumlahnya, yakni maksimal tiga anak di setiap rombongan belajar. Berdasarkan jawaban kepala sekolah pada angket, diketahui bahwa terdapat 482 siswa reguler dan 59 PDPD di sekolah yang didistribusikan ke dalam 21 rombongan belajar. Dengan demikian, pada setiap rombongan belajar terdapat 22-23 orang siswa reguler dan 2-3 orang PDPD. Dengan persentase siswa di masing-masing rombongan belajar yang demikian, diharapkan PDPD mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya selama mengikuti pembelajaran.

Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dikatakan bahwa peserta didik yang memiliki kelainan berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing. Mengacu pada PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, peserta didik yang memiliki kelainan terdiri atas: tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya, serta memiliki kelainan lain.

Berdasarkan jawaban Kepala SD Mutiara Bunda pada angket, diketahui bahwa belum semua ragam disabilitas peserta didik terdaftar di sekolah. Secara keseluruhan, karakteristik PDPD di sekolah ini disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 1 Jumlah PDPD di Sekolah

| No | Jenis Disabilitas | Jumlah di Setiap Kelas | | | | | | Jumlah |
|---------------|--------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | I | II | III | IV | V | VI | |
| 1 | ADHD | 1 | | | | 1 | | 2 |
| 2 | Kesulitan Belajar | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 32 |
| 3 | Autis | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| 4 | Down syndrome | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 |
| 5 | Tunagrahita ringan | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | Tunadaksa sedang | | | | 1 | | | 1 |
| Jumlah | | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 6 | 59 |

Sumber: Angket Kepala Sekolah, diolah

ADHD (*Attention Deficit Hiperactivity Disorder*) atau hiperaktif adalah anak yang mengalami defisiensi dalam perhatian, tidak dapat menerima impuls-impuls yang baik, dan suka melakukan gerakan-gerakan yang tidak terkontrol. Anak yang hiperaktif sulit berkonsentrasi. Menurut Barkley dkk. (dalam Narti, 2017), anak-anak dengan ADHD biasanya mengalami kesulitan belajar dalam Matematika, membaca, dan mengeja. Anak dengan kesulitan belajar adalah anak yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, berbicara, dan menulis (disgrafia) yang dapat memengaruhi kemampuan berpikir, membaca (disleksia), berhitung (diskalkulia), atau berbicara (Suryaningsih, 2011). Anak autis adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan neurobiologis yang kompleks/berat dalam kehidupannya yang meliputi gangguan pada aspek perilaku, interaksi sosial, komunikasi dan bahasa yang ketiganya saling terkait atau *triad impairmental* (Kemendikbud, 2017a). Anak autis lebih mudah merespons stimulasi visual dan kesulitan dalam memahami instruksi guru yang disampaikan secara verbal. Anak tunagrahita adalah anak yang mengalami hambatan intelektual dan kesulitan dalam penyesuaian perilaku. Anak tunagrahita memiliki kesulitan dalam hal belajar, penyesuaian diri, berbicara dan berbahasa, serta kepribadian (Kemendikbud, 2017b). Anak tunagrahita dikelompokkan ke dalam tunagrahita ringan dan tunagrahita sedang-berat atau dikenal dengan *down syndrome*. Peserta didik tunadaksa adalah peserta didik yang memiliki ciri antara lain: anggota gerak tubuh kaku/lumpuh, kesulitan dalam gerakan seperti tidak sempurna, tidak lentur atau tidak terkontrol, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap/

tidak sempurna/lebih kecil dari biasanya, terdapat ketidaksempurnaan pada alat gerak, jari tangan kaku dan tidak dapat mengenggam, kesulitan pada saat berdiri/ berjalan/duduk dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal, dan tidak dapat tenang (Kemendikbud, 2017c).

Pada Tabel 1 terlihat bahwa siswa dengan kesulitan belajar dan siswa autisme ada di setiap tingkat kelas, dan keduanya merupakan PDPD dengan jumlah terbanyak. Sesuai dengan sifatnya, layanan pembelajaran di SD Mutiara Bunda telah diupayakan berpihak kepada PDPD. Hal ini sesuai dengan moto sekolah ini, yaitu setiap anak adalah unik, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada Tabel 1 juga terlihat bahwa masih ada jenis disabilitas lain sesuai dengan PP No. 17 Tahun 2010 yang tidak ada di sekolah ini. Siswa dengan gangguan penglihatan dan siswa dengan gangguan pendengaran sampai saat ini belum bisa diterima oleh sekolah. Alasannya, di sekolah ini belum dapat menyediakan guru maupun sarana pembelajaran yang dibutuhkan bagi siswa dengan dua jenis hambatan tersebut. Kepala sekolah khawatir tidak dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa tunanetra maupun tunarungu.

Selain berdasarkan jenis dan karakteristik disabilitas, seluruh PDPD di sekolah juga akan mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kompetensi akademis atau intelektual masing-masing. Penetapan kompetensi akademis/intelektual setiap PDPD didapatkan sekolah berdasarkan informasi saat penerimaan peserta didik baru. Adapun informasi dimaksud mencakup: hasil asesmen oleh orthopedagog dan psikolog, data dan informasi dari orang tua tentang sejarah terapi anaknya, serta psikotes. Hasil ini selanjutnya dibahas oleh tim guru dan orang tua PDPD untuk menetapkan layanan pembelajaran bagi PDPD. Berdasarkan kajian dokumen, diperoleh informasi bahwa berdasarkan kompetensi akademisnya, PDPD dibagi menjadi lima kelompok seperti dimuat pada tabel berikut.

Tabel 2 Kompetensi Akademis/Intelektual PDPD

| No | Kompetensi Akademis/Intelektual | Jumlah PDPD Sesuai Kelas | | | | | | Total |
|----|---|--------------------------|----|-----|----|---|----|-------|
| | | I | II | III | IV | V | VI | |
| 1 | Dapat mengikuti pembelajaran dengan materi yang dimodifikasi | 4 | 5 | 3 | | | | 12 |
| 2 | Dapat mengikuti pembelajaran materi yang dimodifikasi dan disubsitusi | 4 | 4 | 2 | | | | 10 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 3 | Dapat mengikuti pembelajaran dengan program pembelajaran individual akademik maupun kompensatoris | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | Mendapatkan program pembelajaran individu disesuaikan kemampuan anak | | | | 10 | 9 | 4 | 23 |
| 5 | Perlu reviu ketika mengikuti pembelajaran | | | | | | 1 | 1 |
| Jumlah | | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 6 | 59 |

Sumber: Dokumen SD Mutiara Bunda, diolah

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa terdapat satu saja yang kompetensi akademisnya dianggap setara dengan siswa reguler, yaitu siswa yang dikatakan memerlukan reviu ketika pembelajaran. PDPD yang demikian, menurut kepala sekolah, secara akademik dapat mengikuti pelajaran sebagaimana siswa lainnya di kelas, namun mereka memiliki hambatan dalam aspek sosial, emosi, dan perilaku yang memengaruhi konsentrasi dan kemampuan menangkap materi secara utuh. Dalam hal ini, sebanyak 58 atau hampir seluruh PDPD di sekolah, memiliki kemampuan akademik/intelektual di bawah rata-rata siswa reguler yang ada di sekolah. Bahkan pada Tabel 2 diperlihatkan, berdasarkan kompetensi akademisnya, PDPD yang memerlukan program pembelajaran individu adalah yang terbanyak di antara semuanya.

Dari sisi pendidik atau guru, penyelenggaraan pendidikan inklusif memiliki tantangan tersendiri terutama dalam hal pengaturan guru-guru agar dapat berperan dalam pemberian layanan kepada peserta didik reguler maupun PDPD. Sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, SD Mutiara Bunda memiliki tenaga pengajar yang relatif cukup memadai. Secara keseluruhan, di sekolah tersedia 107 staf dan guru, serta 22 orang guru Layanan Khusus. Di sekolah juga tersedia 1 orang koordinator inklusi, 1 orang asisten koordinator inklusi, dan 1 orang koordinator unit stimulasi anak. Menurut kepala sekolah, secara proporsional jumlah guru di sekolah cukup untuk memberikan layanan pembelajaran baik kepada siswa pada umumnya maupun kepada PDPD pada 21 rombongan belajar. Menurut kepala sekolah, pada masa pandemi COVID-19 ini, jumlah guru masih proporsional dengan beberapa pengaturan penugasan kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Dengan demikian, pihak sekolah tetap dapat menjalankan tugas memberikan layanan kepada PDPD sesuai kondisi masing-masing.

Dari sisi pendidik atau guru, penyelenggaraan pendidikan inklusif memiliki tantangan tersendiri terutama dalam hal pengaturan guru- guru agar dapat berperan dalam pemberian layanan kepada peserta didik reguler maupun PDPD. Sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, SD Mutiara Bunda memiliki tenaga pengajar yang relatif cukup memadai. Secara keseluruhan, di sekolah tersedia 107 staf dan guru, serta 22 orang guru Layanan Khusus. Di sekolah juga tersedia 1 orang koordinator inklusi, 1 orang asisten koordinator inklusi, dan 1 orang koordinator unit stimulasi anak. Menurut kepala sekolah, secara proporsional jumlah guru di sekolah cukup untuk memberikan layanan pembelajaran baik kepada siswa pada umumnya maupun kepada PDPD pada 21 rombongan belajar. Menurut kepala sekolah, pada masa pandemi COVID-19 ini, jumlah guru masih proporsional dengan beberapa pengaturan penugasan kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Dengan demikian, pihak sekolah tetap dapat menjalankan tugas memberikan layanan kepada PDPD sesuai kondisi masing-masing.

Keberadaan guru-guru tersebut, oleh pihak sekolah diatur agar seluruhnya dapat berperan secara optimal. Di masa pandemi COVID-19, peran seluruh guru dan tenaga kependidikan di sekolah semakin ditingkatkan meskipun sebagian besar penyelenggaraan layanan pendidikan berlangsung dari rumah. Dalam hal pembagian tugas, Kepala SD Mutiara Bunda mengatur guru-guru di sekolah dengan tugas-tugas sebagai berikut.

- a. Wali kelas, yaitu guru yang bertanggung jawab membina peserta didik di satu kelas, di mana di dalamnya terdapat siswa reguler maupun PDPD. Selain mengampu mata pelajaran tertentu, dalam menjalankan perannya sebagai wali kelas, mereka juga menjadi gerbang komunikasi dengan orang tua.
- b. Guru kelas adalah guru yang selalu berada di kelas mendampingi wali kelas dalam memberikan layanan pembelajaran kepada peserta didik reguler maupun PDPD. Tugas utama guru kelas, selain mengampu pelajaran tertentu adalah membantu administrasi kelas terkait dengan presensi dan data pengumpulan tugas. Di masa PJJ, tugas guru kelas yang paling utama adalah menjadi *host* dalam kelas *online*. Guru kelas juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyusun panduan belajar yang dibuat secara berkala per dua pekan selama PJJ.

- c. *Supporting Teacher* (ST) adalah guru yang mendampingi anak-anak yang mendapat program layanan khusus (PDPD) di dalam kelas. Tugas utama ST adalah mendampingi PDPD, mengulang kembali materi kepada PDPD, serta memberikan pembelajaran secara khusus di waktu-waktu tertentu kepada PDPD. Selain itu, ST juga bertanggung jawab melakukan asesmen dan membuat tindak lanjut dari hasil asesmen tersebut yang diketahui dan disetujui oleh wali kelas dan tim layanan khusus.
- d. Guru Unit Stimulasi Anak (Guru USA), adalah guru yang akan memberikan layanan khusus pada Unit Stimulasi Anak (USA). Tugas utamanya adalah memberikan stimulasi sesuai dengan kelas stimulasinya.

Guru layanan khusus di sekolah ini terdiri atas guru pendidikan khusus dan guru pembimbing khusus. Dari kedua jenis guru layanan khusus ini, hanya guru pendidikan khusus yang diharuskan berlatar belakang pendidikan yang sesuai.

Kami memiliki GPK atau Guru Pendidikan Khusus dan GPK atau Guru Pembimbing Khusus. Guru Pendidikan Khusus memiliki latar belakang pendidikan luar biasa. Sedangkan Guru Pembimbing Khusus latar belakang pendidikannya dari mana saja, karena di sekolah sering dilakukan pelatihan tentang pendidikan inklusi, PDPD, dan kurikulum adaptif. Guru Pembimbing Khusus juga akan dipandu oleh Guru Pendidikan Khusus apabila menjumpai permasalahan saat menjalankan tugasnya.

(Kepala SD Mutiara Bunda Bandung)

Guru-guru yang mengajar di sekolah ini tidak seluruhnya berijazah bidang pendidikan. Beberapa guru di antaranya berlatar belakang pendidikan keilmuan tertentu, misalnya MIPA, Ilmu Sosial, dan jurusan lainnya. Pihak sekolah masih belum mempermasalahkan tentang latar belakang pendidikan dalam konteks pendidikan inklusi karena guru-guru telah memenuhi persyaratannya, yaitu tertarik dan memiliki motivasi menjadi guru dan mengajar anak-anak. Dalam hal ketersediaan guru di sekolah, terlihat bahwa pada dasarnya SD Mutiara Bunda tidak menghadapi permasalahan berarti pada aspek jumlah guru dan peran masing-masing guru. Dengan demikian, layanan pembelajaran di SD Mutiara Bunda idealnya dapat berpihak kepada PDPD.

Persiapan Pembelajaran yang Berpihak pada PDPD

Peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020 menjadi alasan pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai upaya untuk pencegahan. Merespons kebijakan tersebut, Kemendikbud dalam upaya mencegah penularan COVID-19 pada kluster sekolah, kemudian menetapkan agar aktivitas pembelajaran dilakukan dari rumah (SE Sesjen Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020). Pada awal pandemi COVID-19, sekitar Maret 2020, SD Mutiara Bunda sebagai sekolah inklusi menetapkan kebijakan untuk melakukan pembelajaran dari rumah atau BDR. Salah satu alasan pihak sekolah melakukan BDR adalah PDPD sangat rentan tertular COVID-19. Berkenaan dengan kebijakan pihak sekolah ini, sebagian besar orang tua PDPD memberi tanggapan positif karena mereka mengutamakan kesehatan PDPD. Salah satu orang tua PDPD di sekolah ini mengungkapkan, pada masa pandemi COVID-19 ini anaknya termasuk kelompok yang rentan secara kesehatan, sehingga harus dapat beradaptasi dengan kondisi yang ada dengan melakukan perubahan aktivitas dan pola baru, termasuk dalam melakukan aktivitas pembelajaran.

Di sisi lain, praktik BDR yang tidak pernah dilakukan sebelum terjadinya pandemi COVID-19, memunculkan berbagai permasalahan bagi PDPD. Pimpinan sekolah mengungkapkan bahwa kesulitan yang tampak saat awal BDR adalah respons PDPD yang kaget karena pembelajaran tidak dilakukan di ruang kelas dengan didampingi oleh guru secara langsung, melainkan belajar di rumah dengan bimbingan dari orang tua. Salah seorang guru di SD Mutiara Bunda menyampaikan bahwa pada saat awal mula BDR, PDPD terlihat belum dapat menyesuaikan diri untuk belajar di rumah bersama orang tua, karena bagi mereka rumah adalah zona nyaman dan perspektif yang masih terbentuk adalah belajar biasanya dilakukan di sekolah bersama guru. Kendala lainnya, di sekolah terdapat beberapa siswa autis yang sangat memerlukan pengembangan fokus melalui tatap muka secara langsung dengan guru, sehingga hal ini tidak dapat terlayani dengan baik.

Kendala ketika BDR juga dialami oleh siswa tunagrahita, yakni tidak terpenuhinya kebutuhannya dalam bentuk sentuhan langsung dari guru saat pembelajaran berlangsung. Di sisi lain, guru/sekolah masih mencari media dan metode yang tepat untuk dapat memfasilitasi PDPD agar dapat memahami

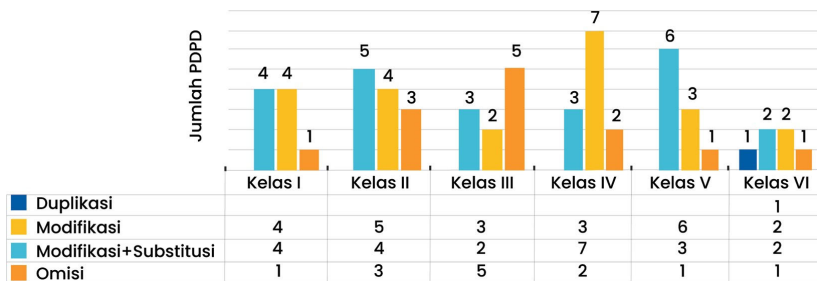
materi dan tetap memiliki motivasi untuk belajar meskipun dilakukan melalui BDR. Dengan kondisi yang demikian, di awal pembelajaran di masa pandemi COVID-19, hampir seluruh PDPD tidak bersemangat untuk mengikuti BDR. PDPD enggan mengikuti aktivitas fisik yang diminta oleh orang tuanya berdasarkan tugas yang disampaikan guru kepada orang tua PDPD. Turunnya motivasi PDPD ini juga disampaikan oleh orang tua yang menyatakan bahwa anaknya sempat mogok belajar jika hanya melalui layar komputer dan tidak belajar bersama temannya di sekolah.

Kondisi pandemi COVID-19 secara langsung telah mendorong SD Mutiara Bunda untuk melakukan rancangan layanan pembelajaran bagi seluruh siswa, baik siswa reguler maupun siswa berkebutuhan khusus. Sekolah berupaya memberikan layanan khusus yang disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 dan karakteristik masing-masing PDPD. Hal tersebut penting mengingat PDPD merupakan kelompok rentan tertular COVID-19 sehingga diperlukan strategi pembelajaran agar PDPD tercegah dari penularan COVID-19 dan sekaligus dapat mencapai kompetensi yang diharapkan.

Untuk itu, salah satu langkah yang ditempuh sekolah dalam pemberian layanan pembelajaran kepada PDPD ialah melalui penyederhanaan kurikulum. Dalam hal ini, sekolah menentukan kurikulum yang tepat bagi setiap PDPD sesuai dengan karakteristik masing-masing. Terdapat empat macam akomodasi kurikulum bagi PDPD yang menggunakan rujukan kurikulum nasional yang berlaku, yaitu: duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi (Kasiyati, 2011). Menurut koordinator inklusi di sekolah ini, akomodasi yang diberikan kepada PDPD di masa pandemi adalah penyesuaian kurikulum agar PDPD tetap dapat mencapai kompetensinya. Akomodasi yang dimaksud mencakup duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi. Kurikulum duplikasi adalah cara dalam pengembangan kurikulum dengan menggunakan kurikulum yang sama dengan siswa pada umumnya. Kurikulum modifikasi adalah kurikulum yang dikembangkan dengan cara memodifikasi kurikulum yang berlaku bagi siswa reguler agar sesuai dengan karakteristik PDPD. Kurikulum substitusi adalah kurikulum yang dikembangkan dengan cara mengganti sebagian dari kurikulum bagi siswa reguler dan disesuaikan dengan kebutuhan PDPD. Sementara kurikulum omisi adalah mengurangi atau menghilangkan bagian kurikulum bagi siswa reguler yang tidak dapat disampaikan kepada PDPD.

Akomodasi kurikulum dilakukan setelah pihak sekolah melakukan asesmen diagnostik dan membahas hasilnya dengan orthopedagog dan psikolog di sekolah serta mendiskusikannya dengan orang tua PDPD untuk merancang program pembelajaran bagi anak mereka masing- masing. Sebagaimana penjelasan kepala sekolah, sebelum pandemi COVID-19 asesmen diagnostik tidak hanya dilakukan pada saat penerimaan peserta didik baru, melainkan juga setiap awal semester terutama kepada PDPD. Alasan dilakukannya asesmen diagnostik secara rutin karena terdapat PDPD yang selama liburan sekolah melakukan terapi secara terus-menerus sehingga mengalami kemajuan saat masuk sekolah, atau sebaliknya ada pula PDPD yang selama liburan mengalami kemunduran karena kurangnya stimulan dari lingkungan keluarga PDPD tersebut.

Di masa pandemi COVID-19, pihak sekolah tidak melakukan asesmen sebagaimana biasanya, karena PDPD tidak mungkin hadir di sekolah untuk mengikuti seluruh rangkaian asesmen. Akomodasi kurikulum bagi PDPD di masa pandemi COVID-19 ini ditetapkan sekolah dengan menelaah hasil asesmen sebelumnya yang dilengkapi dengan hasil komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua tentang kondisi terakhir anak mereka. Pihak sekolah melakukan komunikasi dengan orang tua melalui Zoom Meeting dengan tujuan agar terjadi diskusi untuk mencari solusi terbaik dalam pelaksanaan pembelajaran bagi PDPD. Diskusi dengan orang tua tersebut dihadiri oleh wali kelas, guru kelas, guru pendidikan khusus, guru pembimbing khusus, dan psikolog. Upaya akomodasi kurikulum bagi PDPD di SD Mutiara Bunda di masa pandemi COVID-19 dimuat pada grafik berikut.



Grafik 1 Akomodasi Kurikulum bagi PDPD di Masa Pandemi COVID-19
Sumber: Jawaban Koordinator Inklusi, diolah

Akomodasi kurikulum bagi PDPD ini sebetulnya sudah diterapkan sebelum pandemi. Meskipun kepala sekolah mengakui tidak memiliki informasi tentang aturan pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus sebagaimana diatur oleh Kepmendikbud Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus, namun langkah yang ditempuh SD Mutiara Bunda ini sudah sesuai dengan isi Kepmendikbud tersebut. Dalam Kepmendikbud disebutkan bahwa satuan pendidikan yang berada pada daerah dalam kondisi khusus dapat melaksanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik.

Merujuk pada Grafik 1 terlihat bahwa layanan pembelajaran yang paling banyak diberikan kepada PDPD di sekolah adalah melalui kurikulum yang menggabungkan modifikasi dan substitusi. Sementara itu, terlihat juga bahwa terdapat satu PDPD yang mendapatkan layanan pembelajaran melalui duplikasi dari kurikulum reguler. Siswa PDPD ini menurut penjelasan koordinator inklusi, memiliki intelegansi yang setara dengan siswa reguler di sekolah, namun yang bersangkutan memerlukan layanan khusus agar dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Dalam kondisi sesungguhnya, PDPD ini masih memerlukan layanan pembelajaran secara individual. Contoh kurikulum yang disiapkan bagi PDPD di sekolah ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel 3 Contoh Akomodasi Kurikulum bagi PDPD

| Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator (Umum) | Indikator (Duplikasi) | Indikator (Modifikasi) | Indikator (Omisi) |
|----------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------|
| Melakukan operasi bilangan | Melakukan operasi hitung campuran | Mengerjakan operasi hitung campuran | Melakukan operasi hitung campuran | Melakukan operasi penjumlahan | |
| | Mengurutkan bilangan | | | | Mengurutkan bilangan 1-20 |
| | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB | Menyelesaikan soal cerita penjumlahan | |

Sumber: Bahan Paparan Koordinator Inklusi SD Mutiara Bunda Bandung

Di masa pandemi COVID-19, seluruh guru dan tenaga kependidikan di sekolah tetap menjalankan tugasnya seperti sebelumnya, hanya pekerjaan yang dilakukan guru berbeda dengan sebelum pandemi. Sejak diberlakukan kegiatan pembelajaran dari rumah oleh pemerintah, sekolah melakukan upaya untuk mencari solusi agar pelaksanaan pembelajaran dapat memenuhi hak seluruh

peserta didik. Sekolah juga berupaya menyiapkan langkah pembelajaran khusus bagi PDPD yang memerlukan layanan berbeda dengan peserta didik lainnya.

Di awal-awal pandemi, kondisinya sangat luar biasa. Dengan adanya keputusan pemerintah bahwa anak-anak harus melaksanakan belajar dari rumah yang artinya guru-guru harus bekerja dari rumah (work from home/WFH). Kami harus memutar otak dengan luar biasa untuk berpikir apa yang harus dilakukan agar anak-anak mendapatkan pembelajaran meskipun jarak jauh tetapi mereka tetap mendapatkan haknya seperti kegiatan tatap muka

Disela-sela WFH, Tim Inklusi berkumpul secara tatap muka di sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan tujuan menghasilkan berbagai langkah pembelajaran yang tepat bagi PDPD. Kepala Sekolah yang hadir menyampaikan tentang langkah menjalankan kurikulum bagi seluruh siswa dan bagi PDPD selama masa pandemi.

(Koordinator Inklusi SD Mutiara Bunda Bandung)

Sementara itu, pihak sekolah juga berupaya menyiapkan guru-guru agar dapat beradaptasi dengan situasi pembelajaran yang berbeda dengan pembelajaran di masa normal. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, kepala sekolah mendapatkan sosialisasi berkenaan dengan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Materi sosialisasi ini, yakni kebijakan kurikulum selama masa pandemi, pembelajaran secara *online* menggunakan fasilitas *video conference* maupun *video call* melalui kanal Youtube oleh Mendikbud. Sosialisasi diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung yang disampaikan langsung oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung dan ditujukan kepada seluruh kepala sekolah di Kota Bandung.

Selanjutnya, kepala sekolah menyampaikan hasil dari sosialisasi kepada guru-guru di sekolah. Pada kesempatan ini, kepala sekolah juga menyampaikan kebijakan kurikulum bagi seluruh peserta didik di masa pandemi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berlangsung melalui Zoom Meeting, Google Meet, dan *video call* termasuk sosialisasi kebijakan tentang pemberlakuan jam pelajaran selama pandemi COVID-19. Berkenaan dengan penyiapan guru-guru tentang pembelajaran bagi PDPD di masa pandemi, koordinator inklusi melakukan sosialisasi kepada guru-guru tentang proses asesmen, pembuatan program individual, serta pembuatan panduan belajar dan media pembelajaran. Aktivitas ini dilakukan dengan bimbingan secara *online* dan *offline*.

Salah satu syarat agar pelaksanaan BDR secara *online* dapat dilakukan dengan efektif adalah tersedianya perangkat teknologi informasi (TI) dan

keterampilan guru dalam memanfaatkan perangkat teknologi tersebut. Koordinator inklusi di sekolah ini menyatakan bahwa di masa pandemi, guru-guru yang memberikan layanan kepada PDPD seluruhnya telah memiliki gawai Android maupun laptop yang dapat mendukung aplikasi untuk kegiatan belajar *online*. Sementara itu, guru-guru yang laptopnya mengalami kendala dibantu oleh pihak sekolah dengan menyediakan perangkat TI di sekolah agar pembelajaran di kelas masing-masing tetap dapat berlangsung. Dalam hal kompetensi pemanfaatan perangkat TI untuk pembelajaran, sekolah telah menyiapkannya melalui pelatihan tentang pengenalan dan praktik mengoperasikan aplikasi yang diperlukan dalam pembelajaran *online*. Melalui pelatihan ini, ditambah dengan belajar secara otodidak, guru-guru di sekolah siap mengelola dan memberikan layanan pembelajaran bagi PDPD. Upaya lainnya yang dilakukan sekolah yakni dengan melakukan pelatihan di awal semester dan meminta para guru untuk melakukan *sharing* pengetahuan, termasuk pendampingan dari guru yang sudah kompeten kepada guru lainnya.

Dari sisi kesiapan orang tua dan PDPD dalam hal ketersediaan perangkat TI, menurut kepala sekolah, masing-masing PDPD sudah memilikinya. Bahkan ada orang tua PDPD yang melengkapi perangkat TI anaknya secara lengkap, meliputi telepon pintar, tablet, komputer dan alat pencetaknya (*printer*). Dengan kondisi ketersediaan perangkat TI yang sudah memadai tersebut, sekolah tidak perlu menyediakan perangkat TI yang dapat dipinjam oleh PDPD.

Untuk pembelajaran secara *online* ini, guru-guru juga melengkapi dengan berbagai alat peraga yang dapat didemonstrasikan secara virtual. Selain itu, guru juga menyiapkan film animasi dan gambar-gambar virtual untuk digunakan saat pembelajaran dengan PDPD. Beberapa bahan ajar berbentuk cetak yang disiapkan guru yang harus dikerjakan oleh PDPD, akan dikirim ke rumah mereka. Beberapa aktivitas yang memerlukan bahan atau barang, diupayakan tersedia di lingkungan PDPD dan dapat diperoleh dengan mudah.

Selama masa pandemi COVID-19, sekolah tetap melakukan pembelajaran akademik dan nonakademik bagi PDPD. Pembelajaran akademik dan nonakademik dilakukan secara *online* dan *offline*. Pembelajaran akademik yang dilakukan secara *online* mengikuti jadwal pelajaran yang sama dengan peserta didik reguler lainnya di kelas. Layanan pembelajaran secara individu juga diberikan oleh guru kepada PDPD secara *online*. Selain secara *online*, pembelajaran bagi PDPD juga dilakukan secara *offline* dengan sistem guru

kunjung (*home visit*) untuk memenuhi kebutuhan PDPD. Untuk pembelajaran nonakademik disesuaikan dengan kebutuhan setiap PDPD, misalnya terkait bina diri, bahasa komunikasi, persepsi, konsentrasi, memori, motorik kasar, dan motorik halus. Aktivitas pembelajaran nonakademik ini juga berlangsung secara *online* dan *offline* dengan sistem guru kunjung.

Pembelajaran bagi PDPD, selain bertujuan mencapai kompetensi sesuai yang ditetapkan dalam perencanaan, juga diupayakan menghindarkan mereka dari tertular COVID-19. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang COVID-19 juga disampaikan pada saat pembelajaran. Di luar aktivitas pembelajaran, pihak sekolah juga memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan COVID-19. Dalam hal ini, guru bekerja sama dengan orang tua untuk memberikan pemahaman tentang tata cara mencegah penularan COVID-19, misalnya menganjurkan anak untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Demikian pula setiap melakukan aktivitas pembelajaran baik secara *online* maupun *offline*, guru senantiasa mengingatkan dan memperagakan cara mencuci tangan kepada PDPD. Guru juga memberikan gambar-gambar yang memperlihatkan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan pencegahan penularan COVID-19.

Berkenaan dengan aktivitas belajar dari rumah (BDR) yang dilakukan secara *online*, biasanya dilakukan menggunakan platform Google Meet dengan pengaturan jadwal pembelajaran: 1) pukul 7.45 – 11.45 untuk siswa kelas 1 dan 2 (terdiri dari 2 sesi kelas *online*, 2 kali *break*, 1 sesi pembelajaran mandiri terbimbing), dan 2) pukul 7.45 – 13.45 untuk siswa kelas 3 – 6 (terdiri dari 3 sesi kelas *online*, 3 kali *break*, 1 sesi pembelajaran mandiri). Pada kegiatan BDR ini, pihak sekolah menyiapkan Panduan Belajar dari Rumah yang diberikan kepada PDPD setiap pekan yang kemudian diubah menjadi setiap dua pekan. Menurut koordinator inklusi, kebijakan yang ditetapkan kepala sekolah ini untuk menjaga keselamatan baik guru, peserta didik, maupun orang tua. Adapun kondisi yang mendasari ditetapkannya kebijakan BDR oleh kepala sekolah adalah Peraturan Walikota Bandung Nomor 37 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Aktivitas guru dan PDPD saat memperhatikan penjelasan guru disajikan pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1 Aktivitas Guru pada Pembelajaran Online
(Sumber Foto: Dokumentasi Koordinator Inklusi)



Gambar 2 Aktivitas PDPD pada Pembelajaran Online
(Sumber Foto: Dokumentasi Orang Tua)

Pelaksanaan pembelajaran, sebagaimana penjelasan koordinator inklusi, ada yang bersifat klasikal dan ada yang bersifat individual. Pembelajaran secara klasikal dilakukan karena sesuai dengan hakikat pendidikan inklusi bahwa seluruh siswa melakukan aktivitas yang sama dalam satu kelas. Sementara itu, untuk keperluan program pendidikan individual (PPI) bagi PDPD, dilakukan oleh guru pembimbing khusus yang ditujukan kepada masing-masing PDPD secara individual.

Dalam praktiknya, sekolah tidak secara murni melakukan BDR. Berdasarkan angket yang diperdalam melalui diskusi dengan kepala sekolah dan koordinator inklusi di SD Mutiara Bunda, diketahui bahwa sekolah tidak secara murni

menjalankan BDR melainkan menggabungkannya dengan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Sekolah dalam hal ini melakukan PTM dengan cara guru melakukan kunjungan ke rumah PDPD (*home visit*) untuk memberikan bimbingan atau pendampingan pembelajaran. Alasan kepala sekolah menetapkan kebijakan PTM terbatas adalah agar pembelajaran dapat berlangsung secara optimal untuk mengatasi berbagai hambatan PDPD selama pembelajaran. Selain itu, beberapa PDPD juga memerlukan layanan individual, misalnya penjelasan materi, melatih berbicara atau gerak, dan sebagainya. Sekolah berusaha melaksanakan PPI sesuai dengan kebutuhan PDPD. Sementara itu, koordinator inklusi menyatakan bahwa kombinasi BDR dengan PTM ini dilakukan agar tetap terjalin kedekatan secara psikologis antara PDPD dengan guru, di mana guru dapat mengevaluasi langsung perkembangan PDPD selama BDR di masa pandemi COVID-19, dan pihak sekolah dapat memberikan materi akademik dan nonakademik yang sulit atau tidak dapat dilakukan pada saat BDR.

Berkenaan dengan program pendidikan individual yang dilakukan melalui PTM, sekolah sebelumnya telah melakukan identifikasi terhadap PDPD berdasarkan hasil evaluasi program pembelajaran di masa pandemi pada semester sebelumnya dan masukan dari orang tua. PDPD kemudian dikelompokkan menjadi tiga kriteria. *Kriteria 1*, merupakan PDPD dengan kondisi berat yang memerlukan pendampingan melekat, sehingga program pendidikan individual dilakukan di semua mata pelajaran dan masih memerlukan stimulasi secara konsisten pada program non-akademik. *Kriteria 2*, yaitu PDPD dengan kondisi sedang yang memerlukan pendampingan remedial, sehingga program pendidikan individual dilakukan di beberapa mata pelajaran, serta memerlukan stimulasi di beberapa aspek non-akademis. *Kriteria 3*, yakni PDPD dengan kondisi ringan yang memerlukan program remedial pada materi yang sulit dan program pengayaan pada materi yang unggul. Dengan mengacu pada tiga kriteria ini, sekolah menetapkan strategi pembelajaran di masa pandemi sebagai berikut.

Tabel 4 Strategi Pembelajaran Sesuai Kelompok Kriteria

| Kriteria 1 | Kriteria 2 dan 3 |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Pembelajaran dilakukan <i>online</i> di kelas (secara <i>virtual</i>) bersama teman-temannya dan guru | <ul style="list-style-type: none">• Pembelajaran dilakukan secara <i>online</i> dari awal sampai akhir di kelas bersama teman-temannya dan guru |
| <ul style="list-style-type: none">• Stimulasi dan revidu materi akan dilakukan oleh <i>supporting teacher</i> | <ul style="list-style-type: none">• Pembimbing (revidu) materi sesuai programnya setiap hari dibimbing oleh <i>supporting teacher</i> |

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Terdapat jadwal stimulasi online bersama guru pendidikan khusus | <ul style="list-style-type: none">• Panduan pembelajaran berupa <i>home learning guidance</i> |
| <ul style="list-style-type: none">• Panduan pembelajaran berupa <i>home learning guidance</i> (materi dan <i>worksheet</i>) | <ul style="list-style-type: none">• <i>Home visit</i> |
| <ul style="list-style-type: none">• <i>Home visit</i> | |

Dalam pelaksanaan PTM melalui *home visit* ini, sekolah mengikuti arahan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Pihak sekolah juga harus mendapatkan persetujuan masing-masing orang tua PDPD tentang kesediaan anaknya mendapatkan layanan kunjungan dari pihak sekolah. Sekolah menjalankan PTM dengan protokol kesehatan secara ketat, antara lain dengan pengaturan jadwal kunjungan setelah orang tua PDPD menyetujui program guru kunjung (*home visit*), serta pengecekan kondisi kesehatan bagi anak, orang tua, dan guru dengan melakukan pengukuran suhu badan, mencuci tangan, mengenakan masker dan *face shield* dalam proses komunikasi, dan menjaga jarak saat pembelajaran.

Terkait mekanisme guru kunjung ini, salah satu orang tua siswa menyampaikan bahwa selama masa pandemi, pembelajaran ada yang dilakukan secara tatap muka dengan cara guru datang ke rumah sebanyak dua kali dalam sebulan. Dalam kunjungan itu, guru mendampingi anak melakukan praktik pembelajaran sekaligus menguatkan hubungan emosional di antara mereka supaya anak merasa nyaman untuk belajar. Selain itu, guru juga memberikan penjelasan kepada anak apabila menjumpai kesulitan dalam pelajarannya.

Keberhasilan pemberian layanan pembelajaran kepada PDPD memerlukan kepiawaian kepala sekolah dan seluruh jajaran guru untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam konteks layanan pendidikan inklusif. Di SD Mutiara Bunda, kolaborasi antara sekolah dengan berbagai pihak sudah berlangsung sebelum pandemi COVID-19. Koordinator inklusi menyatakan bahwa sekolah telah bekerja sama dengan Puskesmas, masyarakat, dan Pusat Sumber untuk mendukung proses pembelajaran. Kolaborasi dengan Puskesmas dilakukan untuk berkonsultasi tentang penerapan protokol kesehatan di sekolah dan upaya menjaga kesehatan di masa pandemi. Kolaborasi sekolah dengan masyarakat di sekitar sekolah berlangsung dalam bentuk pemberian izin dari RT/RW setempat terkait adanya mobilitas kendaraan di sekolah. Kolaborasi juga dilakukan dengan Pusat Sumber di SLB Cicendo Kota Bandung terkait dengan konsultasi mengenai pembelajaran bagi PDPD di masa pandemi.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Bandung juga telah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dan melakukan sosialisasi kebijakan dari Kemendikbud tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pengawas yang merupakan unsur dari dinas pendidikan, juga telah memberikan arahan teknis tentang pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi yang berlaku untuk seluruh siswa di sekolah. Selain itu, pengawas berperan pula dalam memberikan konsultasi langsung tentang berbagai strategi teknis pembelajaran, termasuk mempertemukan pihak sekolah dengan para kepala bidang di Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk memberikan arahan dan perizinan terkait dengan PTM terbatas dalam bentuk guru kunjung.

Peran Orang Tua dalam Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran di masa pandemi COVID-19 memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar memberikan dampak hasil belajar yang terbaik bagi PDPD. Menurut kepala sekolah dan koordinator inklusi, dukungan paling kuat ditunjukkan oleh keluarga atau orang tua PDPD. Mereka menyatakan bahwa aktivitas pembelajaran yang sebagian besar berlangsung di rumah, sangat terbantu oleh peran orang tua dalam mendampingi proses pembelajaran anaknya.

Peran orang tua merupakan bentuk dukungan yang paling dirasakan pihak sekolah sejak persiapan hingga pelaksanaan pembelajaran. Pihak sekolah menyatakan, orang tua siswa umumnya memiliki kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya peran mereka dalam pendidikan anaknya. Di sisi lain, sifat agamis orang tua yang memaknai bahwa anaknya yang disabilitas merupakan karunia dari Tuhan YME, menjadi pemicu orang tua untuk memberikan dukungan penuh dalam hal pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kondisi ini membuat pihak sekolah sangat terbantu dalam melakukan berbagai aktivitas pembelajaran.

Menurut kepala sekolah dan koordinator inklusi, dalam hal persiapan pembelajaran, orang tua juga turut berperan dalam penyusunan rencana pembelajaran yang dikembangkan sekolah. Peran tersebut terlihat dari bantuan orang tua dalam memberikan informasi tambahan yang didapat dari hasil asesmen yang dilakukan secara pribadi serta berbagai catatan tentang kondisi PDPD di saat awal pandemi COVID-19. Berdasarkan informasi ini, sekolah memiliki gambaran yang lebih utuh tentang kondisi masing-masing

PDPD sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk menyesuaikan kurikulum dan rencana pembelajaran yang lebih sesuai. Selain itu, masukan orang tua dalam diskusi penyusunan rencana pembelajaran juga dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan riil orang tua kepada sekolah.

Dukungan lain yang diberikan orang tua PDPD dalam persiapan pembelajaran adalah dengan menyediakan perangkat TI bagi anaknya yang akan digunakan selama pembelajaran secara daring. Orang tua juga menyediakan berbagai sumber belajar, seperti buku, alat menggambar, peralatan keterampilan dan peralatan untuk bina diri yang diperlukan selama pembelajaran. Salah satu orang tua PDPD menyatakan, persiapan yang dilakukan untuk pembelajaran anaknya pada masa pandemi COVID-19 terutama berkaitan dengan penyesuaian waktu dan skala prioritas dalam pembelajaran, mengingat anak-anak mereka akan berada di rumah sepanjang waktu. Orang tua, yakni ayah dan ibu berusaha bekerja sama membuat jadwal aktivitas pembelajaran di rumah agar kebutuhan perkembangan seluruh kompetensi anak mereka tetap dapat terlayani. Langkah yang dilakukan orang tua PDPD ini sangat diperlukan karena kondisi anaknya yang berbeda dengan siswa lainnya di sekolah.

Sebagaimana telah disampaikan terdahulu bahwa terdapat sebagian PDPD yang memerlukan layanan individual secara tatap muka untuk menunjang perkembangan mereka. Aktivitas guru kunjung ini memerlukan persiapan yang harus dilakukan oleh orang tua, baik untuk menunjang pemenuhan protokol kesehatan, maupun untuk keperluan pembelajaran. Penunjang protokol kesehatan yang disiapkan orang tua PDPD antara lain masker, *face shield*, pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan pembersih kuman untuk ruangan. Selain itu, orang tua juga menyiapkan peralatan penunjang pembelajaran, seperti peralatan untuk PPI. Orang tua PDPD di sekolah ini umumnya tidak keberatan untuk menyiapkan berbagai perlengkapan tersebut. Selain karena sebagian besar orang tua memiliki latar belakang ekonomi yang berkecukupan, mereka juga berharap anaknya dapat termotivasi untuk mengikuti pelajaran dengan baik di masa pandemi COVID-19 ini.

Sementara itu, dalam hal pelaksanaan pembelajaran, dukungan yang paling banyak dilakukan orang tua yakni mendampingi anaknya selama pembelajaran secara daring. Pendampingan yang dilakukan orang tua ini berbeda dengan pendampingan kepada anak tidak berkebutuhan khusus. Menurut koordinator inklusi, ada beberapa anak yang tidak bisa belajar secara

virtual dalam beberapa waktu karena dapat menyebabkan mereka menjadi tantrum. Dalam kondisi demikian, PDPD memerlukan pendamping orang tua untuk mengatasi kondisi anak-anak mereka saat tantrum. Bahkan untuk siswa tunagrahita yang mengalami “kemunduran” karena tidak bisa mengikuti BDR, orang tua yang mendampingi anaknya terus-menerus selama pembelajaran berlangsung. Beberapa penjelasan guru yang disampaikan melalui layar, umumnya sulit dimengerti siswa tunagrahita sehingga memerlukan keberadaan orang tua untuk mendampinginya. Menurut koordinator inklusi, ada PDPD yang cenderung menjadi hiperaktif dan cepat marah karena bosan melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Dalam kondisi demikian, orang tua PDPD bekerja sama dengan psikolog dan berkoordinasi dengan pihak sekolah dalam mencari jalan keluar terbaik bagi anaknya.

Selama BDR, kami sangat menghargai kerja keras orang tua karena kondisi pandemi ini membuat kami hanya dapat memberikan materi pelajaran secara online dan orang tua yang lebih banyak melakukan pembelajaran di rumah, terutama mengarahkan anak agar siap belajar, juga menyiapkan media yang diperlukan agar bisa mengikuti pelajaran. Orang tua yang biasanya pagi mengantarkan anaknya dan sore anaknya baru pulang sekarang waktu mereka sepenuhnya digunakan untuk mendampingi anaknya dari pagi sampai pagi lagi.

Orang tua kadang juga berperan sebagai agen penerus informasi dari guru. Misalkan pada kegiatan olahraga, ketika ada beberapa gerakan guru yang sulit diikuti oleh anak melalui layar komputer, guru membuat videonya dan mengirimkannya dalam bentuk soft file untuk diputar kembali berulang-ulang oleh orang tua dan sekaligus mendampingi serta membimbing anaknya, begitu pun untuk instruksi atau kegiatan lainnya.

(Koordinator Inklusi SD Mutiara Bunda Bandung)

Pada kondisi pandemi COVID-19 yang semakin masif dan meluas, yang menyebabkan kegiatan guru kunjung ditiadakan, peran orang tua makin dominan. Orang tua salah satu PDPD menyatakan, pada saat kondisi guru tidak dapat berkunjung ke rumah, maka orang tua perlu berperan lebih besar lagi. Misalnya, mereka perlu memastikan PPI disesuaikan dengan prioritas perkembangan PDPD, berkoordinasi dengan pihak sekolah dalam penerapan pembelajaran, bersama guru menyiapkan modul pembelajaran di rumah, menyusun jadwal harian dengan memasukkan program keterampilan hidup (*life skill*), membimbing dan mendampingi anak melakukan aktivitas belajar, dan melakukan evaluasi mingguan dan bulanan yang hasilnya dilaporkan ke sekolah.

Berbagai aktivitas pembelajaran di rumah memerlukan pendampingan orang tua. Untuk pelajaran agama misalnya, orang tua mendampingi anak dalam

praktik salat berjamaah. Begitu pula berbagai aktivitas untuk meningkatkan keterampilan PDPD, seperti mendampingi anak mempraktikkan kegiatan menyapu, dimulai dari cara memegang sapu sampai menggunakannya, membaca sesuai hobi anak dan mendiskusikannya, menggambar dan mewarnai, serta membuat jajanan kecil dan jus. Orang tua juga ada yang melakukan aktivitas bersama seluruh anggota keluarga dalam bentuk proyek bersama. Seluruh aktivitas yang dilakukan PDPD ini dilaporkan kepada sekolah melalui wali kelas yang dikirim dalam bentuk *soft file*.



Gambar 3 Aktivitas BDR dengan Pendampingan Orang Tua



Gambar 4 Produk Hasil Belajar *Life Skill* PDPD dengan Pendampingan Orang Tua (Sumber Foto: Dokumentasi Orang Tua)

Penilaian bagi PDPD di sekolah biasanya mencakup seluruh aspek dan tidak berlangsung hanya secara tertulis saja. Di masa sebelum pandemi,

sekolah melakukan penilaian terhadap gerak fisik PDPD dengan mengamatinya secara langsung. Demikian pula, guru menilai proses PDPD dalam membuat suatu karya sampai hasilnya dengan mengamati secara langsung di sekolah. Pada masa pandemi ini, penilaian dengan pengamatan langsung tidak dapat dilakukan. Dengan kondisi demikian, orang tua ikut berperan membantu kelancaran kegiatan penilaian bagi anaknya. Untuk itu, guru mengirimkan langkah yang harus dilakukan orang tua saat penilaian, termasuk rubrik penilaiannya. Dalam proses penilaian tersebut, orang tua diminta untuk memvideokan aktivitas anaknya dalam mengikuti perintah pada lembar tugas, kemudian mengirimkan hasilnya dalam bentuk *soft file* ke sekolah. Jawaban PDPD pada penilaian tertulis yang dilakukan dari rumah, juga dikirimkan oleh orang tua ke sekolah dalam bentuk *soft file*.

Berbagai Kendala dalam Pembelajaran

Pembelajaran bagi PDPD di masa pandemi tidak selalu berjalan lancar. Menurut informan dari pihak sekolah, pada awal pandemi sekolah menjumpai berbagai kendala, misalnya masalah terkait perangkat TIK, seperti komputer, laptop, atau HP. Kepemilikan perangkat TIK tidak menjadi soal, namun perangkat tersebut bermasalah ketika tidak dapat mendukung kegiatan pembelajaran melalui berbagai aplikasi yang digunakan, seperti Google Meet maupun Zoom Meeting. Orang tua yang belum terampil mengoperasikan perangkat TIK untuk keperluan belajar anaknya, serta sinyal internet yang kadang bermasalah, juga menjadi persoalan lainnya. Ada pula PDPD yang harus bergiliran dengan saudara lainnya dalam menggunakan laptop saat pembelajaran, karena di rumah hanya tersedia satu perangkat. Kesulitan lainnya, tidak semua PDPD memiliki mesin pencetak (*printer*), sehingga menyulitkan ketika terdapat bahan ajar yang harus dicetak. Kendala perangkat TIK ini sebetulnya juga dialami murid reguler pada umumnya, namun kondisi ini sangat berpengaruh kepada PDPD yang memiliki berbagai keterbatasan.

Kendala yang lebih spesifik disampaikan oleh orang tua dan koordinator inklusi. Menurut mereka, adakalanya PDPD mengalami tantrum ketika pembelajaran di rumah, tidak mau mengikuti aktivitas melalui Google Classroom dan menolak mengerjakan tugas guru, dan lebih emosional karena terlalu lama melakukan aktivitas belajar di depan komputer. Hal ini juga berkaitan dengan anggapan sebagian PDPD yang menilai bahwa belajar seharusnya

dilakukan di sekolah, bukan di rumah. Selain itu, terdapat siswa tunagrahita yang tidak memahami materi pelajaran yang disampaikan secara daring. Orang tua dan koordinator inklusi berpendapat bahwa kebutuhan perkembangan PDPD tidak dapat terpenuhi secara utuh apabila pembelajaran berlangsung hanya secara daring.

Dari perspektif guru, terungkap beberapa kendala yang mereka hadapi. Menurut mereka, masih ada orang tua yang tidak optimal dalam mendampingi anaknya. Guru juga merasa tertekan karena perlu lebih kreatif, inovatif, dan ekspresif, sementara panduan atau model-model yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi PDPD masih sulit didapatkan. Di sisi lain, jumlah jam belajar yang banyak terpengkas membuat guru kesulitan untuk mendorong capaian kompetensi PDPD.

Seiring berjalannya waktu, sebagian kendala tersebut dapat dipecahkan. Laptop dan komputer yang tidak dapat mendukung kegiatan pembelajaran secara daring, dipinjamkan oleh sekolah agar pembelajaran tetap dapat berlangsung. PDPD yang bergiliran dalam menggunakan laptop diasiasi oleh sekolah dengan cara membuat jadwal lebih fleksibel dengan menyesuaikan waktu PDPD agar dapat menggunakan laptop. Keterbatasan orang tua PDPD dalam mengoperasikan perangkat TI, diatasi dengan cara sekolah memberikan pelatihan singkat. Orang tua PDPD yang tidak dapat mencetak sendiri tugas atau bahan ajar untuk anaknya, diatasi oleh pihak sekolah dengan cara mencetak di sekolah dan mengirimkan hasilnya ke masing-masing PDPD.

Kendala yang berhubungan dengan PDPD, seperti tantrum dan emosional diatasi dengan pendekatan yang lebih baik dengan berkonsultasi dengan psikolog. Kesulitan PDPD dalam mengikuti pembelajaran secara daring, diatasi oleh sekolah melalui sistem guru kunjung dan komunikasi yang intens antara orang tua dan guru. Sistem guru kunjung ini juga menjadi solusi bagi pemenuhan perkembangan PDPD. Untuk mengatasi rasa bosan dan menghindari penolakan PDPD untuk belajar, guru-guru di sekolah mengatasinya dengan menyiapkan video pembelajaran yang dapat ditonton PDPD. Guru juga menyiapkan video berupa *game* yang bersifat pembelajaran. Keberadaan video ini, karena dapat ditonton berulang kali, juga dapat digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan perkembangan PDPD.

Untuk mengoptimalkan peran dan pendampingan orang tua, pihak sekolah berupaya melakukan komunikasi dan edukasi mengenai pentingnya

pendampingan dalam pembelajaran untuk meningkatkan potensi anak secara maksimal. Kekhawatiran guru untuk berkreasi dan berinovasi diatasi dengan mengadakan pertemuan berkala secara *online* maupun *offline* untuk bertukar pengetahuan di antara guru-guru atau dengan mengundang ahli yang relevan. Pertemuan ini juga menjadi solusi di tengah kurangnya panduan maupun model-model yang sesuai untuk pembelajaran bagi PDPD. Selain itu, kebijakan dari sekolah yang memberikan fleksibilitas waktu dan aktivitas belajar bagi PDPD membuat guru lebih percaya diri. Sekolah juga menerapkan sistem guru kunjung (*home visit*) untuk memenuhi pencapaian kompetensi PDPD yang waktu belajarnya banyak terpankas.

Penutup

SD Mutiara Bunda Bandung sebagai salah satu penyelenggara pendidikan inklusi, terlihat dalam kurun waktu kurang lebih lima bulan sejak diberlakukannya kebijakan pemerintah untuk melakukan BDR, mulai dapat memberikan layanan pembelajaran kepada PDPD secara lebih optimal. Keberhasilan yang dicapai melalui pembelajaran ini mencakup aspek yang berhubungan dengan akademis maupun nonakademis sebagaimana ditetapkan pada perencanaan PPI di awal semester pembelajaran. Berbagai upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh sekolah ini dalam memberikan layanan pembelajaran yang sesuai bagi PDPD dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain. Sekolah-sekolah inklusi dapat mengadopsi atau mengadaptasi berbagai langkah yang telah ditempuh oleh SD Mutiara Bunda Bandung berkenaan dengan layanan pembelajaran bagi PDPD pada masa pandemi COVID-19.

Daftar Pustaka

- Al Aneori, A.N (2020). Berbagai Kendala Belajar di Rumah Bagi ABK pada Masa Pandemi COVID-19 di dalam <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4301467/berbagai-kendala-belajar-di-rumah-bagi-abk-pada-masa-pandemi-COVID-19> , 10 Juli 2020.
- Arsani, Saraswati, dkk. Peran Orang Tua dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus pada Masa Pandemi COVID-19 Sekolah Inklusi SDN Mojorejo I Kota Baru. *Naturalistic; Jurnal Kajian Penelitian dan Pendidikan dan Pembelajaran*, Volume 5 Edisi 2 Tahun 2021, Hal. 846-855

- Kasiyati (2011). *Asesmen Bagi Anak Kesulitan Belajar dalam Setting Inklusif* (Prosiding). Disampaikan pada Seminar dan Workshop Internasional ‘Profesionalisme Layanan Pendidikan Anak dengan Kesulitan Belajar dan Gangguan Intelektual Menuju Pendidikan Inklusif’. Padang, 4 Desember 2011.
- Kemendikbud (2017a). *Pedoman Pembelajaran Peserta Didik dengan Autism pada Satuan Pendidikan Khusus*. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2017.
- Kemendikbud (2017b). *Pedoman Pembelajaran Peserta Didik Tunagrahita pada Satuan Pendidikan Khusus*. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2017.
- Kemendikbud (2017c). *Pedoman Pembelajaran Peserta Didik Tunadaksa pada Satuan Pendidikan Khusus*. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2017.
- Kemenkes (2020). *Pedoman Pencegahan Pengendalian COVID-19*. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, terbit 27 Maret 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020). Tantangan Belajar di Masa Pandemi COVID-19. Diakses melalui: <https://pmpk.kemdikbud.go.id/read-news/tantangan-belajar-di-masa-pandemi-COVID19>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020a). *Statistik Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.
- Narti, W (2014). Penanganan Kesulitan Belajar Anak dengan ADHD (studi Kasus Pusat Layanan Psikologi Bismika Muaro Jambi). *Nur El-Islam*, Volume 4, Nomor 1, April 2014.
- Paparan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus tahun 2020 pada Diskusi Kelompok Terpumpun yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kebijakan.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Permata, T J (2019). 58 Kabupaten/Kota di Indonesia Masih Belum Memiliki SLBNegeridi dalam <https://surabaya.tribunnews.com/2019/07/13/58-kabupatenkota-di-indonesia-masih-belum-memiliki-slb-negeri>, 13 Juli 2019.
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 420/2513 - Disdik Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah Tahun Pelajaran 2018/2019 di Kota Bandung.
- Suryaningsih, Ana. (2011). *Strategi Pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-undang Nomor 2016 Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas.



Belajar Selama Pandemi
Peran Orang Tua Murid
di Jenjang Sekolah Dasar

Belajar Selama Pandemi Peran Orang Tua Murid di Jenjang Sekolah Dasar

~•~

Luhur Bima

Pendahuluan

Ketika pemerintah pada pertengahan Maret 2020 mengumumkan bahwa kegiatan sekolah dihentikan selama dua minggu akibat munculnya COVID-19 di Indonesia, tidak ada yang menyangka bahwa penutupan tersebut akan berlangsung lebih dari satu tahun hingga saat ini. Tanpa ada persiapan yang matang, anak harus membiasakan diri untuk tetap belajar di rumah dengan segala keterbatasan fasilitas yang ada. Sebagian besar guru mengalami kesulitan untuk memberikan pengajaran secara daring secara optimal karena tidak pernah mempersiapkan diri untuk kondisi seperti sekarang ini. Mengutip pernyataan ketua umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) dalam pemberitaan media massa, lebih dari setengah jumlah guru yang ada belum mampu memanfaatkan teknologi dalam pengajaran mereka (Republika, 2020). Selain itu, Para orang tua pun masih banyak yang gagap ketika harus memberikan pendampingan anak-anak dalam belajar. Alifia et al (2020) dalam studi yang dilakukan di awal masa pandemi menemukan bahwa anak yang berasal dari keluarga yang orang tuanya berpendidikan rendah, dan tinggal di perdesaan harus belajar tanpa pendampingan karena rendahnya tingkat pengetahuan orang tua.

Kebijakan penutupan sekolah membuat proses belajar mengajar secara daring dengan memanfaatkan teknologi berdampak terhadap semua anak di setiap jenjang pendidikan. Namun dampak terbesar dirasakan oleh anak-anak yang berada di jenjang sekolah dasar. Dibandingkan anak-anak dari jenjang sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas yang

sudah mampu untuk belajar secara mandiri tanpa pendampingan orang tua, anak-anak di kelompok sekolah dasar ini masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap peran pendamping dalam proses belajar mereka. Dalam kondisi normal, anak-anak tersebut belajar dengan pendampingan langsung dari guru kelas di sekolah. Pandemi ini membuat peran orang tua dalam proses belajar anak-anak di kelompok sekolah dasar, khususnya di jenjang kelas awal, menjadi sangat krusial.

Pada awal pelaksanaan kegiatan belajar di rumah, para guru umumnya tidak siap dengan strategi pengajaran yang berubah dan menyesuaikan kondisi yang serba terbatas. Perubahan proses pengajaran dari yang sebelumnya biasa dilakukan dengan interaksi langsung di dalam kelas, berubah menjadi pembelajaran jarak jauh yang sangat bergantung kepada teknologi komputer dan internet. Hal ini menjadi tantangan bagi para guru senior karena harus beradaptasi dengan teknologi dan metode pengajaran yang hampir tidak pernah mereka pelajari dan gunakan sebelumnya (Fuad, 2020). Selain itu, tantangan karena keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti kualitas sinyal internet yang memadai ataupun kepemilikan gawai komunikasi oleh orang tua murid yang tidak merata menjadi hambatan yang harus dihadapi oleh para guru di daerah perdesaan (Rasmitadila, 2020).

Kegiatan belajar di rumah selama pandemi mengurangi frekuensi interaksi antara guru dan murid secara signifikan. Interaksi tatap muka secara langsung antara guru dengan para muridnya yang berjalan secara rutin setiap hari di sekolah harus digantikan dengan komunikasi tertulis ataupun komunikasi visual jika fasilitasnya memadai. Terlebih lagi dalam kasus-kasus ketika sang guru tidak terlalu menguasai teknologi yang ada saat ini, interaksi antara guru tersebut dengan murid melalui perantaraan orang tuanya masih dilakukan secara konvensional, di mana secara rutin setiap beberapa hari sekali orang tua datang ke sekolah untuk menyerahkan pekerjaan anak dan mengambil tugas yang baru untuk diselesaikan anak dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Hal tersebut menyebabkan anak hampir sama sekali tidak pernah mendapatkan pengajaran langsung dari guru dan anak harus belajar dan mengerjakan tugas secara mandiri. Dalam kondisi seperti itu, peran orang tua dalam mendampingi dan membantu anak belajar menjadi sangat penting agar anak tidak menjadi semakin tertinggal kemampuannya akibat kegiatan pembelajaran yang tidak efektif.

Sayangnya, kemampuan orang tua murid dalam memberikan pendampingan anak ketika belajar masih sangat beragam. Tidak semua orang tua murid merasa mampu untuk mendampingi anak belajar, terutama ketika anak mengalami kesulitan dalam memahami tugas yang diberikan oleh gurunya. Tingkat pendidikan orang tua sangat memengaruhi hal ini. Orang tua dengan tingkat pendidikan rendah, misalnya lulusan setingkat sekolah dasar, merasa tidak menguasai materi belajar anaknya sehingga menjadi penghambat bagi mereka untuk menolong anaknya ketika belajar.

Tingkat kepedulian orang tua murid terhadap kegiatan belajar anak juga menjadi faktor penting, terlepas orang tua tersebut memiliki kemampuan atau tidak dalam membantu anak ketika melakukan pembelajaran di rumah. Ada beberapa hal yang dianggap dapat memengaruhi tingkat atensi orang tua terhadap kegiatan belajar anak di rumah. *Pertama*, kedua orang tua yang bekerja, khususnya di wilayah perkotaan, sehingga tidak dapat mendampingi dan membantu anak belajar selama jam sekolah berlangsung (Wardani dan Ayriza, 2021). Terlebih lagi bagi orang tua yang harus berkegiatan di luar rumah dan baru berada di rumah ketika sore atau malam hari.

Kedua, selama ini kegiatan belajar anak dianggap sebagai tanggung jawab penuh sekolah dan guru. Sering kali interaksi antara guru dan orang tua hanya sebatas ketika anaknya bermasalah. Belum banyak orang tua yang aktif berkomunikasi dengan guru kelas untuk mendiskusikan perkembangan belajar anaknya secara rutin dan membahas hal apa yang harus dilakukan orang tua dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh sang anak.

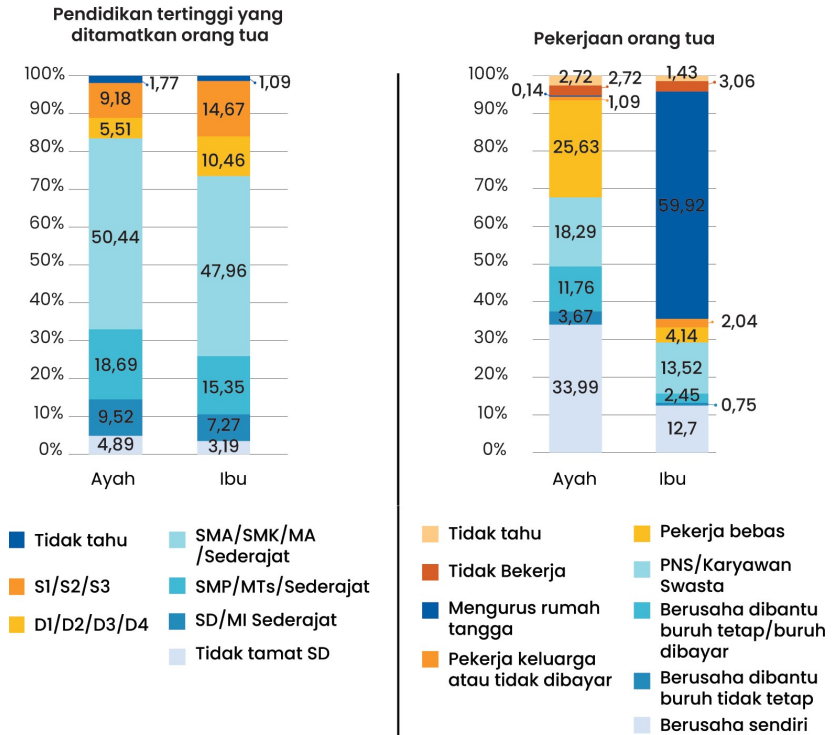
Tulisan ini mencoba melihat fenomena peran orang tua dalam mendampingi anak belajar selama pandemi dengan menganalisis informasi tentang orang tua murid yang dikumpulkan dalam beberapa studi pendidikan yang dilakukan oleh The SMERU Research Institute (SMERU). Sejak 2017, SMERU melaksanakan Program Research in Improving the System of Education (RISE) di Indonesia yang berfokus pada pendidikan dasar. Walaupun studi-studi RISE yang dilaksanakan oleh SMERU tidak secara langsung melihat bagaimana keterlibatan orang tua dalam pembelajaran anak di masa pandemi, informasi yang dikumpulkan melalui survei orang tua murid yang menjadi sampel studi ketika pandemi berlangsung dapat memberikan gambaran bagaimana orang tua murid berperan dalam kegiatan pembelajaran ketika aktivitas pembelajaran di sekolah masih dilarang.

Dalam analisis ini, data survei orang tua murid di Kota Bukittinggi dipilih untuk mewakili karakteristik orang tua murid di wilayah perkotaan yang cenderung tidak terlalu mengalami masalah infrastruktur yang dapat menghambat interaksi guru dan murid dalam kegiatan belajar di rumah. Namun di sisi lain, variasi jenis pekerjaan orang tua yang lebih beragam dapat menjadi tantangan bagi orang tua murid dalam meluangkan waktu mendampingi anaknya belajar. Sementara itu, gambaran terkait keterlibatan orang tua dalam mendampingi kegiatan belajar anak di wilayah perdesaan akan dilihat dari data survei orang tua murid yang dikumpulkan di Kabupaten Kebumen. Analisis informasi orang tua murid di Kabupaten Kebumen ini akan membantu kita untuk melihat pola pendampingan orang tua dan tantangan yang muncul di wilayah perdesaan.

Pendampingan Orang Tua Murid di Kota Bukittinggi

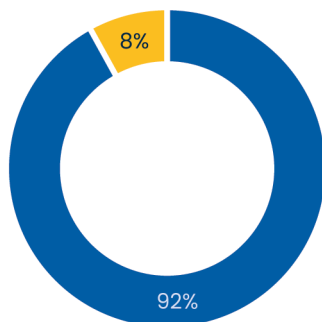
Kota Bukittinggi yang berjarak sekitar 100 km dari Ibu Kota Provinsi Sumatra Barat dikenal sebagai salah satu kota pendidikan di Indonesia. Masyarakat di kota seluas 25 km persegi tersebut terkenal memiliki kultur yang menempatkan pendidikan sebagai hal yang sangat penting dalam keluarga. Kota ini memiliki 64 unit sekolah dasar negeri dan swasta yang tersebar di tiga wilayah kecamatan.

Pada akhir 2020, tim peneliti studi RISE melakukan survei terhadap sekitar 1.500 orang tua murid di kota ini sebagai bagian dari salah satu studi dalam Program RISE. Dalam survei tersebut, para orang tua murid ditanyakan hal terkait pengalaman mereka dalam mendampingi anak belajar selama masa pandemi ini.



Grafik 1 Pendidikan dan Pekerjaan Orang Tua Murid

Dilihat dari tingkat pendidikan orang tua dalam sampel survei di Kota Bukittinggi ini (Grafik 1), sebagian besar orang tua memiliki tingkat pendidikan tertinggi minimal setingkat SMA/SMK/MA atau lebih tinggi. Namun masih ada sekitar 10% ayah dan 7% ibu yang tingkat pendidikannya masih sebatas SD/MI/ sederajat. Sementara dari pekerjaan yang dilakukan orang tua, sekitar 33% ayah dari murid sampel survei ini memiliki pekerjaan berusaha sendiri. Sedangkan ada sekitar 60% ibu yang berfokus untuk mengurus rumah tangga.



■ Mendampingi ■ Tidak mendampingi

Grafik 2 Pendampingan Orang Tua dalam Anak Belajar

Di Bukittinggi, di mana masyarakatnya memiliki kultur yang menempatkan pendidikan sebagai aspek yang sangat penting dalam kehidupan, orang tua murid cenderung memberikan perhatian yang besar terhadap kegiatan belajar anak. Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi sejak beberapa tahun terakhir menyelenggarakan program Sekolah Keluarga yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kapasitas orang tua, khususnya keluarga muda, dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak.¹

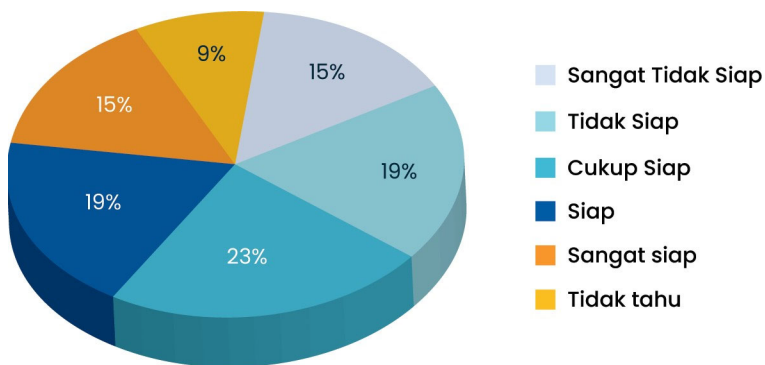
Sekitar 92% orang murid menyatakan bahwa mereka memberikan pendampingan anak dalam belajar selama pandemi ini (Grafik 2). Sementara itu, ada sekitar 8% orang tua yang menyebutkan bahwa mereka tidak pernah menemani anak belajar selama pandemi ini.

Sebagian orang tua yang tidak menemani anak dalam belajar mengatakan bahwa kesibukan menyebabkan mereka tidak memiliki waktu untuk menemani anak belajar. Selain itu, mereka merasa tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menemani anak belajar karena tidak memahami materi pelajaran anak mereka. Sedangkan beberapa orang tua juga menyebutkan bahwa anak mereka tidak didampingi karena sudah mendapatkan pendampingan belajar dari orang lain.

Walaupun sebagian besar orang tua dalam survei di Kota Bukittinggi ini menyebutkan bahwa mereka selalu mendampingi anak mereka dalam belajar,

1 http://binapemdes.kemendagri.go.id/blog/detil/sekolah_keluarga_cara_cerdas_tp_pkk_bukittinggi_b

sebenarnya masih banyak orang tua yang merasa tidak siap untuk memberikan pendampingan anak belajar selama pandemi ini. Seperti terlihat di Grafik 3, ketika orang tua ditanyakan seberapa siap mereka untuk mendampingi anak belajar, 15% orang tua mengakui bahwa mereka sangat tidak siap dan 19% lainnya mengatakan bahwa tidak siap. Sementara itu, ada 9% orang tua yang mereka sendiri tidak tahu apakah mereka siap atau tidak dalam melakukan pendampingan belajar anak. Di sisi lain, ada 15% yang menyatakan bahwa mereka sangat siap dan 19% lainnya siap dalam memberikan dukungan anak belajar melalui pendampingan.



Grafik 3 Tingkat Kesiapan Orang Tua dalam Mendampingi Anak

Hasil survei di Kota Bukittinggi tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa walaupun sebagian besar orang tua menyadari pentingnya pendidikan anak dan melakukan pendampingan anak dalam belajar selama pandemi ini, masih banyak orang tua yang sebenarnya merasa tidak siap untuk memberikan pendampingan belajar sehingga kegiatan belajar anak mungkin saja menjadi kurang optimal. Namun di sisi lain, data survei ini memberikan gambaran yang positif atas tingkat kesadaran orang tua dalam mendampingi anak, terlepas dari tingkat kesiapan mereka dalam melakukan pendampingan tersebut.

Tingkat kesadaran orang tua yang tinggi terhadap pendidikan anak tidak lepas dari kebiasaan masyarakat Minang yang selalu berusaha untuk menjadi individu yang unggul dibandingkan orang sekitarnya sehingga memberikan rasa bangga bagi diri sendiri dan keluarganya. Dalam beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti SMERU di Kota Bukittinggi, para murid sudah

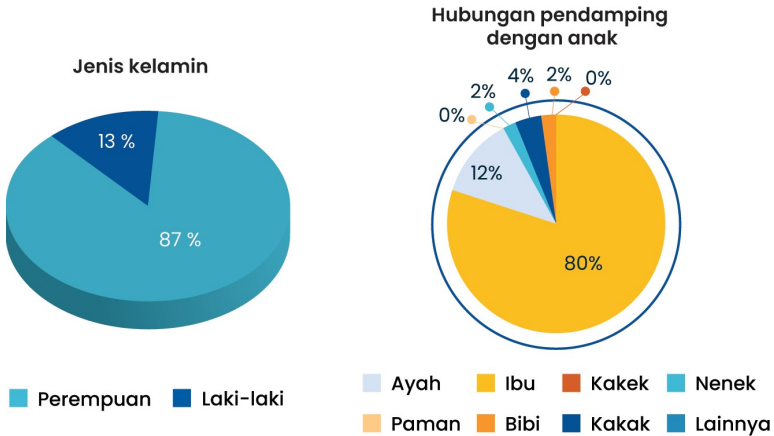
ditanamkan pandangan oleh para gurunya untuk memiliki prestasi terbaik dalam pendidikan. Orang tua pun tidak segan untuk mengeluarkan uang lebih demi pendidikan anak, seperti membiayai pelajaran tambahan di luar sekolah, agar anaknya dapat berprestasi. Masyarakat di Kota Bukittinggi memberikan apresiasi yang tinggi terhadap individu yang berprestasi sehingga memberikan motivasi pribadi bagi setiap orang untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik, termasuk dalam hal pendidikan.

Pendampingan Orang Tua Murid di Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen terletak di bagian selatan provinsi Jawa Tengah dan terdiri dari 26 kecamatan. Secara geografis, Kabupaten Kebumen memiliki karakteristik wilayah yang sangat bervariasi. Di bagian selatan berupa wilayah pantai di mana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sementara di bagian utara adalah wilayah pegunungan sehingga mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Sedangkan di bagian tengah yang merupakan pusat wilayah, para penduduk umumnya mencari penghasilan dengan membuka usaha ataupun menjadi pekerja kantor.

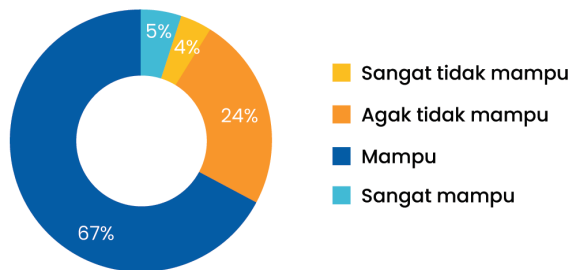
Pada pertengahan 2021, tim peneliti studi RISE melakukan survei terhadap sekitar 8.700 orang tua murid di Kabupaten Kebumen sebagai bagian dari studi. Survei terhadap orang tua murid ini secara khusus menggali informasi bagaimana orang tua memberikan pendampingan anak dalam belajar selama pandemi ini. Responden dari survei tersebut adalah orang tua murid (ayah atau ibu) yang secara aktif melakukan pendampingan anak dalam belajar.

Dari Grafik 4, terlihat bahwa mayoritas orang tua yang mendampingi anak belajar secara rutin adalah perempuan (87%). Sementara itu, sekitar 80% pendampingan anak belajar adalah ibu dan 12% lainnya adalah ayah. Ada sekitar 4% anak yang belajar di rumah dengan pendampingan dari kakak (laki-laki ataupun perempuan) dan masing-masing 2% pendampingan dilakukan oleh bibi atau nenek.



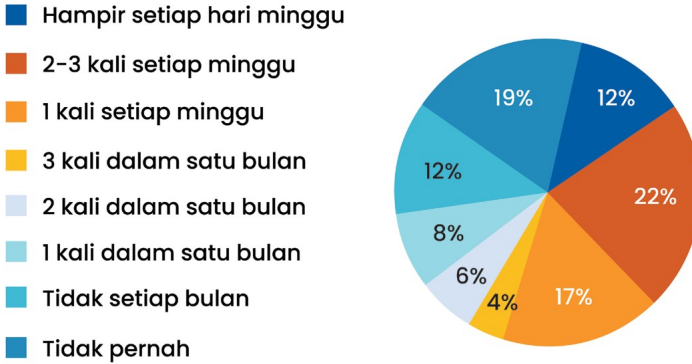
Grafik 4 Karakteristik Pendamping Anak Belajar Selama Pandemi

Mayoritas pendamping (67%) menyebutkan bahwa mereka merasa cukup mampu dalam mendampingi anak belajar (seperti terlihat di Grafik 5). Namun, masih ada sekitar 24% pendamping yang mengakui bahwa mereka merasa agak tidak mampu untuk memberikan pendampingan belajar dan sekitar 4% lainnya merasa sangat tidak mampu untuk melakukan hal tersebut.



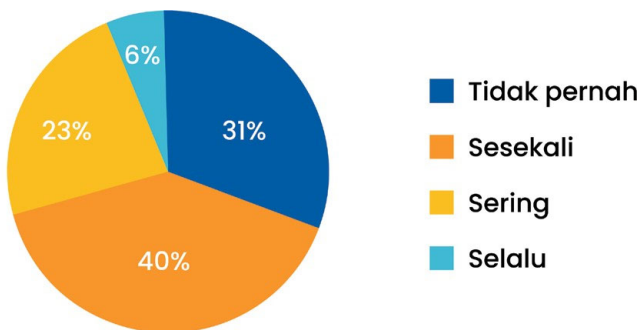
Grafik 5 Persepsi Tingkat Kemampuan dalam Mendampingi Anak Belajar

Sekitar 12% responden di Kabupaten Kebumen menyebutkan bahwa mereka secara rutin (hampir setiap hari) melakukan komunikasi dengan guru anak mereka (Grafik 6). Sementara 22% responden lainnya berkomunikasi sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Namun, masih cukup banyak orang tua murid (12%) yang mengakui bahwa mereka belum tentu sekali dalam sebulan berhubungan dengan guru, dan bahkan 19% orang tua mengatakan bahwa mereka tidak pernah berkomunikasi dengan guru selama pandemi ini.



Grafik 6 Frekuensi Komunikasi antara Pendamping Anak dengan Guru

Dalam berkomunikasi dengan guru, tidak semua orang tua aktif dan berinisiatif mendiskusikan perkembangan belajar anak dan membahas hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang tua agar anak dapat belajar dengan lebih baik. Seperti terlihat pada Grafik 7, sekitar 31% orang tua mengakui bahwa mereka tidak pernah berinisiatif untuk menanyakan bagaimana perkembangan anak mereka dengan wali kelas. Sementara 40% lainnya menyebutkan bahwa mereka sesekali membahas perkembangan belajar anak dengan guru. Hanya 6% orang tua yang secara aktif selalu membahas perkembangan belajar anaknya dengan guru sehingga dapat mengetahui apa yang mereka perlu lakukan agar dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada anak dalam belajar selama pandemi.



Grafik 7 Inisiatif Pendamping untuk Menanyakan Perkembangan Belajar Anak kepada Guru

Apa yang Dapat Dilakukan Orang Tua dalam Mendampingi Anak?

Dari pembahasan sebelumnya, kita melihat bahwa masih cukup banyak anak yang belum mendapatkan dukungan secara penuh dari orang tua dalam kegiatan belajar mereka. Kondisi ini dapat memberikan dampak negatif pada proses belajar mereka sehingga menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, sangat penting kesadaran orang tua untuk memberikan perhatian dan usaha untuk meningkatkan proses belajar anak-anak mereka. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan pembelajaran anak, yang tidak terbatas dilakukan hanya pada masa pandemi ini, tetapi juga ketika pembelajaran sudah kembali normal. Strategi pendampingan orang tua berikut ini diadaptasi dari berbagai sumber, seperti UNICEF, pemerintah negara bagian Australia, dan asosiasi orang tua guru negara bagian California.

Pertama, orang tua dapat memulai dengan menyiapkan kondisi yang nyaman dan mendukung anak dalam melakukan kegiatan belajar di rumah. Ruangan yang tenang dan fasilitas yang memadai, seperti pencahayaan ruangan yang cukup, akan membantu anak untuk dapat lebih berkonsentrasi dalam belajar. Selain itu, orang tua dapat meminimalkan hal-hal yang dapat mendistraksi konsentrasi anak, seperti tidak menyalakan televisi, radio, atau media lain yang dapat mengganggu fokus ketika mereka sedang belajar.

Kedua, dukungan orang tua juga dapat dilakukan dengan mendampingi secara aktif ketika anak belajar. Orang tua dapat memberikan bantuan kepada anak untuk memahami materi pelajaran ketika anak mengalami kesulitan. Selain itu, orang tua juga dapat mencarikan materi-materi belajar tambahan di luar bahan pelajaran inti dari sekolah untuk memperdalam pemahaman anak dan memperluas wawasan mereka terkait dengan materi pelajaran yang didapat.

Ketiga, komunikasi rutin antara orang tua dan guru menjadi salah satu kunci penting keberhasilan orang tua dalam mendukung belajar anak. Selama ini orang tua cenderung pasif dalam berkomunikasi dengan guru. Interaksi yang terjadi umumnya masih terbatas informasi satu arah dari guru kepada orang tua terkait tugas-tugas belajar anak ataupun ketika anak mengalami masalah di sekolah, seperti berkelahi dengan teman, dan orang tua dipanggil ke sekolah. Komunikasi ini umumnya dilakukan melalui berbagai media seperti

surat, ataupun saat ini sudah umum melalui grup Whatsapp wali murid, di mana tingkat keaktifan komunikasi dua arah cenderung sangat rendah.

Untuk meningkatkan kualitas interaksi antara orang tua dan guru, maka diperlukan inisiatif dari orang tua untuk secara aktif menanyakan perkembangan belajar anaknya secara khusus kepada wali kelas anak tersebut. Dengan adanya komunikasi aktif dan rutin, maka orang tua akan memahami secara mendalam perkembangan dan kebutuhan anaknya yang mungkin perlu mendapatkan atensi secara khusus dari orang tua. Selain itu, orang tua juga dapat mendiskusikan dengan guru cara yang paling tepat bagi orang tua dalam mendampingi anak ketika belajar sehingga aktivitas belajar anak dapat menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi anak.

Hal utama yang perlu disadari oleh orang tua ketika memberikan pendampingan anak dalam belajar adalah bagaimana orang tua dapat memberikan dukungan positif terhadap proses belajar anak. Orang tua perlu menyadari bahwa hal terpenting dalam pembelajaran anak adalah bagaimana anak dapat menjalani proses belajar dengan baik sehingga memahami substansi materi belajar yang didapat, dan tidak sekadar berorientasi pada hasil akhir yang dinilai melalui ujian ataupun penilaian lainnya.

Daftar Pustaka

- Alifia, U., Barasa, A.R., Bima, L., Revina, S., Pramana, R.P., Tresnatri, F.A. (2020). Belajar dari Rumah: Potret Ketimpangan Pembelajaran pada Masa Pandemi COVID-19. Catatan Penelitian SMERU 1/2020.
- Adiyudha, F.A.R., Sulistyawati, R.L., dan Antara. (2020). Catatan Kesemrawutan PJJ, dari Guru hingga Fasilitas. <https://www.republika.co.id/berita/qdrrgu328/catatan-kesemrawutan-pjj-dari-guru-hingga-fasilitas>
- Alifia, U., Barasa, A.R., Bima, L., Revina, S., Pramana, R.P., Tresnatri, F.A. (2020). Belajar dari Rumah: Potret Ketimpangan Pembelajaran pada Masa Pandemi COVID-19. Catatan Penelitian SMERU 1/2020.
- Adiyudha, F.A.R., Sulistyawati, R.L., dan Antara. (2020). Catatan Kesemrawutan PJJ, dari Guru hingga Fasilitas. <https://www.republika.co.id/berita/qdrrgu328/catatan-kesemrawutan-pjj-dari-guru-hingga-fasilitas>
- Rasmitadila, Aliyyah, R.R., Rachmadtullah, R., Samsudin, A., Syaodih, E., Nurtanto, M., dan Tambunan, A.R.S. (2020) The Perceptions of Primary School Teachers of Online Learning during the COVID-19 Pandemic

- Period: A Case Study in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, Vol 7 (2), 90-109
- Fuad, M., Ariyani, F., Suyanto, E., dan Shidiq, A.S. (2020). Exploring Teachers' TPCK: Are Indonesian Language Teachers Ready for Online Learning during the COVID-19 Outbreak? *Universal Journal of Educational Research*, 8(11B), 6091 - 6102. DOI: 10.13189/ujer.2020.082245.
- Gelfer, J.I. (1991) Teacher-Parent Partnerships: Enhancing Communications, *Childhood Education*, 67:3, 164-167, DOI: 10.1080/00094056.1991.10521602
- How to Support Student Learning at Home. <http://toolkit.capta.org/programs/family-engagement/how-to-support-student-learning-at-home/>
- Progressing Parental Engagement School Fact Sheet Supporting children's learning at home. http://www.det.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/807441/150897-Supporting-childrens-learning-at-home_2.pdf
- Borssard, M., Cardoso, M., Kamei, A., Mishra, S., Mizunoya, S., Reuge, N. (2020) Parental Engagement in Children's Learning. Innocenti Research Brief, 2020-09. <https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB%202020-09%20CL.pdf>
- Wardani, A. dan Ayriza, Y. (2021) Analisis Kendala Orang Tua dalam Mendampingi Anak Belajar di Rumah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Volume 5 (1), 772-782



**Menurunnya Partisipasi Sekolah
Selama Pandemi**
Ancaman untuk Kesetaraan
Akses Pendidikan

Menurunnya Partisipasi Sekolah Selama Pandemi

Ancaman untuk Kesetaraan Akses Pendidikan

~•~

Senza Arsendy, George Adam Sukoco, Rasita Ekawati Purba

S*chooling but not learning* atau dalam Bahasa Indonesia adalah bersekolah, namun tidak belajar merupakan frasa yang cukup sering digunakan untuk menggambarkan fenomena pendidikan yang umum terjadi sebelum pandemi. Kalimat itu menjelaskan bahwa sudah banyak anak-anak yang hadir di sekolah, namun hanya sedikit di antara mereka yang benar-benar belajar. Singkatnya, meningkatnya angka partisipasi sekolah anak, terutama di level sekolah dasar, tidak diiringi dengan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.

Namun demikian, frasa tersebut kurang tepat untuk menggambarkan fenomena yang terjadi selama pandemi. Beberapa analisis menunjukkan bahwa penutupan sekolah serta dampak turunan dari pandemi COVID-19 berpotensi menurunkan angka partisipasi sekolah. Misalnya, sebuah estimasi di negara berkembang menunjukkan bahwa memburuknya kondisi ekonomi, baik di level negara maupun rumah tangga, berpotensi menyebabkan lebih dari 500.000 siswa terpaksa harus putus sekolah (Asian Development Bank, 2021). Di Indonesia, temuan awal kajian yang dilakukan INOVASI¹ juga menunjukkan bahwa pandemi rentan menyebabkan anak untuk tidak bersekolah sekaligus putus sekolah. Jika dibiarkan maka kondisi ini akan memperparah ketimpangan pendidikan.

Tulisan ini merupakan analisis awal atas temuan studi Analisis Situasi Pembelajaran di Masa Pandemi yang dilakukan oleh INOVASI bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Kebijakan (Puslitjak) – saat ini Pusat Standar dan

¹ Inovasi Pendidikan untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) merupakan program kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di jenjang pendidikan dasar.

Kebijakan Pendidikan (PSKP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Studi dilakukan di 20 kabupaten/kota yang tersebar di 8 provinsi di Indonesia.² Responden utama dalam penelitian ini merupakan siswa kelas rendah, yaitu kelas 1-3 sekolah dasar (SD). Total ada sekitar 18.000 siswa dan orang tua serta 600 kepala sekolah dan 1.800 guru yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

Partisipasi Sekolah sebelum Pandemi

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara di dunia menunjukkan kemajuan terkait angka partisipasi sekolah (Pritchett & Banerji, 2013). Di level global, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menetapkan bahwa pada 2030, seluruh anak baik laki-laki maupun perempuan harus dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.³ Indonesia merupakan salah satu negara dengan peningkatan angka partisipasi yang cukup signifikan. Dalam konstitusinya, Indonesia memang menjamin hak pendidikan warga negara Indonesia (Ministry of National Development Planning et al., 2017).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011/2012 menunjukkan bahwa angka partisipasi murni (APM)⁴ sekolah dasar di Indonesia sudah hampir universal, yaitu sekitar 95,4% (Pillay & Haribowo, 2013). Analisis lain dengan menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) oleh Beatty et al. (2021) menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi juga terjadi di level pendidikan menengah. Di level Sekolah Menengah Pertama (SMP) tingkat partisipasi meningkat dari 71% di tahun 2000 ke 90% di tahun 2014. Selanjutnya di level Sekolah Menengah Atas (SMA), peningkatan terjadi dari 47% di tahun 2000 ke 71% di tahun 2014.

Peningkatan partisipasi bisa terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah munculnya berbagai kebijakan pendidikan yang progresif (Arsendy, 2018). Misalnya, peningkatan total anggaran pendidikan menjadi 20% dari anggaran total belanja. Kebijakan ini menjadi bagian dari amandemen UUD

2 Provinsi yang dipilih mewakili Indonesia bagian barat, yaitu Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara serta Indonesia bagian timur, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

3 Dikenal juga sebagai Sustainable Development Goals: <https://sdgs.un.org/goals/goal4>.

4 APM adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian (<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/568>).

1945 yang mulai diterapkan pada 2009 melalui Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Peningkatan anggaran pendidikan, termasuk alokasi dana daerah memungkinkan sistem pendidikan untuk memperluas akses, memperbaiki fasilitas pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru, serta menghapus biaya sekolah melalui mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Namun demikian, tingginya angka partisipasi tidak sejalan dengan peningkatan kualitas pembelajaran yang cenderung stagnan. Pengukuran yang dilakukan di level global menunjukkan bahwa siswa dari jenjang pendidikan menengah di Indonesia masih banyak yang belum menguasai keterampilan literasi dan numerasi dasar (UNICEF, 2020). Dibandingkan dengan siswa dari negara lain, performa siswa Indonesia baik di level dasar maupun menengah cenderung konsisten menjadi salah satu yang paling rendah.

Analisis lain yang dilakukan oleh Beatty et al. (2021) bahkan menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran di Indonesia tidak hanya stagnan, melainkan signifikan mengalami penurunan. Hal ini tampak pada penurunan kemampuan siswa yang berpartisipasi pada studi tersebut. Studi menemukan bahwa kemampuan rata-rata siswa kelas 7 (kelas 1 SMP) tahun 2014 pada subjek numerasi setara dengan kemampuan rata-rata siswa kelas 4 di tahun 2000.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang berhasil mendorong akses, belum tentu juga berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran. Anak-anak yang hadir di sekolah, tidak selalu memperoleh keterampilan baru dari proses pembelajaran. Pritchett & Banerji (2013) bahkan menyebutkan bahwa meningkatkan partisipasi tanpa memperbaiki kualitas pendidikan berpotensi membawa konsekuensi negatif untuk siswa. Lebih lanjut, mereka menyebut fenomena ini sebagai *learning poverty*.

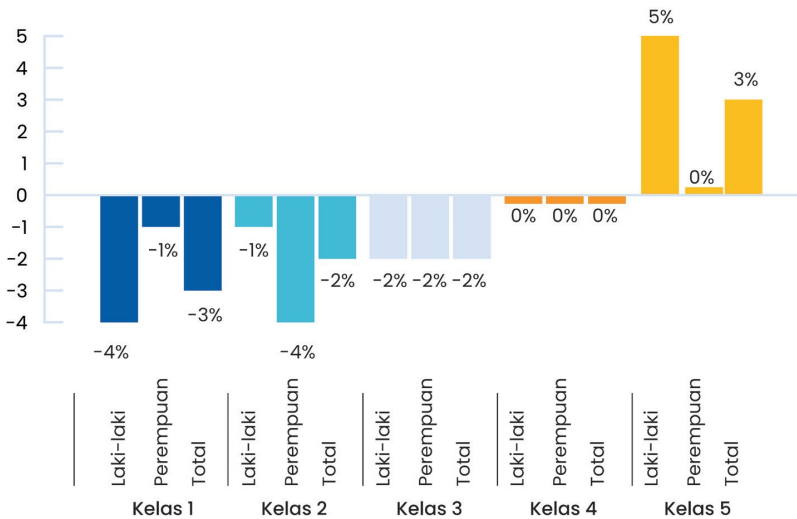
Partisipasi Sekolah Selama Pandemi

Seperti sudah disebutkan di atas, pandemi COVID-19 berdampak besar pada pendidikan di Indonesia. Tingkat partisipasi sekolah yang cenderung mendekati angka universal bisa terancam dengan banyaknya anak-anak, terutama dari kelompok rentan, yang berpotensi putus sekolah atau tidak mendaftar ke sekolah (UNICEF, 2020). Bagian ini memaparkan analisis awal terkait indikasi menurunnya partisipasi sekolah siswa di Indonesia dari studi yang dilakukan oleh INOVASI.

Out-of-school-children (OOSC) atau Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan kelompok anak usia sekolah dasar yang tidak berada di sekolah (Ministry of National Development Planning et al., 2017; UNICEF & UIS, 2015). ATS bisa merupakan mereka yang sama sekali tidak pernah terdaftar ke sekolah maupun mereka yang pernah bersekolah, namun putus di tengah jalan karena berbagai macam faktor. ATS banyak digunakan untuk menggambarkan partisipasi sekolah di suatu wilayah. Temuan awal INOVASI menunjukkan indikasi peningkatan ATS di wilayah studi.

Grafik 1 menggambarkan perbandingan total siswa terdaftar di wilayah studi pada tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021. Angka minus menggambarkan penurunan jumlah siswa terdaftar dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya angka positif menunjukkan peningkatan jumlah siswa. Grafik ini membantu kita untuk memahami perbedaan jumlah siswa baru yang terdaftar (kelas 1) dan potensi siswa putus sekolah (kelas 2-6).

Untuk kelas 1, secara keseluruhan ada penurunan sebanyak 3% total siswa yang terdaftar sebagai siswa baru kelas 1 di sekolah. Artinya, dibandingkan tahun 2019/2020, total siswa yang mendaftar sebagai siswa kelas 1 menurun sebanyak 3% di tahun 2020/2021. Berdasarkan gendernya, penurunan jumlah siswa laki-laki lebih banyak terjadi dibandingkan perempuan dengan selisih sebesar 3%



Grafik 1 Jumlah Siswa di Jenjang Sekolah Dasar
Tahun Ajaran 2019/2020 dan 2020/2021

Selanjutnya, Grafik 1 juga menggambarkan potensi putus sekolah yang tampak jelas terlihat pada siswa yang berada di kelas rendah yaitu kelas 2-4. Sementara jumlah siswa kelas 5 cenderung stagnan dan jumlah siswa kelas 6 cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan perhitungan lebih lanjut, rata-rata tingkat putus sekolah kelas 2-6 adalah hingga 0,78%. Terkait dengan gender, data di atas cenderung menampilkan hasil yang bervariasi dan belum dapat disimpulkan.

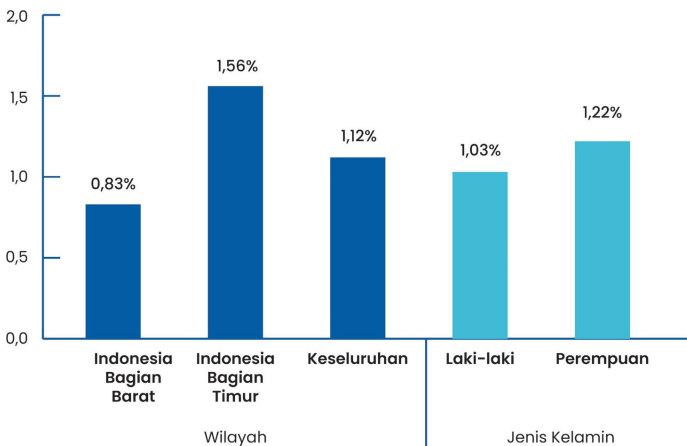
Penurunan partisipasi sekolah yang ditemukan di studi ini sejalan dengan beberapa analisis lain yang dilakukan untuk melihat dampak pandemi pada keikutsertaan anak pada proses pembelajaran. Penutupan sekolah, pembelajaran dengan mode dalam jaringan (daring), serta keterpurukan kondisi ekonomi, baik di level institusi maupun rumah tangga dianggap mengancam nasib sekolah anak (Asian Development Bank, 2021). Studi yang dilakukan oleh Hoeurn (2021) di Kamboja menemukan bahwa rata-rata tingkat putus sekolah di sana selama pandemi adalah sekitar 1,8%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan temuan yang dipaparkan di sini.

Selanjutnya, analisis dalam studi ini juga menunjukkan bahwa potensi penurunan siswa baru yang belum pernah terdaftar ke sekolah cenderung lebih tinggi dibandingkan potensi siswa putus sekolah (sudah pernah sekolah sebelumnya) yaitu 3% berbanding 0,78%. Tingginya angka penurunan partisipasi siswa kelas 1 dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. *Pertama*, keluarga memang sengaja tidak mengirimkan anaknya ke sekolah. Hal ini bisa terjadi baik karena isu pembelajaran yang dianggap kurang efektif—sehingga sebaiknya sekolah ditunda, atau karena isu lain, seperti misalnya keterbatasan ekonomi. Jika siswa belum pernah bersekolah, maka orang tua harus menyiapkan uang untuk membeli peralatan sekolah, termasuk seragam yang harus disediakan secara mandiri. *Kedua*, keluarga mengalami kendala mendaftarkan anak ke sekolah. Kendala ini bisa dalam bentuk kurangnya informasi dan sosialisasi. Keterbatasan teknologi di sebagian tempat membuat orang tua kesulitan untuk berkomunikasi dengan sekolah. Selain itu, sistem pendaftaran siswa secara daring yang dianjurkan oleh pemerintah berpotensi juga mengeksklusi keluarga, khususnya dari kelompok rentan, untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah.

Siapa Saja yang Partisipasi Sekolahnya Menurun dan Mengapa?

Dalam kondisi normal atau kondisi sebelum bencana pandemi COVID-19, sudah diketahui adanya kesenjangan yang terjadi di dunia pendidikan. Kesenjangan ini ditengarai terjadi tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga ditemui di negara-negara maju (Maldonado & Witte, 2020; Psacharopoulos et al., 2020). Pada konteks pandemi, kesenjangan diperkirakan menjadi lebih lebar dan memberikan dampak negatif yang lebih besar bagi anak-anak yang kurang beruntung sehingga mengalami lebih banyak kesulitan untuk bisa berpartisipasi penuh dalam pembelajaran ataupun untuk mengakses pendidikan bermutu.

Bagian ini menjelaskan tentang kesenjangan yang terjadi terkait tingkat partisipasi siswa dalam mengakses pembelajaran di masa pandemi. Data diambil dari 20 kabupaten yang menjadi sampel dari studi ini. Grafik 2 menggambarkan perbandingan jumlah siswa kelas 1-5 di tahun ajaran 2019/2020 dengan jumlah siswa kelas 2-6 di tahun ajaran 2020/2021. Secara keseluruhan, studi ini menemukan penurunan jumlah siswa hingga sebesar 1,12%. Persentase ini tampak tidak terlalu mencolok, namun persentase ini mewakili 1.168 siswa dari total siswa sebanyak 104.092 orang. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa secara rata-rata terdapat 2 siswa yang berisiko putus sekolah di setiap sekolah.



Grafik 2 Penurunan Jumlah Siswa berdasarkan Analisis Kohort Tahun Ajaran 2019/2020 dan 2020/2021⁵

5 Siswa kohort ini merujuk pada siswa kelas 1-5 di Tahun Ajaran 2019/2020 dan kelas 2-6 di Tahun Ajaran 2020/2021

Selain itu, Data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) menunjukkan bahwa persentase putus sekolah di tingkat nasional pada 2019 adalah 0,12%.⁶ Temuan studi ini menunjukkan bahwa risiko putus sekolah akibat pandemi jauh lebih tinggi dibandingkan data tersebut. Namun demikian, interpretasi atas perbandingan data ini perlu dilakukan secara hati-hati mengingat sampel dalam penelitian ini lebih terbatas. Artinya, risiko putus sekolah secara nasional bisa saja jauh lebih tinggi/lebih rendah dari temuan di studi ini.

Selanjutnya, studi ini menunjukkan bahwa indikasi putus sekolah terjadi secara beragam di wilayah penelitian. Beberapa daerah memiliki tingkat indikasi putus sekolah yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka putus sekolah di level nasional sebelum pandemi. Temuan lain menunjukkan bahwa bila dibandingkan antara kawasan timur dan kawasan barat Indonesia⁷, kasus putus sekolah lebih banyak terjadi di kawasan timur. Temuan ini menunjukkan pentingnya untuk melihat lebih jauh kerentanan siswa putus sekolah dengan tinjauan di tingkat lokal.

Tabel 1 menggambarkan jenis data serupa di 20 kabupaten. Bila dilihat antarwilayah, ditemukan bahwa kasus putus sekolah bervariasi antardaerah. Secara keseluruhan, kecenderungan putus sekolah terjadi di mayoritas wilayah (16 dari 20). Indikasi yang paling tinggi terjadi di Tanjung Jabung Timur, Sumba Barat Daya, Bima, Halmahera Tengah, dan Sumba Barat. Sedangkan daerah seperti Bulungan, Buton Selatan, Nagekeo, dan Sumenep, tidak ditemukan indikasi anak putus sekolah.

Tabel 1 Perbandingan Persentase Jumlah Siswa TA 2019/2020 (Kelas 1-5) dan TA 2020/2021 (Kelas 2-6) di 20 Kabupaten

| Kabupaten/Kota | Total | Laki-Laki | Perempuan |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|
| Kab. Bima | -4,2% | -4,0% | -4,6% |
| Kab. Bulungan | 0,2% | 1,6% | -1,1% |
| Kab. Buton Selatan | 0,1% | 2,3% | -2,0% |
| Kab. Halmahera Tengah | -3,6% | 0,0% | -7,5% |

6 <https://npd.kemdibud.go.id>

7 Wilayah penelitian yang ada di Kawasan Barat adalah Kabupaten Tanjung Jabur dan Kota Jambi (Jambi), Kabupaten Probolinggo dan Sumenep (Jatim), Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, dan Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan), dan Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung (Kalimantan Utara). Kawasan Timur Indonesia meliputi Kabupaten Bima, Lombok Tengah, dan Lombok Timur (NTB), Kabupaten Nagekeo, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya (NTT), Kabupaten Buton Selatan dan Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), dan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate (Maluku Utara).

| Kabupaten/Kota | Total | Laki-Laki | Perempuan |
|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| Kab. Hulu Sungai Utara | -1,1% | -1,4% | -0,9% |
| Kab. Konawe Selatan | -1,2% | -0,5% | -2,0% |
| Kab. Lombok Tengah | -1,3% | -1,9% | -0,7% |
| Kab. Lombok Timur | -0,3% | -1,0% | 0,4% |
| Kab. Malinau | -0,31% | -0,04% | -0,62% |
| Kab. Nagekeo | 0,2% | -1,1% | 1,6% |
| Kab. Probolinggo | -1,0% | -0,6% | -1,4% |
| Kab. Sumba Barat | -2,2% | -3,4% | -0,6% |
| Kab. Sumba Barat Daya | -5,8% | -6,4% | -5,1% |
| Kab. Sumenep | 0,1% | 0,8% | -0,6% |
| Kab. Tabalong | -1,4% | -2,0% | -0,8% |
| Kab. Tana Tidung | -1,3% | 0,9% | -3,8% |
| Kab. Tanjung Jabung Timur | -8,9% | -9,9% | -7,8% |
| Kota Banjarmasin | -0,9% | 0,1% | -1,8% |
| Kota Jambi | -0,3% | -0,2% | -0,4% |
| Kota Ternate | -1,1% | -1,7% | -0,4% |

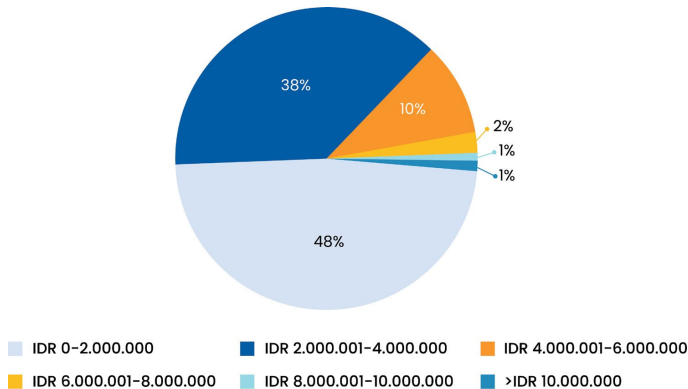
Selanjutnya, berdasarkan gender, Grafik 2 menampilkan bahwa indikasi putus sekolah siswa perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan siswa laki-laki, yaitu 1,22% berbanding 1,03%. Tabel 1 menunjukkan bahwa temuan tersebut tidak universal melainkan bervariasi antarwilayah. Untuk siswa perempuan, indikasi paling tinggi dapat ditemukan di Bima, Halmahera Tengah, Sumba Barat Daya, Tana Tidung, dan Tanjung Jabung Timur. Sementara untuk siswa laki-laki, indikasi putus sekolah tertinggi ada di Bima, Sumba Barat Daya, dan Tanjung Jabung Timur.

Dua temuan tersebut sekaligus menggambarkan bahwa Halmahera Tengah dan Tana Tidung merupakan dua area di mana perempuan memiliki kondisi yang lebih rentan dibandingkan laki-laki. Selisih indikasi putus sekolah di Halmahera Tengah dan Tana Tidung masing-masing adalah 7% dan 3%, di mana perempuan merupakan kelompok yang lebih rentan. Selanjutnya, Sumba Barat merupakan daerah di mana akses pendidikan siswa laki-laki signifikan lebih rendah dibandingkan siswa perempuan.

Variasi gender antarwilayah ini menunjukkan bahwa isu gender pada fenomena putus sekolah perlu mempertimbangkan kajian lokal dan faktor-faktor signifikan yang ada di daerah. Analisis yang menunjukkan bahwa ada kelompok gender tunggal yang jauh lebih rentan dibanding kelompok gender

lainnya cenderung menyimplifikasi fenomena dan mengabaikan faktor-faktor kontekstual. Analisis yang kontekstual bermanfaat untuk memahami solusi yang bisa direkomendasikan untuk pengentasan masalah. Dalam analisis ini, pemahaman tersebut ada di luar lingkup analisis yang berusaha menunjukkan indikasi putus sekolah.

Selain aspek gender, ada faktor-faktor lain untuk mengenali kelompok-kelompok anak yang rentan untuk putus sekolah. Salah satu faktor yang ditemukan dalam studi ini adalah faktor ekonomi keluarga. Dari responden yang berjumlah lebih dari 18 ribu keluarga, ditemukan bahwa anak usia sekolah yang tidak bersekolah, mayoritas berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi terbatas.⁸ Sekitar 48% dari mereka berasal dari keluarga dengan pengeluaran berkisar 2 juta rupiah per bulan atau kurang. Sementara itu, sekitar 38% berasal dari keluarga dengan pengeluaran 2-4 juta rupiah per bulan. Dua kelompok ini adalah dua kelompok dengan penghasilan terendah. Dengan demikian, hampir semua anak usia sekolah namun tidak bersekolah berasal dari keluarga dengan ekonomi terbatas.



Grafik 3 Persentase Siswa Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah dan Status Ekonomi Keluarga

Temuan ini diperkuat dengan pendapat guru yang menyatakan bahwa kelompok siswa yang paling rentan mengalami putus sekolah adalah siswa dari keluarga miskin. Kelompok paling berisiko berikutnya adalah siswa yang tidak memiliki akses ke internet maupun perangkat komunikasi. Dua fasilitas ini

8 Kemampuan ekonomi keluarga ini menggunakan proksi pengeluaran keluarga dalam satu bulan terakhir (INOVASI, 2021).

penting untuk mendukung pembelajaran yang dijalankan dari rumah. Keluarga dengan ekonomi terbatas memiliki keterbatasan untuk bisa menyediakan fasilitas internet dan perangkat komunikasi yang memadai bagi anak-anak mereka untuk mengikuti pembelajaran daring.

Selanjutnya, Tabel 2 memperlihatkan beberapa faktor lain yang dianggap guru meningkatkan risiko putus sekolah, di antaranya keutuhan keluarga, disabilitas, tingkat pendidikan orang tua, dan bahasa utama yang digunakan anak di rumah. Bagi anak-anak yang bahasa ibunya adalah bahasa daerah, studi ini memperkirakan bahwa mereka memiliki risiko lebih besar karena tidak menguasai bahasa pengantar dan materi belajar yang pada umumnya menggunakan bahasa Indonesia.

Tabel 2 Persentase Persepsi Guru terkait Faktor-faktor Penyebab Putus Sekolah

| Latar Belakang Siswa | Persentase Persepsi Guru |
|------------------------|--------------------------|
| Kab. Bima | 15% |
| Kab. Bulungan | 8% |
| Kab. Buton Selatan | 22% |
| Kab. Halmahera tengah | 19% |
| Kab. Hulu Sungai Utara | 18% |
| Kab. Konawe Selatan | 14% |
| Kab. Lombok Tengah | 14% |
| Kab. Lombok Timur | 14% |
| Kab. Malinau | 13% |
| Kab. Nagekeo | 8% |

Dari wawancara dengan orang tua dan juga diperkuat dengan data menurunnya jumlah siswa seperti diuraikan di atas, terdapat kecenderungan risiko lebih besar menurunnya tingkat partisipasi sekolah pada kelas rendah dibanding kelas tinggi. Demikian juga ditengarai lebih besarnya risiko putus sekolah di jenjang lebih rendah dibandingkan jenjang lebih tinggi. Studi yang dilakukan oleh Sahadewo & Irhamni (2020) menemukan bahwa orang tua siswa kelas 1 sampai kelas 4 cenderung menghadapi tantangan yang lebih konsisten dan berat bila dibandingkan orang tua dari siswa kelas 5 dan 6.

Berbagai permasalahan pendidikan yang terkait dengan faktor ekonomi maupun keterbatasan fasilitas, pada dasarnya adalah problem yang juga ditemui sebelum masa pandemi. Di masa pandemi yang memaksa pembelajaran

dilaksanakan secara berbeda, faktor-faktor penghambat ini memperberat kesulitan yang dihadapi. Sekolah, guru, keluarga dan siswa harus beradaptasi dengan cara belajar yang berbeda, baik melalui pembelajaran daring, luring, maupun campuran keduanya. Masalah baru pun muncul, seperti akses internet, fasilitas komunikasi, kurikulum, dan materi pembelajaran yang perlu disesuaikan. Kesulitan ini dibarengi dengan tekanan yang dihadapi terkait dengan aspek kesehatan: memastikan pencegahan, mengurus keluarga yang terkena COVID-19 maupun keluarga yang meninggal dunia. Berkelindannya masalah ini berpengaruh pada aspek psikososial, terutama pada anak-anak.

Guru dan orang tua memiliki pendapat yang sama bahwa faktor turunnya motivasi belajar adalah salah satu dampak nyata dari pandemi dan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat partisipasi siswa. Guru memiliki pandangan bahwa siswa laki-laki lebih terpengaruh motivasi belajarnya dibandingkan siswa perempuan. Turunnya motivasi belajar diperkuat dengan temuan bahwa siswa yang belajar dengan sistem belajar dari rumah (BDR) saja cenderung kurang menikmati pembelajaran. BDR membuat mereka tidak bisa bertemu teman dan hal ini menjadi alasan utama mengapa mereka kurang bahagia (67%). Alasan lainnya adalah mereka sulit untuk fokus belajar (25%) dan lebih sulit untuk meminta bantuan guru (13%). Wahana Visi Indonesia (2020) menemukan hal yang sama: 50% siswa bosan BDR dan sekitar 55% siswa merasa khawatir dengan COVID-19 dan rindu dengan temannya. Kondisi psikososial siswa ini sama pentingnya dengan perhatian terhadap masalah hasil belajar siswa dan tingkat partisipasi siswa karena aspek ini akan berpengaruh juga pada hasil belajar dan pada upaya memastikan anak tetap belajar.

Sementara itu Save the Children (2020) menyoroti secara khusus dampak COVID-19 terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Sebagian besar orang tua dari siswa penyandang disabilitas maupun siswa itu sendiri menyatakan kekhawatiran tidak bisa terus mengikuti pelajaran. Sementara itu, hampir semua ibu dari siswa penyandang disabilitas merasa kurang percaya diri untuk kembali bersekolah. Studi INOVASI (2020) juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang siap untuk menyelenggarakan pendidikan di masa pandemi yang bisa memenuhi kebutuhan khusus dari siswa penyandang disabilitas. Pemerintah daerah cenderung untuk menyerahkan kepada sekolah ataupun guru. Sementara itu, guru pun memiliki keterbatasan dan sedikit guru yang memberikan layanan khusus bagi siswa penyandang disabilitas (Arsendy et al., 2020).

Dari uraian di atas, bisa disimpulkan beberapa temuan yang memengaruhi tingkat partisipasi belajar di masa pandemi. *Pertama*, risiko putus sekolah pada siswa sekolah dasar lebih besar di masa pandemi meskipun kondisi antarwilayah sangat bervariasi. Tidak dimiliki cukup informasi untuk menjelaskan konteks lokal masing-masing wilayah untuk menjelaskan temuan ini. *Kedua*, sangat penting untuk memilah data berdasarkan jenis kelamin untuk mengetahui risiko putus sekolah yang dialami secara berbeda oleh anak laki-laki dan anak perempuan yang juga sangat bervariasi kasusnya di masing-masing wilayah. Konteks lokal bisa jadi memengaruhi hal ini. *Ketiga*, adanya faktor psikososial siswa, seperti menurunnya motivasi belajar, yang saling berkait dengan faktor-faktor lain, seperti ancaman kesehatan, meningkatnya hambatan yang dirasakan karena cara belajar yang berbeda, dan keterbatasan-keterbatasan yang sudah dialami sebelumnya dan semakin besar tantangannya di masa pandemi. Dengan demikian perlu kiranya pemerintah daerah memiliki informasi memadai untuk bisa memetakan potensi putus sekolah ini berbasis pada berbagai variabel, seperti jenis kelamin dan juga variabel lainnya yang bisa bersifat konteks lokal. Pemetaan yang tepat akan membantu penanganan pada target yang lebih tepat sasaran.

Dampak Menurunnya Partisipasi Sekolah

Beberapa studi menemukan bahwa menurunnya tingkat partisipasi sekolah dalam konteks COVID-19 berpotensi menyebabkan berbagai dampak negatif dalam jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya adalah penurunan kemampuan kognitif siswa, berkurangnya potensi pendapatan siswa di masa depan, terganggunya perkembangan sosial dan emosional anak. Jika ini dibiarkan, penurunan partisipasi sekolah ini dapat mengancam bonus demografi.

Pertama, sebuah studi dalam konteks pandemi yang dilakukan pada siswa jenjang kelas 3-8 di Amerika Serikat, menemukan bahwa tidak berpartisipasi dalam 10 hari pembelajaran setara dengan kehilangan 5% standar deviasi untuk mata pelajaran literasi dan 8% standar deviasi untuk mata pelajaran matematika (Santibañez & Guarino, 2021). Angka ini setara dengan kehilangan satu bulan progres pembelajaran.⁹ Lebih lanjut, studi ini menemukan bahwa siswa dari kelompok rentan terutama siswa dari keluarga miskin, siswa penyandang disabilitas, dan tunawisma memiliki risiko untuk mengalami

9 <https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/about-the-toolkits/attainment/>

penurunan nilai hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang lain sehingga tingkat kesenjangan antarmurid semakin melebar.

Kedua, dalam jangka panjang, penurunan partisipasi sekolah akan mengurangi produktivitas dan pendapatan seumur hidup siswa. Analisis yang dilakukan oleh Asian Development Bank (2021) di negara berkembang di Asia menemukan bahwa COVID-19 telah menyebabkan 506.130 anak mengalami *drop out* dan faktor ekonomi keluarga menjadi alasan utama mengapa siswa mengalami hal tersebut. Penurunan partisipasi sekolah selama setahun akan mengurangi pendapatan siswa di masa depan hingga 9,7% setiap tahun. Dalam konteks makro, hal ini akan menyebabkan kerugian sebesar 1.25 triliun dolar atau kurang lebih setara dengan 5,4% Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Untuk Indonesia, Yarrow et al. (2020) mengestimasi siswa di Indonesia mengalami potensi kehilangan pendapatan sebanyak 7 juta rupiah per tahun akibat penutupan sekolah selama 8 bulan atau setara dengan 13,5% PDB Indonesia pada 2019.

Ketiga, ketidakhadiran siswa dalam proses pembelajaran akan mengganggu perkembangan kemampuan sosial dan emosional siswa. Kesadaran sosial¹⁰, tingkat efikasi diri¹¹, kemampuan manajemen diri¹² dan pola pikir berkembang¹³ menjadi faktor penting penentu tingkat keberhasilan siswa di masa depan ketika masuk ke perguruan tinggi, dunia kerja, dan kehidupan berbangsa/bernegara (Kanopka et al., 2020). Dalam konteks pandemi, Santibañez & Guarino (2021) menemukan bahwa menurunnya partisipasi siswa akibat pandemi, secara signifikan menurunkan kemampuan sosial dan emosional siswa terutama pada aspek kesadaran sosial, efikasi diri, dan manajemen diri. Efek tersebut ditemukan jauh lebih besar terjadi pada anak di jenjang sekolah menengah dibandingkan anak di jenjang sekolah dasar.

Terakhir, menurunnya tingkat partisipasi sekolah berpotensi mengancam bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Tahun 2030- 2040 diperkirakan menjadi puncak bonus demografi Indonesia, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif.¹⁴

10 Kemampuan untuk berempati dengan orang lain dari berbagai latar belakang budaya dan nilai.

11 Keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan.

12 Kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif dalam situasi yang berbeda.

13 Keyakinan bahwa kecerdasan seseorang dapat dilatih dan tumbuh melalui usaha.

14 <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/02/25/pandemi-mengancam-bonus-demografi/>

Bonus demografi hanya akan menjadi suatu keuntungan jika generasi muda mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik serta layak untuk mengembangkan kualitas diri. Dalam situasi normal penyediaan fasilitas ini masih menjadi tantangan tersendiri di Indonesia, di mana 3 dari 5 tenaga kerja di Indonesia hanya merupakan lulusan SMP atau di bawahnya¹⁵ dan adanya ketidaksesuaian antara kemampuan yang diharapkan di dunia kerja dengan apa yang diajarkan di sekolah. Konteks pandemi akan semakin memperbesar tantangan yang dihadapi pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang baik.

Sebagai contoh, proses BDR menghadapi banyak hambatan karena faktor ketimpangan akses fasilitas pembelajaran dan tidak meratanya kemampuan guru (Usman, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa bisa jadi anak tetap terdaftar di sekolah, namun tidak berpartisipasi dalam pembelajaran sehingga menyebabkan hilangnya capaian belajar siswa dan berimplikasi kepada produktivitas dan daya saing siswa di masa depan. Sebagai catatan, siswa sekolah dasar yang saat ini mengalami dampak negatif BDR akan memasuki angkatan kerja pada 2030 atau pada saat puncak bonus demografi. Dalam konteks ini, seluruh pemangku kepentingan yang relevan harus berkolaborasi untuk mengatasi tantangan ini agar bonus demografi tetap menjadi suatu keuntungan dan bukan kutukan.

Mencegah ATS dengan Meningkatkan Supply dan Demand Layanan Pendidikan

Tulisan ini menggambarkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak serius pada partisipasi belajar siswa. Angka partisipasi yang sudah hampir universal, khususnya di tingkat dasar, bisa terancam akibat kondisi ini. Mereka yang belum sekolah terancam untuk tidak sekolah. Mereka yang sudah ada di sekolah, terancam putus sekolah. Meskipun hal ini dapat terjadi pada banyak anak, mereka yang berasal dari kelompok rentan relatif mengalami dampak yang lebih besar.

Jika kondisi ini dibiarkan, maka masa depan anak-anak Indonesia berpotensi terancam. Hilangnya partisipasi belajar siswa diprediksi akan menurunkan kemampuan kognitif siswa, pendapatan siswa di masa depan, hingga terganggunya perkembangan sosial dan emosional anak. Bonus demografi yang banyak digadang-gadang, bisa jadi hanya akan menjadi mitos.

15 <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190614153137-17-78468/sri-mulyani-sebut-59-pekerja-lulusan-smp-fakta-lebih-ngenes>

Beberapa pilihan kebijakan dapat diambil oleh pemangku kepentingan untuk mencegah bertambah banyaknya jumlah ATS dan memitigasi dampak menurunnya partisipasi belajar siswa selama pandemi. Rekomendasi ini fokus pada dua aspek, yaitu meningkatkan dan memperbaiki sisi *supply* dan *demand* layanan pendidikan (Tabel 3).

Tabel 3 Rekomendasi Kebijakan untuk Menekan Jumlah ATS

| Kebijakan | Detail Kebijakan | Contoh Praktik |
|--|--|---|
| Fokus pada Peningkatan dan Perbaikan Supply | | |
| Peningkatan Jumlah Fasilitas Belajar | Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan yang lebih banyak pada peserta didik | <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sekolah di daerah terpencil, termasuk penyediaan kelas jauh/kelas kecil untuk wilayah dengan jumlah penduduk terbatas • Pembangunan Taman Baca Masyarakat, Perpustakaan Desa yang memungkinkan anak untuk belajar secara informal meskipun sekolah harus ditutup • Dufio (2001) menunjukkan bahwa pembangunan layanan pendidikan yang masif dilakukan di periode 1973–1978 berhasil meningkatkan angka partisipasi belajar dan pendapatan siswa di masa berikutnya |
| Peningkatan Ragam Model Pembelajaran Alternatif | Sejalan dengan peningkatan akses, kebijakan ini fokus pada peningkatan akses dengan menambah ragam model pendidikan. | <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan kelas tambahan untuk siswa yang partisipasinya menurun selama pandemi. Kegiatan ini dapat dilakukan di luar jam sekolah. • Penyediaan beragam program paket yang memungkinkan siswa untuk belajar di luar jam sekolah. • Banerjee at.al. (2016) menemukan bahwa salah satu pendekatan alternatif yaitu pengajaran sesuai level kemampuan siswa yang sudah tertinggal sebelumnya. Pendekatan ini efektif untuk diimplementasi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. |

| Kebijakan | Detail Kebijakan | Contoh Praktik |
|--|---|---|
| Pelatihan Guru | Kebijakan ini berusaha mendorong guru-guru untuk lebih sensitif dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Selain itu, guru yang memahami keadaan siswa bisa mencegah siswa untuk terputus dari aktivitas belajar di sekolah | <ul style="list-style-type: none"> • Untuk bisa melaksanakan pembelajaran alternatif, termasuk misalnya adalah mengajar anak-anak di kelas jauh, maka guru perlu dilatih dengan keterampilan mengajar kelas rangkap, yaitu pengajaran yang memungkinkan guru untuk mengajar anak-anak dari lintas kelas pada waktu yang sama. • Di Indonesia, kebutuhan akan pembelajaran kelas rangkap relatif tinggi dengan sumber daya yang relatif terbatas. • Di Jawa Timur, studi yang dilakukan oleh INOVASI menunjukkan bahwa keterampilan guru merupakan hal esensial untuk menunjang implementasi kelas rangkap. |
| Fokus pada Peningkatan dan Perbaikan Demand | | |
| Bantuan Beasiswa dan Fasilitas Belajar | Kebijakan ini berusaha untuk mengurangi beban rumah tangga terkait pengeluaran pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> • Distribusi beasiswa dan fasilitas pembelajaran ke kelompok rentan dan marginal. Pemberian beasiswa ini harus disertai dengan data yang valid dan reliabel untuk memasyikan bahwa kebijakan bisa tepat sasaran. • Di Indonesia riset yang dilakukan oleh Sparrow (2007) menunjukkan bahwa pemberian beasiswa efektif untuk melindungi kelompok rentan saat krisis terjadi di akhir tahun 1990-an. Bantuan ini berhasil meningkatkan partisipasi sekolah siswa khususnya dari kelompok miskin dan daerah tertinggal. |

| Kebijakan | Detail Kebijakan | Contoh Praktik |
|--|---|--|
| <p>Bantuan Finansial ke Rumah Tangga</p> | <p>Sama dengan kebijakan sebelumnya, kebijakan ini fokus pada stimulus insentif. Bantuan ini berpotensi mengurangi <i>opportunity cost</i> rumah tangga ketika anaknya bersekolah (Sharma & Ng, 2014), yang kemudian dapat meningkatkan <i>demand</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan ini bisa diberikan baik dengan syarat (<i>conditional cash transfer</i>) maupun tanpa syarat (<i>unconditional cash transfer</i>). Bantuan pertama dapat diberikan untuk kelompok miskin yang anaknya bersekolah. Bantuan kedua dapat diberikan untuk kelompok miskin yang anaknya bersekolah atau tidak bersekolah • Riset tentang CCT di Indonesi, misalnya pada Program Keluarga Harapan, menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak positif pada tingkat partisipasi sekolah anak dari rumah tangga penerima bantuan (Nazara & Rahayu, 2013). Cahyadi et.al. (2018) menemukan bahwa dampak positif ini berlangsung bahkan hingga 6 tahun dari program diluncurkan. • Terkait bantuan UCT, studi yang dilakukan oleh Izzati et. al. (2020) menunjukkan bahwa UCT tidak meningkatkan perilaku berisiko rumah tangga miskin. Dengan kata lain, UCT tidak digunakan secara sembarangan, melainkan memang untuk kepentingan sehari-hari rumah tangga miskin. |
| <p>Kampanye kepada orang tua tentang pentingnya sekolah.</p> | <p>Kebijakan ini berusaha untuk meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini bisa dilakukan dengan melibatkan anggota masyarakat serta tokoh agama. • Kampanye tentang pentingnya sekolah perlu dikaitkan dengan fenomena-fenomena sosial yang menyebabkan anak putus sekolah, misalnya perkawinan di usia anak dan tenaga kerja anak. |

| Kebijakan | Detail Kebijakan | Contoh Praktik |
|-----------|------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Meskipun semua orang tua, termasuk yang dari rumah tangga miskin, peduli dengan anaknya. Pemahaman tentang pentingnya gelar pendidikan pada masa depan anak belum tentu dimiliki oleh mereka dengan pengalaman pendidikan yang terbatas.• Dengan menggunakan data TIMSS dari 32 negara, Huang & Liang (2016) menunjukkan bahwa harapan orang tua pada pendidikan anak merupakan fakta paling signifikan yang berhubungan dengan performa sekolah siswa. Oleh karena itu, kampanye ke orang tua harus berfokus pada peningkatan harapan orang tua tentang pendidikan anaknya, bukan bertujuan pada mendistribusikan kewajiban sekolah ke orang tua. Analisis yang merangkum efektivitas berbagai macam internensi pendidikan menunjukkan bahwa kampanye tentang pentingnya sekolah serta manfaatnya merupakan intervensi paling efektif untuk mendorong akses dan kualitas pendidikan anak (Angrist et al, 2020). |

Selain pilihan kebijakan di atas, pemangku kepentingan juga perlu memperkuat sistem *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan bahwa tidak ada lagi anak-anak usia sekolah yang ada di luar sekolah, baik itu karena belum terdaftar di sekolah maupun karena putus sekolah. Sistem *monitoring* ini bisa dikembangkan baik di level dinas maupun sekolah. Di Kabupaten Tana Tidung¹⁶, pemerintah daerah menginstruksikan guru untuk bisa mendatangi langsung siswa-siswa yang sulit dijangkau. Selain untuk memastikan kondisi siswa, inisiatif ini dilakukan untuk memberikan siswa jam belajar tambahan.

16 <https://news.okezone.com/read/2021/04/09/65/2392226/cegah-learning-loss-tanah-tidung-malah-sukses-partisipasi-belajar-98>

Mekanisme *monitoring* yang sistematis juga penting untuk memahami penyebab anak-anak tersebut tidak bersekolah (Sharma & Ng, 2014).

Dengan mempertimbangkan kondisi Indonesia yang luas dan sangat beragam, maka penting juga untuk memperkuat kerja sama dengan masyarakat, komunitas, serta organisasi-organisasi di akar rumput.

Di Nusa Tenggara Barat, Program Relawan Literasi dilaksanakan untuk memperkuat kerja sama antara organisasi masyarakat, universitas, dengan sekolah dalam pemberian layanan pembelajaran literasi untuk siswa sekolah dasar. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak, khususnya dari kelompok rentan, bisa tetap memperoleh kesempatan belajar selama pandemi. Detail tentang program ini akan dibahas di tulisan lain (baca artikel "Relawan Literasi [RELASI]: Program Kolaborasi untuk Mendukung Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19" dalam buku ini).

Daftar Pustaka

- Angrist, N., Evans, D. K., Filmer, D., Glennerster, R., Rogers, F. H., & Sabarwal, S. (2020). *How to Improve Education Outcomes Most Efficiently? A Comparison of 150 Interventions using the New Learning-Adjusted Years of Schooling Metric*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-9450>
- Arsendy, S. (2018). *Is education reform finally paying off for Indonesian kids?* Indonesia at Melbourne. <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/is-education-reform-finally-paying-off-for-indonesian-kids/>
- Arsendy, S., Sukoco, G. A., & Purba, R. E. (2020). *Riset dampak COVID-19: Potret gap akses online "Belajar dari Rumah" dari 4 provinsi*. The Conversation. <http://theconversation.com/riset-dampak-covid-19-potret-gap-akses-online-belajar-dari-rumah-dari-4-provinsi-136534>
- Asian Development Bank. (2021). *Learning and Earning Losses from COVID-19 School Closures in Developing Asia* (p. 25).
- Banerjee, A., Banerji, R., Berry, J., Duflo, E., Kannan, H., Mukerji, S., Shotland, M., & Walton, M. (2016). *Mainstreaming an Effective Intervention: Evidence from Randomized Evaluations of "Teaching at the Right Level" in India*. 39.
- Beatty, A., Berkhout, E., Bima, L., Pradhan, M., & Suryadarma, D. (2021). *Schooling progress, learning reversal: Indonesia's learning*

- profiles between 2000 and 2014. *International Journal of Educational Development*, 85, 102436. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102436>
- Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B.A., Prima, R.A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2018). *CUMULATIVE IMPACTS OF CONDITIONAL CASH TRANSFER PROGRAMS: EXPERIMENTAL EVIDENCE FROM INDONESIA*. 72.
- Duflo, E. (2001). Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment. *The American Economic Review*, 91(4), 795–813.
- Hoeurn, C. (2021). *School drop-out risk hotspot analysis*. Save the Children.
- Huang, H., & Liang, G. (2016). Parental cultural capital and student school performance in mathematics and science across nations. *The Journal of Educational Research*, 109(3), 286–295. <https://doi.org/10.1080/00220671.2014.946122>
- INOVASI. (2020). *Studi Kesiapan Dinas Pendidikan dalam Memasuki Tahun Ajaran Baru 2020/2021*. Tidak diterbitkan.
- Irhamni, M., & Sahadewo, G. (2020). *Temuan Awal Studi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Tingkat Sekolah Dasar di DKI Jakarta*. J-PAL Southeast Asia. <https://www.povertyactionlab.org/project/learning-home-during-pandemic-experiences-parents-and-teachers>
- Izzati, R. A., Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2020). *The Behavioral Effects of Unconditional Cash Transfers: Evidence from Indonesia*. 45.
- Kanopka, K., Claro, S., & Loeb, S. (2020). *Changes in Social- Emotional Learning: Examining Student Development Over Time*. 42.
- Maldonado, J. E., & Witte, K. D. (2020). *The Effect of School Closures on Standardised Student Test Outcomes*. 49.
- Ministry of National Development Planning, Muttaqin, T., Wittek, R., University of Groningen, Heyse, L., University of Groningen, Van Duijn, M., & University of Groningen. (2017). Why Do Children Stay Out Of School In Indonesia? *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 1(2). <https://doi.org/10.36574/jpp.v1i2.12>
- Nazara, S., & Rahayu, S. K. (2013). Program Keluarga Harapan (PKH): *Indonesian Conditional Cash Transfer Programme*. 6.
- Pillay, H., & Haribowo, H. (2013). *Review of Satap Schools* (p. 30).

- Pritchett, L., & Banerji, R. (2013). *Schooling is not education! Using assessment to change the politics of non-learning*. Center for Global Development.
- Psacharopoulos, G., Collis, V., Patrinos, H. A., & Vegas, E. (2020). Lost Wages: The COVID-19 Cost of School Closures. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3682160>
- Santibañez, L., & Guarino, C. M. (2021). The Effects of Absenteeism on Academic and Social-Emotional Outcomes: Lessons for COVID-19. *Educational Researcher*, 0013189X2199448. <https://doi.org/10.3102/0013189X21994488>
- Save the Children. (2020). *The Hidden Impact of COVID-19*. Global Research Result – Indonesia.
- Sharma, U., & Ng, O. (2014). What has worked for Bringing Out-of-school Children with Disabilities into Regular Schools? A Literature Review. *Disability, CBR & Inclusive Development*, 25(2), 54. <https://doi.org/10.5463/dcid.v25i2.355>
- Sparrow, R. (2007). Protecting Education for the Poor in Times of Crisis: An Evaluation of a Scholarship Programme in Indonesia. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 69(1), 99–122. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2006.00438.x>
- UNICEF. (2020). *COVID-19 and Children in Indonesia*.
- UNICEF, & UIS. (2015). *Out-of-School Children and Adolescents in Asia and the Pacific*.
- Usman, S. (2021). *Belajar dari rumah yang tidak efektif selama pandemi berpotensi hapus bonus demografi*. The Conversation. <http://theconversation.com/belajar-dari-rumah-yang-tidak-efektif-selama-pandemi-berpotensi-hapus-bonus-demografi-159712>
- Wahana Visi Indonesia. (2020). *Pandemi COVID-19 dan Pengaruhnya terhadap Anak Indonesia*. Wahana Visi Indonesia.
- Yarrow, N., Masood, E., & Afkar, R. (2020). *Estimates of COVID-19 Impacts on Learning and Earning in Indonesia: How to Turn the Tide*. 33.



Kondisi Psikologis Siswa
Pada Masa Pandemi COVID-19

Kondisi Psikologis Siswa Pada Masa Pandemi COVID-19

~•~

Ais Irmawati, Sri Fajar Martono, Noviyanti

Peralihan Pembelajaran Tatap Muka ke Daring

Pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19, yang pelaksanaannya diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19. Tujuan dari pelaksanaan belajar dari rumah (BDR) adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan, serta memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua.

Penutupan sekolah dilaksanakan sebagai strategi untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Namun, penutupan sekolah dapat menyebabkan gangguan pada rutinitas sehari-hari karena memaksa sistem sekolah dan siswa untuk beralih dari pembelajaran tatap muka menjadi belajar secara jarak jauh. Pandemi membuat banyak pihak seperti sekolah, guru, maupun siswa perlu beradaptasi dengan kebiasaan baru dengan melakukan pembelajaran *online* (daring) dari rumah.

Upaya adaptasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan selama pandemi. Pembelajaran daring sangat bergantung pada jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan keterampilan teknologi yang memadai dalam pembelajaran yang pelaksanaannya memerlukan dukungan

perangkat *mobile* yang dapat digunakan untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja (Sri Gusty dkk., 2020). Transisi pendidikan secara daring memunculkan tantangan bagi pelajar yang tidak mempunyai infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Kesenjangan digital menjadi masalah besar, khususnya bagi pelajar di daerah perdesaan yang sering kali kekurangan fasilitas dan keterampilan digital untuk menerapkan pembelajaran *online* (Onyema, 2019).

Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, kendala yang dihadapi adalah kurangnya keterlibatan orang tua karena kesibukan orang tua, keterbatasan perangkat digital yang memadai, seperti laptop, tablet, gawai, jaringan internet, dan kuota internet dalam pembelajaran karena tidak seluruhnya dapat dimiliki siswa (Sukma dkk, 2020). Pembelajaran daring juga terkendala keahlian guru dan wali murid yang mendampingi belajar serta motivasi atau kemauan dari individu (Kutsiyah, 2021).

Survei Kemdikbud (Zamjani, dkk., 2020) mengenai kendala kebijakan BDR dari sudut guru juga mengungkapkan berbagai kendala, seperti keterbatasan penggunaan perangkat digital, kesulitan siswa memahami materi pembelajaran dan tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan guru, ketersediaan sarana dan prasarana belajar siswa, serta kesulitan guru dalam mendampingi siswa ketika belajar. Selain keterbatasan akses dan infrastruktur, permasalahan lain yang dialami siswa selama belajar daring adalah mereka mengalami kesulitan belajar dan mengeluhkan beratnya tugas yang setiap hari diberikan guru sehingga menyebabkan meningkatnya stres, *mental down*, dan perasaan jenuh (Unik dkk., 2020).

Berdasarkan permasalahan di atas, tulisan ini akan mengangkat hambatan psikologis yang dihadapi siswa ketika BDR selama masa pandemi COVID-19. Penelitian ini didasarkan pada hasil survei Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) – saat ini Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) – bekerja sama dengan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia terhadap 15.840 siswa. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *multistage random sampling* dengan populasi siswa berusia 9–17 tahun, yaitu siswa SD (kelas 4, 5, dan 6), SMP, SMA dan SMK yang tersebar di 24 kabupaten/kota di 12 provinsi, yaitu Sumatra Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Papua. Survei dilakukan pada 2–13 November 2020.

Kesulitan Psikologis Siswa Selama Pandemi

UNESCO (2020) dalam laporannya mengungkapkan beberapa efek penutupan sekolah akibat pandemi COVID-19. *Pertama*, pembelajaran menjadi terganggu sehingga siswa kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. *Kedua*, banyak anak bergantung pada makanan bernutrisi yang disediakan di sekolah. *Ketiga*, akses yang tidak merata ke platform pembelajaran digital. *Keempat*, meningkatnya tekanan terhadap sekolah agar tetap menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. *Kelima*, membuat remaja dan anak-anak tidak dapat berkomunikasi dan bersosialisasi sehingga dapat berdampak pada keterampilan sosial mereka.

Umum dipahami bahwa pembelajaran di masa darurat seperti bencana dan pandemi telah menyebabkan siswa kehilangan pembelajaran (*learning loss*). Pengalaman peristiwa bencana alam yang pernah terjadi, seperti penutupan sekolah selama 14 minggu di Pakistan akibat gempa bumi, telah menimbulkan dampak hingga 4 tahun selepasnya, di mana siswa mengalami ketertinggalan dalam capaian hasil belajar yang setara dengan 1,5 tahun pembelajaran (Kaffenberger, 2020). Sementara untuk kondisi pandemi COVID-19, Bank Dunia memperkirakan bahwa penutupan sekolah di Indonesia selama empat bulan dapat berdampak pada penurunan 25 poin hingga 35 poin dari skor membaca PISA siswa Indonesia (Afkar dan Yarrow, 2021).

Selain berpengaruh terhadap aspek akademis siswa, pandemi juga memicu dampak psikologis. Sebuah survei yang dilakukan terhadap pengasuh (*care taker*) siswa TK sampai kelas 12 di sekolah negeri di Chicago menemukan, terjadi penurunan kesehatan mental yang signifikan selama penutupan sekolah di masa pandemi (Kluger, 2021). Hal ini meliputi meningkatnya perasaan kesepian, agitasi atau kemarahan, stres, kecemasan, depresi atau *mood* yang buruk, menyakiti diri sendiri maupun pikiran untuk bunuh diri, terjadinya penurunan perencanaan masa depan, serta menurunnya interaksi positif dalam keluarga (Kluger, 2021). Di sisi lain, dalam keadaan normal, kesehatan mental remaja sudah menyimpan permasalahan, mengingat di masa ini remaja mengalami perubahan psikologis yang sangat cepat yang oleh Halls (dalam Meyers, 2018) disebut sebagai masa "*storm and stress*". Kondisi ini berpotensi meningkat seiring dengan pandemi yang semakin meluas.

Imbauan *social distancing* dan penutupan sekolah selama pandemi menjadi permasalahan tersendiri, khususnya bagi remaja yang terbiasa

bersosialisasi, karena menurunnya rutinitas siswa serta perasaan kesepian dapat meningkatkan risiko kesehatan mental di masa depan (Aditya, 2020). Kondisi tersebut tidak akan berdampak besar bagi remaja yang matang secara emosi, namun akan menambah tekanan psikologis pada remaja yang emosinya masih labil (Choirunissa, et al, 2020). Pembatasan sosial dalam jangka panjang akan berdampak pada depresi dan kesehatan mental anak, salah satunya karena anak merasa kurang diberikan perhatian, dan potensi risiko ini lebih tinggi pada anak perempuan dan anak yang duduk di kelas yang lebih tinggi (Julie, 2020).

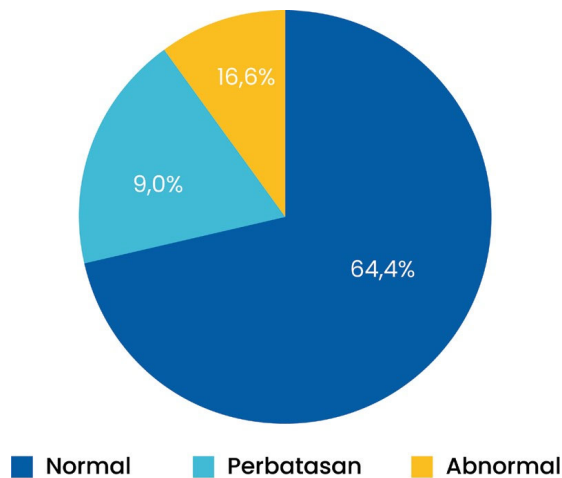
Kondisi Kesulitan Mental Emosional Siswa

Kondisi psikologis yang sehat adalah komponen utama kualitas hidup yang baik yang penting tidak hanya untuk masa sekarang, tetapi juga untuk masa-masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan *Strength and Difficulties Questionnaire* (SDQ) untuk mengukur gangguan mental emosional yang memengaruhi kondisi psikologis individu. Instrumen ini mengukur lima aspek, yaitu: permasalahan emosional, permasalahan perilaku (kenakalan), permasalahan hubungan sebaya, permasalahan hiperaktivitas-inatensi, dan permasalahan pada perilaku prososial. Semakin tinggi skor SDQ seseorang menunjukkan bahwa semakin besar kesulitan mental emosional yang dihadapi. Kategorisasi skor SDQ dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: normal untuk skor 0–15, perbatasan untuk skor 16–19, dan abnormal untuk skor 20–40. Individu yang mendapatkan skor dalam kategori abnormal dapat diartikan bahwa secara umum individu tersebut mengalami kesulitan mental dan emosional.

Hasil survei kami menunjukkan, rerata kesulitan mental emosional berada pada skor 13,50. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat kesulitan mental emosional responden berada pada kategori normal. Berdasarkan pengkategorian kesulitan mental emosional tersebut, hasil survei menunjukkan sebagian besar responden (64,4%) berada pada kategori normal, 19% berada pada kategori perbatasan, dan 16,6% berada pada kategori abnormal (Grafik 1). Hasil ini dapat dimaknai bahwa sebagian besar responden tidak mengalami masalah psikologis di masa pandemi, meskipun sebanyak 16,6% siswa perlu mendapat perhatian.

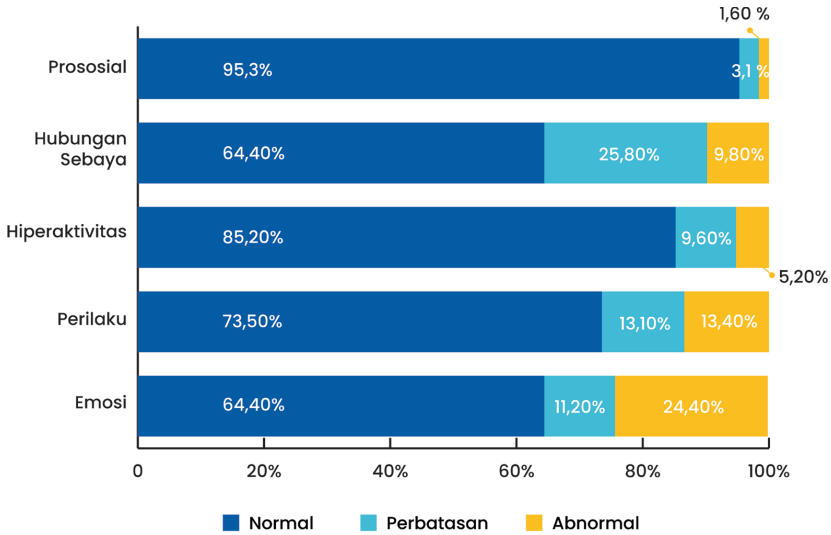
Kondisi mental yang sehat akan terlihat dalam perilaku sehari-hari. Bagi anak-anak, kondisi mental yang sehat tidak hanya menjadi ciri khas

tumbuh kembang yang baik, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pembelajaran yang dijalani (Mayasari, dkk, 2021). Hasil survei di atas menunjukkan, sebanyak 16,6% siswa yang mengalami kesulitan mental emosional pada kadar yang memerlukan penanganan lebih lanjut agar tidak berkembang menjadi gangguan psikologis. Damayamti dan Masitoh (2020) dalam kajiannya menyatakan bahwa anak dengan kesulitan mental emosional, jika tidak memiliki keterampilan-keterampilan pemecahan masalah (*coping*) yang baik, dapat tumbuh menjadi individu dewasa yang bermasalah, baik secara internal (dalam diri) maupun eksternal (dalam hubungan dengan orang lain). Adapun strategi *coping* yang dapat dilakukan oleh siswa dalam menghadapi berbagai *stressor* yang timbul di masa pandemi adalah *coping* berpusat pada masalah, *coping* berpusat pada emosi, dan *coping* berbasis nilai-nilai keyakinan agama (Damayamti & Masitoh, 2020).



Grafik 1 Kondisi Mental Emosional

Jika didasarkan pada dimensi-dimensi kesulitan mental emosional, aspek emosi dan berperilaku adalah dua aspek di mana cukup banyak responden yang mengalami persoalan atau hambatan. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa pada aspek emosi terdapat 24,4% responden dan pada aspek perilaku sebesar 13,4% responden yang berada pada kategori abnormal (Grafik 2).

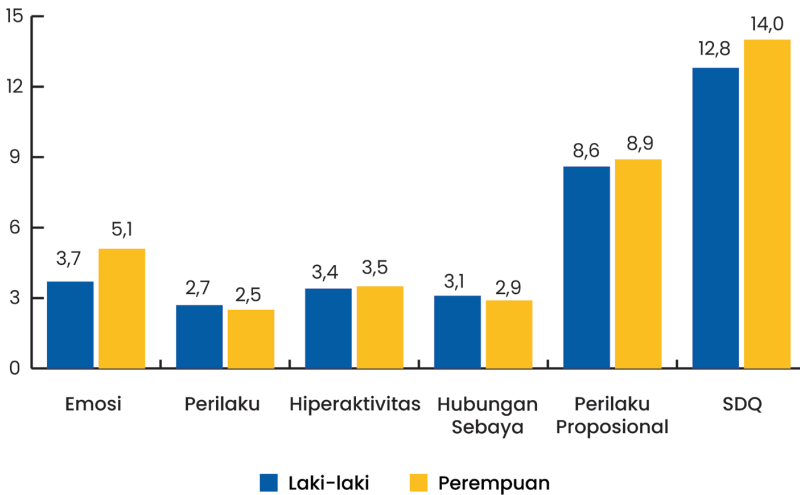


Grafik 2 Aspek Kondisi Mental Emosional

Kesulitan pada aspek emosi terlihat pada munculnya beberapa gejala emosi yang bersifat negatif, seperti rasa sedih, takut, dan khawatir secara berlebihan yang dapat mengganggu fungsi-fungsi dalam aktivitas keseharian anak (Meutia, 2020). Sedangkan kesulitan pada aspek perilaku dapat terwujud pada munculnya perilaku-perilaku maladaptif, seperti membangkang, merusak barang, dan mengganggu orang lain. Christner, et al (2021) dalam studinya pada populasi anak-anak di Jerman menemukan bahwa gangguan perilaku sebagai akibat Pandemi COVID-19 terjadi bahkan sejak anak masih sangat muda (3-6 tahun).

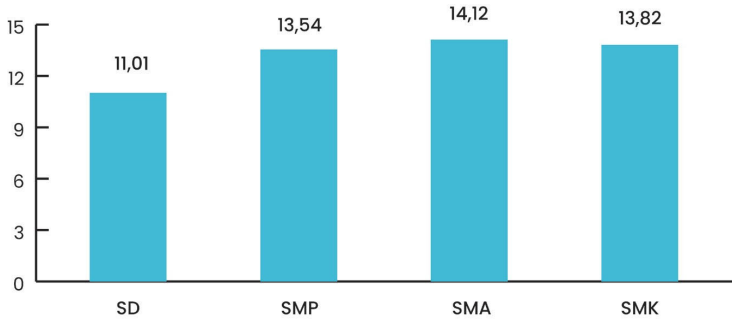
Kesehatan mental adalah variabel yang salah satu determinannya adalah jenis kelamin (Aryani, dkk., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi bagaimana seseorang mengembangkan adaptasi-adaptasi mental dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungannya (Aryani, dkk., 2020). Hasil penelitian ini menemukan, responden perempuan memperoleh skor kesulitan mental emosional yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa laki-laki (Grafik 3). Hal ini selaras dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa anak atau remaja perempuan berisiko lebih tinggi mengalami kesulitan mental emosional daripada anak atau remaja laki-laki (Vallejo-Slocker, 2020). Pada dimensi-dimensi kesulitan mental emosional, siswa perempuan memiliki

skor lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki pada komponen emosi dan hiperaktivitas. Sedangkan siswa laki-laki memiliki skor yang lebih tinggi pada aspek perilaku dan hubungan sebaya. Pada aspek kekuatan perilaku prososial secara statistik tidak ada perbedaan skor antara responden perempuan dengan laki-laki.



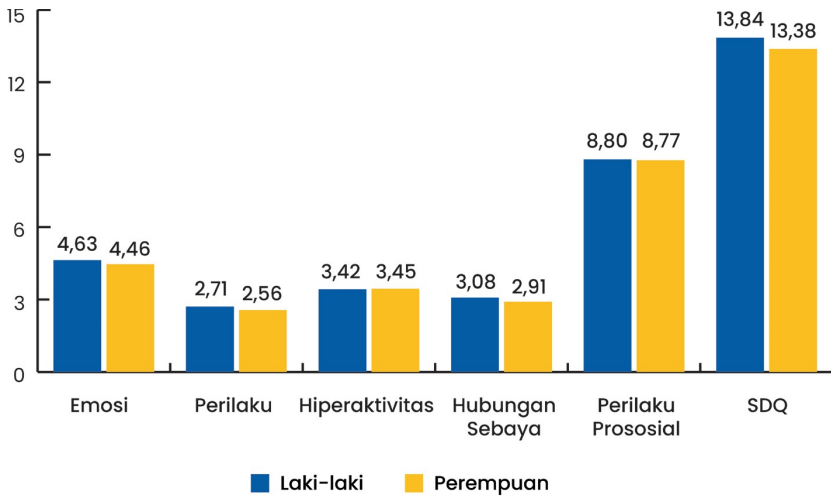
Grafik 3 Skor Aspek-Aspek Kesulitan Mental Emosional menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenjang pendidikannya, data menunjukkan perbedaan skor antarkelompok pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan responden, maka semakin tinggi skor kesulitan mental emosional (Grafik 4). Rerata skor kesulitan mental emosional siswa SMA adalah sebesar 14,12, siswa SMK sebesar 13,82, siswa SMP sebesar 13,54, dan siswa SD sebesar 11,01. Hasil analisis korelasi juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara usia dengan skor kesulitan mental emosional responden ($r: 0,145$ Sig. $0,00$). Artinya terdapat hubungan positif, meski kekuatannya lemah, antara usia dengan tingkat kesulitan mental emosional responden, yang mana semakin tinggi usia semakin tinggi pula kesulitan mental emosional yang dialami responden tersebut. Temuan ini dapat diperkuat dengan analisis lain yang menyatakan bahwa semakin dewasa individu, maka tantangan kehidupannya pun akan semakin besar, sehingga menuntut upaya adaptasi dan penyelesaian masalah yang lebih beragam (Estikasari & Pudjiati, 2021).



Grafik 4 Skor Kesulitan Mental Emosional menurut Jenjang Pendidikan

Berdasarkan status ekonomi responden, ditemukan bahwa responden dari keluarga ekonomi rendah memiliki skor kesulitan mental emosional yang lebih tinggi dibandingkan responden yang berasal dari ekonomi menengah/atas (13,84 berbanding 13,38) (Grafik 5). Hal ini menunjukkan bahwa status ekonomi berdampak pada kesehatan mental emosional individu. Pada dimensi-dimensi kesulitan mental emosional, responden dari keluarga ekonomi rendah memiliki rerata skor yang lebih tinggi pada aspek emosi, perilaku, dan hubungan sebaya dibandingkan responden dari keluarga ekonomi menengah/atas. Sedangkan pada aspek hiperaktivitas-inatensi dan aspek kekuatan perilaku prososial tidak ditemukan perbedaan skor kesulitan mental emosional. Hal ini dapat diartikan bahwa kondisi ekonomi memiliki implikasi terhadap kesulitan mental emosional yang dihadapi siswa, terutama terhadap perkembangan individu pada dimensi emosi, perilaku, dan hubungan sosial. Bøe, et al. (2014) dalam studinya pada populasi anak-anak di Norwegia juga menemukan hubungan antara kondisi ekonomi keluarga dengan munculnya permasalahan-permasalahan *externalizing* (gangguan perilaku dan persoalan hubungan sebaya) pada anak-anak.



Grafik 5 Skor Aspek-Aspek Kesulitan Mental menurut Status Ekonomi

Kondisi Kesulitan Mental Emosional menurut Variabel

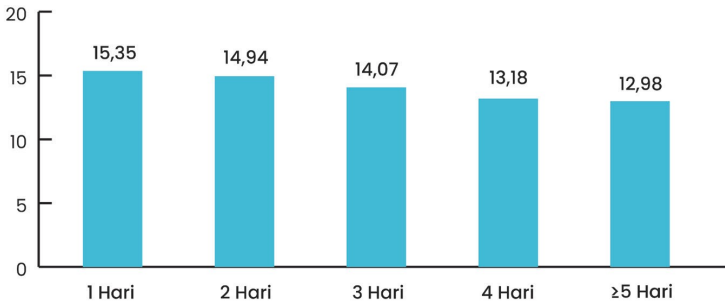
Selain kesulitan mental secara umum, pandemi terbukti berdampak langsung pada kondisi pembelajaran siswa, seperti intensitas pembelajaran, durasi pembelajaran, dan pendampingan belajar.

1. Intensitas Pembelajaran

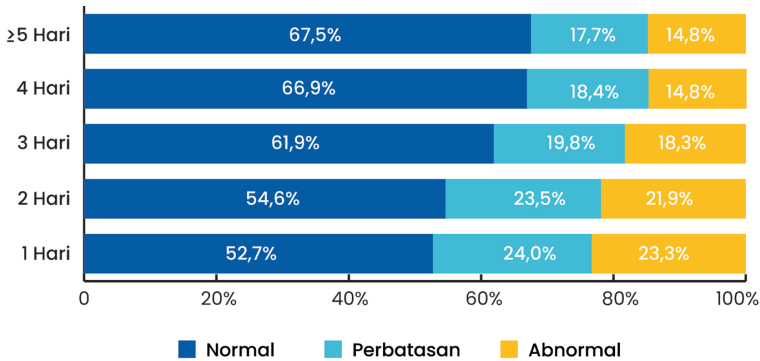
Data menunjukkan terdapat keterkaitan antara kesulitan mental emosional yang dialami oleh siswa dengan intensitas atau frekuensi pembelajaran yang dilakukan. Berdasarkan skor rerata kesulitan mental emosional, siswa yang melakukan pembelajaran hanya satu hari dalam seminggu memiliki skor sebesar 15,35, siswa belajar 2 hari seminggu memiliki skor 14,95, siswa yang belajar 3 hari dalam seminggu memiliki skor 14,07, siswa yang belajar 4 hari dalam seminggu memiliki skor 13,18, dan siswa yang belajar 5 hari dalam seminggu memiliki skor 12,98 (Grafik 6). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi intensitas atau frekuensi belajar siswa semakin rendah skor kesulitan mental emosional yang dialami oleh siswa tersebut.

Data persentase status kesulitan mental emosional siswa menurut intensitas atau frekuensi belajar juga menunjukkan hasil yang selaras. Pada kelompok siswa yang belajar selama 1 hari dalam seminggu terdapat 23,3% responden berada pada status abnormal (mengalami masalah kesulitan

mental emosional). Pada kelompok siswa yang belajar selama 2 hari seminggu sebesar 21,9%, pada kelompok siswa yang belajar selama 3 hari sebesar 18,3%, dan pada kelompok siswa yang belajar selama 4 hari dan belajar selama 5 hari atau lebih sebesar 14,8% (Grafik 7).



Grafik 6 Skor Kesulitan Mental Emosional menurut Frekuensi Belajar dalam Seminggu



Grafik 7 Persentase Kategori Kesulitan Mental Emosional menurut Frekuensi Belajar

Kedua temuan di atas menunjukkan bahwa kelompok responden yang melaksanakan pembelajaran dengan intensitas atau frekuensi yang lebih tinggi memiliki kecenderungan kesulitan mental emosional yang lebih rendah dibandingkan kelompok siswa yang belajar dengan intensitas/frekuensi lebih rendah, hal ini disebabkan karena intensitas belajar siswa juga berarti meningkatkan komunikasi di antara siswa dan dengan gurunya. Temuan ini sependapat dengan studi Yunitasar dan Hanifah (2020) yang menyatakan

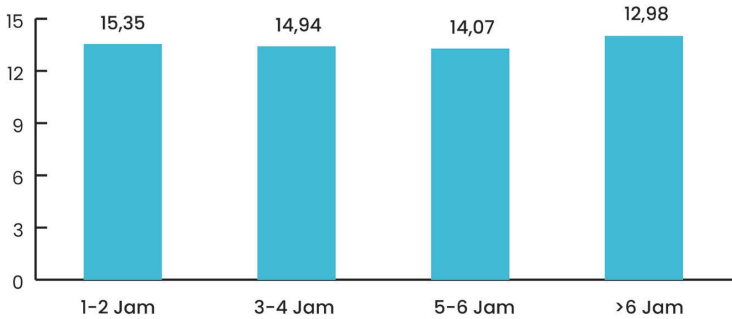
pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap minat belajar siswa, siswa merasa bosan karena tidak bertemu dengan teman dan gurunya secara langsung.

Pembelajaran dengan intensitas lebih lama akan mendorong interaksi sosial yang terbangun antarsiswa menjadi lebih intensif sehingga siswa merasa lebih bahagia dengan kehidupannya, karena perkembangan aspek psikologis dan sosio-emosional yang dicapai melalui proses belajar mengajar memungkinkan siswa untuk memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan untuk memahami dan mengelola emosi dan menetapkan tujuan positif yang diinginkan. Aspek sosio-emosional membantu membangun dan memelihara hubungan positif dengan teman sebaya dan masyarakat (Srivastava A. et al, 2022).

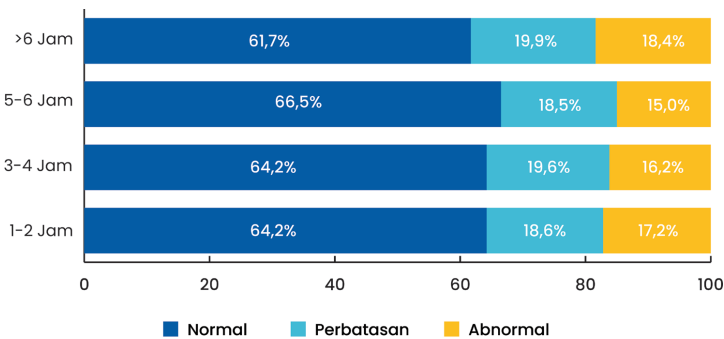
2. Lama Pembelajaran dalam Sehari

Data menunjukkan pula adanya keterkaitan antara kesulitan mental emosional yang dialami siswa dengan lama atau durasi belajar siswa per hari. Berdasarkan skor kesulitan mental emosional, siswa yang belajar selama 5-6 jam sehari mengalami kesulitan mental emosional paling rendah (13,28), diikuti oleh siswa yang belajar selama 3-4 jam sehari (13,41). Sementara itu, siswa yang belajar selama 1-2 jam sehari memiliki kesulitan mental emosional yang lebih tinggi (13,55). Hal ini juga dialami oleh siswa yang belajar lebih dari 6 jam yang ditunjukkan dengan skor sebesar 14,01.

Berdasarkan persentase status kesulitan mental emosional, terlihat bahwa persentase siswa dalam status abnormal paling kecil adalah pada kelompok siswa yang melakukan pembelajaran selama 5-6 jam per hari (15%), diikuti kelompok belajar 3-4 jam per hari (16,2%) (Grafik 9). Pada kelompok belajar 1-2 jam terdapat 17,2% siswa berada pada status kesulitan mental emosional abnormal. Sedangkan persentase terbesar (18,4%) adalah pada kelompok yang belajar lebih dari 6 jam per hari. Hal ini menunjukkan kecenderungan bahwa semakin lama durasi belajar dilakukan siswa semakin kecil potensi mengalami gangguan kesulitan mental emosional. Namun, perkecualian terlihat ketika lama belajar mencapai lebih dari 6 jam.



Grafik 8 Skor Kesulitan Mental Emosional menurut Lama Belajar dalam Sehari



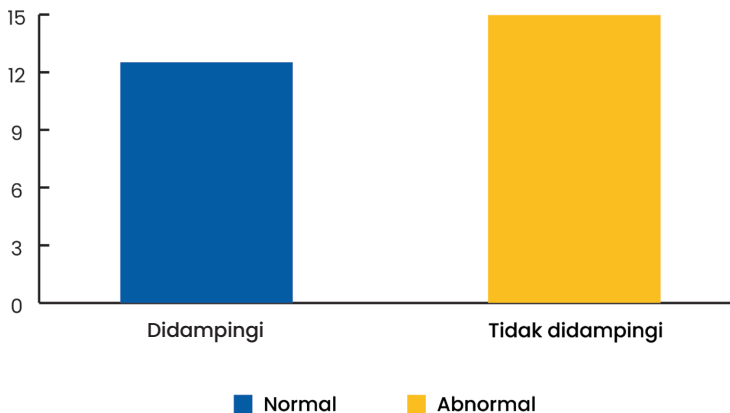
Grafik 9 Persentase Kategori Kesulitan Mental Emosional menurut Lama Belajar

Kedua temuan di atas mengindikasikan bahwa siswa yang belajar selama 5-6 jam memiliki kesehatan mental yang optimal dibandingkan lama pembelajaran lainnya. Belajar dalam durasi yang terlalu pendek (1-2 jam) menghasilkan kesulitan emosional yang lebih tinggi. Hal itu juga terjadi pada siswa belajar dalam waktu yang terlalu lama (di atas 6 jam). Di sisi lain, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sholehani (2018) pada prestasi belajar siswa dengan sistem *full day school* di SMAN 2 Probolinggo, kelelahan akibat durasi belajar yang lama memberi pengaruh terhadap prestasi belajar yang dicapai siswa karena proses belajar yang dilakukan dalam keadaan lelah sehingga tidak efektif. Penelitian lain terkait dengan lama belajar (dalam konteks pembelajaran *full day* dan pembelajaran *half day*), Nasution (2017) menemukan hubungan antara lama belajar dengan kesulitan mental emosional pada aspek hiperaktivitas siswa merujuk pada perilaku anak yang hiperaktif, impulsif, dan sulit memusatkan perhatian.

3. Pendampingan Siswa Selama Belajar

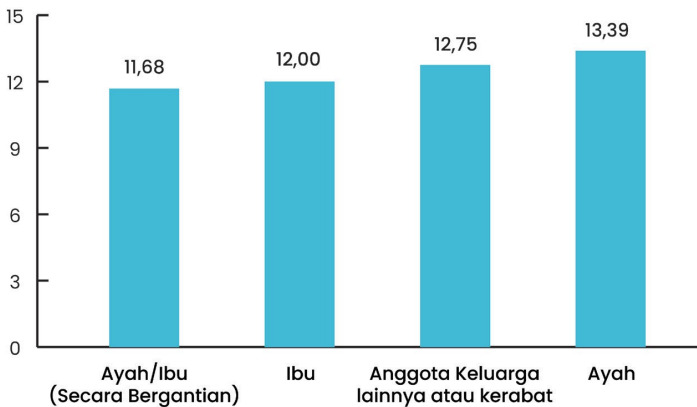
Pendampingan adalah salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah di masa pandemi COVID-19. Pendampingan membantu anak agar dapat fokus dalam belajar dan mendapatkan bantuan-bantuan yang dibutuhkan selama pembelajaran (Yulianingsih, dkk, 2021). Dalam survei ini ditemukan bahwa sebagian besar responden (60%) mendapatkan pendampingan saat melaksanakan pembelajaran dari rumah (Grafik 10). Data ini juga menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan anak, maka pendampingan yang dilakukan orang tua atau anggota keluarga lainnya semakin berkurang. Hasil pengukuran kondisi psikologis siswa yang kami lakukan, menegaskan pentingnya pendampingan belajar bagi siswa, hal ini terlihat di mana para siswa yang didampingi memiliki rerata skor kesulitan mental emosional yang lebih rendah dibandingkan para siswa yang tidak didampingi saat melaksanakan pembelajaran (Grafik 10).

Pendampingan merupakan salah satu bentuk dukungan sosial yang sangat dibutuhkan anak untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak jelas dan mengancam. Estikasari & Pudjiati (2021) menyebutkan bahwa hubungan yang positif dengan orang tua atau orang dewasa lain dalam keluarga dapat berperan sebagai faktor pelindung (*protective factors*) bagi anak dalam menghadapi stres sehingga tidak mengembangkan penyesuaian diri yang tidak tepat (*maladjustment*).



Grafik 10 Skor Kesulitan Mental Emosional menurut Status Pendampingan Belajar

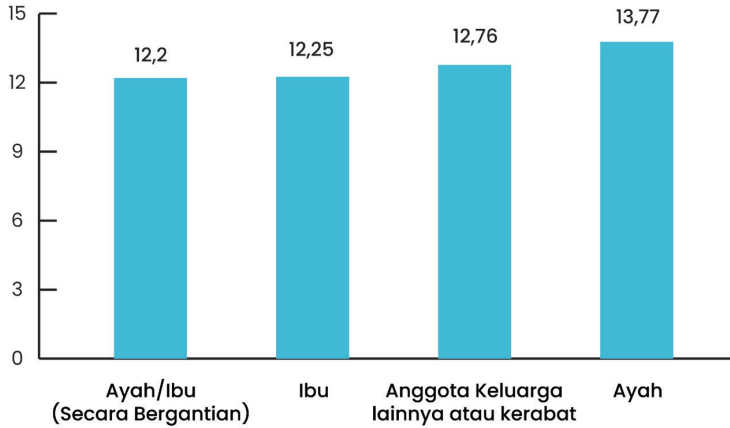
Berdasarkan sosok pendamping belajar, terlihat perbedaan rerata skor kesulitan mental emosional responden. Rerata skor kesulitan mental emosional anak yang didampingi belajar oleh ayah adalah sebesar 13,4, didampingi oleh ibu sebesar 12,0, didampingi oleh ayah atau ibu (secara bergantian) sebesar 11,7, dan didampingi anggota keluarga lainnya atau kerabat sebesar 12,8% (Grafik 11). Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh ibu atau secara bergantian antara ayah atau ibu menghasilkan kesulitan mental emosional yang lebih rendah pada anak dibandingkan pendampingan oleh ayah atau pendampingan oleh anggota keluarga lainnya/kerabat. Yunike (2021) menyoroti pentingnya pendampingan pembelajaran dilakukan oleh ibu yang memiliki kemampuan untuk menyikapi pandemi secara positif sehingga anak dapat melakukan adaptasi konstruktif selama pandemi, termasuk terhadap tuntutan-tuntutan pembelajaran akademis selama pembelajaran jarak jauh.



Grafik 11 Skor Kesulitan mental Emosional menurut Pendamping Belajar

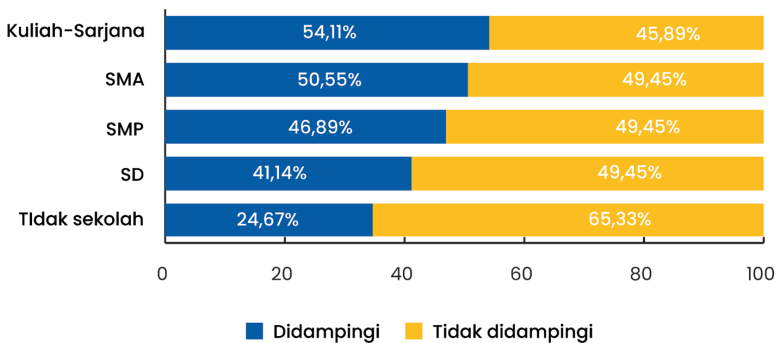
Berikutnya, berdasarkan cara-cara pendampingan yang dilakukan, terlihat perbedaan rerata skor kesulitan mental emosional. Skor kesulitan emosional menurut cara pendampingan “membantu menjelaskan pelajaran” adalah sebesar 12,2, pada “memberikan motivasi” sebesar 12,25, pada “memantau saat belajar” sebesar 12,76, dan pada “membantu mengerjakan tugas” sebesar 13,77 (Grafik 12). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa cara pendampingan yang lebih sesuai untuk mendukung kondisi psikologis siswa adalah membantu menjelaskan pelajaran kepada anak dan memberikan motivasi selama belajar. Yunike, dkk. (2021) menyebutkan bahwa

pendampingan harus tetap menempatkan anak sebagai pelaku pembelajaran dan peran orang tua adalah sebagai fasilitator dan motivator sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar.



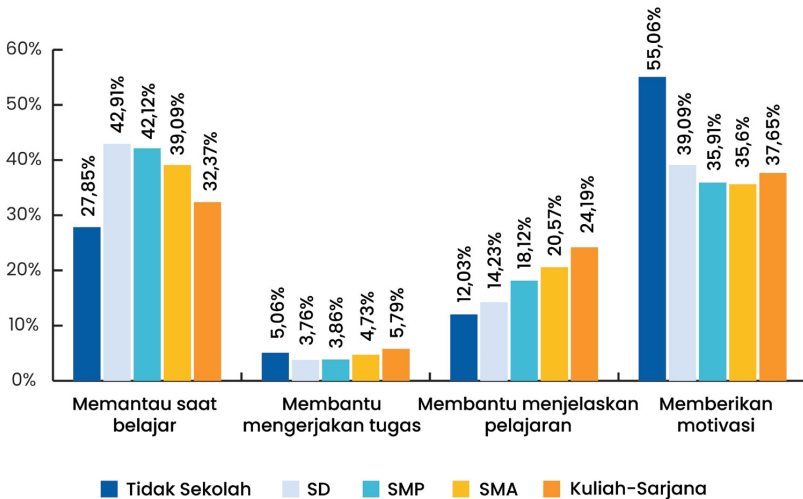
Grafik 12 Skor Kesulitan mental Emosional menurut Pendamping Belajar

Berdasarkan tingkat pendidikan orang tua, jumlah orang tua yang mendampingi anak belajar lebih banyak dilakukan oleh mereka yang berkualifikasi pendidikan lebih tinggi. Secara berturut-turut dari yang paling tinggi adalah orang tua yang berpendidikan kuliah-sarjana (54,11%), SMA (50,55%), SMP (46,89%), SD (41,14%), dan terendah tidak sekolah (34,76%).



Grafik 13 Status Pendampingan Belajar menurut Pendidikan Terakhir

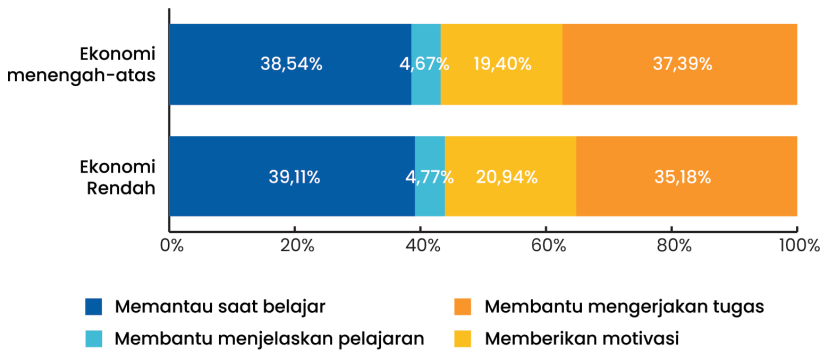
Pada orang tua yang melakukan pendampingan belajar pada anaknya, pendampingan dilakukan melalui empat cara, yaitu memberikan motivasi, memantau saat belajar, membantu menjelaskan pelajaran, dan membantu mengerjakan tugas. Pemberian motivasi dilakukan oleh orang tua pada semua kelompok tingkat pendidikan SD sampai kuliah- sarjana, yakni antara 35,60% sampai 39,09%, sedangkan pada orang tua yang tidak sekolah memberikan pendampingan melalui cara ini mencapai 55,06%. Pendampingan melalui memantau saat belajar paling banyak dilakukan oleh orang tua berpendidikan SD dan SMP (42,92% dan 42,12%), diikuti oleh orang tua berpendidikan SMA (39,09%). Sedangkan orang tua berpendidikan kuliah-sarjana sebesar 32,37%. Pendampingan ini dilakukan paling rendah oleh orang tua yang tidak bersekolah (27,85%). Membantu menjelaskan pelajaran secara berturut- turut dari yang paling tinggi dilakukan oleh orang tua berpendidikan kuliah-sarjana (24,19%), berpendidikan SMA (20,57%), berpendidikan SMP (18,12%), berpendidikan SD (14,23%), dan tidak bersekolah (12,03%). Sementara pendampingan melalui membantu mengerjakan tugas adalah cara pendampingan yang paling sedikit dilakukan oleh orang tua pada semua jenjang pendidikan.



Grafik 14 Persentase Cara Pendampingan menurut Pendidikan Orang Tua

Dalam penelitian ini juga dilihat apakah status ekonomi siswa memiliki keterkaitan dengan cara-cara pendampingan belajar. Status ekonomi siswa dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu ekonomi rendah dan status

ekonomi menengah/atas, didasarkan pada status penerimaan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) oleh siswa. Siswa penerima PIP dikategorikan sebagai kelompok ekonomi rendah, sedangkan siswa bukan penerima PIP dikategorikan sebagai kelompok ekonomi menengah/atas. Terdapat sebanyak 4.337 siswa penerima PIP (27,4%) dan 11.503 responden bukan penerima PIP (72,6%). Hasil pengolahan data menunjukkan cara pendampingan yang cenderung sama pada kelompok siswa ekonomi bawah maupun siswa ekonomi menengah/atas. Cara pendampingan “memantau saat belajar” adalah yang paling banyak dilakukan, diikuti oleh “memberikan motivasi” dan “membantu menjelaskan pelajaran”. Cara pendampingan “membantu mengerjakan tugas” adalah yang paling sedikit dilakukan, baik pada kelompok ekonomi menengah atas maupun kelompok ekonomi bawah. Temuan ini menunjukkan bahwa cara-cara pendampingan belajar yang dilakukan orang tua tidak terkait dengan status ekonomi keluarga.



Grafik 15 Persentase Kategori Kesulitan Mental Emosional menurut Status Ekonomi

Urgensi Pendampingan Belajar bagi Siswa

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendampingan belajar bagi anak selama pandemi COVID-19, terutama ketika menjalankan pembelajaran jarak jauh. Siswa yang selama pembelajaran didampingi menunjukkan kualitas kesehatan mental yang lebih baik dibandingkan rekan-rekannya yang tidak didampingi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa beberapa karakteristik pendampingan berkaitan dengan kualitas kesehatan yang lebih baik. Berkaitan dengan sosok pendamping pembelajaran, pendampingan yang

dilakukan oleh sosok ibu atau bergantian antara ibu dan ayah berkaitan dengan kesehatan mental yang lebih baik. Berdasarkan cara pendampingan ditemukan bahwa pendampingan yang terwujud dalam perilaku menjelaskan pelajaran dan memberikan motivasi menghasilkan kualitas kesehatan mental yang lebih baik bagi anak dibandingkan pendampingan dengan memantau belajar dan membantu mengerjakan tugas. Pendampingan belajar yang dilakukan harus menempatkan anak sebagai subjek belajar yang utama. Pendamping belajar (dalam hal ini yang paling banyak adalah ibu) perlu untuk memperhatikan peran mereka sebagai fasilitator dan motivator belajar bagi anak-anak mereka.

Hasil penelitian ini juga menegaskan keterkaitan antara jenis kelamin dan usia dengan kualitas kesehatan mental. Terkait dengan jenis kelamin, penelitian ini mengonfirmasi penelitian-penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa anak perempuan memiliki kecenderungan masalah kesehatan mental lebih besar dibandingkan dengan anak laki-laki. Hal ini terkait dengan peran dan harapan sosial dan budaya yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Terkait dengan jenjang pendidikan, ditemukan bahwa siswa pada jenjang yang lebih tinggi mempunyai masalah kesehatan mental lebih tinggi dibandingkan dengan siswa pada jenjang pendidikan yang lebih rendah. Hal ini dapat dimengerti bahwa semakin dewasa usia seseorang semakin beragam dan kompleks pula tuntutan-tuntutan yang individu hadapi (tugas perkembangan). Selain itu, tuntutan akademis bagi siswa pada jenjang yang lebih tinggi tentu saja lebih besar dan menuntut keterampilan kognitif yang lebih tinggi.

Berdasarkan temuan yang telah disampaikan, penulis menegaskan pentingnya pendampingan pembelajaran bagi para siswa selama menjalankan pembelajaran selama pandemi baik oleh orang tua/ keluarga maupun guru. Pendampingan belajar merupakan salah satu bentuk dukungan sosial yang diperlukan anak dalam menghadapi berbagai stres (termasuk stres akademik) yang mereka alami selama pandemi COVID-19. Hal lain yang perlu penulis sarankan adalah terkait dengan perlunya para guru untuk memperhatikan isu kesehatan mental para siswa. Di sisi lain, pihak sekolah juga perlu memberdayakan guru bimbingan konseling (BK) untuk dapat mendeteksi persoalan psikologis siswa selama pandemi. Sekolah diharapkan mampu memahami persoalan psikologis siswa sehingga dapat mengembangkan upaya mitigasi untuk mencegah berkembangnya kesulitan mental emosional menjadi gangguan psikologis yang dapat menghambat pertumbuhan pribadi siswa.

Daftar Pustaka

- Aditya Thakur, 2020, *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry : Mental Health in High School Students at the Time of COVID-19: A Student's Perspective*.
- Aryani, F., Umar, N. F., & Kasim, S. N. O. (2020, December). Psychological well-being of students in undergoing online learning during Pandemi COVID-19. In *International Conference on Science and Advanced Technology (ICSAT)*.
- Assiddiqi, Dimas Ruri, 2021, *Peluang Menurunnya Capaian Hasil Belajar (Learning Loss) dan Alternatif Solusinya : Kajian Kasus Pembelajaran Online di Era Pandemi COVID-19 di Jurusan Teknik Mesin UNESA, JPTM. Volume 10 Nomor 03 Tahun 2021, 47-54, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-teknik-mesin/article/view/42617>*
- Bøe, T., Sivertsen, B., Heiervang, E., Goodman, R., Lundervold, A. J., & Hysing, M. (2014). Socioeconomic status and child mental health: The role of parental emotional well-being and parenting practices. *Journal of abnormal child psychology, 42*(5), 705-715.
- Choirunissa, et all. (2020) Analisis Deteksi Dini Kesehatan Jiwa Remaja di Masa Pandemi COVID-19. Universitas Nasional Jakarta. [http:// repository.unas.ac.id/818/1/analisis%20deteksi%20dini%20 kesehatan%20 jiwa%20remaja%20di%20masa%20pandemi%20 COVID.pdf](http://repository.unas.ac.id/818/1/analisis%20deteksi%20dini%20kesehatan%20jiwa%20remaja%20di%20masa%20pandemi%20COVID.pdf)
- Christner, N., Essler, S., Hazzam, A., & Paulus, M. (2021). Children's psychological well-being and problem behavior during the COVID-19 pandemic: An online study during the lockdown period in Germany. *PLOS ONE, 16*(6), e0253473.
- Damayanti, D, & Masitoh, A. (2020). Strategi koping siswa dalam menghadapi stres akademik di era pandemi COVID-19. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies, 4*(2), 185-198.
- Estikasari, P., & Pudjiati, S. R. R. (2021). Gambaran psikologis remaja selama sekolah dari rumah akibat Pandemi COVID-19. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi, 2*(1), 23-36.
- Julie Gazmararian, Rachel Weingart, Katherine Campbell, Thomas Cronin, Jasleen Ashta, 2021, *Impact of COVID-19 Pandemic on the Mental Health of Students From 2 Semi--Rural High Schools in Georgia**
- Kaffenberger, Michelle, 2020. *Modelling the Long Run Learning Impact of the COVID-19 Learning Shock*, Rise Insight, [https:// riseprogramme.org/publications/modeling-long-run-learning- impact-COVID-19-learning-shock-actions-more-mitigate-loss](https://riseprogramme.org/publications/modeling-long-run-learning-impact-COVID-19-learning-shock-actions-more-mitigate-loss)

- Kluger, Jeffrey (2021) How the Closure of In-School Learning Damaged US Children's Mental Health during the Pandemic. <https://time.com/5964671/school-closing-children-mental-health-pandemic/>
- Kumara, A., Wimbari, S., Susetyo, Y. F., & Kisriyani, A. (2017). The epidemiology of Indonesian children and adolescent school- based mental health: Validation of school-based mental health information system. *Universal Journal of Psychology*, 5(3), 114- 121.
- Lee, Joyce, 2020. Mental Health Effects of School Closures during COVID-19, Reflections, <https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2352-4642%2820%2930109-7>
- Mayasari, E. D., Evanjeli, L. A., Anggadewi, B. E. T., & Purnomo, P. (2021). Elementary school students' mental health during the Corona Virus Pandemic (COVID-19). *Journal of Psychology and Instruction*, 5(1), 5-17.
- Meherali, S., Punjani, N., Louie-Poon, S., Abdul Rahim, K., Das, J. K., Salam, R. A., & Lassi, Z. S. (2021). Mental health of children and adolescents amidst COVID-19 and past pandemics: A rapid systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(7), 3432.
- Meutia, A. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 pada psikis dan ingatan anak. *Elementary School Journal PGSD FIP UNIMED*, 10(1), 60- 66.
- Meyers, Laurie, 2018, The 'storm and stress' of adolescence and young adulthood, t.counseling.org/2018/10/the-storm-and-stress-of-adolescence-and-young-adulthood/
- Nasution, S. H. (2017). Gambaran mental emosional remaja sekolah full-day dan half-day. Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.
- Onyema, E.M., 2019, Integration of Emerging Technologies in Teaching and Learning Process in Nigeria : the challenges. *Central Asian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences*.
- Sholehani. (2018) Hubungan Tingkat Kelelahan Dengan Prestasi Belajar Siswa Sistem Full Day School di SMAN 2 Probolinggo (Skripsi) Mojokerto: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit. [https:// docplayer.info/219381829-Jurnal-skripsi-hubungan-tingkat-kelelahan-dengan-prestasi-belajar-siswa-dengan-sistem-full-day-school-di-sman-2-probolinggo.html](https://docplayer.info/219381829-Jurnal-skripsi-hubungan-tingkat-kelelahan-dengan-prestasi-belajar-siswa-dengan-sistem-full-day-school-di-sman-2-probolinggo.html)
- Srivastava, A., Maheshwari, D., & Dwivedi, A. (2022). Psychological and Socio-Emotional Impacts of the COVID-19 Pandemic on School Children. In P.

- Bull, & G. Patterson (Ed.), *Redefining Teacher Education and Teacher Preparation Programs in the Post-COVID-19 Era* (pp. 117-131). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8298-5.ch007>
- Unik Hanifah Salsabila, Antika Melania, Alfia Miftakhul Jannah Irada Haira Arni, Bunga Fatwa, 2020, Peralihan Transformasi Media Pembelajaran Luring ke Daring dalam Pendidikan Agama Islam *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* <http://dx.doi.org/10.31604/muaddib.v5i1.198-216>
- UNESCO, 2020, 290 Million Students Stay Home due to Coronavirus. website: <https://learningenglish.voanews.com/a/unesco-290-million-students-stay-home-due-to-coronavirus/5317148.html>
- Vallejo-Slocker, L., Fresneda, J., & Vallejo, M. A. (2020). Psychological wellbeing of vulnerable children during the COVID-19 pandemic. *Psicothema*, 32(4), 501-507.
- Wulan, D. R., Rosita, C. D., & Nopriana, T. (2021). Kondisi psikologi siswa SMP dalam pembelajaran Matematika pada masa Pandemi COVID-19. *JNPM (Jurnal Nasional Pendidikan Matematika)*, 5(1), 51-64.
- Yulianingsih, W., Suhanadji, S., Nugroho, R., & Mustakim, M. (2020). Keterlibatan orang tua dalam pendampingan belajar anak selama masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1138-1150.
- Yunitasari, R., & Hanifah, U. (2020). Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Minat Belajar Siswa pada Masa COVID 19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(3), 232-243.
- Yunike, K. I. (2021). Kondisi psikologis ibu dalam mendampingi anak belajar pada masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Medikes (Media Informasi Kesehatan)*, 8(1), 23-36.
- Zamjani, dkk. (2020) Adaptasi Ekosistem Sekolah selama Belajar dari Rumah. Risalah Kebijakan Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>.



Pembelajaran Tatap Muka yang Aman
Mengatasi Dilema Keselamatan
dan Kehilangan Pembelajaran

Pembelajaran Tatap Muka yang Aman Mengatasi Dilema Keselamatan dan Kehilangan Pembelajaran



Lukman Solihin, Amaliah Fitriah, Kaisar Julizar, Sri Fajar Martono

Dorongan Membuka Sekolah di Tengah Kendala PJJ

Dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidikan telah menimbulkan dilema antara keselamatan dan kehilangan pembelajaran. Di satu sisi, aktivitas pembelajaran tatap muka (PTM) dikhawatirkan menjadi kluster penyebaran virus karena membuka kemungkinan terjadinya interaksi langsung. Sejak diwacanakan oleh pemerintah pada pertengahan 2020, tak kurang dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ombudsman Republik Indonesia, dan berbagai elemen masyarakat lainnya meminta pemerintah tidak tergesa-gesa menerapkan kebijakan pembukaan kembali sekolah (*Kontan.co.id*, 3 Juni 2020; *Jawapos.com*, 4 Agust 2020; *Bbc.com*, 10 Agust 2020; *Republika.co.id*, 28 Des 2020). Studi yang dilakukan Amri dkk. (2021) juga memperoleh simpulan sekitar 76% responden dari 27.046 guru khawatir jika sekolah dibuka kembali karena risiko kesehatan. Di sisi lain, pembelajaran jarak jauh sebagai jalan keluar agar siswa tetap belajar selama pandemi masih menghadapi banyak kendala, sehingga siswa mengalami penurunan intensitas dan kualitas pembelajaran (Zamjani dkk., 2020a; Arsendy dkk., 2020). Selain itu, efek psikologis yang dialami siswa selama penutupan sekolah, juga turut menjadi pertimbangan agar sekolah dapat segera dibuka kembali (Irmawati dkk., 2021).

Penutupan sekolah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud, saat ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 tahun 2020 yang diperkuat dengan Surat Edaran Sesjen Kemendikbud Nomor 15 tahun 2020 tentang

Pedoman Pelaksanaan Belajar dari Rumah selama Darurat COVID-19. Dua surat edaran ini menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah (BDR), istilah lain dari pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diterapkan bagi semua satuan pendidikan di Indonesia. PJJ menjadi pilihan kebijakan yang tak terelakkan sebagai akibat dari penutupan sekolah. Namun, pelaksanaannya mengalami berbagai kendala dan menimbulkan permasalahan baru, terutama terkait dengan akses, fasilitas penunjang, kompetensi guru, dan pendampingan orang tua.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), persentase penduduk yang mengakses internet secara nasional mencapai 62,10% pada 2021. Namun, kesenjangan terjadi di antara provinsi, terutama Jawa dan Luar Jawa. Di DKI Jakarta misalnya, penduduk yang mengakses internet mencapai 85,55%, sedangkan di Papua hanya 26,49% (BPS, 2022). Belum meratanya akses internet dan listrik menjadi salah satu kendala utama PJJ, terutama bagi siswa di daerah tertinggal dan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu (Arsendy et.al, 2020).

Guru juga mengalami kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran selama BDR, utamanya terkait dengan kompetensi digital mereka. Survei Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak)—saat ini Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP)—menemukan bahwa meskipun 95% guru telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran, namun lebih dari 50% guru baru menggunakan TIK ketika pandemi. Akibatnya, banyak guru merasa kesulitan dalam beradaptasi dengan tantangan baru karena kurangnya kompetensi TIK tersebut (Zamjani, dkk., 2021).

Kendala lainnya terkait dengan pendampingan orang tua. Survei SMERU (2020) mengungkapkan, 87% guru mengeluh orang tua tidak responsif dalam berkomunikasi selama kegiatan BDR. Survei itu juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam pendampingan anak, di mana wali murid yang berpendidikan tinggi, tinggal di wilayah perkotaan, dan menyekolahkan anaknya di sekolah swasta cenderung lebih aktif mendampingi dan berkomunikasi dengan guru (SMERU, 2020). Studi lainnya menunjukkan bahwa peran ibu lebih besar dalam mendampingi anak belajar dibanding anggota keluarga lainnya (Rakhmah & Azizah, 2020) (baca juga artikel “Belajar Selama Pandemi: Peran Orang Tua Murid di Jenjang Sekolah Dasar” dalam buku ini).

Proses pelaksanaan PJJ juga masih jauh dari efektif karena menurunnya intensitas dan rutinitas belajar. Survei Puslitjak pada April dan Mei 2020 menunjukkan, dari sekitar 96% siswa yang melakukan BDR, kurang dari setengahnya yang belajar setiap hari dan rata-rata siswa hanya belajar kurang

dari tiga jam per hari. Sementara itu, rata-rata interaksi siswa dengan guru terjadi hanya dua setengah jam per hari (Zamjani dkk., 2020b). Tidak efektifnya PJJ membuat siswa berpotensi mengalami kehilangan pembelajaran atau *learning loss*. Survei OECD menemukan bahwa hanya setengah dari populasi siswa di dunia yang dapat mencapai ketuntasan kurikulum akibat rendahnya pembelajaran selama pandemi (*The Economist*, 18 Juli 2020). Sementara laporan Bank Dunia memperkirakan hasil capaian BDR hanya sekitar 33% dibandingkan belajar normal di kelas. Kehilangan pembelajaran ini diperkirakan berdampak pada menurunnya skor PISA siswa Indonesia yang seterusnya dapat mengurangi pendapatan ekonomi di masa depan (World Bank, 2020). Estimasi ini diperkuat oleh studi dari INOVASI yang menyebutkan bahwa siswa di kelas awal (1, 2, dan 3 SD) mengalami kemerosotan pembelajaran dilihat dari tiga indikator, yaitu hilangnya kompetensi yang telah dipelajari sebelumnya, tidak tuntasnya pembelajaran di jenjang tertentu, dan dampak yang terakumulasi dari kegagalan menguasai pembelajaran dari tingkat sebelumnya (INOVASI, 2021).

Anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung, mengalami dampak terburuk dari kehilangan pembelajaran ini (SMERU, 2020; INOVASI, 2020). Siswa miskin yang bersekolah di sekolah negeri di perdesaan, khususnya di luar Pulau Jawa, rentan mengalami penurunan kemampuan belajar lebih besar dari siswa lainnya (SMERU, 2020). Selain itu, risiko putus sekolah juga meningkat, di mana 10 juta siswa di seluruh dunia diperkirakan dapat mengalami putus sekolah, terutama anak perempuan (*The Economist*, 18 Juli 2020). Di Indonesia, menurut sensus terbatas pada keluarga miskin yang dilakukan UNICEF, terdapat sekitar 1.243 anak putus sekolah karena pandemi, di mana sebagian besar (70%) disebabkan faktor ekonomi (Kudus, 2021).

Selain beragam masalah di atas, dampak PJJ terhadap kesejahteraan sosial dan emosional anak juga nyata. Pola kehidupan yang berubah akibat pembatasan aktivitas sosial berpengaruh terhadap tumbuh kembang sosial-emosional anak. Survei yang dilakukan Puslitjak pada November 2020 menunjukkan, selama pandemi gangguan mental emosional anak usia sekolah cenderung meningkat, di mana sejumlah 16,61% responden mengalami kesulitan mental emosional (Irmawati dkk., 2021). Angka ini lebih besar dibandingkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang menunjukkan 9,8% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan mental emosional (Balitbangkes, 2019). Dalam konteks pandemi, pendampingan orang tua selama pembelajaran dari rumah merupakan faktor penting dalam

mencegah permasalahan mental emosional anak (baca juga artikel “Kondisi Psikologis Siswa pada Masa Pandemi COVID-19” dalam buku ini).

Merespons berbagai persoalan yang timbul selama penutupan sekolah tersebut, pemerintah kemudian menelurkan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang dimulai sejak Tahun Ajaran 2020/2021. Di sisi lain, aneka rupa sanggahan dan pertimbangan senantiasa mengemuka di tengah naik-turunnya kasus penularan COVID-19. Artikel ini berupaya mendiskusikan dinamika kebijakan tersebut serta implementasinya berdasarkan hasil survei maupun kajian kualitatif yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak)—saat ini Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP)— pada pertengahan 2020 hingga pertengahan 2021. Data sekunder juga digunakan untuk melengkapi analisis, baik berupa bahan paparan resmi dari Kemendikbud, data dari laman sekolah.data.kemdikbud.go.id, maupun informasi dari media massa. Tulisan ini lantas ditutup dengan suatu refleksi mengenai pentingnya menjadikan protokol kesehatan sebagai habitus baru, sehingga PTM dapat dilaksanakan dengan aman.

Lini Masa Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka

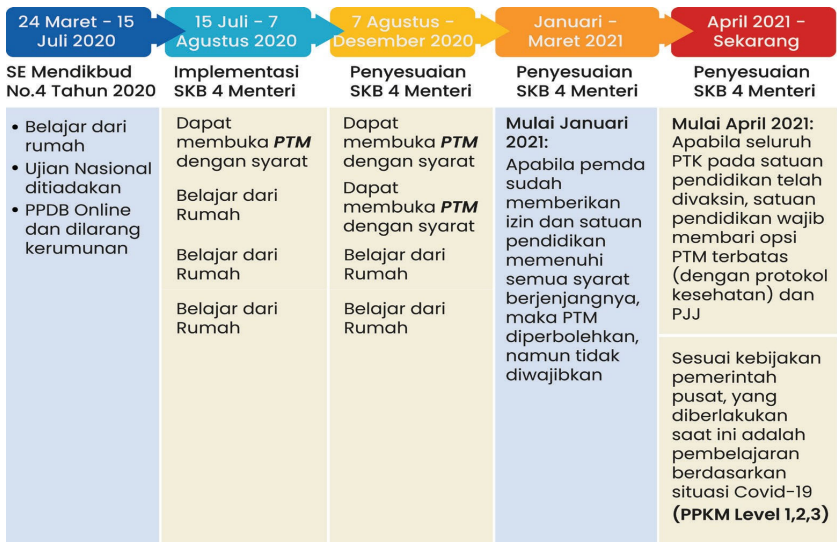
Penutupan sekolah akibat pandemi telah mendorong banyak lembaga dunia menyarankan pembukaan kembali sekolah dengan menyiapkan rambu-rambu yang perlu diperhatikan apabila sekolah dibuka kembali. Pada Maret 2020, UNICEF, WHO, dan IFRC memublikasikan *Guidance for COVID-19 Prevention and Control in Schools*. Publikasi ini menjelaskan perihal daftar periksa yang perlu dipenuhi sebelum sekolah dibuka, meliputi kerja sama dengan otoritas lokal dan pejabat kesehatan dalam memastikan kesiapan fasilitas yang aman, menyosialisasikan cara mencuci tangan dan mendorong perilaku hidup bersih dan sehat, memastikan fasilitas di sekolah disterilkan secara berkala, meningkatkan sirkulasi udara, serta memastikan sampah dikelola dengan aman.

Bulan berikutnya, April 2020, McKinsey & Company menerbitkan *Safely Back to School after Coronavirus Closures* yang menyoroti tiga isu utama (Jake, et.al, 2020). *Pertama*, keputusan pembukaan kembali sekolah harus mempertimbangkan aspek risiko bagi kesehatan, aktivitas ekonomi masyarakat, tumbuh kembang anak, dan kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan. *Kedua*, prioritas pembukaan kembali sekolah mempertimbangkan beberapa hal, misalnya mendahulukan siswa tahap akhir yang akan mengikuti ujian kelulusan, siswa yang tidak memiliki pengasuh di rumah, serta siswa di daerah terpencil. Sebaliknya, bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga

kependidikan yang memiliki kerentanan dan risiko kesehatan harus belajar dan bekerja dari rumah. *Ketiga*, sekolah perlu memenuhi syarat kesehatan dan keamanan, seperti sarana sanitasi yang mencukupi, serta kemungkinan untuk melakukan jaga jarak fisik.

Sementara WHO pada Mei 2020 menerbitkan *Considerations for School-Related Public Health Measures in the Context of COVID-19: Annex to Considerations in Adjusting Public Health and Social Measures in the Context of COVID-19*. WHO menyoroti enam dimensi yang perlu dipertimbangkan saat melakukan pembukaan kembali sekolah, yaitu: kebijakan, pembiayaan, pelaksanaan yang aman, proses pembelajaran, perhatian terhadap siswa yang memiliki keterbatasan, dan kesejahteraan anak.

Secara umum berbagai lembaga di dunia menganjurkan pembukaan kembali sekolah untuk meminimalkan dampak buruk penutupan sekolah. Konteks global tersebut dan kondisi pelaksanaan PJJ yang belum efektif menjadi konsiderans bagi terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang pertama kali diluncurkan pada 15 Juni 2020—SKB ini kemudian mengalami beberapa kali penyesuaian (Gambar 1). SKB empat menteri tersebut menjadi panduan penyelenggaraan PTM yang dapat dilakukan sejak Tahun Ajaran 2020/2021.



Gambar 1 Penyesuaian SKB Empat Menteri Sejak 2020

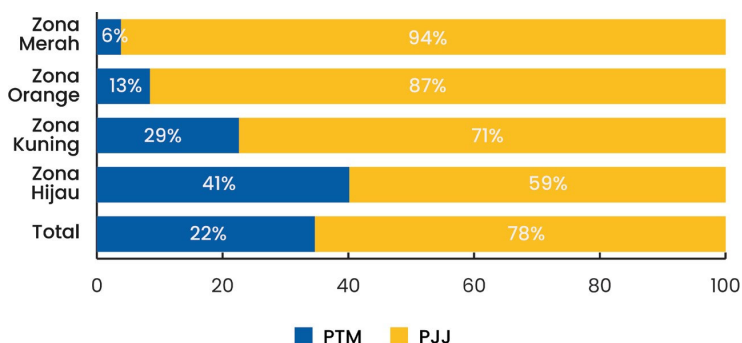
Sumber: Diolah dari paparan Dirjen PAUD–Dikdasmen (21 September 2021)

Terdapat beberapa poin penting dalam SKB empat menteri tersebut. *Pertama*, pembelajaran tatap muka dapat dilakukan di daerah zona hijau. *Kedua*, sekolah harus memenuhi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka, seperti sarana sanitasi dan kebersihan, akses terhadap fasilitas kesehatan, kesiapan menerapkan area wajib masker, memiliki pengukur suhu tubuh tembak (*thermogun*), dan melakukan pendataan kondisi kesehatan warga sekolah. *Ketiga*, pembukaan sekolah dilakukan atas persetujuan pemerintah daerah dan orang tua melalui rapat komite sekolah. Bagi orang tua yang tidak mengizinkan anaknya belajar di sekolah, sekolah wajib memfasilitasi BDR. *Keempat*, pelaksanaan belajar tatap muka dilakukan bertahap mulai dari jenjang SMP dan SMA, disusul SD, dan terakhir PAUD.

Untuk memperluas pelaksanaan PTM, pemerintah menerbitkan perubahan SKB empat menteri pada 7 Agustus 2020 yang membolehkan PTM dilakukan di zona kuning. Namun, hasil evaluasi Kemendikbud pada 18 November 2020 menunjukkan, opsi yang membolehkan PTM dilakukan di zona hijau dan kuning belum sepenuhnya dilaksanakan, yakni baru sekitar 75% sekolah di zona hijau dan 20% sekolah di zona kuning yang telah membuka sekolah. Sebaliknya, terdapat pula sekolah- sekolah di luar zona hijau dan kuning yang mulai melakukan PTM, yaitu sekitar 12% di zona oranye dan 8% di zona merah (Kemendikbud, 2020a).

Perkembangan ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah mengubah SKB pada 20 November 2020, yang mana kebijakan pembukaan sekolah pada semester genap tahun 2021 diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, sehingga tidak lagi berpatokan pada zona epidemiologi (Kemendikbud, 2020a). Pemerintah daerah di semua zona epidemiologi dapat membuka sekolah dengan mempertimbangkan kesiapan semua pihak dan mendapat persetujuan orang tua. Pelaksanaan PTM juga tidak perlu dilakukan serentak di seluruh wilayah, melainkan dapat dilaksanakan terbatas di wilayah tertentu dalam kewenangan daerah tersebut.

Upaya pemerintah dalam mendorong daerah untuk membuka kembali sekolah selama tahun 2020 belum sepenuhnya berhasil. Hasil pendataan Kemendikbud yang dilakukan hingga 23 Maret 2021 menunjukkan, secara nasional PTM hanya dilakukan oleh 22% satuan pendidikan, sementara 78% lainnya memilih tetap menerapkan PJJ. Satuan pendidikan yang dibuka di zona hijau juga baru mencapai 41%, sedangkan 59% selebihnya memilih PJJ (Grafik 1) (Kemendikbud, 2021a).



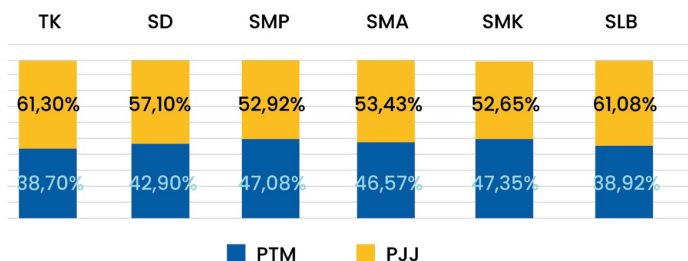
Grafik 1 Persentase PTM dan PJJ dari Pelaporan 183.566 Satuan Pendidikan
Data Per 23 Maret 2021

Sumber: Paparan Mendikbud, SKB 4 Menteri, 30 Maret 2021

Agar terjadi akselerasi pembukaan kembali sekolah pada awal 2021, pemerintah kembali mengumumkan penyesuaian SKB empat menteri pada 30 Maret 2021, bersamaan dengan kebijakan melakukan vaksinasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Mendikbud menyatakan, setelah pendidik dan tenaga kependidikan divaksin secara lengkap hingga akhir Juni 2021, maka satuan pendidikan diharapkan segera memberikan layanan PTM terbatas (*Kemdikbud.go.id*, 30 Maret 2021). Kemendikbud juga meluncurkan *Panduan Pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Masa Pandemi COVID-19* pada 2 Juni 2021. Panduan ini di antaranya menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan, prosedur dan tahapan pelaksanaan PTM, pelaksanaan protokol kesehatan, dan sumber pendanaannya (Kemendikbud, 2021b).

Meskipun Kemendikbud telah berupaya mendorong pemerintah daerah melalui sosialisasi, penyiapan panduan, serta vaksinasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan, namun penerapan PTM terbatas pada awal hingga pertengahan 2021 masih mengalami banyak kendala. Hal ini terutama karena ledakan penyebaran COVID-19 akibat melonggarnya pembatasan sosial, meningkatnya kegiatan ekonomi, aktivitas mudik lebaran pada akhir Mei sampai awal Juni 2021, serta munculnya varian Delta pada awal Juni 2021 (*Kompas.com*, 15/07/2021). Berbagai elemen masyarakat juga meminta rencana pembukaan sekolah ditinjau kembali di tengah naiknya kasus penularan tersebut.

Hingga akhir 2021 (ketika artikel ini ditulis), meskipun jumlah satuan pendidikan yang melakukan PTM mulai meningkat, namun sebagian besar masih memilih pembelajaran jarak jauh (Grafik 2). Dari data tersebut juga terlihat bahwa pelaksanaan PTM tertinggi dilakukan di jenjang SMP, SMA, dan SMK, sementara di jenjang PAUD, SD, dan SLB relatif lebih rendah. Kenyataan ini kemungkinan berkaitan dengan kekhawatiran sementara pihak yang menganggap bahwa perilaku siswa PAUD dan SD, terutama di kelas awal, lebih sulit dikontrol. Misalnya, pernyataan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang mengusulkan agar pembukaan PAUD dan SD ditangguhkan (*Suara.com*, 27 Sept 2021). Padahal, menurut sebuah studi di Inggris mengenai skenario pembukaan kembali sekolah memperlihatkan bahwa potensi penularan lebih besar justru terjadi pada anak-anak di jenjang lebih tinggi karena mereka umumnya memiliki lebih banyak kontak sosial (Keeling et al., 2021). Lagi pula, dalam proses berangkat dan pulang sekolah, siswa PAUD dan SD lazimnya masih didampingi oleh orang tua. Hal ini tentu berbeda dengan siswa di jenjang yang lebih tinggi, di mana sebagian dari mereka sudah dianggap lebih mandiri.



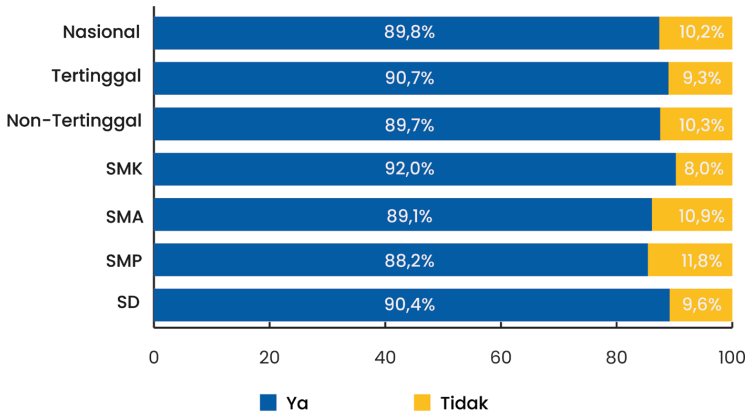
Grafik 2 Satuan Pendidikan yang Sudah Laport Menurut Pembelajaran Secara PTM dan PJJ

Sumber: Diolah dari sekolah.data.kemdikbud.go.id
(data per 12 September 2021)

Persiapan Sekolah Mengutamakan Sarana Fisik

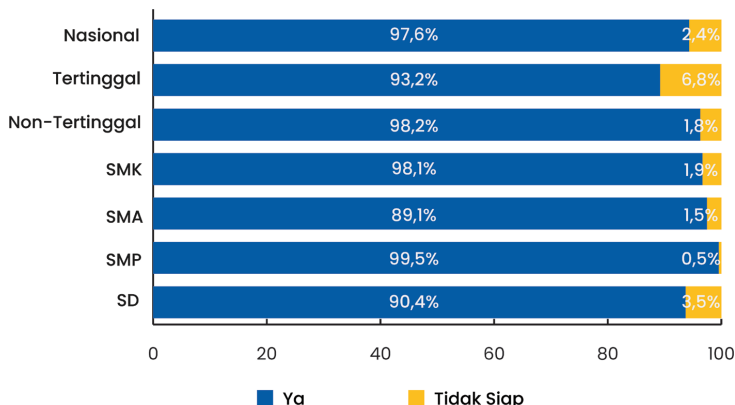
Hasil beberapa survei menegaskan tingginya keinginan siswa dan orang tua agar sekolah segera dibuka. Survei UNICEF pada Mei dan Juni 2020 menunjukkan, 87% siswa ingin segera kembali ke sekolah (*Mediaindonesia.com*, 26 Sept 2020). Begitu pula survei yang dilakukan KPAI pada Desember 2020 mencatat sekitar 78,17% siswa setuju PTM dilakukan pada Januari 2021 (*Kompas.com*, 29 Des 2020). Sementara dari sisi orang tua, hasil studi

Lembaga Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan sebanyak 62,8% orang tua berpendapat bahwa PTM dapat segera dilakukan (LSI, 2021). Sementara survei Puslitjak memperoleh angka 89,8% orang tua setuju anak mereka dapat segera mengikuti PTM (Grafik 3). Alasannya, sekolah sudah menyediakan sarana untuk melaksanakan protokol kesehatan, anak tidak dapat belajar optimal selama BDR, kendala koneksi internet, orang tua tidak bisa mendampingi anak ketika BDR, dan tidak memiliki gawai untuk kegiatan belajar.



Grafik 3 Orang Tua Mengizinkan Anak Mengikuti PTM
Sumber: Survei Puslitjak, Mei-Juni 2021

Namun, kebijakan pembukaan kembali sekolah tidak dapat didasarkan hanya pada aspirasi siswa dan orang tua. Kesiapan sekolah dalam menerapkan kebijakan tersebut perlu menjadi pertimbangan. Hasil survei Puslitjak memperoleh data sebesar 97,6% kepala sekolah secara nasional menyatakan siap untuk melakukan PTM, terutama dalam memenuhi fasilitas kebersihan, kesehatan, dan penerapan protokol kesehatan di sekolah. Namun, di daerah tertinggal angkanya lebih rendah, yaitu 93,2%. Dibandingkan jenjang lainnya, SD memiliki persentase terbesar yang belum siap melaksanakan PTM (3,5%) (Grafik 4). Dari keterangan yang dihimpun dari sekolah-sekolah yang merasa belum siap melaksanakan PTM terungkap beberapa alasan, antara lain karena sekolah tidak memiliki anggaran khusus untuk melakukan tes COVID-19, belum memiliki fasilitas yang memadai untuk pencegahan COVID-19, tidak semua guru siap kembali mengajar di sekolah, serta terkendala izin dari orang tua.



Grafik 4 Persentase Sekolah Berdasarkan Kesiapan Melakukan PTM
Sumber: Survei Puslitjak, Mei-Juni 2021

Sebagai upaya menyiapkan pelaksanaan PTM, sekolah-sekolah mulai berbenah melengkapi berbagai fasilitas penunjang dalam rangka penerapan protokol kesehatan, melakukan sosialisasi, menyiapkan mekanisme penanganan jika warga sekolah terpapar, serta melakukan pendataan kondisi kesehatan warga sekolah. Dari sekian upaya persiapan itu, sekolah-sekolah umumnya memberi perhatian besar (lebih dari 90%) pada sarana dan fasilitas fisik yang memungkinkan penerapan protokol kesehatan, seperti penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun, *hand sanitizer*, menyiapkan ruang kelas dengan sirkulasi udara yang baik, menyediakan masker, serta pengukur suhu tubuh tembak (*thermogun*). Selain sarana dan prasarana tersebut, sekolah juga melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat, serta meminta persetujuan dan sosialisasi kepada orang tua (Tabel 1).

Tabel 1 Persiapan Sekolah Menyambut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

| No | Persiapan Sekolah | % |
|----|---|------|
| 1 | Menyediakan sabun untuk cuci tangan | 98,9 |
| 2 | Menyediakan hand sanitizer | 98,4 |
| 3 | Menyiapkan ruang kelas dengan sirkulasi udara yang baik | 98,3 |
| 4 | Menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir | 97,6 |
| 5 | Meminta persetujuan orang tua untuk melakukan PTM | 97,0 |
| 6 | Berkoordinasi dengan instansi kesehatan setempat | 96,2 |
| 7 | Melakukan sosialisasi kepada orang tua sebelum PTM | 95,8 |
| 8 | Meyediakan masker bagi siswa dan guru | 95,8 |

| No | Persiapan Sekolah | % |
|----|--|------|
| 9 | Menyediakan <i>thermogun</i> | 94,7 |
| 10 | Menyajikan poster protokol kesehatan di tempat strategis | 91,2 |
| 11 | Membentuk Satgas COVID-19 di sekolah | 86,6 |
| 12 | Melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin | 83,5 |
| 13 | Menyiapkan mekanisme jika terjadi penularan | 82,6 |
| 14 | Mengisi daftar periksa kesiapan PTM | 81,7 |
| 15 | Melakukan pendataan warga sekolah terkait COVID-19 | 78,1 |

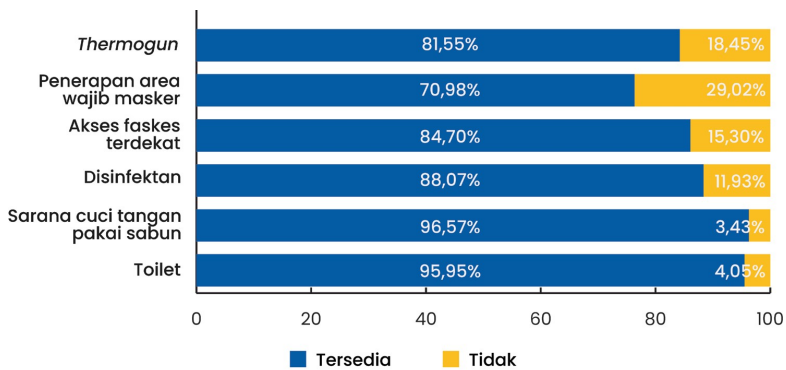
Sumber: Survei Puslitjak, Mei-Juni 2021

Dibandingkan aneka persiapan sarana fisik tersebut, upaya sekolah dalam membentuk Satgas COVID-19, menyiapkan mekanisme jika terjadi penularan, mengisi daftar periksa kesiapan PTM, dan melakukan pendataan kondisi kesehatan warga sekolah relatif mendapat perhatian yang lebih kecil dari sekolah. Padahal berbagai hal tersebut menjadi prasyarat dalam menjamin terlaksananya penerapan PTM yang aman. Dalam hal pengisian daftar periksa misalnya, sekolah-sekolah perlu melengkapi keterangan mengenai kondisi kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan menerapkan protokol kesehatan, dapat mengakses fasilitas kesehatan terdekat, serta melakukan pendataan kondisi warga sekolah. Namun, berbagai kalangan menganggap isian daftar periksa terlalu panjang dan detail, sehingga banyak sekolah belum mengisi daftar periksa yang disyaratkan (*Kompas.com*, 22/04/2021). Menurut catatan hingga 12 September 2021, terdapat sekitar 220.763 satuan pendidikan atau sekitar 41,09% yang belum mengisi daftar periksa yang menjadi prasyarat dalam pelaksanaan PTM tersebut (Sekolah.data.kemdikbud. go.id).

Salah satu isian dalam daftar periksa ialah pendataan kondisi warga sekolah yang meliputi pendataan terhadap kondisi medis komorbid warga sekolah, akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak, riwayat perjalanan dari zona penularan tinggi, dan adanya riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Dibandingkan menyiapkan sarana fisik, proses pendataan ini rupanya belum banyak dilakukan oleh sekolah. Salah satu kepala sekolah dalam diskusi dengan kami menyatakan, pendataan umumnya dilaksanakan satu kali sebelum pelaksanaan PTM. Hal itu pun dilakukan apabila ada perintah dari dinas pendidikan dan tidak dilakukan secara berkala. Proses pendataan ini sebetulnya dapat dibantu oleh satuan tugas (satgas) penanganan COVID-19 di sekolah. Namun, hasil survei juga menunjukkan belum semua

sekolah memiliki satgas penanganan COVID-19, yakni baru sekitar 86,6% sekolah yang telah membentuk satgas tersebut (Tabel 1).

Kesiapan sekolah dari segi sarana fisik sebagaimana tergambar dari hasil survei tersebut selaras dengan data kesiapan sekolah dalam melaksanakan PTM yang dihimpun Kemendikbud. Penyediaan toilet, sarana cuci tangan pakai sabun, dan disinfektan misalnya, merupakan persiapan yang paling menonjol (Grafik 5). Sementara aspek lainnya, seperti proses pendataan yang dilakukan oleh sekolah masih sangat minim, yaitu baru sekitar 39% sekolah yang telah melakukan pendataan (sekolah.data.kemdikbud.go.id).



Grafik 5 Ketersediaan Sarana Sanitasi dan Kesehatan di Sekolah
Sumber: Diolah dari sekolah.data.kemdikbud.go.id
(Data Per 12 September 2021)

Gambaran kondisi di atas mengonfirmasi asumsi sebagian kalangan bahwa sekolah baru siap pada tataran penyediaan sarana dan prasarana, namun belum mampu memenuhi aspek penting lainnya untuk pelaksanaan PTM terbatas, seperti upaya sekolah dalam membentuk Satgas COVID-19, menyiapkan mekanisme jika terjadi penularan, mengisi daftar periksa kesiapan PTM, dan melakukan pendataan kondisi kesehatan warga sekolah secara berkala. Kondisi ini juga merefleksikan perlunya pembagian peran dan tanggung jawab yang lebih baik di tingkat daerah.

Dukungan terhadap kesiapan yang perlu dilakukan sekolah perlu dilakukan terutama oleh pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendidikan, dinas kesehatan, serta Satgas COVID-19 di daerah. Dalam buku saku *Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19* disebutkan mengenai beberapa peran pemerintah daerah tersebut, antara lain dalam hal

memastikan pemenuhan daftar periksa di sekolah, melarang PTM pada sekolah yang belum memenuhi semua daftar periksa, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PTM, dan apabila terdapat kasus konfirmasi COVID-19 di sekolah, wajib melakukan tindakan penanganan kasus dan dapat memberhentikan sementara PTM. Pelaksanaan peran tersebut secara optimal tentu dapat menjadi dukungan riil agar sekolah lebih siap dalam melaksanakan PTM.

Lain Persiapan, Lain Pula Penerapannya

Pembukaan kembali sekolah perlu dilakukan secara aman. Hal ini mengandaikan adanya dukungan dari lingkungan sosial yang juga menaati protokol kesehatan. Mustahil kiranya berupaya menjaga penularan virus hanya di sekolah, sementara dalam lingkup sosial lainnya orang-orang dewasa tidak menerapkan jaga jarak dan bebas melanggar protokol kesehatan (Levinson et al., 2020). Oleh sebab itu, penerapan protokol kesehatan tidak hanya perlu dilakukan di sekolah, melainkan sejak di rumah, selama keberangkatan, dan saat pulang sekolah. Merujuk pada *Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19*, sebelum berangkat ke sekolah, orang tua perlu memastikan anaknya dalam kondisi sehat, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, menggunakan dan membekali dengan masker cadangan, membawa bekal makan dan minum, serta peralatan belajar. Ketika berangkat ke sekolah, siswa harus tertib menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari menyentuh benda-benda di area publik (Kemendikbud, 2021b).

Kemudian di sekolah, petugas mengukur suhu tubuh dan memerintahkan untuk melakukan cuci tangan pakai sabun, pembelajaran dilakukan dengan menjaga jarak, tertib menggunakan masker, dan tidak diperkenankan saling meminjam alat belajar dan peralatan lainnya. Ketika pulang, siswa juga menerapkan protokol kesehatan seperti ketika berangkat sekolah. Sesampainya di rumah, siswa memisahkan alat belajar, sepatu, dan pakaian, serta membersihkan diri sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga. Apabila siswa atau anggota keluarganya mengalami gejala umum seperti batuk, demam, nyeri tenggorokan, atau sesak nafas setelah pelaksanaan PTM, maka perlu melaporkan kepada satgas COVID-19 di sekolah masing-masing untuk dipantau dan mendapatkan penanganan (Kemendikbud, 2021b).

Praktik ideal sebagaimana tergambar dalam panduan yang disebarluaskan oleh Kemendikbud relatif telah diikuti oleh sekolah. Beberapa kepala sekolah dan guru yang telah melaksanakan PTM mengungkapkan kepada kami bahwa sekolah

mereka berupaya mengikuti panduan yang ada. Secara umum, sekolah-sekolah yang menerapkan PTM melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada seluruh warga sekolah ketika memasuki lingkungan sekolah, lalu meminta mereka mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir di tempat-tempat yang telah disediakan (Gambar 2). Di dalam kelas, jarak tempat duduk siswa dibuat minimal 1,5 meter dan ada pula yang membatasi setiap meja dengan partisi yang terbuat dari plastik tembus pandang. Sementara itu, untuk kegiatan ekstrakurikuler dan kantin sebagian ditutup untuk menghindari kontak fisik satu sama lain.



Gambar 2 Pemeriksaan Suhu Tubuh Saat Kedatangan Siswa SMK Negeri 2 Pangkalpinang (Sumber Foto: smk2pangkalpinang.sch.id)

Sebelum dan sesudah digunakan, ruangan-ruangan di sekolah dilakukan penyemprotan disinfektan. Di beberapa sekolah di Kota Langsa, Kota Pangkalpinang, dan Kab. Lombok Tengah seperti terungkap dalam diskusi dengan kami, penyemprotan disinfektan ini dilakukan bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas kesehatan, kecamatan, dan Puskesmas. Pembatasan jumlah 50% siswa yang melaksanakan PTM juga ditaati, di mana sebagian siswa lainnya tetap melanjutkan pembelajaran secara daring dari rumah. Untuk memastikan pelaksanaan berjalan aman dan terkendali, pihak dinas pendidikan juga melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Pemantauan ini juga melibatkan unsur pengawas sekolah.

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan sarana kebersihan dan kesehatan yang diperlukan, sekolah memanfaatkan dana BOS, misalnya untuk menambah fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun, membeli *thermogun*, serta menyediakan masker dan pelindung wajah (*face shield*). Pihak sekolah juga membentuk tim satuan tugas (*satgas*) yang berperan memastikan kesiapan sekolah, mengontrol penerapan protokol kesehatan, serta memantau perkembangan kondisi kesehatan warga sekolah sebelum dan ketika PTM dilaksanakan. Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) difungsikan sebagai ruang transit bagi siapa saja yang sakit atau mengalami gejala COVID-19 ketika proses PTM. Di berbagai tempat strategis di lingkungan sekolah ditempelkan pula berbagai informasi mengenai penularan COVID-19 dan himbauan pencegahan, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menjaga imunitas tubuh.

Proses belajar juga dilakukan dengan menyesuaikan kondisi sekolah, sehingga pembelajaran tidak harus selalu berlangsung di dalam kelas. Beberapa sekolah yang memiliki halaman dan pekarangan yang cukup luas memanfaatkan area tersebut pada jam-jam tertentu untuk pembelajaran (Gambar 3). Selain dapat memberikan suasana baru bagi peserta didik, hal ini juga bertujuan untuk menerapkan jaga jarak antarsiswa dan memastikan sirkulasi udara yang memadai (Julizar dkk., 2021).



Gambar 3 Siswa Belajar di Ruang Terbuka di SMP Negeri 1
Kuala Batee, Aceh Barat Daya
(Sumber Foto: Dok. Penelitian Puslitjak)

Salah satu sekolah yang dianggap berhasil menerapkan PTM dengan aman adalah SDN 03 Pontianak Selatan (Gambar 4). Penyelenggaraan PTM di sekolah ini menjadi rujukan dalam paparan Mendikbud pada 30 Maret 2021. Sebelum memulai PTM terbatas, sekolah ini membentuk tim Satgas COVID-19, menyiapkan prosedur pelaksanaan PTM, memenuhi daftar periksa, memperbanyak informasi dan imbauan pencegahan COVID-19 di lingkungan sekolah, memberitahukan rencana PTM kepada lingkungan di sekitar sekolah, seperti RT, kelurahan, dan Babinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), serta melaporkan perkembangan kesiapan uji coba PTM pada Dinas Pendidikan Kota Pontianak.

SD Negeri 03 Pontianak Selatan juga mengimbau setiap guru untuk melakukan rapid test secara berkala, mendata dan memastikan bahwa siswa dan guru yang sakit tidak berangkat ke sekolah, menerapkan protokol kesehatan, memastikan tidak ada yang masuk ke lingkungan sekolah tanpa izin dari petugas keamanan sekolah, dan mengimbau pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan vaksinasi. Dalam hal pembagian rombongan belajar, sekolah ini mematuhi aturan 50% kapasitas per kelas, sehingga dalam satu rombongan belajar terdapat dua kelompok belajar. Kelompok belajar tersebut melakukan PTM sebanyak dua kali dalam seminggu dengan alokasi waktu tiga jam di setiap pertemuan. Kelompok belajar yang tidak melakukan PTM mendapatkan materi PJJ dari guru melalui grup Whatsapp yang akan diperdalam dalam pertemuan tatap muka berikutnya (*Kemdikbud.go.id*, 05 April 2021).



Gambar 4 Pelaksanaan PTM Terbatas di SDN 03 Pontianak Selatan
(Sumber Foto: Pontianak.tribunnews.com)

Namun, gambaran praktik di atas belum merata di semua sekolah yang menerapkan PTM. Hasil penelusuran Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) dan KPAI di berbagai daerah menunjukkan adanya pelanggaran protokol kesehatan selama pelaksanaan PTM, salah satu yang mencolok ialah tidak menggunakan masker ketika proses belajar mengajar (*Detik.com*, 01 Agust 2021; *CNNIndonesia.com*, 27 Sept 2021). Begitu pula inspeksi mendadak yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di hari pertama PTM di Kota Semarang pada 5 April 2021 juga menemukan adanya ketidaksiplinan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan guru. Ganjar menyoroti perilaku guru yang berkerumun, tidak memakai masker dengan benar, bahkan ada guru yang memberikan telepon genggamnya kepada siswa untuk mengambil gambar (*Semarang.bisnis.com*, 5 April 2021).

Kajian Puslitjak pada 2020 juga menunjukkan adanya perilaku tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di sekolah. Masih kerap ditemukan, guru dan siswa yang tidak memakai masker dengan benar, tidak rutin mencuci tangan pakai sabun padahal fasilitasnya sudah disediakan, sulit menerapkan jaga jarak, berkumpul untuk makan bersama, saling tukar alat belajar, atau sekadar bergurau. Pada kasus tertentu, misalnya aturan untuk tidak membuka kantin di lingkungan sekolah untuk menghindari kerumunan dan interaksi langsung, ternyata di luar lingkungan sekolah para penjual makanan bebas berjualan. Para pedagang makanan membuka lapak tepat di luar pagar sekolah, sehingga pada jam istirahat atau pulang banyak siswa yang berkumpul untuk jajan dengan tidak memakai masker dan menjaga jarak (Julizar dkk., 2021). Studi yang dilakukan Hadi et al. (2022) terhadap kesiapan kantin sekolah juga menunjukkan bahwa kondisi kesehatan kantin sekolah dipengaruhi oleh para pedagang di luar sekolah. Semakin banyak pedagang di luar sekolah, maka kondisi kantin yang sehat lebih sulit diwujudkan. Kondisi kantin sekolah lebih mungkin terjaga apabila sekolah membatasi siswa dalam membeli makanan di luar sekolah dan mempromosikan pembatasan membeli makanan dari luar (Hadi et al., 2022).

Sikap tidak disiplin melaksanakan protokol kesehatan juga rentan terjadi ketika pulang sekolah (*Kompas.id*, 8 Apr 2021). Beberapa sekolah memang membuat peraturan siswa harus dijemput oleh orang tua atau keluarga, namun tidak sedikit juga siswa pulang sendiri. Akibatnya, sekolah tidak bisa memastikan siswa langsung pulang ke rumah atau bermain ke tempat lain, baik bersama

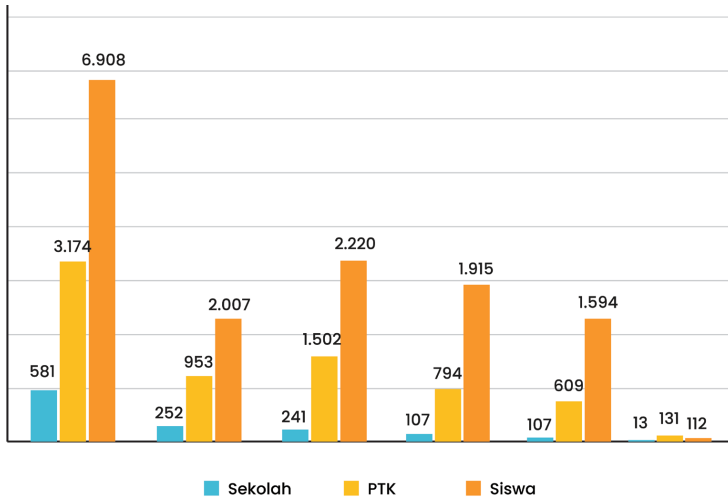
teman maupun sendiri. Kepala sekolah dan guru yang kami ajak diskusi juga menaruh kekhawatiran terhadap penerapan protokol kesehatan di luar sekolah. Menurut mereka, penerapan disiplin protokol kesehatan di sekolah lebih mungkin dilakukan melalui pengawasan kepala sekolah, guru, dan satuan pengamanan sekolah. Sebaliknya di lingkungan keluarga dan lingkungan sosial lainnya, kontrol terhadap pelaksanaan protokol kesehatan bukan lagi kewenangan mereka.

Di sinilah pentingnya menjadikan protokol kesehatan sebagai habitus baru. Sebagai sebuah disposisi baru, menjaga kebersihan, mencuci tangan, menjaga jarak, melakukan etika batuk-bersin dan sebagainya, merupakan kebiasaan-kebiasaan yang perlu diinternalisasikan sebagai kebajikan kolektif. Habitus kebersihan (*habitus of hygiene*) merupakan kelaziman bagi petugas kesehatan, terutama di kalangan perawat. Pengetahuan medis mengenai ancaman infeksi menjadi pedoman bagi mereka untuk mempraktikkan habitus kebersihan melalui perilaku mendasar, seperti mencuci tangan, menjaga area tetap steril, serta memakai sarung tangan dan pelindung diri ketika menangani pasien. Pemahaman dan praktik sehari-hari di dunia medis ini kemudian membentuk disposisi dan tindakan yang menubuh bagi para petugas kesehatan sehingga dilakukan seperti sudah mekanis dan spontan (Brown et al., 2008). Tenaga kesehatan menjadikan habitus kebersihan sebagai bagian dari profesionalisme mereka. Lain halnya dengan masyarakat awam yang tidak berhubungan langsung dengan dunia medis, sehingga upaya membentuk kebiasaan mematahui protokol kesehatan perlu dilakukan melalui serangkaian strategi difusi agar menjadi habitus baru.

Penerapan Protokol Kesehatan sebagai Habitus Baru

Penyelenggaraan PTM dengan menerapkan protokol kesehatan merupakan kebiasaan baru, sehingga membutuhkan proses adaptasi. Lingkungan sekolah yang sudah didesain sesuai protokol kesehatan COVID-19, dalam praktiknya masih belum optimal. Hal itu karena kegiatan mencuci tangan secara berkala masih perlu pembiasaan di kalangan warga sekolah, sementara hal-hal kecil masih kerap terjadi, seperti saling tukar barang, tidak menjaga jarak, dan tidak mengenakan masker dengan benar. Upaya membentuk kesadaran dan habitus baru dalam penerapan protokol kesehatan mutlak diperlukan agar pelaksanaan PTM dapat diselenggarakan dengan aman. Sebab jika tidak, potensi penularan tetap terbuka kendati sebagian besar guru dan dan siswa sudah divaksin.

Data yang dihimpun oleh Kemendikbudristek dari 46.500 sekolah yang melaksanakan PTM terbatas hingga 20 September 2021 memperlihatkan, terdapat 2,8% atau sekitar 1.296 sekolah yang melaporkan adanya penularan COVID-19 (Paparan Dirjen PAUD-Dikdasmen, 21 Sept 2021). Kluster penyebaran COVID-19 paling banyak terjadi di jenjang SD, yakni sebanyak 581 sekolah, disusul PAUD sebanyak 252 sekolah, SMP sebanyak 241 sekolah, SMA sebanyak 107 sekolah, SMK 70 sekolah, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 13 sekolah. Sementara itu, jumlah kasus positif pada siswa dan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) paling tinggi terjadi di jenjang SD, SMP, dan PAUD. Sedangkan pada SMA/SMK dan SLB, kasus positif pada siswa dan PTK relatif lebih kecil (Grafik 6).



Grafik 6 Jumlah Penularan COVID-19 Dari 1.296 Sekolah yang Melaksanakan PTM Per 20 September 2021
Sumber: Diolah dari Paparan Dirjen PAUD-Dikdasmen (Data Per 12 September 2021)

Terjadinya kasus penularan COVID-19 pada pelaksanaan PTM mengindikasikan bahwa upaya penerapan protokol kesehatan belum sepenuhnya berhasil. Oleh sebab itu, dibutuhkan adaptasi dalam habitus sehari-hari sehingga protokol kesehatan dapat dijalankan dengan tertib. Penerapan protokol kesehatan sebagai praktik baru dalam mencegah penyebaran COVID-19, meminjam istilah Rogers (1971) dalam *Diffusion of Innovations*, merupakan suatu *inovasi* yang memerlukan upaya *difusi* agar dapat diterima

dan diterapkan. Difusi merupakan proses di mana inovasi dikomunikasikan dari waktu ke waktu di antara para anggota dalam suatu sistem sosial. Proses komunikasi tersebut dilakukan lewat dua jalur, yakni jalur formal melalui media massa, pamflet, poster, dan berbagai media komunikasi formal lainnya. Jalur kedua adalah komunikasi interpersonal, yakni antar-individu dalam lingkup kecil dan terbatas, namun berlangsung secara intens. Jalur pertama bertujuan menyampaikan informasi umum mengenai suatu konsep agar dapat diketahui dan dipahami khalayak, sedangkan jalur kedua berperan membujuk individu untuk mengadopsi ide/konsep baru tersebut (Rogers, 1971).

Proses difusi melalui beberapa tahapan, yaitu *pengetahuan*, *persuasi*, *keputusan*, *implementasi*, dan *konfirmasi*. Diseminasi melalui media massa memungkinkan terbentuknya *pengetahuan* mengenai suatu inovasi. Informasi tersebut tidak cukup mampu memengaruhi individu, sebab pada tahap *persuasi* dan tahap *keputusan*, seorang individu umumnya akan mengevaluasi inovasi tersebut melalui jaringan interpersonal mereka. Keputusan untuk menerima kemudian mengarahkan individu untuk menerapkan inovasi tersebut. Melalui tahap *implementasi* ini, berdasarkan pengalaman individu masing-masing dan berbagai faktor lainnya, suatu inovasi dapat sepenuhnya diterima atau sebaliknya, ditolak. Inilah babak akhir dari proses difusi, yakni tahap *konfirmasi*. Difusi sendiri terjadi dalam suatu sistem sosial, di mana keputusan individu dalam menerima atau menolak inovasi juga dipengaruhi oleh struktur sosial, norma, serta “pemimpin opini” (*opinion leader*) dan agen perubahan (Rogers, 1971).

Usaha untuk membentuk habitus mematuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaan PTM tampaknya masih sebatas dilakukan lewat upaya-upaya “formal”, seperti menyiapkan sarana kebersihan dan kesehatan, kampanye melalui media massa, serta menempelkan informasi di berbagai tempat strategis di tempat-tempat umum termasuk di sekolah. Sebuah riset yang mendalami penyebaran poster mengenai cuci tangan di Kanada menemukan bahwa poster-poster tersebut bermanfaat sebagai bagian dari edukasi masyarakat. Melalui poster, khalayak mendapatkan informasi mengenai pentingnya mencuci tangan, besarnya kemungkinan terinfeksi melalui benda dan aktivitas sehari-hari, serta gambaran virus yang tampak “nyata” lewat visualisasi yang ditampilkan (Hamilton, 2019). Upaya komunikasi seperti ini cukup masif dilakukan sehingga masyarakat secara umum telah mengetahui

urgensi penerapan protokol kesehatan sebagai bagian dari pencegahan COVID-19. Hanya saja, langkah ini belum cukup, karena keputusan untuk menerapkan habitus baru juga memerlukan peran jejaring interpersonal.

Oleh sebab itu, upaya persuasi melalui rekan sejawat maupun pemimpin opini pada masing-masing kelompok sosial, misalnya di antara guru, siswa, maupun orang tua perlu dilakukan secara lebih efektif. Peran rekan sejawat dan pembentuk opini penting agar persuasi dan pengawasan disiplin protokol kesehatan tidak hanya berjalan melalui struktur formal, melainkan juga jejaring informal dan kultural. Struktur formal mengandaikan praktik protokol kesehatan akan berjalan baik bila ada paksaan, sehingga individu melakukannya untuk menghindari hukuman, bukan karena kesadaran yang terbentuk melalui peran orang-orang terdekat yang mengikat secara emosional. Hal ini terbukti dalam sebuah studi yang dilakukan di Jerman, di mana sebagian besar responden lebih taat menggunakan masker jika diatur oleh regulasi yang ketat. Namun bagi anak-anak muda, penggunaan masker ada kalanya dianggap “aneh” dan kurang populer, sehingga untuk mengatasinya perlu panutan dari kalangan mereka sendiri (Rieger, 2020).

Peran kepala sekolah dan guru senior dapat menjadi teladan penerapan protokol kesehatan bagi para guru. Mereka juga dapat menjadi panutan bagi siswa karena secara sosial kepala sekolah dan guru menduduki struktur sosial di atas siswa. Namun, di antara siswa perlu pula dikuatkan kesadaran dan penerapan protokol kesehatan melalui teman sejawat, organisasi siswa intra sekolah (OSIS), usaha kesehatan sekolah (UKS), kegiatan ekstrakurikuler, serta memanfaatkan peran *opinion leader*, yakni siswa yang memiliki pengaruh dalam lingkup pertemanan mereka. Begitu pula pada orang tua, peran paguyuban orang tua dan komite sekolah tidak hanya perlu dimaksimalkan untuk urusan pemenuhan sarana sanitasi dan kebersihan, tetapi terutama untuk mengontrol penerapan disiplin protokol kesehatan di rumah dan ketika pergi/pulang sekolah.

Disiplin penerapan protokol kesehatan di sekolah sebetulnya merupakan cerminan dari perilaku masyarakat yang lebih luas. Apabila disiplin protokol kesehatan di luar sekolah tidak dijalankan dengan baik, maka implementasinya di sekolah juga sulit dilakukan. Oleh sebab itu, selain memerlukan ketegasan pemerintah dalam mengontrol pelaksanaan penerapan protokol kesehatan, juga dibutuhkan dukungan keluarga dan berbagai lapisan masyarakat untuk mewujudkannya sebagai habitus baru.

Daftar Pustaka

- Amri, Avianto; Yusra Tebe; Ayu Siantoro; Mega Indrawati; Cahyo Prihadi. (2021). Teachers voices on school reopening in Indonesia during COVID-19 pandemic. *Social Sciences & Humanities Open* 4 (2021) 100218. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100218>.
- Arsendy, Senza.; C. Jazzlyne Gunawan; Niken Rarasati; dan Daniel Suryadarma. (2020). *Teaching and Learning During School Closure: Lessons from Indonesia*, ISEAS Perspective, Issue: 2020, No. 89
- Arsendy, Senza; George Adam Sukoco; dan Rasita Ekawati Purba. (2020). *Riset dampak COVID-19: potret gap akses online 'Belajar dari Rumah' dari 4 provinsi*. Diakses dari: <https://theconversation.com/riset-dampak-COVID-19-potret-gap-akses-online-belajar-dari-rumah-dari-4-provinsi-136534>
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2019). *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. *Statistik Indonesia 2022*. Jakarta: BPS.
- Bbc.com/Indonesia. (10 Agustus 2020). "Sekolah Anak: Federasi Serikat Guru Indonesia Keberatan Sekolah di Zona Kuning Dibuka, Khawatir Muncul Kluster Penularan Baru". Diakses dari: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53714934>
- Brian Brown, Paul Crawford, Brigitte Nerlich, Nelya Koteyko. (2008). The habitus of hygiene: Discourses of cleanliness and infection control in nursing work. *Social Science & Medicine* 67(2008) 1047–1055.
- Bryant, Jake, Emma Dorn, Stephen Hall, and Frédéric Panier. (2020). *Safely back to school after coronavirus closures*. *McKinsey & Company*.
- CNNIndonesia.com. (27 September 2021). "KPAI Temukan Banyak Pelanggaran Prokes Selama Pelaksanaan PTM". Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210927102919-20-699835/kpai-temukan-banyak-pelanggaran-prokes-selama-pelaksanaan-ptm>
- Detik.com. (01 Agustus 2021). *Pemda Dituding Biarkan Sekolah Langgar Aturan Pembelajaran Tatap Muka*. Diakses dari: <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-5665386/pemda-dituding-biarkan-sekolah-langgar-aturan-pembelajaran-tatap-muka>.
- Hadi, Hamam; Resti K. Triastanti; Devita Anggraeni; Esti Nurwanti; Emma C. Lewis; Uriyoan Colon-Ramos; Yunhee Kang; Miwa Yamaguchi;

- Joel Gittelsohn. (2022). The role of the school food environment in improving the healthiness of school canteens and readiness to reopen post COVID-19 pandemic: A study conducted in Indonesia. *Journal of Public Health Research 2022*; volume 11:2287.
- Hamilton, Sheryl N. (2019). Envisioning a Habitus of Hygiene: Hands as Disease Media in Public Health Handwashing Campaigns. *Canadian Journal of Communication Vol 44* (2019) 263–288.
- INOVASI. (2021). *Pemulihan Pembelajaran: Waktunya untuk Bertindak (Risalah Kebijakan – Agustus 2021)*. Jakarta: Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI).
- Irmawati, Ais, dkk. (2021) *Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Psikologis Siswa Selama Pandemi COVID-19*. Risalah Kebijakan No. 5, Juni 2021. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan.
- Jawapos.com. (4 Agustus 2020). “IDAI Tolak Relaksasi Pembukaan Sekolah”. Diakses dari: <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/04/08/2020/idai-tolak-relaksasi-pembukaan-sekolah/>
- Julizar, Kaiser, dkk. (2021). *Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pembelajaran Tatap Muka pada Masa Pandemi COVID-19*. Risalah Kebijakan Nomor 4, Mei 2021. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan.
- Kemdikbud.go.id. (5 April 2021). *Berbagai Daerah Tunjukkan Praktik Baik Pembelajaran Tatap Muka Terbatas*. Diakses dari: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/04/berbagai-daerah-tunjukkan-praktik-baik-pembelajaran-tatap-muka-terbatas>
- Kemendikbud. 2020a. *Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19* (20 November 2020). Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud. 2020b. *Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19* (7 Agustus 2020). Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud. 2020c. *Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19* (15 Juni 2020). Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud. 2021a. *Paparan Mendikbud mengenai Keputusan Bersama Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19* (30 Maret 2021). Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud. 2021b. *Panduan Pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia*

Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Masa Pandemi COVID-19. (2 Juni 2021).

Kompas.com. (15 Juli 2021). *Awal Mula Varian Delta Masuk ke Jakarta hingga Mendominasi 90 Persen Kasus Covid-19.* Diakses dari: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/15/13220151/awal-mula-varian-delta-masuk-ke-jakarta-hingga-mendominasi-90-persen?page=all>.

Kompas.com. (22 April 2021). *Jelang PTM Terbatas, Kemendikbud Pertimbangkan Evaluasi Isi Daftar Periksa.* Diakses dari: <https://edukasi.kompas.com/read/2021/04/22/145415971/jelang-ptm-terbatas-kemendikbud-pertimbangkan-evaluasi-isi-daftar-periksa?page=all>.

Kompas.com. (29 Des 2020). *Survei KPAI: 78 Persen Siswa Setuju Sekolah Tatap Muka Januari 2021.* Diakses dari: <https://www.kompas.com/edu/read/2020/12/29/075436771/survei-kpai-78-persen-siswa-setuju-sekolah-tatap-muka-januari-2021?page=all>.

Kompas.id. (8 April 2021). *Protokol Kesehatan Rentan dilanggar Saat Siswa Pulang Sekolah.* Diakses dari: <https://www.kompas.id/baca/metro/2021/04/08/pelanggaran-protokol-kesehatan-rentan-terjadi-saat-siswa-pulang-sekolah/>.

Kontan.co.id. (03 Juni 2020). *Ombudsman: Pemerintah perlu hati-hati tetapkan rencana siswa kembali masuk sekolah.* Diakses dari: https://nasional.kontan.co.id/news/ombudsman-pemerintah-perlu-hati-hati-tetapkan-rencana-siswa-kembali-masuk-sekolah/?utm_source=line&utm_medium=text

Kudus, Suhaeni. (2021). *Fenomena Anak Tidak Sekolah di Masa Pandemi.* Bahan paparan dalam webinar yang diselenggarakan Forum Kajian Pembangunan (FKP) & INOVASI, pada 14 September 2021.

Levinson, Meira; Muge Cevik, M.D., dan Marc Lipsitch, D.Phil. (2020). *Reopening Primary Schools during the Pandemic.* *The New England Journal of Medicine.* September 3, 2020.

Mediaindonesia.com. (26 September 2020). *Survei UNICEF: Mayoritas Siswa Ingin Kembali ke Sekolah.* Diakses dari: <https://mediaindonesia.com/humaniora/348093/survei-unicef-mayoritas-siswa-ingin-kembali-ke-sekolah>

Rakhmah, Diyan Nur & Siti Nur Azizah. (2020). *Survei: Beban Pendampingan Belajar Anak Selama Pandemi Lebih Banyak Ke Ibu Ketimbang Ayah.* Diakses dari: <https://theconversation.com/survei-beban->

- pendampingan-belajar-anak-selama-pandemi-lebih-banyak-ke-ibu-ketimbang-ayah-143538
- Republika.co.id. (28 Desember 2020). *KPAI: Perlu Kecermatan dan Kehati-hatian Buka Sekolah*. Diakses dari: <https://republika.co.id/berita/qm1ugc428/kpai-perlu-kecermatan-dan-hatihati-untuk-buka-sekolah>
- Rieger, Marc Oliver. (2020). To Wear or Not to Wear? Factors Influencing Wearing Face Masks in Germany during the COVID-19 Pandemic. *Social Health and Behavior* 2020;3:50-4.
- Rogers, Everett M. (1971). *Diffusion of innovations. Rev. ed. of: Communication of innovations. 2nd ed.* The Free Press. A Division of Macmillan Publishing Co., Inc: New York.
- Semarang.bisnis.com. (5 April 2021). *Hari Pertama PTM, Ini Temuan Ganjar Saat Sidak 2 Sekolah di Semarang*. Diakses dari: <https://semarang.bisnis.com/read/20210405/535/1376603/hari-pertama-ptm-ini-temuan-ganjar-saat-sidak-2-sekolah-di-semarang>
- SMERU. (2020). *Belajar dari Rumah: Potret Ketimpangan Pembelajaran pada Masa Pandemi COVID-19*. SMERU Research Institute.
- TheEconomist. (18 Juli 2020). *The Risk of Keeping Schools Closed Far Outweigh the Benefits*. Diakses dari: <https://www.economist.com/leaders/2020/07/18/the-risks-of-keeping-schools-closed-far-outweigh-the-benefits>
- UNICEF, WHO, dan IFR. (Maret 2020). *Guidance for COVID-19 Prevention and Control in Schools*. UNICEF, WHO, dan IFR.
- WHO. (Mei 2020). *Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19: Annex to Considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-19*. WHO.
- World Bank. (2020). *Report, Estimates of COVID-19 Impacts on Learning and Earning in Indonesia: How to Turn the Tide*. World Bank.
- Zamjani, Irsyad dkk. (2020a). *Adaptasi Ekosistem Sekolah Selama Belajar dari Rumah*. *Risalah Kebijakan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan.
- Zamjani, Irsyad dkk. (2020b). *Risalah Kebijakan: Mengatasi Risiko Belajar Dari Rumah*. *Risalah Kebijakan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan.
- Zamjani, Irsyad dkk. (2021). *Pembelajaran Digital untuk Pendidikan Berkualitas yang Inklusif*. Laporan Akhir Prioritas Riset Nasional, Tidak Diterbitkan.



Menonton adalah Belajar
Catatan Transformasi
Tayangan Program Belajar dari Rumah

Menonton adalah Belajar Catatan Transformasi Tayangan Program Belajar dari Rumah

~•~

Diyan Nur Rakhmah, Siti Nur Azizah, Erni Hariyanti, Ais Irmawati

The future of learning is digital. The ability to learn autonomously will indeed be critical in the digital future. However, strong mentorship is required for students to achieve this autonomy, while an overemphasis on student independence can leave students floundering.

(Mark Warschauer. 2007. *The Paradoxical Future of Digital Learning*)

Pandemi, Disrupsi, dan Adaptasi

Pandemi COVID-19 telah menciptakan disrupsi terbesar dalam sejarah sistem pendidikan dunia (United Nations, 2020). Sejak 11 Maret 2020 hingga 2 Februari 2021, sebanyak 214 juta siswa dari jenjang prasekolah hingga pendidikan menengah di lebih dari 200 negara mengalami ketertinggalan setidaknya tiga perempat waktu pembelajaran mereka di kelas karena penutupan sekolah (UNICEF, 2021a). Kondisi ini memperburuk krisis pembelajaran global yang telah terjadi sebelum adanya pandemi. Studi memperkirakan, penutupan sekolah secara global mengakibatkan hilangnya setidaknya 10 triliun dolar Amerika dari pendapatan generasi yang terdampak saat ini (World Bank, 2020a), terjadinya tren peningkatan pernikahan dini dan kekerasan seksual di beberapa negara, termasuk meningkatkan jumlah pekerja anak (Asanov et al., 2020; Reuters, 2020a).

Tetapi, proses pendidikan tidak sepenuhnya terhenti karena pandemi. Di tingkat global, berbagai perubahan proses pembelajaran terjadi. Data laporan beberapa lembaga dunia menunjukkan lebih dari 90% kementerian pendidikan di seluruh dunia telah menerapkan berbagai bentuk pendekatan pembelajaran

jarak jauh dengan melibatkan banyak media, seperti radio, televisi atau internet (UNESCO, 2020; UNICEF, 2020a; World Bank, 2020b).

Di Indonesia, pandemi mengakibatkan 59% guru mengajar secara daring (Zamjani dkk., 2020), bahkan hingga Desember 2020, lebih dari 63% guru masih mengajar dengan memanfaatkan teknologi (Puslitjak, 2020b). Masalahnya, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh masih menghadapi beragam tantangan, seperti ketersediaan akses dan kepemilikan perangkat teknologi. Setidaknya 31% siswa di seluruh dunia tidak dapat menjangkau program pembelajaran daring, terutama karena tidak adanya dukungan ekonomi keluarga untuk memenuhi akses terhadap internet (UNICEF, 2020a). Kondisi di Indonesia juga serupa.

Akses pada jaringan internet, perangkat belajar, dan keterampilan penggunaan teknologi menjadi hambatan utama pembelajaran selama pandemi (Zamjani, Rakhmah, dkk., 2020). Pembelajaran daring memiliki ketergantungan pada akses dan lingkungan belajar, sehingga hanya akan memudahkan kelompok siswa dan guru yang memiliki akses dan lingkungan belajar yang mendukung (David et al., Jalli, 2020; Orłowski, 2020). Semakin lama, kesenjangan digital justru akan memperburuk ketidakesetaraan pembelajaran antara siswa yang kurang terhubung pada akses digital dengan siswa yang *hiper-digital* (Henshaw, 2022). Akses berupa listrik dan jaringan internet telah menjadi pekerjaan rumah yang belum usai di Indonesia. Meskipun data menunjukkan 99,38% wilayah perdesaan telah teraliri listrik (ESDM, 2019), di beberapa wilayah Indonesia bagian timur masih ditemukan kondisi listrik yang belum stabil dan bahkan baru menyala ketika malam hari (Rakhmah dkk., 2021a; Suryanto, 2017; Zamjani dkk., 2020). Kondisi jaringan internet juga sama bermasalahnya. Data menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia telah terakses jaringan internet, namun jangkauan seluler layanan jaringan 3G dan 4G sampai saat ini baru mencakup 76% wilayah saja (Kemenkominfo, 2019).

Keragaman kondisi tersebut menyebabkan penggunaan satu moda pembelajaran menjadi tidak efektif dan bahkan dapat memperlebar kesenjangan belajar yang sudah ada. Oleh karena itu, setiap negara perlu beradaptasi terhadap tantangan pendidikan yang dimiliki. Sejauh ini, internet dan siaran televisi dan radio menjadi moda pembelajaran yang digunakan di sebagian besar belahan dunia. Temuan di beberapa negara menunjukkan, untuk setiap tingkat pendidikan telah dikembangkan kebijakan mengenai pembelajaran jarak jauh secara digital (berbasis internet) maupun melalui

siaran (berbasis TV atau radio), yaitu 42% negara menerapkannya pada pendidikan prasekolah, 74% negara menerapkan untuk pendidikan dasar, dan 77% negara menerapkan pada pendidikan menengah atas (UNICEF, 2020a). Secara global, potensi jangkauan pembelajaran berbasis internet lebih rendah dibandingkan dengan televisi dan radio (UNICEF, 2020a). Di Amerika Latin dan Karibia, Eropa Timur, serta Asia Tengah, pembelajaran jarak jauh berbasis internet hanya menjangkau sekitar 50% siswa. Sedangkan, hampir di seluruh wilayah Afrika, pembelajaran berbasis radio lebih potensial menjangkau lebih banyak siswa dibandingkan belajar melalui internet maupun televisi.

Jauh sebelum teknologi internet menggurita, dunia sudah lebih dulu mengenal televisi sebagai media komunikasi dan informasi. Oleh karenanya, ketika jangkauan internet masih terbatas dan tidak memungkinkan di beberapa daerah, televisi menjadi pilihan. Praktik di banyak negara menunjukkan bagaimana televisi dioptimalkan untuk membantu mengatasi kesenjangan belajar karena terdampak pandemi, selain internet. Televisi menawarkan materi belajar yang relatif lengkap berupa audio dan visual secara bersamaan. Di negara-negara Sub-Sahara, televisi dimanfaatkan untuk menyediakan konten belajar siswa sekolah dasar melalui tayangan kartun berbahasa ibu (Reuters, 2020b). Di negara yang tingkat ekonominya lebih baik, pemanfaatan televisi sebagai media belajar juga menjadi pilihan kebijakan dengan penyediaan saluran khusus pembelajaran (BBC, 2020; Kim, 2020). Di beberapa distrik California Bagian Selatan, sebuah layanan penyiaran publik menawarkan tayangan pendidikan berbasis lokal yang didasarkan pada segmen usia, melalui saluran terpisah dengan program tayangan umum lain (Kim, 2020).

Di Indonesia, kebijakan pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 mengadvokasi pembelajaran yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi guru dan siswa, salah satunya dalam penggunaan media dan sumber belajar. Pada April 2020, pemerintah meluncurkan tayangan Program Belajar dari Rumah (BDR). Tayangan ini berisi konten literasi, numerasi, dan pendidikan karakter untuk jenjang PAUD hingga pendidikan menengah, tayangan bimbingan untuk orang tua dan guru, serta program kebudayaan di setiap akhir pekan (Kemendikbud, 2020).

Bertahan dalam situasi pandemi bukan hal mudah dan butuh banyak kemampuan adaptasi yang tinggi dan berkelanjutan (Washington Post, 2020). Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan, tayangan Program BDR juga

mengalami beberapa transformasi dalam hal konten pembelajaran serta media penayangan, yang disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pembelajaran.

Untuk memahami berbagai transformasi tersebut, Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) melakukan dua kali studi terkait tayangan Program BDR Kemendikbud. Studi pertama dilakukan pada Februari 2021, dan studi kedua pada Juni 2021. Kedua studi dilakukan melalui survei dan diskusi kelompok terpumpun. Survei pada studi pertama dilakukan dengan melibatkan guru dan orang tua siswa, sedangkan survei di tahap kedua, dilakukan secara acak melalui *blasting* WhatsApp tanpa melakukan penarikan sampel yang terstruktur seperti halnya pada studi pertama. Diskusi kelompok terpumpun juga kami lakukan dengan melibatkan sasaran program tayangan BDR (guru dan orang tua), pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah, ahli di bidang teknologi pembelajaran, *social media specialist*, dan psikolog pendidikan. Kami menyadari, bahwa survei dan diskusi belum cukup mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana transformasi tayangan Program BDR tersebut terjadi sebagai upaya perluasan sumber belajar selama pandemi. Oleh karena itu, pada studi kedua, dilakukan juga observasi terhadap tayangan dan media promosi program. Elaborasi hasil literatur dan studi lain yang pernah kami lakukan juga digunakan untuk mempertajam analisis dalam artikel ini.

Tayangan Program Belajar dari Rumah: Inisiatif untuk Afirmasi

Untuk pertama kalinya, tayangan Program BDR Kemendikbud diluncurkan pada 13 April 2020. Program ini ditayangkan setiap hari, dan bertujuan memberikan pilihan sumber belajar khususnya bagi guru dan siswa yang berada di wilayah yang sulit akses internet. Kebijakan ini berangkat dari keyakinan bahwa proses belajar jarak jauh melalui media daring belum efektif, sehingga penyediaan pilihan berbagai sumber belajar yang dapat dipilih guru dan siswa, menjadi penting dilakukan.

Tidak sekadar menasar pada penonton dari kalangan siswa melalui konten literasi, numerasi, dan pendidikan karakter, tayangan Program BDR juga ditujukan bagi guru dan orang tua melalui konten bimbingan orang tua dan guru, serta program kebudayaan yang khusus ditayangkan pada akhir pekan. Hingga Desember 2020, Program BDR Kemendikbud menasar pada guru dan siswa di semua jenjang (PAUD hingga menengah), dengan waktu penayangan di hari Senin hingga Minggu. Tayangan Program BDR berdurasi

total 3 jam, dengan pembagian materi berdasarkan jenjang kelas. Setengah jam pembelajaran digunakan untuk materi belajar siswa PAUD, setengah jam untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD, setengah jam untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD, dan setengah jam berikutnya masing-masing untuk SMP, SMA, dan parenting (Kemendikbud, 2020). Inisiatif pemerintah melalui tayangan program pembelajaran ini juga tidak sekadar pada materi pelajaran yang sifatnya umum, namun juga pada isu-isu kebudayaan. Pada Sabtu dan Minggu, ada durasi khusus untuk program kebudayaan, antara lain gelar wicara, siniar (podcast), kesenian, dan tayangan tentang perkembangan budaya dari seluruh Indonesia. Kemudian di malam hari, juga ada pemutaran film Indonesia dengan pilihan berbagai genre, seperti film anak, drama, dan dokumenter.

Agar tayangan menjadi lebih fokus dan efektif, materi pelajaran dalam tayangan Program BDR mengalami perubahan sejak Januari 2021, dengan hanya fokus pada materi belajar pada jenjang PAUD dan SD. Perubahan ini juga berdampak pada penyesuaian jam tayang program. Sejak perubahan tersebut hingga 30 Juni 2021, penayangan program hanya dilakukan sejak Senin hingga Jumat pada pukul 08.00 hingga 11.30 WIB. Waktu penayangan dibagi setiap 30 menit untuk masing-masing jenjang pendidikan dan kelas, yang dimulai dengan tayangan program PAUD, dan diakhiri dengan tayangan program kelas 6 SD.

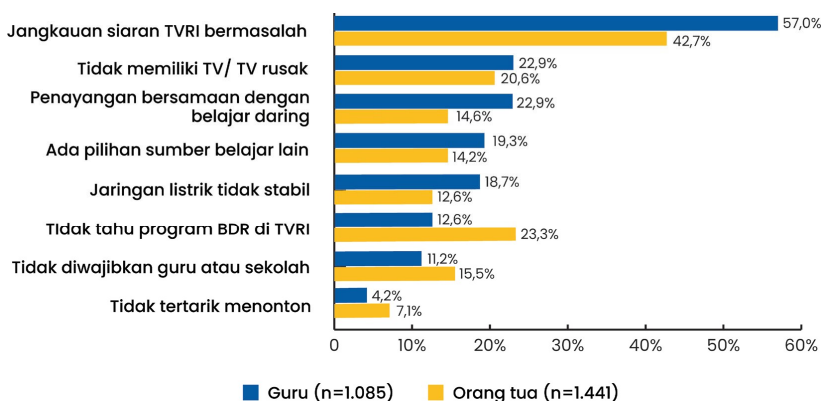
Kebijakan tayangan Program BDR merupakan upaya afirmasi pemerintah untuk memperluas kesempatan belajar siswa di masa pandemi, khususnya bagi siswa yang mengalami kesulitan dari segi akses, lokasi tempat tinggal, maupun latar belakang ekonomi. Belajar pada pengalaman Undang-Undang Hak Sipil Amerika tahun 1964 sebagai acuan pertama kali istilah kebijakan afirmasi digunakan secara umum, penyesuaian kebijakan perlu dilakukan untuk memberikan kesempatan lebih luas pada golongan masyarakat yang termarginalkan, salah satunya karena usia, gender, dan lokasi di mana mereka tinggal (Britannica, 2021). Salah satu bentuk afirmasi kebijakan yang dilakukan adalah dengan melakukan *refocusing* materi tayangan belajar pada kelompok siswa dengan karakteristik yang lebih spesifik. Siswa dengan usia rendah merupakan golongan yang paling terdampak dari adanya pandemi (OECD, 2020), karena kesulitan mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan dan sistem pembelajaran baru yang sangat berbeda dengan yang selama ini siswa jalani. Sebagai contoh, praktik tayangan program pembelajaran di beberapa negara seperti Peru, Australia, dan Irlandia juga hanya fokus pada

materi belajar bagi siswa di jenjang sekolah dasar dan menengah pertama agar tayangan dapat mengakomodasi siswa yang lebih rentan terdampak penutupan sekolah (Queensland Departement of Education, 2020; RTE, 2020; UNICEF, 2021b). Berdasarkan hal tersebut, memfokuskan program BDR pada tayangan belajar siswa di jenjang PAUD dan SD merupakan upaya yang tepat, mengingat di jenjang pendidikan lebih tinggi, siswa relatif sudah mampu secara mandiri mencari materi belajar dari sumber yang lebih beragam.

Akses dan Jangkauan Siaran: Pekerjaan Rumah yang Tak Kunjung Usai

TVRI dipilih sebagai media penayangan program BDR selama 1 tahun, yaitu sejak April 2020 hingga 31 Maret 2021. Hal ini dilakukan sebagai upaya menutup celah pembelajaran yang tidak memungkinkan dilakukan melalui jaringan internet. Harapannya, siswa dan guru yang kesulitan internet masih dapat mengakses tayangan televisi khususnya TVRI mengingat di beberapa daerah, infrastruktur televisi telah lebih dulu mapan dibandingkan teknologi internet.

Namun, pemanfaatan televisi melalui Program Belajar dari Rumah di TVRI belum sepenuhnya optimal, salah satunya dilihat dari persentase penonton tayangan program. Survei Puslitjak pada Februari 2021 menemukan bahwa masih ada 38,6% guru dan 42,5% siswa (melalui jawaban dari orang tua) yang tidak menonton Program BDR di TVRI selama satu bulan terakhir (Rakhmah dkk., 2021a). Alasan utama guru dan orang tua tidak menonton adalah karena akses, yaitu tidak adanya siaran TVRI atau siaran TVRI bermasalah, listrik yang tidak stabil, dan tayangannya bersamaan dengan proses belajar daring (Grafik 1).



Grafik 1 Alasan Tidak Menonton Program BDR TVRI (Rakhmah dkk., 2021a)

Masalah listrik masih menjadi momok di beberapa wilayah di Indonesia. Sebenarnya, data menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah di Indonesia telah teraliri listrik (ESDM, 2019). Namun, beberapa daerah khususnya di wilayah terpencil belum mendapatkan aliran listrik yang memadai atau baru menyala pada malam hari. Informan dari Kabupaten Nduga, Papua, misalnya menyatakan bahwa listrik di daerahnya baru menyala pada pukul 18.00 – 24.00 WIT (Rakhmah dkk., 2021a). Jika pun menyala, aliran tidak stabil karena harus digunakan bergantian dengan berbagai keperluan lain yang memerlukan aliran listrik.

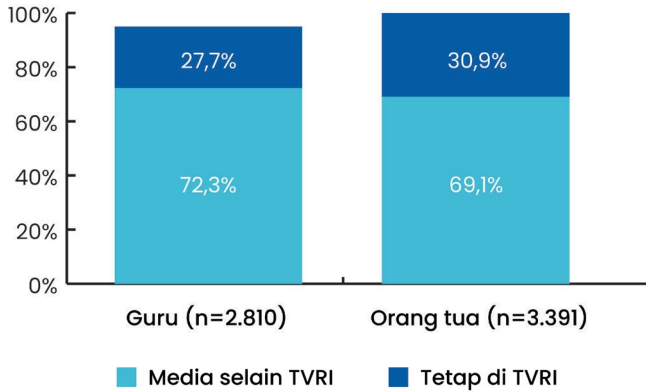
Hal serupa juga terjadi pada saluran TVRI yang ternyata belum menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia (Pramuji, 2019) meskipun sudah diklaim sebagai satu-satunya televisi yang jangkauannya mencapai seluruh wilayah NKRI (TVRI, tt). Hasil diskusi kami dengan perwakilan dinas pendidikan menemukan bahwa beberapa daerah masih sulit menerima siaran TVRI, bahkan tidak hanya daerah pedalaman, tetapi juga perkotaan termasuk ibu kota provinsi seperti di Kota Mataram dan Kota Palembang. Beberapa informan dinas pendidikan yang kami ajak diskusi menyatakan bahwa di rumah mereka siaran TVRI sangat sulit ditangkap. Temuan menarik juga terjadi di beberapa daerah yang berbatasan dengan negara lain. Di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas, misalnya, tayangan televisi dari negara lain justru ditangkap lebih baik dibandingkan siaran TVRI. Temuan ini diperkuat dengan data dari Statistik Potensi Desa 2018 yang menunjukkan setidaknya masih ada 5,1% desa/kelurahan di Indonesia yang sama sekali tidak terjangkau saluran televisi apa pun. Kondisi ini khususnya terjadi di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Siaran TVRI Nasional baru dijangkau oleh 78.627 desa/kelurahan atau 93,7% dari jumlah desa/kelurahan secara keseluruhan (BPS, 2018).

Kondisi ini menjadi dilematis. Di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses internet, siaran pembelajaran melalui TVRI ternyata belum mampu menjembatani kesenjangan dan kehilangan pembelajaran siswa karena penutupan sekolah. Padahal dari hasil survei, sebagian besar guru dan orang tua yang menonton tayangan Program BDR di TVRI menyatakan bahwa program ini dibutuhkan untuk melengkapi pilihan sumber belajar siswa selama belajar di rumah.

Dari Tayangan TVRI ke TV Edukasi dan Media Sosial

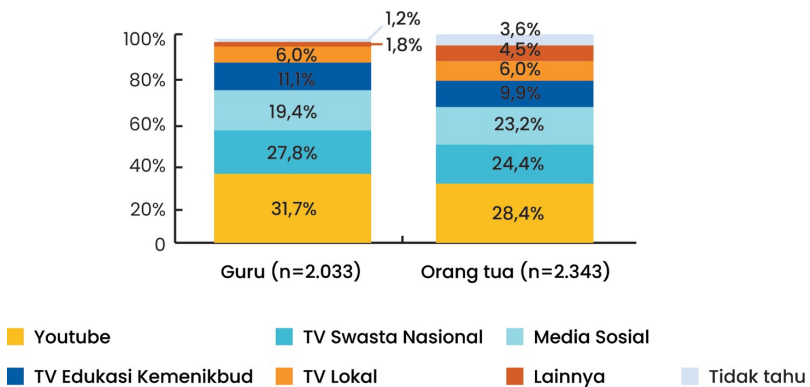
Selain akses dan jangkauan siaran, studi kami menemukan adanya pergeseran perilaku belajar siswa dari sebelumnya hanya mengandalkan bahan-bahan buku pelajaran, menjadi tayangan belajar yang lebih dinamis dan dapat leluasa diakses melalui jaringan internet. Informan dinas pendidikan yang kami ajak diskusi menyatakan bahwa banyak guru yang mulai terbiasa melakukan pembelajaran secara jarak jauh dengan mengirimkan video pembelajaran melalui WhatsApp yang terhubung langsung ke gawai siswa ataupun orang tua. Praktik ini tidak hanya terjadi di Pulau Jawa seperti di Kota Depok dan Kota Magelang yang menjadi informan diskusi, tetapi juga di luar Pulau Jawa seperti Kabupaten Lembata dan Kabupaten Halmahera Selatan. Pergeseran pola belajar dan perilaku mengakses informasi melalui internet ini merupakan salah satu imbas dari kenaikan kepemilikan *handphone* yang 99,7%-nya terhubung langsung pada jaringan internet (Kemenkominfo & Katadata, 2020). Studi kami menemukan bahwa media sosial semacam WhatsApp menjadi salah satu wadah belajar yang umum digunakan oleh 85% guru selama pembelajaran di masa pandemi (Zamjani dkk., 2020). Diskusi juga menemukan inisiatif beberapa pemerintah daerah yang menyediakan kebijakan khusus untuk mendukung pembelajaran guru melalui media daring. Beberapa misalnya kebijakan penyediaan ruang produksi video pembelajaran di Provinsi Bali, dan kompetisi pembuatan video pembelajaran di Kota Kupang dan Kota Mataram.

Salah satu alasan bahwa jangkauan siaran TVRI yang tidak dapat diakses secara merata, menjadi pemantik perlunya mencari alternatif media lain sebagai media penayangan Program BDR. Survei kami pada Februari 2021 menemukan, sebagian besar guru (72,3%) maupun orang tua (69,1%) menyarankan Program BDR Kemendikbud dapat ditayangkan di media selain TVRI agar lebih efektif, fleksibel, dan dapat dijangkau lebih banyak siswa (Grafik 2). Guru, orang tua dan juga pemangku kebijakan di daerah meyakini bahwa memindahkan program ke media tayang yang lebih fleksibel dan relatif menjangkau banyak kalangan, akan berpotensi meningkatkan aksesibilitas terhadap tayangan pembelajaran itu sendiri.



Grafik 2 Pilihan Alternatif Media Penayangan Program BDR Kemendikbud

Media sosial merupakan alternatif yang paling banyak disarankan, di mana YouTube merupakan media alternatif penayangan yang paling banyak dipilih guru (31,7%) maupun orang tua (28,4%) (Grafik 3). Selain karena guru dan orang tua juga sudah terbiasa menggunakan YouTube untuk mencari informasi, berita, dan sumber belajar alternatif, fleksibilitas untuk menonton tayangan YouTube juga menjadi pertimbangan guru dan orang tua. Ketika Program BDR ditayangkan di YouTube, siswa dan orang tua dapat menonton tayangan secara berulang dan kapan pun sesuai dengan waktu dan kebutuhan pembelajaran. Kelebihan ini yang belum dimiliki oleh televisi, meskipun sudah menyediakan layanan *TV streaming*.



Grafik 3 Alternatif Media Penayangan Program BDR Kemendikbud Selain TVRI

Memperhatikan efektivitas tayangan tersebut, pemerintah kemudian melakukan penyesuaian kebijakan dengan mengubah media tayang Program BDR Kemendikbud di TVRI, ke TV Edukasi dan YouTube Channel TV Edukasi sejak 1 April 2021. Perubahan ini diikuti dengan perluasan tujuan penyediaan tayangan, yang tidak sekadar digunakan sebagai bahan pembelajaran selama BDR, tetapi juga referensi dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Penyesuaian media tayang dengan melibatkan YouTube yang lebih dikenal oleh sebagian besar guru dan siswa menjadi upaya memperluas jangkauan tayangan. Pada daerah-daerah yang sulit akses, kendala internet memang masih terjadi, sehingga akses video melalui kanal YouTube pun sedikit banyak akan terdampak. Namun, penyediaan tayangan pembelajaran yang memungkinkan untuk diunduh, disebarluaskan melalui WhatsApp yang cenderung membutuhkan jaringan ringan, dan ditonton secara luring kapan pun, menjadikan penayangan Program BDR Kemendikbud di YouTube dirasa lebih efektif dibandingkan ketika ditayangkan di TVRI.

Dari sisi materi tayangan, Program BDR yang ditayangkan di TVRI dan TV Edukasi dan YouTube Channel TV Edukasi tidak mengalami banyak perubahan. Satu seri tayangan dikemas dalam bentuk penyampaian materi belajar selayaknya yang disampaikan guru di dalam kelas. Tayangan diawali dengan bagian pembuka, inti pembelajaran, dan kemudian penutup. Upaya pembiasaan mengenai protokol kesehatan di masa pandemi, selalu menjadi bagian dalam penutup tayangan. Khusus program PAUD, tayangan berisi penggabungan beberapa video berdurasi 5 – 6 menit yang berasal dari beragam sumber seperti kanal KPK, Serial Anak Diva, dan lagu anak. Sayangnya, penggabungan ini agaknya tidak melalui proses pengeditan yang memadai, sehingga kualitas gambar pada setiap segmen menjadi berbeda-beda, karena video dibuat dengan teknik produksi dan standar visual yang juga berbeda.

Selain itu, perbedaan juga sedikit terjadi pada proses produksi konten. Pada awal penayangannya di TVRI, materi tayangan merupakan konten yang diproduksi oleh beberapa unit utama di Kemendikbud (seperti Pusat Data dan Teknologi Informasi, Pusat Penguatan Karakter, dan Direktorat Jenderal Kebudayaan) dan juga materi tayangan dari sumber eksternal seperti “Jalan Sesama” untuk materi PAUD. Ketika transformasi media tayangan terjadi, produksi tayangan program mengalami beberapa perubahan. Beberapa materi tayangan diproduksi oleh penulis dan pengkaji materi yang berasal dari berbagai

unsur di bawah koordinasi Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), meskipun beberapa tayangan masih merupakan penayangan ulang (*relay*) dari program pembelajaran yang sebelumnya telah ditayangkan di TVRI. Hal ini tidak mengubah karakter dan durasi tayangan. Dalam penayangan program di TVRI, durasi penayangan adalah 30 menit, sedangkan di YouTube, durasi tayangan adalah 24 – 30 menit yang terbagi dalam 3 segmen pada setiap tayangan.

Dalam pengemasannya, penayangan Program BDR di YouTube terlihat lebih terkelola dengan baik. Tayangan belajar dikelompokkan sesuai jenjang kelas dan terbagi ke dalam beberapa episode. Penayangan melalui YouTube memungkinkan adanya daftar pengelompokan materi melalui *playlist* yang akan memudahkan penonton mencari video yang dibutuhkan. Hal ini tentu tidak terjadi ketika program ditayangkan di TVRI.

Tanggapan Pengguna dan Ahli

Studi kami menemukan bahwa sejak Program BDR ditayangkan di TVRI, guru dan orang tua menganggap tayangan tersebut bermanfaat dalam pembelajaran. Selain dianggap membantu memahami materi pelajaran yang diberikan guru, tayangan BDR juga menjadi alternatif sumber belajar bagi siswa. Pada guru, manfaat yang dirasakan lebih spesifik, karena program ini dianggap menambah referensi ketika mengajar. Diskusi kami dengan beberapa guru di DKI Jakarta, Kota Bogor, dan Kota Bekasi menemukan adanya guru yang menggunakan tayangan Program BDR sebagai referensi mereka menyiapkan materi pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Beberapa video pembelajaran yang ditayangkan guru ketika belajar merupakan video dari tayangan Program BDR yang telah mereka unduh. Pemanfaatan video ini menjadi penegas tentang pentingnya menayangkan program pada media yang lebih fleksibel dan memungkinkan ditonton tanpa harus selalu terhubung dengan internet atau melalui siaran televisi.

Manfaat yang dirasakan penonton dapat menegaskan bahwa materi yang disampaikan dalam tayangan Program BDR cukup sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Studi kami pada tayangan Program BDR yang dilakukan pada Juni 2021 menunjukkan, sebagian besar informan guru dan orang tua menganggap materi pembelajaran dalam tayangan sudah sesuai kebutuhan perkembangan siswa di jenjang kelasnya. Hal ini juga dibuktikan melalui observasi yang dilakukan pada beberapa tayangan program di jenjang PAUD

dan SD. Hasil observasi pada tayangan PAUD misalnya, menemukan bahwa materi tayangan cukup sesuai dengan kebutuhan siswa prasekolah. Tayangan berisi cerita anak tentang nilai-nilai karakter, dilanjutkan dengan aktivitas bernyanyi, mengenal angka, berhitung, dan pengenalan bahasa Inggris.

Tayangan pembelajaran di jenjang SD juga sudah dikemas secara tematik. Dalam satu tayangan disajikan secara multidisiplin ilmu seperti materi pembelajaran Bahasa Indonesia, Sejarah, Geografi, Matematika, dan Seni Budaya dan Keterampilan. Melalui tayangan tematik tersebut, siswa diperkenalkan pada cara berpikir integratif tanpa terkotak-kotak pada mata pelajaran tertentu saja. Dengan kemampuan berpikir integratif, siswa diharapkan dapat menghubungkan keterkaitan antarinformasi yang diterima untuk dimanfaatkan dalam menghadapi berbagai permasalahan. Selain itu, pembelajaran tematik juga memperluas perspektif siswa terhadap sesuatu, seperti yang umum dilakukan dalam pembelajaran sekolah-sekolah di Finlandia (Haapaniemi et al., 2020; Mansilla, 2008).

Terlepas dari kritik terhadap materi, keberadaan tayangan Program BDR direspons baik oleh guru dan orang tua. Beberapa dinas pendidikan yang kami libatkan diskusi menganggap tayangan Program BDR dapat memperkaya sumber belajar siswa selama pandemi yang sering kali terbatas ketersediaannya di daerah-daerah tertentu. Di Kota Gorontalo, misalnya, keberadaan tayangan Program BDR disambut antusias khususnya pada siswa jenjang PAUD.

Peralihan media tayang ke TV Edukasi dan YouTube berpotensi memperluas jangkauan dan memudahkan pencarian terhadap sumber belajar. Dalam perspektif ahli teknologi pembelajaran, memperluas media penayangan program melalui YouTube dinilai sudah tepat. Jika dielaborasi dengan tinjauan pakar psikologi, YouTube dan media sosial dianggap memenuhi kebutuhan psikologi dasar siswa, yaitu *connected*, *competent*, dan *control*. Setidaknya ada lima keunggulan YouTube menurut narasumber psikolog pendidikan anak yang kami ajak diskusi. *Pertama*, YouTube dapat menjadi media pemenuhan kebutuhan siswa agar terkoneksi dengan banyak hal, seperti informasi, teman, termasuk lingkungan permainan. *Kedua*, melalui YouTube, siswa mudah mengeksplorasi berbagai topik yang diminati dengan beragam metode. *Ketiga*, menonton video melalui YouTube bagi sebagian besar anak menyenangkan, dan tidak seberat metode belajar yang selama ini dilakukan seperti membaca. *Keempat*, fleksibilitas yang ditawarkan YouTube juga

memenuhi kebutuhan siswa untuk memiliki kontrol secara mandiri, karena tayangan yang ada di YouTube dapat diakses kapan pun siswa membutuhkan. *Kelima*, YouTube juga memenuhi kebutuhan psikologis siswa seperti hiburan dan teman bermain yang dibatasi selama pandemi.

Ahli teknologi pembelajaran yang kami ajak diskusi menyatakan bahwa penayangan program belajar melalui YouTube memungkinkan siswa melakukan aktivitas belajar dengan lebih menyenangkan dibandingkan hanya belajar melalui teks dan pertemuan virtual. Hal ini dikarenakan aktivitas belajar melalui YouTube mengombinasikan audio, visual, dan gerakan secara bersamaan dalam satu tayangan. Sejauh ini, penggunaan multimedia dalam pembelajaran dianggap mampu menjembatani kesenjangan belajar yang tidak dapat dilakukan melalui interaksi langsung antara guru dan siswa di kelas, meskipun hal itu tidak selalu mampu menawarkan aktivitas yang sifatnya interaktif (Dale, 1969; UNICEF, 2020a).

Beberapa Catatan Kritis

1. Masalah Seputar Materi, Kemasan, dan Durasi

Menyediakan sumber belajar melalui materi tayangan tidak lantas menjadikan pembelajaran selama pandemi selalu optimal. Hasil diskusi kami dengan ahli teknologi pembelajaran menyimpulkan setidaknya ada empat hal yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan tayangan program pembelajaran. *Pertama*, pesan dalam tayangan tidak sampai pada sasaran, karena penonton tidak memahami secara utuh materi yang ditayangkan. *Kedua*, tayangan monoton, durasi tayangan tidak sesuai, dan penyampaian tayangan tidak komunikatif. *Ketiga*, adanya kelemahan teknis (pengambilan gambar, kualitas suara, ukuran kamera yang digunakan, dll.). *Keempat*, tayangan tidak berdampak pada perubahan perilaku yang diharapkan.

Sebagai sebuah tayangan pembelajaran, ketersampaian pesan dalam materi tayangan kepada penonton menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pengemasan dan penyampaian materi pembelajaran perlu menjadi fokus pengembangan tayangan. Studi kami di bulan Juni 2021 terhadap tayangan Program BDR di YouTube Channel TV Edukasi menemukan, dari sudut pandang guru, tayangan program BDR sudah cukup baik disampaikan dan dikemas selayaknya aktivitas belajar di dalam kelas. Namun, pandangan berbeda muncul dari perspektif informan orang tua.

Bagi orang tua, penyampaian materi tayangan dalam bentuk aktivitas belajar seperti di dalam kelas, kurang efektif. Orang tua menganggap durasi tayangan cukup panjang karena terlalu banyak panduan dan dialog yang disampaikan oleh pemeran dalam tayangan, yang sebenarnya dapat dikurangi agar pembahasan langsung fokus pada materi yang ingin disampaikan. Durasi tayangan yang relatif panjang meningkatkan potensi penonton mempercepat tayangan yang mereka tonton, sehingga tayangan ditonton dengan tidak utuh. Hampir seluruh orang tua yang meminta anak mereka menonton tayangan program BDR menyatakan bahwa anak tidak betah berlama-lama menonton, karena cepat bosan. Temuan ini selaras dengan hasil riset yang menemukan bahwa waktu yang dibutuhkan siswa untuk dapat bertahan dan fokus pada materi pembelajaran adalah sekitar 10 – 15 menit saja (Bradbury, 2016). Hasil survei bulan Juni 2021 juga menemukan bahwa menurut penonton, idealnya video pembelajaran yang ditayangkan di YouTube berdurasi 5 sampai 10 menit saja (Rakhmah dkk., 2021b).

Mempersingkat durasi tayangan dapat dilakukan dengan memadatkan materi dengan berfokus pada materi-materi tertentu yang esensial. Dua tayangan pembelajaran mengenai daur air yang ditayangkan di dua media berbeda, dapat menjadi perbandingan. Dalam tayangan Program BDR, terdapat materi tentang “Menjaga Siklus Air” (kelas 2, episode 39) (TV Edukasi, 2020) yang secara konten sama dengan materi belajar “*Let’s Learn about the Water Cycle*” yang ditayangkan RTE Home School Hub Irlandia (RTE, 2021). Dalam tayangan “Menjaga Siklus Air”, durasi tayangan adalah 24 menit, sedangkan tayangan dengan materi serupa di RTE Home School Hub, berdurasi 1 menit 30 detik dengan hanya berfokus pada inti materi pelajaran. Sama halnya seperti “Menjaga Siklus Air”, tayangan “*Let’s Learn about the Water Cycle*” juga ditayangkan di stasiun TV dan YouTube. Upaya peringkasan seperti ini agaknya perlu dilakukan dengan memecah dan membagi tayangan program BDR menjadi beberapa video singkat, dengan tetap berfokus pada materi pelajaran yang ingin disampaikan.

Upaya pemilahan materi sebenarnya sudah dilakukan melalui pembagian segmen dalam satu tayangan. Setiap tayangan BDR berdurasi 24 – 30 menit, terdiri dari 2 sampai 3 segmen. Sayangnya, jeda antarsegmen tidak dioptimalkan secara menarik sehingga masih dirasa terlalu panjang. Dalam pandangan ahli teknologi pembelajaran, mendesain sesi peralihan segmen menjadi tantangan

tersendiri dalam produksi sebuah tayangan. Mengingat, sesi peralihan segmen ini perlu menjaga alur cerita tayangan agar tetap runtut dan mengalir. Selain itu, psikolog pendidikan yang kami ajak diskusi juga mengatakan bahwa mengoptimalkan jeda antarsegmen tayangan secara menarik dalam satu tayangan utuh, akan mampu menjaga atensi penonton tetap bertahan hingga akhir tayangan. Sehingga, jika tetap ingin mempertahankan format tayangan dengan durasi lebih dari atensi siswa ketika belajar (10–15 menit), mendesain konten peralihan antarsegmen agar menarik dan atraktif, juga penting dilakukan.

Selain durasi, pemilihan materi tayangan juga tidak kalah penting. Hasil diskusi kami menemukan sebagian guru urung menonton karena materi tayangan program dianggap belum mengacu pada kurikulum di tingkat/ jenjang kelas yang dimaksud. Ditemukan beberapa materi yang terkesan melompat atau tidak lengkap. Padahal, umumnya guru berharap tayangan merupakan bentuk utuh dari keseluruhan masing- masing tema dalam setiap jenjang kelas dan episodenya.

Atas dasar temuan tersebut, kami melakukan konfirmasi kepada pengkaji materi program dan Pusdatin sebagai koordinator produksi materi. Menurut pengkaji materi tayangan program BDR dan Pusdatin, materi telah dikembangkan dengan mengacu pada kurikulum dalam kondisi khusus (kurikulum darurat). Jika diperhatikan lebih mendalam, materi tayangan sebetulnya telah berisi beberapa kompetensi dasar yang disederhanakan dan mengacu pada modul pembelajaran kurikulum darurat yang dikeluarkan pemerintah. Masalahnya, pemahaman mengenai kurikulum darurat tersebut belum merata pada semua guru dan belum terimplementasi dengan baik (CIPS Indonesia, 2020). Banyak guru yang masih menggunakan Kurikulum 2013 secara utuh dan mengejar pemenuhan/ketuntasan kurikulum dalam aktivitas selama BDR. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak pada harapan guru ketika mencari sumber belajar, salah satunya melalui tayangan Program BDR.

Selain materi, beberapa tantangan teknis juga menjadi catatan dan perlu perbaikan. Sebagai sebuah tayangan, Program BDR sejak ditayangkan di TVRI hingga kemudian beralih ke TV Edukasi dan YouTube telah melalui proses produksi yang terseleksi. Meskipun beberapa materi tayang merupakan kompilasi video dari beberapa sumber, proses produksi tayangan seperti pengambilan gambar, penokohan dengan bermain peran, juga dilakukan pada beberapa tayangan lain. Namun, hasil observasi kami menemukan beberapa

konsep bercerita melalui penokohan guru dan siswa dalam tayangan, masih disampaikan dengan kaku, kurang natural dan berdialog, sehingga seperti sedang membaca teks. Penokohan tayangan juga perlu lebih beragam. Dalam tayangan pembelajaran yang dilakukan di beberapa negara, tayangan sesekali juga melibatkan *public figure* yang dikenal siswa. Di Inggris, *Bitsize Daily* melalui siaran BBC menghadirkan beberapa penyanyi dan pemain sepak bola profesional untuk ikut menyampaikan materi dalam satu sesi pembelajaran siswa (BBC, 2020; Li & Lalani, 2020). Menurut psikolog pendidikan, penggunaan tokoh, konteks dan pilihan bahasa percakapan yang “kekinian” perlu lebih banyak digunakan dalam tayangan agar siswa yang menonton merasakan kedekatan personal dengan tayangan pembelajaran yang tengah ditonton.

2. Turunnya Animo Penonton

Sebuah survei yang dilakukan di Selandia Baru pada September 2020 menunjukkan, peningkatan akses terhadap televisi di negara tersebut semasa pandemi salah satunya karena penayangan program pembelajaran (ThinkTV, 2020). Dalam praktiknya, tayangan pembelajaran melalui televisi tersebut berisi materi belajar seperti literasi, matematika, sains, permainan, serta materi bahasa Maori sebagai bahasa ibu mereka. Semua program tayangan terkait langsung dengan kurikulum dan sesuai kelompok usia siswa (TVNZ, 2020). Program tersebut akan melengkapi program pembelajaran yang diperoleh siswa dari sekolah atau layanan pembelajaran yang dilakukan guru secara jarak jauh.

Penggunaan tayangan program sebagai bagian dari pembelajaran menjadi upaya yang secara tidak langsung akan mendorong siswa memanfaatkan tayangan ketika belajar. Selain Selandia Baru, Irlandia juga telah menerapkan hal serupa melalui program pembelajaran *Home School Hub* (RTE, 2020). Tayangan pembelajaran melalui televisi di negara tersebut didesain sebagai alat bantu pembelajaran yang digunakan guru untuk mengarahkan siswa ke *website* atau aplikasi penugasan dan pembelajaran yang sifatnya lanjutan.

Praktik tayangan Program BDR juga dapat menjadi contoh. Di awal peluncuran program yang ditayangkan di TVRI, banyak daerah dan sekolah mengimbau guru untuk menggunakan tayangan Program BDR sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran. Informan guru PAUD menyatakan, aktivitas belajar yang ia lakukan di awal pandemi, salah satunya adalah dengan menugaskan siswa menonton tayangan BDR bersama orang tua di rumah. Materi yang telah

ditonton tersebut kemudian dibahas oleh guru ketika melakukan pertemuan daring dengan siswa. Survei terdahulu kami di bulan Mei 2020 juga menemukan hal serupa. Sebanyak 71,4% guru di semua jenjang, menjadikan tayangan Program BDR TVRI sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran, dan bahkan 14%-nya menggunakannya sebagai sumber utama pembelajaran khususnya pada jenjang SD (Puslitjak, 2020a).

Namun, seiring berjalannya waktu, perkembangan kebutuhan sumber belajar menyebabkan guru tidak lagi menyarankan siswa menggunakan tayangan Program BDR dalam pembelajaran. Fleksibilitas lebih diutamakan guru untuk mengarahkan siswa mengakses lebih banyak sumber belajar yang beragam dan mudah dijangkau. Hambatan yang ditemukan siswa ketika diharuskan menonton tayangan Program BDR, menjadi pertimbangan utama. Analisis kami menemukan, menurunnya upaya imbauan dari sekolah maupun guru kepada siswa untuk menggunakan tayangan dalam aktivitas belajar, menjadi salah satu sebab penurunan penonton Program BDR khususnya ketika beralih penayangan ke TV Edukasi dan YouTube. Data Pusdatin menunjukkan penurunan penonton tayangan Program BDR dari 50.783 kali ditonton di bulan April 2021 menjadi 23.469 kali pada Mei 2021 (Pusdatin, 2021). Meskipun begitu, penurunan atensi dan intensitas imbauan penggunaan tayangan program bukan satu-satunya alasan. Masih ada beberapa faktor lain yang diperkirakan menjadi sebab mengapa penonton tayangan Program BDR di YouTube mengalami penurunan, salah satunya terkait promosi dan diseminasi.

3. Minimnya Promosi dan Diseminasi

Upaya promosi dan diseminasi tayangan program juga memiliki andil perihal apakah guru dan siswa menonton tayangan Program BDR. Observasi yang kami lakukan hingga Juni 2021 menemukan setidaknya ada empat upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyebarluaskan informasi tayangan Program BDR, yaitu unggahan informasi pada laman Kemendikbud (<https://www.kemdikbud.go.id/>), *press release* ke media, *blasting* WhatsApp Group, dan promosi melalui media sosial resmi milik Kemendikbud (Instagram, Twitter, Facebook) (Rakhmah dkk., 2021b). Meskipun secara jumlah platform promosi yang digunakan sudah cukup banyak, strategi promosi yang dilakukan tampaknya belum optimal. Studi kami menemukan bahwa peralihan media penayangan (dari TVRI ke YouTube) belum disosialisasikan dengan baik kepada guru dan orang tua, dibandingkan ketika pertama kali tayangan

Program BDR di TVRI diluncurkan ke masyarakat. Guru dan orang tua lebih mengenal Program BDR di TVRI daripada ketika ditayangkan di TV Edukasi dan YouTube. Observasi juga menunjukkan, informasi yang disebarluaskan melalui empat platform media promosi cenderung seragam dan tidak memiliki spesifikasi konten tertentu.

Temuan dari diskusi kami dengan guru dan orang tua dapat menjadi bukti tidak optimalnya upaya promosi tersebut. Hampir seluruh guru dan orang tua yang kami ajak diskusi tidak pernah mengetahui informasi atau promosi penayangan Program BDR saat ini di TV Edukasi dan YouTube TV Edukasi. Beberapa guru yang rutin menonton ketika program masih ditayangkan di TVRI, bahkan baru mengetahui bahwa tayangan tersebut telah pindah media tayang ke TV Edukasi dan YouTube. Menurut guru dan orang tua, ada beberapa perbedaan yang mereka rasakan terkait informasi penayangan program BDR tersebut. Pada guru, imbauan untuk memanfaatkan tayangan pembelajaran selama BDR melalui TV Edukasi dan YouTube tidak disampaikan oleh dinas pendidikan atau sekolah, baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana ketika program BDR ditayangkan di TVRI. Imbasnya, menurut orang tua, guru tidak lagi mengarahkan (dan menginformasikan) siswa untuk menonton tayangan Program BDR di TV Edukasi dan YouTube.

Selain itu, upaya promosi tayangan program secara acak melalui media pesan singkat (SMS ataupun WhatsApp Group/WAG) juga sudah tidak lagi dilakukan. Ketika pertama kali program BDR ditayangkan di TVRI, guru maupun orang tua beberapa kali menerima *blasting* di WAG berisi imbauan penggunaan tayangan dalam aktivitas BDR. Secara kebijakan, imbauan ini juga tertuang dalam Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 yang secara eksplisit mengimbau pemanfaatan tayangan Program BDR selama pembelajaran di masa pandemi. Selepas itu, upaya promosi melalui *blasting* tidak lagi ditemukan, atau jika pun ada, tidak dilakukan secara berkala. Rilis resmi kementerian terkait perubahan media tayang juga hanya terdengar gemanya ketika pertama kali media tayang berubah dari TVRI ke TV Edukasi dan YouTube, yang kemudian dirilis di beberapa media daring. Observasi kami hanya menemukan satu infografik mengenai pengalihan tayangan BDR ke TV Edukasi dan YouTube yang dimuat di laman Kemendikbud tertanggal 21 Maret 2021. Selepas itu, pola promosi yang dilakukan mengalami perubahan. Promosi

lebih banyak dilakukan dalam bentuk rilis jadwal dan panduan pemanfaatan tayangan program BDR yang dirilis kembali oleh media sosial dan beberapa platform berita.

Observasi kami pada beberapa unggahan di Twitter, Facebook, dan Instagram menyimpulkan bahwa ketiga media sosial tersebut memang telah mengunggah jadwal tayangan Program BDR di TV Edukasi dan YouTube. Namun, penayangan jadwal program tidak dilakukan secara rutin dan terpola. Unggahan jadwal di Instagram misalnya, umumnya dilakukan pada Kamis hingga akhir pekan. Memang ditemukan unggahan jadwal tayangan pada setiap hari di Senin hingga Jumat di minggu ke-1, 2, dan 4 bulan April 2021, namun tidak konsisten di bulan berikutnya. Unggahan jadwal tayang Program BDR di Twitter juga hanya dilakukan di hari kerja pada sekitar pukul 06.30 – 08.00 WIB. Padahal, unggahan terjadwal mengenai promosi sebuah program tayangan, penting dilakukan untuk membangun *online engagement* atau kelekatan sekaligus rasa ingin tahu publik terhadap tayangan tersebut (Santoso dkk., 2017).

Dari upaya promosi yang dilakukan melalui tiga media sosial tadi, respons yang diberikan publik sayangnya juga belum optimal. Observasi kami menemukan bahwa umumnya, unggahan jadwal tayangan Program BDR tidak direspons dengan tanggapan atau ajuan pertanyaan berkaitan dengan tayangan Program BDR tersebut. Respons publik melalui kolom komentar unggahan, hampir seluruhnya terkait dengan isu di luar konteks tayangan program. Selain itu, hasil pengamatan terhadap Twitter dan Facebook menunjukkan, informasi mengenai tayangan Program BDR yang diunggah di kedua media tersebut lebih banyak disukai (*likes*) dibandingkan dibagikan ulang (*share/re-tweet*) (Rakhmah et al., 2021b). Hanya 16% unggahan di Twitter @Kemdikbud_RI yang dibagikan ulang, padahal 84% unggahan disukai. Sedangkan, pada unggahan Facebook, 96% unggahan disukai, namun hanya 4% unggahan saja yang dibagikan ulang ke media lain oleh *followers*. Temuan ini setidaknya menggambarkan bahwa *online engagement followers* di kedua media sosial Kemendikbud tersebut belum optimal. *Online engagement* ini meliputi aktivitas *likes* dan *share/re-tweet* dari unggahan media sosial yang menjadi salah satu indikasi ketersediaan pesan yang ingin disampaikan dalam setiap materi unggahan (Santoso dkk., 2017).

Promosi dan penyebaran informasi tentang tayangan program kepada publik memerlukan upaya yang lebih strategis. Menurut *social media specialist*

yang kami ajak diskusi, promosi program dan kebijakan pemerintah perlu dilakukan melalui *multiplatform*, rutin, sistematis, dan juga didukung dengan upaya promosi yang sifatnya personal/ individu. Oleh karena itu, penggunaan promosi melalui media terbatas seperti WAG orang tua maupun email guru yang bisa didapatkan melalui basis data Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Profesional Berkelanjutan (SIM-PKB) perlu dilakukan untuk mendorong upaya promosi yang telah dilakukan di media daring seperti laman dan media sosial. Hal ini perlu diupayakan secara bersamaan, mengingat tidak semua orang tua aktif membuka laman berita, memiliki media sosial, ataupun menjadi pengikut aktif media sosial resmi Kemendikbud. Upaya promosi melalui kebijakan pemanfaatan tayangan Program BDR ketika ditayangkan di TVRI yang lebih intens dapat diadopsi dalam menyebarkan informasi tayangan program yang saat ini ditayangkan di TV Edukasi dan YouTube. Fleksibilitas dan konten tayangan yang lebih menarik dan esensial dapat menjadi pesan utama dalam setiap upaya promosi yang dilakukan.

4. Potensi Distraksi Tayangan Lain

Orang tua siswa SD di Kota Bekasi yang kami sertakan dalam diskusi menyatakan, selama belajar dari rumah, anaknya semakin senang berlama-lama menghabiskan waktu dengan gawai miliknya. Penggunaan gawai diawali dengan aktivitas belajar melalui video pembelajaran yang dikirimkan guru melalui tautan YouTube. Namun, selepas itu anak juga menonton berbagai tayangan lain di luar materi belajar dan bahkan mengakses permainan *online*. Potensi distraksi semacam itu, hampir selalu terjadi pada pembelajaran daring jika tanpa disertai pendampingan penuh orang tua ketika siswa belajar.

Ketersediaan tayangan hiburan yang dianggap lebih menarik dan mudah diakses melalui internet perlu diwaspadai. Konten tayangan yang sangat beragam dan bebas diakses oleh siapa pun, menyebabkan perhatian siswa mudah teralihkan pada tayangan lain di luar materi pembelajaran. Pada jangka panjang, risiko kesehatan dan efek adiksi pada tayangan sering kali terjadi (Rahmat dkk., 2019; Yamada et al., 2018) dan memberikan pengaruh pada aktivitas lain. Survei *Firefly Learning* – sebuah perusahaan teknologi pendidikan yang berbasis di London – yang dilakukan pada 2.000 siswa berusia antara 11 dan 15 tahun menunjukkan bahwa YouTube dipilih oleh paling banyak siswa sebagai platform yang membuat mereka rela menunda aktivitas lain termasuk belajar (The Telegraph, 2018).

Secara teknis, pembelajaran melalui tayangan belajar termasuk melalui YouTube merupakan metode pembelajaran *asynchronous* penuh. Dalam pembelajaran tersebut, tidak ada interaksi dua arah antara penonton dan pemberi materi, serta tidak ada struktur. Aktivitas menonton siswa tidak sepenuhnya diikuti dengan *feedback* dan kontrol guru, apakah siswa memahami materi belajar yang disampaikan dalam tayangan tersebut, termasuk memastikan siswa menonton tayangan secara utuh. Dari perspektif psikologi pendidikan, siswa khususnya di jenjang pendidikan rendah, masih membutuhkan pembelajaran yang terstruktur. Pembelajaran terstruktur dalam konteks ini adalah mengalihkan pendampingan penuh kepada orang tua, selepas aktivitas belajar bersama guru usai. Instruksi pembelajaran dari guru, diberikan pula kepada orang tua agar orang tua juga dapat mengikuti aktivitas belajar siswa dan mengetahui target pembelajaran yang dilakukan.

Masalahnya, tidak semua orang tua mampu dan menyadari pentingnya mendampingi anak ketika belajar melalui media sosial. Riset *Parental Children in the Age of Screen* tahun 2020 menunjukkan lebih dari 80% orang tua memberikan akses YouTube kepada anak-anak mereka yang berusia 11 tahun atau lebih muda, dan 53%-nya mengakses video melalui YouTube secara rutin setiap hari (Auxier et al., 2020). Berbagai hambatan menyebabkan orang tua tidak mampu secara intensif melakukan pendampingan. Survei kami pada Mei 2020 menemukan alasan utama orang tua tidak mendampingi anak ketika belajar adalah karena tidak memahami materi belajar (36%) dan kelelahan karena bekerja (33%) (Zamjani dkk., 2020).

Konsistensi terhadap pendampingan, menjadi jawaban utama untuk memitigasi potensi distraksi tayangan belajar melalui YouTube, meskipun bukan satu-satunya cara. Kunci dari pembelajaran melalui YouTube adalah apakah tayangan tersebut benar-benar ditonton siswa, dan apakah siswa mengerti materi yang disampaikan dalam tayangan. Oleh karena itu, pembelajaran melalui YouTube membutuhkan sistem yang mendorong orang tua melakukan pendampingan dengan lebih intensif untuk ikut mengawasi dua ketercapaian pembelajaran tersebut, khususnya pada kelompok siswa di jenjang pendidikan rendah. Opsi lainnya yang dapat ditempuh ialah membatasi akses YouTube hanya pada YouTube Kids, sehingga tontonan lain yang dapat mendistraksi anak juga relatif masih sesuai dengan usia dan perkembangannya.

Bagaimana Agar Optimal?

The New York Times melalui artikelnya berjudul “*Is Your Child a Digital Addict? Here’s What You Can Do*” menyatakan bahwa anak-anak sangat mudah melakukan transisi dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, namun sulit beranjak dari perangkat digital yang mereka gunakan (*New York Times*, 2020). Suara, visual, dan gerakan yang ditawarkan dalam konten-konten digital, jauh lebih memukau dan memikat anak-anak dibandingkan dunia nyata. Oleh karena itu, melibatkan aktivitas menonton tayangan dalam kegiatan pembelajaran, berpotensi merangsang ketertarikan anak-anak pada aktivitas belajar. Namun, sifat dari tontonan adalah tidak terstruktur. Interaksi dua arah menjadi sangat terbatas dan cenderung sulit terjadi. Berbagai upaya mitigasi perlu dilakukan agar belajar melalui media tayangan tetap dapat optimal. Upaya mitigasi ini perlu menjadi kesadaran bersama. Tentunya, kita tidak ingin aktivitas belajar anak-anak dengan media tayangan tersebut justru memunculkan beban pendidikan baru: menjebak anak-anak aktif pada aktivitas lain di luar pembelajaran, atau bahkan makin membuat anak-anak terasing dari kehidupan sosialnya.

Dari berbagai temuan yang telah dibahas sebelumnya, setidaknya ada tiga isu utama yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan tayangan Program BDR ke depan, yaitu fokus dan konten tayangan, upaya promosi dan pemanfaatan program, dan upaya mitigasi potensi distraksi. *Pertama*, fokus dan konten tayangan berkaitan dengan pemilihan dan pengemasan materi pembelajaran dalam konten tayangan. Memfokuskan tayangan hanya pada materi-materi esensial dengan pengemasan yang lebih sederhana dan menarik, akan memudahkan guru dan siswa menangkap pesan pembelajaran yang disampaikan. Tayangan program BDR dapat menjadi sarana optimalisasi penggunaan kurikulum darurat untuk membantu siswa dan guru agar tidak terbebani target ketuntasan kurikulum reguler di masa pandemi. Pastinya langkah ini perlu dibarengi dengan upaya mendorong penggunaan kurikulum darurat secara lebih masif kepada guru selama BDR.

Upaya memfokuskan materi ini akan berdampak pada durasi tayangan yang akan menjadi lebih singkat, materi yang lebih padat, dan jumlah tayangan semakin meningkat karena tayangan dapat dipecah menjadi video singkat berdasarkan topik dan materi. Dengan cara ini, guru dapat memilih dan

mengombinasikan beberapa video belajar yang tersedia sebagai alat bantu mereka ketika mengajarkan satu topik tertentu. Mengemas tayangan program dengan lebih menarik juga penting dilakukan. Proses produksi tayangan perlu lebih jeli melihat selera siswa saat ini, memperhatikan kualitas teknis tayangan yang akan dipublikasikan, dan menyisipkan unsur-unsur kekinian yang tengah tren saat ini.

Kedua, upaya promosi dan pemanfaatan program berkaitan dengan bagaimana strategi penyebaran informasi mengenai tayangan program disampaikan kepada publik dan bagaimana tayangan tersebut dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Promosi yang dilakukan dengan berbagai platform media sudah cukup baik, namun perlu lebih sistematis, terpola, berkala, dan melibatkan media komunikasi yang bersifat personal dan dua arah seperti WAG dan *blasting* email. Promosi terhadap media penayangan program juga perlu dilakukan (promosi saluran YouTube TV Edukasi), selain mempromosikan program/ konten yang ditayangkan. Lebih memperkenalkan media tayang yang digunakan akan mempermudah publik untuk menonton tayangan dan menarik calon penonton baru. Pola komunikasi secara terstruktur juga dapat dilakukan, dengan memberikan imbauan langsung kepada guru untuk memanfaatkan tayangan program sebagai pengayaan dalam pembelajaran dan mengombinasikannya dengan materi belajar dari sumber-sumber lain.

Ketiga, upaya mengurangi potensi distraksi tayangan yang paling efektif adalah memberikan pendampingan langsung ketika siswa dalam mengakses tayangan. Hal ini perlu dilakukan *khususnya* bagi siswa yang berada di jenjang pendidikan yang lebih rendah. Di beberapa sekolah ditemukan beberapa inisiatif yang mengeluarkan imbauan tertulis kepada siswa melalui orang tua untuk membatasi penggunaan gawai selepas jam belajar usai. Namun, upaya ini pun baru akan efektif ketika orang tua dan anggota keluarga berkomitmen menerapkan imbauan tersebut secara konsisten.

Selain itu, memperluas penayangan program pada platform yang terbatas dapat menjadi salah satu upaya memitigasi potensi distraksi tayangan. Upaya perluasan tersebut diharapkan juga dapat mengakomodasi kelompok orang tua yang hanya memberikan akses internet kepada anak-anak mereka pada platform terbatas seperti YouTube Kids. Penyediaan konten video dalam versi *offline* juga memungkinkan guru melakukan *sharing* video tayangan melalui

media komunikasi (WA atau WAG), khususnya bagi siswa kelas rendah agar tidak langsung diarahkan pada saluran YouTube yang terlalu luas kontennya. Penggunaan bahan belajar *offline* seperti buku teks, modul, dan juga tayangan video yang telah diunduh, juga tidak boleh dilupakan. Penggunaan bahan-bahan *offline* ini diharapkan dapat mengimbangi aktivitas belajar agar siswa tidak selalu harus menggunakan gawai yang mereka miliki.

Daftar Pustaka

- Asanov, I., Flores, F., McKenzie, D., Mensmann, M., & Schulte, M. (2020). *Remote-Learning, Time-Use, and Mental Health of Ecuadorian High-School Students during the COVID-19 Quarantine (Issue May)*.
- Auxier, Brooke, Anderson, Monica, Perrin, Andrew, Turner, Erica. *Parenting Children in the Age of Screens*. (2020, 28 July). <https://www.pewresearch.org/internet/2020/07/28/parenting-children-in-the-age-of-screens/>
- BBC. (2020). *How to use Bitesize Daily - Our New Service to Help You Learn at Home - BBC Bitesize*. <https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zfwrqct>
- BPS. (2018). Statistik Potensi Desa.
- Bradbury, Neil A. 2016. Attention Span During Lectures: 8 seconds, 10 minutes, or more?. *Advances in Psychology in Education*. Vol. 40, No. 4, American Psychological Society. <https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/advan.00109.2016>
- Britannica. (2021, June 25). Affirmative Action: Definition, History, and Cases. <https://www.britannica.com/topic/affirmative-action>
- CIPS Indonesia. (2020). *Tidak Efektif, Kurikulum Darurat Kurang Sosialisasi*. <https://www.cips-indonesia.org/post/siaran-pers-tidak-efektif-kurikulum-darurat-kurang-sosialisasi>.
- Dale, E. (1969). Audio-Visual Methods in Teaching. https://edtechbooks.org/lidtfoundations/edgar_dale
- David, R., Pellini, A., Jordan, K., & Phillips, T. (2020). Education during the COVID-19 Crisis Opportunities and Constraints of Using EdTech in Low-Income Countries. In *Blavatnik School of Government* (Issue April). <https://doi.org/10.5281/zenodo.3750976>
- ESDM. (2019). Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2018.
- Haapaniemi, J., Venäläinen, S., Malin, A., & Palojoki, P. (2020). *Teacher Autonomy and Collaboration as Part of Integrative Teaching-*

- Reflections on The Curriculum Approach in Finland.* <https://doi.org/10.1080/00220272.2020.1759145>
- Henshaw, P. (2022). The Two Sides of the Digital Divide. <https://www.sec-ed.co.uk/news/the-two-sides-of-the-digital-divide-laptops-connectivity-pandemic-remote-learning-home-education-edtech-esafety-skills-technology/>
- Jalli, N. (2020). Kesenjangan akses internet di Asia Tenggara jadi Tantangan bagi Pengajaran *Online* akibat Pandemi COVID-19. <https://theconversation.com/kesenjangan-akses-internet-di-asia-tenggara-jadi-tantangan-bagi-pengajaran-online-akibat-pandemi-covid-19-133928>
- Kemendikbud. (2020). Kemendikbud Hadirkan Program Tayangan Belajar dari Rumah di TVRI. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/04/kemdikbud-hadirkan-program-tayangan-belajar-dari-rumah-di-tvri>
- Kemenkominfo dan Katadata. (2020). Status Literasi Digital Indonesia 2020. Status Literasi Digital Indonesia 2020.
- Kemenkominfo. (2019). Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018. https://www.kominfo.go.id/content/detail/21396/laporan-kinerja-kementerian-komunikasi-dan-informatika-tahun-2018/0/laporan_kinerja
- Kim, N. C. (2020). PBS SoCal, KCET Create at Home Learning for LAUSD Students. <https://spectrumnews1.com/ca/la-west/education/2020/03/27/pbs-social-kcet-create-at-home-learning-for-laUSD-students>
- Li, C., & Lalani, F. (2020). The Rise of Online Learning During the COVID-19 Pandemic. <https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/>
- Mansilla, V. (2008). Integrative Learning: Setting the Stage for a Pedagogy of the Contemporary. *Peer Review*, 10(4), 31.
- New York Times. (2020). Is Your Child a Digital Addict? Here's What You Can Do - The New York Times. <https://www.nytimes.com/2020/04/15/parenting/big-kid/child-screen-addiction.html>
- OECD. (2020, November 19). The impact of COVID-19 on student equity and inclusion: Supporting vulnerable students during school closures and school re-openings. <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-d593b5c8/>.

- Pramuji, S. (2019, July 6). TVRI masih sulit ditonton dengan antena terestrial. <https://Beritagar.Id/Artikel/Berita/Tvri-Masih-Sulit-Ditonton-Dengan-Antena-Terestrial>.
- Pusdatin (2020). Statistik Penonton Program Tayangan Belajar dari Rumah (April – Mei 2021)
- Puslitjak. (2020a, Mei 2020). Survei Belajar dari Rumah.
- Puslitjak. (2020b). Hasil Survei Belajar dari Rumah dalam Pandemi COVID-19 (Desember 2020).
- Queensland Departement of Education. (2020). (144) Queensland Department of Education - YouTube. <https://www.YouTube.com/user/DETQueensland/playlists>
- Rahmat, N. S., Hidayat, D. R., & Abdullah, A. (2019). Adiksi Terhadap Media Sosial dan Online Games pada Generasi *Communication & Information Beyond Boundaries* (pp. 93–100). Universitas Padjadjaran.
- Rakhmah, D. N., Azizah, S. N., Irmawati, A., Hariyanti, E., & Solihin, (2021a). Menakar Efektivitas Tayangan Program Belajar dari Rumah (Vol. 1, Issue April).
- Rakhmah, D. N., Azizah, S. N., Irmawati, A., Hariyanti, E., & Solihin, L. (2021b). Mengoptimalkan Pemanfaatan Tayangan BDR Kemendikbud di Media Sosial: Saran Perbaikan Konten dan Promosi Tayangan.
- Reuters. (2020a, July). Kenya orders probe into rise in violence against women and girls during pandemic | Reuters. <https://Www.Reuters.Com/Article/Us-Health-Coronavirus-Kenya-Women-Trfn/Kenya-Ordersprobe-into-Rise-in-Violence-against-Women-and-Girlsduring-Pandemic-IdUSKBN2472ER>.
- Reuters. (2020b). Millions of African Children Rely on TV Education During Pandemic. <https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-africa-education/millions-of-african-children-rely-on-tv-education-during-pandemic-idUKKBN26619B>
- RTE. (2020). RTÉ Learn. <https://Www.Rte.Ie/Learn/>. <https://www.rte.ie/learn/>
- RTE. (2021). Let's Learn about the Water Cycle. <https://www.rte.ie/learn/home-school-hub/2021/0322/1205392-the-water-cycle/>
- Santoso, A., Baihaqi, I., & Persada, S. (2017). Pengaruh Konten Post Instagram Terhadap Online Engagement: Studi Kasus pada Lima Merek Pakaian Wanita. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 50–54.

- Suryanto, Y. (2017). Analisis Regulasi Ekonomi Sistem Ketenagalistrikan Nasional. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 24(1), 63–77.
- The Telegraph. (2018). YouTube is bigger distraction to children's homework than television, survey finds. <https://www.Telegraph.Co.Uk/Education/2018/02/23/YouTube-Bigger-Distraction-Childrens-Homework-Television-Survey/>.
- ThinkTV. (2020). Fast Fact NZ: What You Need to Know about TV Viewing in 2020 (Issue September).
- TV Edukasi. (2020). (143) BDR | SD Kelas II | Episode 39 - Menjaga Siklus Air - YouTube. <https://www.YouTube.com/watch?v=5Ay28S82jE4>
- TVNZ. (2020). Watch Home Learning TV | Episodes | TVNZ On Demand. <https://www.tvnz.co.nz/shows/home-learning-tv>
- TVRI. (tt). TVRI. <http://Tvri.Go.Id/About>. Retrieved August 1, 2021, from <http://tvri.go.id/about>
- UNESCO. (2020). Education: From Disruption to Recovery. <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>
- UNICEF. (2020a). COVID-19: Are children able to continue learning during school closures. A Global Analysis of the Potential Reach of Remote Learning Polices Using Data From, 100, 17.
- UNICEF. (2021a). COVID-19 and School Closures: One Year of Education Disruption.
- UNICEF. (2021b). Keeping Children in Peru Learning in the Time of COVID-19.
- United Nations. (2020). Policy Brief: Education during COVID-19 and beyond (August 2020) - World | ReliefWeb (Issue August). <https://reliefweb.int/report/world/policy-brief-education-during-covid-19-and-beyond-august-2020>
- Washington Post. (2020, May 26). Why Adaptability is the Most Important Skill in the COV ID-19 Era. https://www.Washingtonpost.Com/Lifestyle/Wellness/Adaptability-Coronavirus-Skills/2020/05/26/8bd17522-9c4b-11ea-Ad09-8da7ec214672_story.Html.
- World Bank. (2020a, June 18). COVID-19 Could Lead to Permanent Loss in Learning and Trillions of Dollars in Lost Earnings. <https://www.Worldbank.Org/En/News/Press-Release/2020/06/18/Covid-19-Could-Lead-to-Permanent-Loss-in-Learning-and-Trillions-of-Dollars-in-Lost-Earnings>.
- World Bank. (2020b). How Countries are Using EdTech (Including Online

Learning, Radio, Television, Texting) to Support Access to Remote Learning During the COVID-19 Pandemic. [https:// www.worldbank.org/en/topic/edutech/brief/how-countries-are-using-edtech-to-support-remote-learning-during-the-covid-19- pandemic](https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/brief/how-countries-are-using-edtech-to-support-remote-learning-during-the-covid-19-pandemic)

Yamada, M., Sekine, M., & Tatsuse, T. (2018). Parental internet use and lifestyle factors as correlates of prolonged screen time of children in japan: Results from the super shokuiku school project. *Journal of Epidemiology*, 28(10), 407–413. <https://doi.org/10.2188/jea.JE20170100>

Zamjani, I., Azizah, S. N., Pratiwi, I., Rakhmah, D. N., Hijriani, I., & Hidayati, S. (2020). Adaptasi Ekosistem Sekolah selama Belajar dari Rumah (Issue April).

Zamjani, I., Rakhmah, D. N., Pratiwi, I., & Azizah, S. N. (2020). Mengatasi Risiko Belajar dari Rumah. 1–7.



**Inisiatif Pembelajaran Jarak Jauh
Berbasis Masyarakat di Wilayah Terpencil**

Inisiatif Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Masyarakat di Wilayah Terpencil

~•~

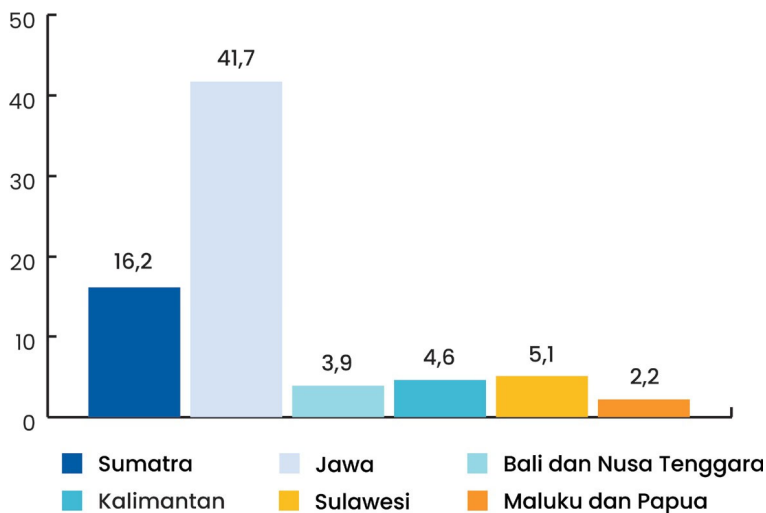
*Petra Wiyakti Bodrogini, Mayla Safura Putri Gustaff H. Iskandar,
Indri Sri Sembadra, Misiyah*

Menyiasati Pembelajaran Jarak Jauh di Wilayah Terpencil

Pandemi COVID-19 mendorong peningkatan penggunaan teknologi untuk pendidikan di seluruh Indonesia. Mitigasi bencana non-alam ini mengharuskan masyarakat menghentikan penyebaran virus dengan cara menjaga jarak, melakukan pekerjaan dan belajar dari rumah dengan tumpuan sarana internet dan alat komunikasi yang memadai. Pembelajaran jarak jauh telah menjadi pilihan utama selama satu tahun terakhir untuk kegiatan pembelajaran karena penutupan sekolah, baik di Indonesia maupun secara global.

Namun, konektivitas (koneksi internet) masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia/ APJII (2020) menjelaskan bahwa sejak 2019 hingga 2020, sebanyak 73,7% masyarakat Indonesia telah menggunakan internet.¹ Penetrasi internet di Pulau Jawa adalah 41%, tertinggi dibandingkan daerah- daerah lain di Indonesia (Gambar 1).

¹ Pengguna internet adalah setiap individu yang terhubung ke internet melalui ponsel pintar atau komputer. Penetrasi internet adalah proporsi pengguna internet pada populasi tertentu.



Grafik 1 Penetrasi Internet di Daerah-Daerah di Indonesia
Sumber: APJII, 2020

Kesenjangan digital tersebut disebabkan beberapa persoalan, di antaranya faktor geografis yang sulit dijangkau serta pasokan listrik yang tidak memadai. Selain itu, tantangan kesenjangan digital juga muncul karena tidak tersedianya infrastruktur internet, biaya *bandwidth* yang kurang terjangkau, serta terbatasnya perangkat yang memadai. Hal lain yang dihadapi adalah kurangnya konten lokal yang disebabkan karena terbatasnya keterampilan dan literasi digital. Rata-rata tingkat literasi digital di Indonesia tahun 2020 adalah 87% dengan persentase populasi tertinggi ada pada kelompok usia dewasa 15 sampai 24 tahun. DI Yogyakarta menempati urutan teratas (98%) dan Papua (39%) menempati urutan terbawah untuk tingkat literasi digital provinsi-provinsi di Indonesia (BPS, 2021).

Untuk menyasiasi berbagai tantangan koneksi internet di wilayah terpencil, jaringan internet dan radio berbasis komunitas dapat menjadi model yang sesuai untuk mendukung pembelajaran karena beberapa alasan. *Pertama*, menjembatani penyediaan koneksi internet kepada siswa yang belum menerima bantuan kuota data internet dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). *Kedua*, layanan koneksi internet komunitas dan radio dapat diselenggarakan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. *Ketiga*,

inisiatif berbasis komunitas menekankan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat melalui konektivitas atau keterhubungan dengan informasi.

Dalam usaha untuk memastikan inklusivitas digital dan pendidikan di wilayah terpencil, *Digital Access Programme* (DAP) dari Pemerintah Inggris telah menginisiasi dua program rintisan pada masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar (Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat), dan Pulau Sabutung (Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan). Program Akses Digital atau DAP² di Indonesia dirancang untuk menyokong inklusi digital di tanah air. Program ini bertujuan untuk mempromosikan pengembangan, validasi, dan peluncuran model konektivitas dasar yang inovatif dan inklusif, meningkatkan keterampilan digital, konten dan layanan digital yang relevan secara lokal untuk komunitas yang kurang terlayani. Berbagai prioritas ini menjadi sangat relevan seiring penyebaran pandemi COVID-19, di mana terjadi kesenjangan digital yang semakin melebar karena sekolah perlu beradaptasi dengan cara belajar daring.

Program rintisan pertama DAP adalah Program Pengembangan Internet Komunitas di Kampung Kasepuhan Ciptagelar untuk mengembangkan *tech hub* (jejaring teknologi) yang diwujudkan dalam bentuk *media lab/studio* “Ciga” dan pengadaan kuota internet yang dikelola mandiri oleh masyarakat untuk melayani masyarakat di Kasepuhan Ciptagelar, Sukabumi, Jawa Barat. Program rintisan ini diimplementasikan dan dikelola oleh Yayasan Mitra Ruang Kolektif atau yang dikenal sebagai Common Room Network Foundation (Common Room).³ Program rintisan kedua menginisiasi penyiaran Radio Darurat Siaga COVID-19 yang mengemas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dalam siaran radio di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB). Program rintisan ini dilaksanakan oleh Institut KAPAL Perempuan.

Tulisan ini bertujuan untuk berbagi informasi mengenai praktik-praktik baik yang dilaksanakan oleh kedua program rintisan DAP dengan harapan dapat melakukan diseminasi informasi dan memberikan inspirasi bagi wilayah terpencil lainnya. Kedua praktik baik ini juga telah ditelaah dalam kegiatan

2 Program Akses Digital (DAP) adalah kemitraan yang dipimpin oleh DFID (Departemen Pembangunan Internasional) dengan Kantor Luar Negeri & Persemakmuran (FCDO) dan Departemen Digital, Budaya, Media & Olahraga (DCMS), Pemerintah Inggris. Program ini bertujuan untuk mengkatalisasi akses digital yang lebih inklusif, terjangkau, aman dan terjangkau bagi masyarakat kurang mampu di Kenya, Nigeria, Afrika Selatan, Brasil, dan Indonesia.

3 Yayasan Common Room Network adalah sebuah institusi yang bertujuan untuk menjadi wadah kreativitas dan inovasi di bidang sosial dan budaya melalui ekspresi seni, budaya, dan teknologi. Sejak 2013, Common Room juga terlibat dalam kolaborasi pembangunan perdesaan dan perkotaan, yang mengembangkan kreativitas, inovasi, dan wirausaha sosial dalam konteks lokal maupun internasional (Common Room, 2020a).

“Dukungan Teknis untuk Pengembangan Strategi Pembelajaran Jarak Jauh dan Literasi Digital untuk Kemendikbudristek” yang diselenggarakan DAP.⁴

Pengembangan Internet Komunitas di Kampung Kasepuhan Ciptagelar

Kasepuhan Ciptagelar merupakan kampung masyarakat adat yang berada di lereng Gunung Halimun-Salak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Masyarakat Kampung Kasepuhan Ciptagelar tersebar di tiga kabupaten di daerah perbatasan Jawa Barat dan Banten. Berdasarkan rekam jejak yang ada, Kasepuhan Adat Ciptagelar didirikan pada 1368 dan telah melalui pergantian kepemimpinan dari generasi ke generasi. Secara administratif, Kasepuhan Ciptagelar berada di daerah selatan Jawa Barat, di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cislak, Kabupaten Sukabumi. Populasi Kasepuhan Ciptagelar terdiri atas 293 orang penduduk atau 84 kepala keluarga. Secara budaya, masyarakat ini adalah bagian dari masyarakat tradisional Banten Kidul yang tersebar di 500 desa. Kasepuhan Ciptagelar terkenal sebagai masyarakat adat yang menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari dan bergantung dari mata pencaharian sebagai petani (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2020).

Proses pengembangan infrastruktur internet berbasis komunitas di Kampung Kasepuhan Ciptagelar telah dimulai sejak 2013 dan mulai membuahkan hasil pada 2016. Tujuan utama pengembangan program yang digagas oleh komunitas ini adalah untuk meningkatkan keterampilan digital sekaligus menyebarkan nilai-nilai budaya setempat. Kampung Kasepuhan memiliki struktur masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang tetap dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari (Common Room, 2020b).

Untuk pemanfaatan Ciga Studio ini, ya mudah-mudahan warga Abah bisa belajar di sini. Karena untuk belajar teknologi IT itu sangat mahal. Tidak hanya di kampung adat seperti Abah yang jauh dari perkotaan, di kota-kota besar pun agak sedikit sulit untuk mendapatkan cerna-an informasi IT. Mudah-mudahan dengan adanya gedung pelatihan di Kasepuhan Ciptagelar Ciga Studio ini bisa membantu untuk masyarakat yang awam akan teknologi bisa belajar di sini. Istilahnya tidak hanya belajar tentang teknologi internet, ya bisa (juga) mengembangkan bakat-bakat yang ada di Kasepuhan Ciptagelar, entah itu di musik atau di seni-seni tradisional. Terus lagi, istilahnya kolaborasi antara tradisional dengan modern seperti apa. Ya, mudah-mudahan bisa meningkatkan kreativitas masyarakat yang ada di Kasepuhan Ciptagelar.

(Abah Ugi, Pimpinan Masyarakat Hukum Adat [MHA])

4 Kegiatan dukungan teknis untuk pengembangan strategi pembelajaran jarak jauh dan literasi digital untuk Kemdikbudristek dilaksanakan mulai bulan Oktober 2020 sampai dengan Juni 2021. Laporan masih dalam proses revidi dan akan dipublikasikan.

Upaya mengembangkan infrastruktur internet di wilayah Kasepuhan Ciptagelar didukung oleh *Common Room* melalui kerja sama multipihak, seperti mitra pembangunan internasional, penyedia layanan internet, organisasi non-pemerintah, serta asosiasi. Sebelum bekerja sama dengan DAP pada 2020, masyarakat Kasepuhan Ciptagelar telah melaksanakan Program *Innovation Factory – ICT4AG* yang didukung *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)* di akhir 2015. Inisiatif ini kemudian melibatkan *ICT Watch* yang melakukan peninjauan pengembangan teknologi *Open Source Base Transceiver Station (OpenBTS)* pada awal 2016. OpenBTS merupakan teknologi BTS GSM berbasis *software open source*. Dengan melibatkan Awinet, penyedia layanan internet lokal, pada 2018 dilakukan percobaan pengembangan infrastruktur internet dengan menggunakan jaringan radio. Pada perkembangannya, perluasan jaringan internet mulai dirintis di lima kampung⁵ yang berada di sekitar kampung Kasepuhan Ciptagelar bekerja sama dengan lembaga *Association for Progressive Communications (APC)*.

Internet untuk Literasi Digital dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Kesenjangan digital semakin terasa saat menyebarnya pandemi COVID-19 pada awal 2020. Di bidang pendidikan, banyak kendala muncul ketika metode pembelajaran tatap muka terpaksa harus diganti dengan proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Di Jawa Barat, selama masa pandemi COVID-19 ada sekitar 42.000 siswa yang tidak memiliki akses internet dan kesulitan mengikuti PJJ (Pikiran Rakyat, 2020). Tantangan lebih besar dialami oleh para siswa yang bersekolah di wilayah terpencil di mana koneksi internet sangat terbatas.

5 Setelah eksperimen pengembangan infrastruktur internet dengan menggunakan jaringan radio berhasil dilakukan di wilayah Kasepuhan Ciptagelar pada pertengahan 2018, Awinet bersama dengan *Common Room* melakukan peninjauan perluasan jaringan ke kampung-kampung terdekat sebagai prioritas awal. Pada saat itu, perluasan jaringan internet diutamakan untuk menjangkau lima kampung yang terdiri dari Kampung Ciptagelar, Kampung Lebak Nangka, Kampung Ciptarasa, Kampung Sukarame, dan Kampung Sirnaresmi.



Gambar 1 Pemasangan Infrastruktur Internet Komunitas
di Kasepuhan Ciptagelar
(Sumber Foto: Common Room)

Dengan tujuan untuk menjembatani kesenjangan di berbagai bidang pembangunan pada masyarakat adat tersebut, dukungan dari DAP diperuntukkan untuk mendorong beberapa hal.

- ***Peningkatan literasi digital***
Pembangunan Studio Ciga sebagai pusat pelatihan dan pengembangan digital yang digunakan oleh masyarakat setempat, terutama pemuda, untuk mengembangkan konten-konten lokal dan melakukan pelatihan literasi digital. Pelatihan-pelatihan non-formal juga dilaksanakan di laboratorium media untuk mendorong perekonomian masyarakat setempat.
- ***Pelaksanaan PJJ dari rumah***
PJJ dilakukan dengan menggunakan kuota internet yang dapat dibeli dan diakses oleh guru dan siswa, serta sekolah, madrasah, maupun pesantren.
- ***Penerapan Desa Siaga COVID-19***
Buku elektronik dan cetak mengenai kesiapan mitigasi pandemi COVID-19 dikembangkan dalam bahasa Indonesia dan Sunda. Selain untuk memberi edukasi mengenai COVID-19, buku ini juga menjelaskan pentingnya *telemedicine* dengan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

- **Perluasan akses internet**

Program ini mendorong dan melanjutkan pengadaan dan *maintenance* infrastruktur internet serta sumber daya pendidikan di kampung-kampung sekitar Kasepuhan Ciptagelar seperti Cileungsing dan Cirendah.

Menciptakan komunitas praktik

“Komunitas praktik” (*community of practice*) dibentuk melalui penyelenggaraan *Rural ICT Camp*. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun dan menjadi forum diskusi antara para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan yang pertama dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 yang diikuti oleh lebih dari 600 peserta dan rencananya akan terus diadakan setiap tahun.

Akses internet komunitas dimanfaatkan untuk pendidikan, baik untuk pendidikan formal maupun pelatihan non-formal. Walaupun sebagian siswa memperoleh bantuan kuota data internet dari Kemdikbudristek, namun sebagian lainnya belum mendapatkan program subsidi ini. Daya beli masyarakat Kasepuhan Ciptagelar untuk membeli paket data internet juga terbatas. Oleh karena itu, akses internet komunitas di masyarakat Kasepuhan Ciptagelar dan sekitarnya juga bermanfaat untuk beberapa hal.

Pertama, berkaitan dengan aktivitas pendidikan formal. Internet dimanfaatkan ketika PJJ termasuk oleh siswa yang bersekolah di luar lingkungan Kasepuhan Ciptagelar. Misalnya, siswa SMAN 1 Cisolok pada 2021 menyampaikan bahwa saat pandemi mereka belajar dari rumah. Walau terkadang masih perlu ke sekolah untuk mengambil tugas, namun sebagian besar interaksi pembelajaran dilakukan secara daring (*online*). Kegiatan belajar secara daring lebih memudahkan bila ada siswa yang tidak mengerti karena memungkinkan siswa mencari referensi melalui laman peramban web. Penyediaan internet komunitas ini dianggap memberikan keuntungan dalam proses belajar siswa.

Selama pandemi, pembelajaran dilakukan di rumah secara online. Dengan internet kita bisa mencari materi di Google. Untungnya Ciptagelar sudah ada internet yang bagus sehingga mudah mencari materi pelajaran di Google

(Siswa SD, laki-laki)

Kedua, pelatihan non-formal. Internet memungkinkan berbagai pelatihan diselenggarakan secara berkala meskipun dengan keterbatasan. Salah satunya, kegiatan pelatihan dan pendampingan petani muda dan perempuan yang dikembangkan oleh *Common Room*.⁶ Kegiatan pelatihan jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet dan platform digital dimulai pada Juni 2020, dan dilakukan secara rutin dengan melibatkan kelompok Petani Muda Ciptagelar (PAMULAR). Saat ini PAMULAR telah menjadi mitra pemerintah Desa Sirnaresmi yang dilibatkan dalam program pemberdayaan anak muda, khususnya di sektor pertanian.

Praktik Baik Pendekatan Internet Komunitas

Beberapa catatan mengenai praktik baik dari program rintisan ini meliputi beberapa hal berikut.

- *Model pengelolaan dan penyediaan layanan internet berbasis komunitas (internet komunitas)*

Pengembangan dan pemanfaatan internet komunitas melibatkan warga secara langsung. Proses ini diawali dengan melakukan serangkaian pelatihan untuk membentuk tim teknisi lokal yang memiliki kemampuan untuk membangun dan mengelola infrastruktur internet secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk distribusi jaringan kepada pengguna (*end user*), dikembangkan metode penjualan voucher internet oleh para agen voucher di setiap kampung yang sebelumnya juga telah mengikuti serangkaian proses pelatihan terlebih dahulu.

- *Pelatihan literasi digital bagi pemuda*

Common Room memfasilitasi pelatihan literasi digital kepada perwakilan anak muda di lingkungan Kasepuhan Ciptagelar bersamaan dengan kegiatan pelatihan pembentukan tim teknisi dan agen voucher internet. Kegiatan ini diintegrasikan dengan aktivitas belajar-mengajar di SMPN 4 Cisolak Satu Atap yang ada di Kampung Kasepuhan Ciptagelar. Perwakilan siswa yang mengikuti pelatihan juga dilatih untuk membuat konten digital agar dapat memproduksi serta menyebarkan pengetahuan lokal yang ada di sekitar mereka. Hal ini terutama ditujukan agar warga dapat memanfaatkan internet dan *platform* digital secara produktif. Selanjutnya,

6 Program pelatihan ini juga dikelola melalui program VOICE yang didukung oleh Hivos dan Oxfam Novib.

berbagai kegiatan pelatihan yang terkait pengembangan dan pemanfaatan internet komunitas kerap digelar di pusat pelatihan dan laboratorium media yang ada di kampung Kasepuhan Ciptagelar. Selain pelatihan rutin pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur internet komunitas, beberapa pelatihan juga telah dilakukan, seperti pelatihan penanganan pandemi COVID-19 dengan menggunakan internet, pelatihan PJJ, pelatihan literasi digital, pelatihan pemetaan dengan menggunakan aplikasi *Open Street Map Tracker* (OSMTracker), dan lainnya. Melalui berbagai kegiatan pelatihan tersebut diharapkan pengetahuan dan keterampilan digital warga Kasepuhan Ciptagelar dapat terus meningkat di masa depan.

- ***Penanganan dan pencegahan COVID-19***

Selain untuk melayani kebutuhan komunikasi sehari-hari, akses internet di wilayah Kasepuhan juga digunakan untuk berbagai kepentingan. Pada awal 2020, penggunaan internet difokuskan pada upaya penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19. Selain mengirimkan informasi, dokumen protokol penanganan pandemi, serta media edukasi publik untuk penanganan serta pencegahan penyebaran pandemi COVID-19, infrastruktur internet komunitas juga dibangun di Kampung Cirendang dan Cilimus untuk memonitor mobilitas serta mempermudah proses komunikasi dengan warga yang berada di kawasan ini.

Kampung Cirendang dan Cilimus adalah dua kampung yang berlokasi di wilayah perbatasan terluar dari lingkungan Kasepuhan Ciptagelar. Awalnya, kedua kampung ini masih belum memiliki infrastruktur internet sehingga warga kesulitan untuk mengakses informasi. Sebagian warganya hidup berbaur dengan warga lain yang bekerja sebagai buruh di beberapa kota besar. Saat pemerintah memberlakukan kebijakan karantina skala besar pada pertengahan tahun 2020, ada banyak pekerja yang memutuskan untuk pulang ke kampung sehingga meningkatkan risiko penyebaran pandemi COVID-19. Guna mengantisipasi dan mencegah penyebaran pandemi, perangkat internet dibangun di dua kampung tersebut untuk mempermudah proses komunikasi serta memantau kondisi warga. Selama masa pandemi COVID-19, kampung Kasepuhan Ciptagelar telah beberapa kali melakukan kebijakan isolasi kampung untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.

- *Perluasan akses internet yang sistematis*

Setelah kegiatan pelatihan selesai dilakukan, upaya membangun infrastruktur internet baru dilakukan dengan tahapan yang spesifik. Prosesnya didahului dengan melakukan beberapa survei untuk menentukan titik-titik lokasi penempatan perangkat distribusi jaringan internet di beberapa kampung yang ada. Setelah itu, pemasangan perangkat jaringan dan distribusi layanan internet mulai dilakukan dengan melibatkan warga setempat. Pada pertengahan 2019, layanan internet mulai tersedia dan dikelola oleh warga dengan pendampingan dari Awinet dan Common Room. Selanjutnya, titik akses dan distribusi terus diperluas secara perlahan dan saat ini telah berhasil menjangkau sekitar 29 kampung, dengan pengguna sekitar 800 sampai dengan 1.000 pengguna setiap hari.

Tantangan dan Peluang

Upaya pengembangan infrastruktur internet komunitas di wilayah perdesaan dan tempat terpencil merupakan kerja jangka panjang yang perlu dilakukan secara terus-menerus. Pengalaman dalam mengembangkan dan mengelola internet komunitas di lingkungan MHA Kasepuhan Ciptagelar memperlihatkan bagaimana upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan digital di kalangan warga adat merupakan komponen yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan manfaatnya di masa depan. Hal ini terutama disebabkan oleh sejumlah keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah tersebut.

Beberapa kendala dan keterbatasan yang ada di antaranya adalah kondisi geografis yang sulit dijangkau, pasokan listrik yang kerap mengalami hambatan, gangguan kondisi alam, dan lain-lain. Bila infrastruktur internet komunitas mengalami kendala, teknisi lokal di kampung terdekat harus dengan sigap menyelesaikan gangguan yang ada agar layanan internet dapat tetap tersedia. Pendekatan yang dikembangkan dalam internet berbasis komunitas tersebut, setidaknya dapat menyelesaikan berbagai kebutuhan yang muncul di lapangan, mulai dari proses pengembangan, pengelolaan, sampai dengan penanganan masalah teknis lainnya.

Kerja sama multipihak yang dikembangkan di antara tim teknisi yang ada di setiap kampung dengan perusahaan layanan jasa internet maupun lembaga pendamping seperti Common Room sangat diperlukan untuk memastikan

penyediaan dan pemanfaatan layanan internet komunitas dapat terus dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, penyediaan layanan internet juga harus dipastikan mengikuti kebijakan dan regulasi yang ada agar sejalan dengan perangkat peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini perlu dilakukan agar keberlanjutan pengembangan dan pemanfaatan internet komunitas dapat terus dilakukan tanpa terbentur oleh kendala regulasi.

Setelah berjalan lebih dari dua tahun, layanan internet komunitas di lingkungan Kasepuhan Ciptagelar dapat terus berlangsung meski terkadang masih menemui sejumlah kendala teknis. Selain dapat memenuhi berbagai kebutuhan, pengembangan dan pemanfaatan internet komunitas di lingkungan warga Kasepuhan Ciptagelar juga telah memberi dampak ekonomi berupa pendapatan tambahan dan lapangan kerja baru. Namun begitu, dalam rentang waktu yang panjang upaya pengembangan dan pemanfaatan internet komunitas di lingkungan masyarakat adat masih harus dikembangkan dan mendapatkan pendampingan mengingat pemanfaatan internet juga dapat mendorong terbentuknya budaya digital baru di lingkungan warga adat secara umum. Digitalisasi harus lebih ditekankan untuk memungkinkan warga Kasepuhan Ciptagelar memproduksi konten-konten untuk terus memperkuat nilai-nilai budaya mereka.

Radio Darurat Siaga COVID-19 “Sipurennu” dan “Nina Bayan”

Program Radio Darurat Siaga COVID-19 diimplementasikan oleh Institut KAPAL Perempuan⁷ dan diujicobakan di dua konteks masyarakat dengan karakteristik yang berbeda, yaitu di kepulauan dan pegunungan. Radio Darurat Siaga COVID-19 “Sipurennu” (95,6 MHz) dirintis di Pulau Sabutung, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan Radio Darurat Siaga COVID-19 Nina Bayan (107,7 MHz) disiarkan di Desa Sukadana, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) (Institut KAPAL Perempuan, 2020).

Pulau Sabutung secara administratif berlokasi di Desa Mattiro Kanja, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi

7 Institut KAPAL Perempuan merupakan singkatan dari Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan. Institut KAPAL Perempuan berkedudukan di Jakarta dan didirikan pada 8 Maret 2000. Visinya adalah mewujudkan masyarakat sipil yang berfokus pada gerakan perempuan dengan basis pemikiran kritis, solidaritas, berdasarkan kesetaraan gender, pluralisme, transparansi, dan non-kekerasan (Institut KAPAL Perempuan, 2020a).

Selatan. Luas Pulau Sabutung kurang lebih dua kilometer persegi dengan hutan dan vegetasi di tengah pulau. Desa Mattiro Kanja dapat dicapai melalui transportasi laut dari Kota Pangkajene dengan perjalanan kurang lebih dua jam dan jadwal kapal hanya satu kali sehari pada pukul 6 pagi. Alternatif lainnya, dapat menggunakan kapal sewa dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit. Populasi Desa Kanja Mattiro adalah sebanyak 317 Kepala Keluarga (KK). Mata pencaharian utama adalah nelayan, pembuat kapal, dan pemberi jasa perjalanan. Sebagian besar orang di Pulau Sabutung adalah lulusan sekolah dasar. Di Pulau ini terdapat 1 TK, 2 SD, 2 SMP, dan 2 SMA dengan 231 siswa dan 48 guru (Profil Desa Mattiro Kanja, 2021).

Berbeda halnya dengan Pulau Sabutung yang berada di daerah kepulauan dan pesisir, Desa Sukadana merupakan salah satu desa di antara sembilan desa di Kecamatan Bayan yang berada di kaki Gunung Rinjani dengan kondisi geografis lereng sampai daratan dan pesisir pantai. Jumlah penduduk di wilayah ini adalah 2.423 orang perempuan, dan 2.491 orang laki-laki, dengan total kepala keluarga sebanyak 1.601 KK. Desa Sukadana memiliki 11 dusun yang menyebar dan terpencil mulai dari pegunungan hingga pesisir pantai dengan kondisi infrastruktur yang sulit dijangkau dan akses jalan bebatuan yang jika musim hujan sulit dilalui dengan topografi menanjak. Jarak Desa Sukadana dengan ibu kota kabupaten sekitar 45 kilometer dengan waktu tempuh sekitar satu jam. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi, Kota Mataram sekitar 90 kilometer. Untuk menjangkau dusun-dusun yang terletak di atas bukit, jarak tempuh sekitar 10-12 kilometer dengan infrastruktur yang belum memadai, namun memiliki sumber daya alam, perkebunan, pertanian, serta potensi wisata dan ekonomi yang dapat dikembangkan.

Radio Darurat Siaga COVID-19 untuk PJJ

Atas dukungan DAP, Institut KAPAL Perempuan bersama YKPM Sulawesi Selatan dan LPSDM Nusa Tenggara Timur mengembangkan Radio Darurat Siaga COVID-19 di kepulauan terpencil Pulau Sabutung, Pangkep, Sulawesi Selatan dan dusun-dusun terpencil wilayah pegunungan di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, NTB. Radio darurat siaga menjadi opsi terbaik berbasis masyarakat untuk merespons kondisi pandemi sebagai bencana non-alam, seperti ditutupnya sekolah-sekolah dan diterapkannya program PJJ. Di Pulau Sabutung, Pangkep maupun Desa Sukadana, Lombok

Utara yang terpencil, radio menjadi opsi satu- satunya sebagai media yang dapat digunakan untuk implementasi pembelajaran karena terbatasnya koneksi internet. Sasaran program rintisan ini adalah perempuan dan anak-anak yang tinggal di wilayah terpencil, sebagai populasi yang dianggap rentan.

Dalam praktiknya, PJJ yang dilakukan siswa di kedua wilayah ini terhambat karena beberapa faktor. *Pertama*, terbatasnya kepemilikan piranti teknologi yang memadai serta pasokan listrik yang tidak stabil. Selain itu, daya beli masyarakat untuk mendapatkan kuota data internet juga terbatas, khususnya bagi yang belum terakses bantuan kuota data internet dari Kemendikbudristek. *Kedua*, para siswa tidak memiliki pendamping belajar di rumah karena kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua yang tidak memadai. Di sisi lain, orang tua merasa kurang mampu mendampingi anak-anaknya belajar dengan mode PJJ.

Selain berbagai keterbatasan tadi, pengembangan radio berbasis komunitas ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender terutama selama pandemi. Oleh karena itu, program siaran radio diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelatihan non-formal untuk meningkatkan penghidupan perempuan, serta pembelajaran formal dan informal anak-anak melalui tutorial dan mendongeng cerita. Dalam praktiknya, Radio Darurat Siaga COVID-19 berperan untuk mendukung PJJ dengan memberikan tutorial bagi siswa, meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan, menyampaikan informasi/berita kesehatan dan perkembangan pandemi COVID-19, dan pemberdayaan perempuan.

Isu gender merupakan bagian tidak terpisahkan dengan dunia pendidikan. Salah satunya, kesadaran atas pentingnya memberi perhatian pada kasus perkawinan anak sebagai salah satu upaya mencegah angka putus sekolah. Oleh karena itu, program radio ini juga merespons berbagai isu gender selama pandemi. Dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, pandemi semakin memarginalisasi perempuan mengingat budaya patriarki yang masih sangat kuat, sehingga menumpukan beban tugas-tugas kerumahtanggaan kepada perempuan. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga, dan perkawinan paksa anak perempuan merupakan salah satu isu gender dalam pandemi yang belum mendapat perhatian memadai. Program ini kemudian merespons dengan menyiarkan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan anak, dan mendukung usaha-usaha mikro ekonomi perempuan di wilayah terpencil sebagai program siaran unggulan.

Praktik Baik Pengelolaan Radio Darurat Siaga COVID-19

Program radio disiarkan enam hari dalam seminggu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore (WITA). Radio ini juga menawarkan program promosi bagi UMKM setempat yang ingin memasarkan produknya. Untuk menjembatani kesenjangan literasi bahasa, bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah, yaitu bahasa Bugis di Pulau Sabutung dan bahasa Sasak di Desa Sukadana. Selama implementasi program, tim Institut KAPAL Perempuan tinggal di Pulau Sabutung dan Desa Sukadana untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat, termasuk melakukan instalasi infrastruktur radio dan pembentukan tim manajemen/pengurus radio komunitas. Tahapan pelaksanaan kegiatan mencakup:

1. Konsultasi dan diskusi bersama masyarakat. Konsultasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa Radio Darurat Siaga COVID-19 ini dibutuhkan masyarakat. Institut Kapal Perempuan berhasil mengumpulkan tanda tangan dari anggota masyarakat untuk memulai inisiatif ini.
2. Penyediaan infrastruktur radio dan uji coba siaran untuk perangkat radio konvensional maupun di aplikasi ponsel. Instalasi infrastruktur dan instalasi ruang penyiar radio ditempatkan di kantor kecamatan untuk Radio Sipurenu dan di kantor desa untuk Radio Nina Bayan.
3. Pembentukan tim pengelola dan penyusunan program siaran radio. Pengembangan konten dilakukan untuk layanan tutorial siswa sekolah dengan merancang jadwal tutorial dan pembagian tugas mengajar serta sosialisasi rancangan jadwal kepada masyarakat di komunitas yang terjangkau radio komunitas; membangun kerja sama dengan guru, serta persiapan bahan tutorial sesuai kebutuhan siswa.
4. Pengembangan kapasitas/pelatihan dan pendampingan bagi para guru, kepala desa, penyiar, pemimpin perempuan, dan mitra lokal. Institut KAPAL Perempuan juga mengelola “Sekolah Perempuan” dan “Sekolah Perempuan Muda” untuk melatih para pemimpin perempuan.
5. Pelaksanaan siaran dan evaluasi serta pemberian masukan terhadap proses tutorial.

Tabel 1 Ilustrasi Program Radio Sipirennu

| Program Senin–Jumat | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| No | Nama Program | Waktu Siar | Isi Program |
| 1. | Semangat Pagi | 09.00–10.00 | Sapaan pagu untuk pendengar dengan memutarakan lagu pop Indonesia dan menyampaikan informasi tentang keadaan Pulau Sabutung dan pulau-pulau lain di sekitar Pulau Sabutung |
| 2. | <i>Aggurung SD</i> | 10.00–11.00 | Tutorial belajar untuk siswa SD |
| 3. | <i>Aggurung SMP</i> | 11.00–12.00 | Tutorial belajar untuk siswa SMP |
| 4. | Rileks Siang | 12.00–13.00 | Sapaan siang untuk pendengar dengan memutarakan lagu pop Indonesia |
| 5. | <i>Aggurung SMA</i> | 13.00–14.00 | Tutorial belajar untuk siswa SMA |
| 6. | Informasi COVID-19 | 14.00–14.30 | Menyampaikan informasi tentang perkembangan COVID-19 |
| Program Sabtu | | | |
| No | Nama Program | Waktu Siar | Isi Program |
| 1. | Semangat Pagi | 09.00–10.00 | Sapaan pagu untuk pendengar dengan memutarakan lagu pop Indonesia dan menyampaikan informasi tentang keadaan Pulau Sabutung dan pulau-pulau lain di sekitar Pulau Sabutung |
| 2. | <i>Talkshow Perempuan</i> | 09.30–12.00 | Talkshow membahas berbagai topik tentang isu-isu perempuan, perlindungan sosial, SDGs dan lain-lain |
| 3. | Rileks Siang | 12.00–13.00 | Sapaan siang untuk pendengar dengan memutarakan lagu pop Indonesia |
| 4. | Gadde–Gadde | 13.00–14.00 | Mempromosikan produk–produk ekonomi perempuan |
| 5. | Dongeng Anak | 14.00–15.00 | Menceritakan dongeng–dongeng anak |

Sumber: Institut Kapal Perempuan (2020)

Dalam perkembangannya, keberadaan radio komunitas ini membawa hasil positif terhadap para guru dan siswa, terutama dalam mendukung proses PJJ dengan biaya murah. Berikut ini ditampilkan beberapa tanggapan terkait radio komunitas ini.

Dengan radio ini, para siswa tidak lagi perlu membeli kuota untuk belajar dari rumah, karena banyak siswa yang malas belajar karena masalah kuota, mereka berpikir bahwa membeli kuota itu mahal. Dengan radio ini, mereka bisa belajar tanpa kuota, tetapi mendengarkan radio. Hambatan kami adalah jaringan (internet) dan listrik. Siswa-siswa dari beberapa pulau lain yang ingin menggunakan jaringan yang sama, kesulitan memperolehnya, jadi sulit untuk belajar. Jadi radio ini sangat membantu, frekuensinya dapat diakses dari beberapa pulau lain sehingga mereka yang ada di pulau lain juga bisa mendengarkan.

(Guru, perempuan)

Saat radio ini diperkenalkan, radio ini dapat membantu kita di desa karena siswa bisa belajar hanya dengan mendengarkan radio karena mereka juga tidak memiliki dan menggunakan ponsel. Ini membantu mereka memahami pelajaran melalui radio. Repons siswa saat mendengarkan radio dibandingkan belajar melalui WhatsApp, jauh lebih baik. Sebelum ada radio, orang tua tidak dapat mengerti dan mengontrol tugas sekolah anak-anak di WhatsApp. Sekarang para siswa lebih mengerti karena diumumkan melalui radio sehingga bisa mengingatkan anak-anak mereka.

(Guru, laki-laki)

Mereka juga melihat radio dapat terus dimanfaatkan bahkan setelah PJJ tidak dilakukan lagi saat pandemi sudah usai.

Kita tetap memerlukan radio ini bahkan setelah pandemi selesai, karena materi pelajaran yang disampaikan di kelas itu banyak dan waktu dirasa kurang. Kita bisa memberikan materi tambahan melalui radio. Radio dapat meningkatkan pemahaman siswa dan meningkatkan pengetahuan mereka.

(Guru, laki-laki)

Setelah mengudara sejak bulan September 2020, radio darurat siaga COVID-19 ini didukung oleh anggota masyarakat yang merasa memiliki atas program ini. Program ini didukung oleh setiap tingkatan masyarakat dan pemerintahan dari desa, kecamatan, kabupaten, sampai tingkat nasional. Inisiatif ini misalnya, juga diapresiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Tantangan dan Peluang

Dalam penyelenggaraan Radio Darurat Siaga COVID-19, tantangan utama yang ditemui adalah perizinan siaran. Perizinan yang diajukan oleh kedua radio ini adalah radio darurat mengingat inisiatif ini dilakukan dalam rangka memecahkan masalah kebencanaan. Namun demikian, dalam pengajuan perizinan ini mengalami hambatan, misalnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat

pihak Balai Monitoring menyatakan bahwa tidak mengenal radio darurat untuk bencana non-alam. Demikian halnya Balai Monitoring Sulawesi Selatan juga menganggap bahwa di Pulau Sabutung, COVID-19 tidak menyebabkan kendala yang berarti sehingga tidak perlu ada dukungan yang spesifik untuk PJJ, meskipun terdapat perubahan besar dalam proses pembelajaran.

Selain itu, hambatan juga terjadi pada frekuensi radio. Frekuensi radio Sipirennu mengganggu frekuensi penerbangan di sekitar pelabuhan udara Makassar. Beberapa langkah solusi diambil untuk mengatasi hal tersebut. *Pertama*, merekam siaran dan mengunggah ke aplikasi siniar (*podcast*). Selama tidak mendapatkan izin, siaran radio diganti dengan cara merekam siaran dan mengunggah ke dalam aplikasi siniar (*podcast*). Siaran ini disebarluaskan melalui kunjungan di titik kumpul siswa antara 4-6 orang siswa. Di Pulau Sabutung, rekaman siniar diputarkan di lokasi yang strategis dengan penguat suara. Keterbatasan ini membuat proses siaran dan penyebarluasan menjadi lebih lama, namun mempermudah anak-anak mendengarkan kembali rekaman proses pembelajaran jika dibutuhkan. Sisi positif dari keterbatasan ini adalah munculnya solidaritas antarsiswa untuk saling membantu mengatasi berbagai keterbatasan. Salah satu contoh, seorang siswa meminta kepada ibunya untuk membelikan penguat suara agar empat orang temannya dapat berkumpul di rumahnya untuk belajar bersama.



Gambar 3 Belajar Bersama dalam Kelompok Kecil.
Sumber foto: Institut KAPAL Perempuan.

Kedua, eksplorasi dukungan dari lembaga terkait. Dalam hal ini, Institut KAPAL Perempuan berkonsultasi dengan DAP dan bekerja sama dengan Kemkominfo untuk memperoleh solusi perizinan penyiaran atau pemilihan frekuensi yang berbeda. Diskusi dengan Kemkominfo telah dimulai untuk melanjutkan inisiatif Radio Darurat Siaga COVID-19 di kedua wilayah tersebut.

Program Internet dan Radio Komunitas: Pengembangan ke Depan

Kedua program rintisan DAP, yaitu Internet Komunitas dan Radio Darurat Siaga COVID-19 telah menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat melalui konektivitas. Prinsip-prinsip ini relevan untuk masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, termasuk masyarakat adat (Internet Society, 2018). Prinsip-prinsip yang diterapkan mencakup empat hal. Pertama, konsultasi. Inisiatif yang dimulai dari masyarakat akan memenuhi kebutuhan dan menjawab permasalahan yang ditemui oleh masyarakat tersebut sehingga program yang diimplementasikan lebih bermakna, relevan, dan sesuai dengan budaya setempat. Dalam konteks ini, masyarakat Kasepuhan, Ciptagelar, Pulau Sabutung, dan Desa Sukadana mendapatkan dukungan yang tepat dalam mengatasi tantangan dalam PJJ di masa pandemi.

Kedua, advokasi. Upaya ini perlu didukung oleh berbagai lembaga seperti Common Room dan Institut KAPAL Perempuan, serta masyarakat yang berkepentingan dalam pengembangan komunitasnya.

Ketiga, pengembangan kapasitas. Kedua program rintisan ini mendorong pengembangan kapasitas masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan edukasi, khususnya berkenaan dengan pemanfaatan teknologi untuk PJJ dan penyampaian konten untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Keempat, kemitraan strategis. Common Room dan Institut KAPAL Perempuan telah bekerja sama dan terus memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga terkait seperti kementerian di tingkat nasional (Kemkominfo dan KPPPA), dan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten. Program internet komunitas juga memperkuat “komunitas praktik” melalui kegiatan *Rural ICT Camp*.

Atas berbagai temuan di atas, tulisan ini menyarankan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan bagi program di masa depan. *Pertama*, para pengambil kebijakan perlu untuk melakukan replikasi atau adaptasi pendekatan kegiatan-kegiatan dalam kedua program rintisan. Kedua

program ini dapat menjadi model atau referensi untuk diterapkan di wilayah tertinggal atau wilayah terpencil lain di Indonesia. *Kedua*, Common Room dan Institut KAPAL Perempuan perlu memastikan keberlanjutan program di daerah program rintisan dan melanjutkan diseminasi yang memungkinkan replikasi atau adaptasi program oleh pihak lain yang tertarik atau berkepentingan. Dalam hal ini, perlu juga untuk bersinergi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek untuk memperoleh akses ke sumber- sumber belajar yang dapat memperkaya pengembangan konten PJJ melalui pemberdayaan *tech hub* dan program siaran radio.

Daftar Pustaka

- APJII. (2020). *Laporan Survei Internet APJII 2019 – 2020 (Q2)*. Jakarta: APJII.
- BPS. (2021). *Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-24 Tahun Dengan Keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK) Menurut Provinsi (Persen), 2018-2020*. BPS: Jakarta.
- Common Room Networks Foundation. (Producers). (2020) *Platform Jaringan Komunitas Masyarakat Adat dan Pusat Teknologi untuk Inovasi di Daerah Pedesaan [Video]*. Bandung: Transmission.
- Common Room Networks Foundation. (2020b, November) *Digital Access Programme: Indigenous Community Networks Platform & Tech Hub for Rural Innovation*. Proposal document shared at virtual meeting of Digital Access Programme.
- Institut KAPAL Perempuan. (2020, November) *Pengembangan Radio Komunitas Perempuan untuk Memperkecil Resiko Pandemi COVID-19 terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Terpencil*. Inception meeting presentation presented at the virtual meeting of Institut KAPAL Perempuan.
- Internet Society (2018). *Empowerment through Connectivity. 2018 Indigenous Connectivity Summit Community Report*. Diunduh dari: https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2019/01/2018-Indigenous-Connectivity-Summit-Community-Report_EN.pdf
- 42.000 siswa Jabar Tak Dapat Layanan Internet*. (2020, 17 Juli). Pikiran Rakyat, hal. 1.



Relawan Literasi (RELASI)

Program Kolaborasi untuk Mendukung Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19

Relawan Literasi (RELASI) Program Kolaborasi untuk Mendukung Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19

~•~

Lanny Octavia, Rasita Ekawati Purba, Mia Amalia

Rendahnya Tingkat Literasi dan Potensi *Learning Loss* saat Pandemi di NTB

Sebelum pandemi COVID-19 terjadi, hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) atau *Indonesian National Assesment Program* (INAP) menunjukkan bahwa tingkat literasi siswa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berada pada urutan ke-25 dari 34 provinsi se-Indonesia atau di bawah rata-rata nasional (Puspendik, 2016). Data ini sejalan dengan hasil kajian Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca), yang menunjukkan bahwa NTB merupakan salah satu di antara tiga provinsi se-Indonesia dengan aktivitas literasi terendah di samping Nusa Tenggara Timur dan Papua (Solihin dkk., 2019).

Sedangkan di tataran global, survei yang dilakukan *Programme for International Student Assessment* (PISA) menemukan bahwa Indonesia sendiri berada di antara sepuluh negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah (OECD, 2019). Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional di sela pemaparannya mengenai hasil kajian Indeks Kegemaran Membaca¹, persoalan literasi semacam ini sedikit banyak nantinya akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari rendahnya daya saing, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inovasi, pendapatan per kapita, hingga Indeks Kebahagiaan Warga.

1 <https://www.kompas.com/edu/read/2021/02/02/203054871/kepala-perpusnas-indeks-kegemaran-baca-indonesia-2020-masuk-kategori-sedang?page=all>

Kondisi tersebut diperkirakan semakin memburuk pada saat pandemi COVID-19, di mana penutupan sekolah berdampak pada hasil belajar siswa. Selain adanya risiko putus sekolah karena pandemi, penelitian menemukan bahwa penutupan sekolah dapat mengakibatkan kehilangan pembelajaran (*learning loss*). Di negara maju seperti Belgia, studi menunjukkan bahwa siswa angkatan 2020 mengalami kehilangan pembelajaran signifikan dalam kemampuan membaca, di mana siswa yang kurang beruntung mengalami tingkat kehilangan pembelajaran yang lebih besar (Maldonado & De Witte, 2020). Di Indonesia, studi World Bank (2020) memprediksi turunnya nilai PISA siswa Indonesia dalam hal membaca sebesar 21 poin, dikarenakan 8 bulan penutupan sekolah sejak pertengahan Maret sampai November 2020.

Bahkan, selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dilaksanakan pun studi *Save The Children* (2020) menunjukkan adanya penurunan kualitas belajar, di mana 73% anak mengatakan bahwa mereka lebih sedikit belajar dibandingkan kondisi normal, dan 1% anak mengatakan tidak belajar apapun. Hasil survei INOVASI (2020) mengenai implementasi kebijakan belajar dari rumah di empat provinsi mitra termasuk NTB juga menunjukkan bahwa menurut orang tua, hanya 26% siswa yang sudah melaksanakan PJJ dengan menggunakan media belajar daring dan masih ada 6% siswa yang sama sekali tidak mendapatkan bahan belajar dari guru. Di lain sisi, 64% guru menganggap beban mengajar menjadi lebih berat selama PJJ, sedangkan 60% guru ragu-ragu dan tidak setuju untuk mengatakan belajar dari rumah telah terlaksana dengan baik antara lain dikarenakan adanya keraguan guru akan kemampuan orang tua mendampingi anak belajar dan tidak adanya fasilitas pendukung untuk PJJ di rumah.

Dalam kasus NTB, krisis pendidikan literasi sudah disinyalir oleh studi Indeks Alibaca sejak sebelum pandemi (2019), yang ditandai dengan tingginya tingkat buta aksara dan rendahnya rata-rata lama sekolah, serta rendahnya persentase penduduk yang memanfaatkan sarana digital seperti menggunakan komputer dan mengakses internet. Tidak mengherankan ketika PJJ diberlakukan, kegiatan belajar mengajar di NTB belum terlaksana dengan optimal. Hal ini terjadi tidak hanya karena minimnya fasilitas pendukung seperti gawai dan internet, namun juga akibat keterbatasan kemampuan orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah (INOVASI, 2020). Temuan ini sejalan dengan identifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi NTB, di mana di satu sisi sekolah mengalami kesulitan melaksanakan PJJ, sementara di sisi lain siswa mengalami

kesulitan memahami pelajaran dan orang tua memiliki keterbatasan dalam mendampingi anak mereka belajar dari rumah.

Sehubungan dengan tantangan dan konteks spesifik di NTB tersebut, maka diperlukan pendekatan langsung untuk mencegah dan meminimalkan risiko kehilangan pembelajaran yang dialami siswa akibat pandemi. Kehilangan pembelajaran di sini dapat berarti siswa mengalami kehilangan kompetensi yang telah dipelajari sebelumnya (Cooper et al., 1996), menurunnya hasil belajar sebagai dampak dari kegagalannya menguasai pembelajaran di tingkat sebelumnya (Andrabi, Daniels, Das, 2020), atau tidak mampu mencapai target pembelajaran yang diharapkan tercapai pada jenjang atau tingkatan tertentu (McKinsey, 2021).

Hal yang perlu dicermati dari survei INOVASI (2021) adalah adanya indikasi terjadinya kehilangan pembelajaran, khususnya terkait literasi, di sekolah mitra INOVASI termasuk di Kabupaten Bima, NTB. Dalam kondisi normal, terdapat peningkatan nilai dari anak kelas 1 ke kelas 2 sebesar 1.17 standar deviasi. Selama pandemi, peningkatan nilai anak kelas 1 ke kelas 2 hanya sebesar 0.70 standar deviasi, yang mengindikasikan terjadinya *learning loss* sebesar 0.47 standar deviasi atau jika dikonversi maka kehilangan ini setara dengan 6 bulan progres belajar.

Sementara analisis RISE (2021) terhadap hasil penilaian belajar siswa di Bukittinggi, ternyata justru menunjukkan tidak adanya kehilangan pembelajaran. Kondisi ini diperkirakan berhubungan dengan tingkat pendidikan serta keterlibatan orang tua dalam pembelajaran yang kuat selama penutupan sekolah. Hal ini membuktikan bahwa dukungan bagi orang tua selama proses PJJ sangat krusial, khususnya dalam proses pencegahan risiko kehilangan pembelajaran bagi para siswa di wilayah NTB.

Indikasi di atas sejalan dengan hasil studi Stringer & Keys (2020) yang menunjukkan bahwa faktor keluarga berpengaruh signifikan pada kemampuan siswa selama penutupan sekolah dan pembelajaran *online*, di mana siswa sebetulnya dapat memperoleh manfaat dari *home schooling* sekiranya orang tua memiliki tingkat pendidikan dan motivasi yang lebih tinggi daripada guru dalam “berinvestasi” pada anak mereka. Oleh karena itu, di samping pengembangan berbagai ragam moda pembelajaran jarak jauh yang inklusif dengan fokus pada keterampilan dasar siswa, penguatan komunikasi antara guru, orang tua dan siswa pun menjadi salah satu rekomendasi utama untuk memitigasi dampak penutupan sekolah akibat pandemi COVID-19 (Conto et al., 2020).

Di antara praktik baik yang teridentifikasi efektif memulihkan kehilangan pembelajaran selama pandemi adalah program bimbingan secara satu persatu (*one on one*), di mana intervensi berupa beberapa kali pendampingan dalam seminggu untuk siswa yang kesulitan dalam hal membaca dan matematika menunjukkan efek peningkatan terbesar (Hanover Research, 2020). Kegiatan tersebut dapat diselenggarakan dengan memperluas kemitraan masyarakat, melalui pemanfaatan sumber daya bersama dan sukarelawan yang terlatih dalam program layanan tersebut. Di NTB, praktik baik semacam ini telah dilakukan berdasarkan kolaborasi antarelemen masyarakat, melalui pendampingan dan dukungan khusus pada siswa, orang tua dan guru sejak awal mula pandemi melalui kegiatan Relawan Literasi (RELASI).

Tumbuhnya Inisiatif Kolaborasi Antarelemen Masyarakat di NTB

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan krisis di berbagai lini. Selain dampak utama pada aspek kesehatan, dampak besar juga terasa di bidang lain, seperti ekonomi, sosial, dan pendidikan. Pandemi COVID-19 telah memaksa semua pihak untuk menerapkan cara hidup baru, termasuk dalam layanan pendidikan. Pandemi memaksa keterlibatan berbagai pihak dalam praktik-praktik pembelajaran. Retorika bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, menemukan perwujudannya dalam konteks pandemi. Mode baru pembelajaran yang didorong oleh pandemi adalah Belajar dari Rumah (BDR). Praktik ini membutuhkan peran dari keluarga yang lebih besar, baik dalam hal menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, maupun pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Pada masa pandemi, komunikasi dengan guru menjadi lebih penting peranannya dibandingkan di masa normal.

Praktik baru ini tentu tidak mudah dijalankan, mengingat variasi kondisi status sosial, ekonomi, dan latar belakang pendidikan masing-masing keluarga. Keterbatasan ini bisa diprediksi akan menjadi lebih berat dialami oleh keluarga-keluarga dengan latar belakang ekonomi dan pendidikan terbatas, serta mereka yang berada di wilayah-wilayah yang relatif sulit terjangkau akses internet maupun bentuk komunikasi lainnya.

Permasalahan ini tidak luput dialami juga oleh masyarakat yang ada di NTB. Namun, elemen masyarakat tidak berpangku tangan dan mencoba mengatasi masalah yang dihadapi dengan mendorong keterlibatan berbagai pihak untuk mengatasi keterbatasan pembelajaran dari rumah. Aktor-aktor lokal di NTB,

didukung oleh Program INOVASI, mendorong partisipasi beberapa pihak untuk mengatasi risiko hilangnya hasil pembelajaran karena terdampak pandemi dan memastikan anak-anak tetap belajar. Inisiatif ini melahirkan Program Relawan Literasi yang didasari pada keprihatinan akan rendahnya kemampuan literasi di wilayah ini dan pandemi COVID-19 dikhawatirkan memperburuk keadaan.

Lembaga-lembaga lokal, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kemudian bergerak dengan memobilisasi relawan-relawan agar mereka membantu pembelajaran bagi masyarakat di sekitar tempat mereka tinggal. Selain menggerakkan para relawan, upaya yang dilakukan adalah membangun kolaborasi dengan lembaga pencetak guru atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan unsur organisasi masyarakat. LPTK ini tergabung dalam Asosiasi Dosen LPTK NTB, sementara organisasi masyarakat tergabung dalam Konsorsium NTB Membaca (KNTBM). Pemangku kepentingan di NTB pun menyambut positif dan mendukung inisiatif ini.

Konsorsium ini bersama dengan Asosiasi Dosen LPTK bekerja sama untuk memastikan bahwa anak-anak bisa tetap belajar dan hasil belajar mereka bisa dipertahankan dan juga ditingkatkan. Gagasan Program Relawan Literasi, yang kemudian disingkat dengan RELASI, dilaksanakan dengan dukungan teknis dari Program INOVASI.

Elemen utama dari program RELASI adalah relawan yang dimobilisasi untuk membantu keluarga dan anak-anak yang mengalami kesulitan belajar di masa pandemi. Relawan ini turun langsung untuk mendampingi anak-anak, terutama anak yang sulit atau bahkan tidak bisa dijangkau oleh guru. Sebelum mereka menjalankan misinya, tentu diperlukan pembekalan secara teknis agar para relawan memiliki kemampuan untuk menjalankan perannya. Meskipun sebagian relawan adalah calon guru, pembelajaran di masa pandemi sangat berbeda. "Rumah menjadi ruang kelas dan biasanya lingkungan yang mendukung belajar terbatas" (Barron dkk., 2021). Barron dkk. lebih lanjut menekankan dua hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, para guru yang sudah berpengalaman sekalipun harus beradaptasi, terutama terkait pedagogi yang diterapkan, mengingat pembelajaran tatap muka tidak sama dengan pembelajaran jarak jauh. *Kedua*, guru harus bisa memastikan jalinan komunikasi dengan siswa.

Pembekalan teknis diberikan oleh Program INOVASI yang telah memiliki pengalaman dalam mendukung sekolah meningkatkan kapasitas guru dalam menyampaikan pembelajaran literasi dan numerasi dasar. Sesuai dengan anjuran

dari Kemendikbud, pembelajaran di masa pandemi ditekankan pada kemampuan esensial. Detail terkait pembekalan ini dijabarkan di subbab selanjutnya.

Mobilisasi pihak-pihak nonpemerintah pada konteks pandemi tidak bisa dihindari. Beberapa studi sudah mengidentifikasi berbagai kesenjangan yang terjadi ketika pembelajaran menggunakan mode belajar dari rumah atau belajar jarak jauh. Menyerahkan sepenuhnya penanganan pembelajaran dengan berbagai kesenjangan ini kepada pemerintah saja akan menyebabkan kesenjangan semakin lebar, mengingat pemerintah juga menghadapi berbagai keterbatasan. University of Sunderland, mengutip salah satu pakar pendidikan, menyebutkan bahwa calon guru atau mahasiswa LPTK, bisa memainkan peran kunci dalam membantu sekolah yang harus melaksanakan proses belajar dan mengajar dalam situasi yang tidak menentu. Apalagi ketika sekolah harus menghadapi semakin terbatasnya jumlah guru/tenaga kependidikan apabila ada yang terdampak COVID-19 dan tidak bisa aktif bekerja.²

Bagi para mahasiswa LPTK, program RELASI memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas mereka sebagai calon guru. Mereka mendapatkan pengalaman praktik mengajar dan kemampuan beradaptasi dengan konteks lokal yang mereka hadapi dalam memberikan layanan kepada anak-anak yang mereka dampingi. Di samping itu, mereka mendapatkan kesempatan untuk langsung menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah, di samping melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan dukungan. Keuntungan lainnya adalah bahwa kegiatan ini dilakukan melalui berbagai skema, seperti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pengenalan Lapangan Persekolahan (PPL), atau Kuliah Kerja Partisipatif (KKP). Dengan demikian, kegiatan ini pun berkontribusi pada capaian akademik mereka.

Sementara itu mobilisasi unsur masyarakat, yaitu mereka yang tergabung dalam organisasi berbasis masyarakat maupun lembaga nonpemerintah (LSM) juga menjadi praktik yang ditemukan di berbagai negara. UNESCO misalnya mendokumentasikan berbagai praktik baik yang dijalankan oleh LSM di berbagai negara.³ Berbagai praktik baik ini ternyata tidak hanya menghasilkan solusi praktis, namun juga menjadi inspirasi bagi upaya untuk memperbaiki pendidikan di jangka panjang dan tidak terbatas hanya pada konteks pandemi.

2 <https://www.sunderland.ac.uk/more/news/story/university-professors-key-role-in-boosting-teacher-training-during-pandemic-1394>

3 <https://www.soroptimistinternational.org/solidarity-of-ngos-facing-the-pandemic-education/>

Program RELASI untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, program RELASI dilaksanakan untuk menjawab tantangan yang muncul selama PJJ. Melalui program ini, relawan memberikan pendampingan secara langsung kepada siswa yang selama ini terkendala dalam PJJ. Secara spesifik, program ini ditujukan agar relawan memiliki kemampuan dalam melakukan pendampingan pembelajaran literasi terhadap anak dengan berkoordinasi bersama orang tua dan guru, mengidentifikasi kesulitan belajar siswa atau kebutuhan belajar lainnya, melakukan penilaian kemampuan membaca siswa dan memanfaatkan hasilnya, serta meningkatkan kemampuan literasi anak secara inklusif.

Program RELASI dilaksanakan sebanyak dua tahap. Tahap pertama dilakukan pada Agustus-November 2020, dengan melibatkan 5 LPTK dan 5 LSM. Tahap kedua dilanjutkan pada Maret-Juni 2021 dengan melibatkan 13 LPTK dan 11 LSM. Sebanyak 128 relawan di tahap pertama dan 507 relawan di tahap kedua mendapat pembekalan mengenai materi dan metode pembelajaran dari INOVASI. Pada tahap pertama, Program RELASI dilakukan secara daring, sedangkan di tahap kedua, program dilakukan secara campuran (daring untuk relawan LPTK dikarenakan banyaknya jumlah mahasiswa pendaftar yang tersebar di seluruh wilayah NTB sehingga sulit untuk dikumpulkan di satu tempat, dan luring untuk relawan LSM karena berasal dari kalangan masyarakat umum yang belum terbiasa dengan sistem pembelajaran daring).

Setidaknya terdapat sembilan materi yang disampaikan pada tahap pertama program, yaitu: (1) kesukarelawanan dan perlindungan anak; (2) *formative assessment*; (3) berbicara dengan orang tua dan guru; (4) *growth mindset*; (5) pendidikan inklusif disabilitas; (6) apa dan mengapa literasi; (7) kesadaran bunyi dan membaca kata; (8) membaca lancar, pemahaman, dan Higher Order Thinking Skills (HOTS); serta (9) buku dan bahan bacaan lainnya. Pada tahap kedua, materi program lebih diringkas dan disederhanakan menjadi 6 unit, mencakup 5 unit pertama, sedangkan 4 unit terakhir diintegrasikan menjadi 1 unit terkait pembelajaran membaca sesuai level kemampuan siswa. *Formative assessment* yang tadinya mencakup lima level kemampuan membaca (huruf, suku kata, kata, membaca lancar, membaca pemahaman) juga digantikan dengan tes kemampuan membaca yang mengelompokkan siswa hanya ke dalam tiga kelompok kemampuan membaca (pemula dan huruf, kata dan paragraf, cerita). Format terakhir ini diadaptasi dari alat penilaian kemampuan membaca

yang dikembangkan oleh Pratham Education Foundation, salah satu organisasi nonpemerintah di India melalui pendekatan *Teaching at the Right Level (TaRL)*.

Sebelum melakukan pendampingan, relawan mengidentifikasi siswa yang akan didampingi berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan masing-masing. Di tahap pertama, relawan mengidentifikasi siswa yang tidak dapat belajar selama masa pandemi di sekitar tempat tinggal mereka akibat terdampak penutupan sekolah. Kemudian, relawan didorong untuk berkoordinasi dengan sekolah/guru dalam mengidentifikasi siswa yang belum dapat membaca dan menulis yang dituangkan dalam daftar periksa (*checklist*), di mana semakin banyak indikator yang terisi, maka semakin tinggi prioritas anak tersebut untuk mendapatkan pendampingan. Jadi, selain identifikasi kemampuan baca tulis melalui *formative assesment*, relawan juga mengidentifikasi kondisi latar belakang kesulitan belajar yang dialami anak, seperti: anak membantu pekerjaan orang tua di rumah, anak bekerja, penyandang disabilitas/ kesulitan belajar, anak dengan orang tua/wali tidak bisa membaca, orang tua pekerja migran, orang tua sangat sibuk, kemiskinan, dan menikah/ hamil di usia dini.

Intensitas pendampingan yang dilakukan pada anak sekitar 2-3 kali dalam satu minggu. Dalam satu kali pendampingan, durasi waktu yang digunakan adalah 60 menit pada setiap sesinya dengan materi modul pendampingan. Namun pada praktiknya, durasi tersebut dapat lebih singkat atau panjang sesuai ketersediaan waktu, kebutuhan materi pembelajaran, minat belajar, dan jumlah anak yang didampingi. Dalam teknisnya, relawan mengunjungi rumah siswa secara individual atau mengelompokkan siswa dalam satu tempat antara di rumah atau sekolah.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan implementasi pembekalan dan pendampingan (penerapan materi) yang dilakukan. Di tahap pertama, relawan melakukan praktik pendampingan di sela-sela pemberian materi secara bertahap setiap minggunya selama 10 pekan. Namun, dengan pola ini, sebagian relawan tidak dapat tuntas mengikuti pembekalan karena terbatasnya akses komunikasi (sinyal dan kuota internet) di daerah terpencil serta kesibukan lain yang dimiliki oleh para relawan.

Hal ini menjadi pertimbangan penyesuaian program di tahap kedua, di mana relawan melakukan pendampingan setelah semua materi selesai diberikan secara langsung selama 3 hari di awal program. Relawan kemudian melaporkan hasil pendampingan dan melakukan refleksi secara berkala bersama koordinator lembaga dan INOVASI.

Hasil *monitoring* awal oleh INOVASI menunjukkan bahwa program RELASI direspons secara positif oleh pemangku kepentingan karena dianggap dapat menjawab permasalahan yang dihadapi guru, siswa dan orang tua saat pandemi, serta terindikasi mampu meningkatkan kemampuan literasi siswa. Hal tersebut memicu minat yang lebih besar dari Asosiasi Dosen LPTK dan KNTBM sehingga program dilanjutkan dengan melibatkan lebih banyak LPTK dan LSM. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, *monitoring* lanjutan dilakukan untuk memahami berbagai perubahan yang terjadi sebagai hasil dari pelaksanaan program, serta mendokumentasikan dan menarik pembelajaran dari program RELASI di NTB.

Secara umum, relawan yang diwawancarai dalam *monitoring* lanjutan mengatakan banyak mendapatkan tambahan pengetahuan dari proses pembekalan. Mereka menganggap materi yang diberikan dalam pembekalan lengkap dan relevan dengan kebutuhan di lapangan, di mana materi terkait penilaian tingkat kemampuan membaca anak dianggap yang paling bermanfaat karena belum pernah didapatkan relawan. Materi ini menjadi bekal utama dalam pelaksanaan pendampingan karena fleksibel dan sederhana, serta membantu relawan untuk menentukan strategi pembelajaran yang sesuai level siswa dampingan.

Yang paling bermanfaat menurut saya, ya tes formatif. Karena memang tes formatif ini sangat-sangat diperlukan. Dari sana kita bisa menyusun strategi tindakan seperti apa sih seharusnya yang dikasih ke anak dengan kemampuan seperti ini dan lain sebagainya.

(Relawan, Laki-laki, Yayasan LIDI)

Namun demikian, kondisi di lapangan menuntut relawan untuk menyesuaikan materi yang didapatkan. Di awal pendampingan, merangkul anak mengikuti proses pendampingan merupakan tantangan karena mereka sudah lama tidak bersekolah, atau bersekolah tetapi mengalami banyak kendala, sehingga lebih ingin bermain daripada belajar. Sehingga, relawan perlu mencoba berbagai strategi untuk membangun minat belajar anak dengan menggunakan permainan ataupun media digital, seperti film atau aplikasi belajar membaca. Ada relawan yang tidak memulai pendampingan dengan membacakan cerita dikarenakan anak tidak tertarik, lalu membuka pembelajaran dengan cara menonton film bersama kemudian mendiskusikan isi cerita.

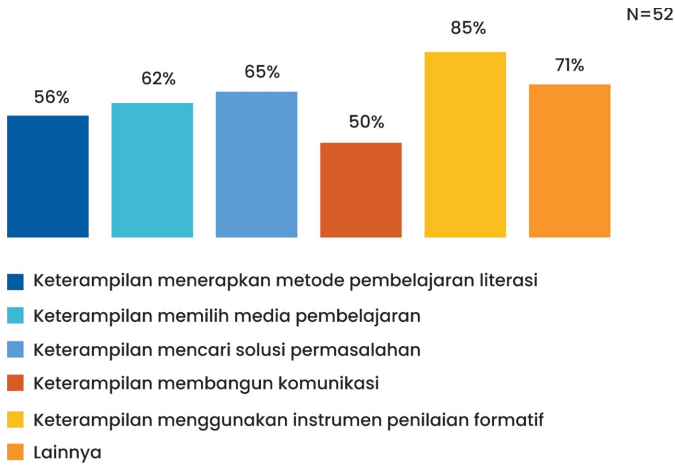
Kalau menurutku, untuk cerita (dari Youtube) itu ya untuk mengalihkan, misalkan dia mau main, jadi bisa narik dia untuk nggak jadi main sama teman-temannya, nggak main game online. Kalau untuk aplikasinya (MARBEL-Mari Belajar Sambil Bermain), menurut saya itu sangat efektif. Saya itu sampai pernah sampai belajar sekitar 2 jam-an pakai itu, dan dia setelah selesai, terus dia bilang gini, 'Tbu, kita nggak jadi belajar?' (Anaknya) nggak merasa belajar.

(Relawan, Perempuan, STKIP Paracendekia NW Sumbawa)

Pada praktiknya, sebagian relawan tidak hanya fokus pada pembelajaran literasi, namun juga materi lain, seperti numerasi atau pelajaran lain yang dibutuhkan siswa dampingan. Hal ini kemudian menjadi salah satu pendorong agar pendampingan dapat terus dilakukan meskipun anak sudah lancar membaca. Relawan disarankan untuk mendampingi tidak lebih dari dua anak untuk menjaga protokol kesehatan, meskipun memungkinkan jika relawan perlu mendampingi lebih banyak anak karena adanya permintaan di lapangan. Tidak hanya siswa kelas rendah, ada relawan yang juga melakukan pendampingan belajar pada siswa kelas tinggi yang membutuhkan.

Dapat dikatakan bahwa para relawan tidak saja meningkat pengetahuannya terkait metode pembelajaran literasi secara teoretis, namun juga terkait implementasinya di lapangan. Beberapa relawan LPTK mengatakan, mereka berkesempatan mempraktikkan cara mengajar dan menerapkan ilmu perkuliahan melalui program RELASI. Terkait dengan kegiatan PPL/KKN, jika dulunya mahasiswa dibebaskan untuk menyampaikan pembelajaran apa saja, kini mereka memiliki acuan yang jelas dan lebih memahami adanya tahapan dalam proses belajar membaca.

Sebagian besar relawan juga merasakan perubahan keterampilan dalam mengelola pembelajaran (Grafik 1). Hasil survei terhadap persepsi responden menunjukkan relawan mengalami peningkatan keterampilan dalam penggunaan instrumen penilaian formatif (85%), pemilihan media pembelajaran yang tepat (62%), dan penerapan metode pembelajaran literasi (56%). Keterampilan lain yang diasah relawan dalam program RELASI adalah penyelesaian masalah di lapangan (65%). Praktik pendampingan telah mendorong relawan menjadi peka terhadap permasalahan di lapangan serta berstrategi mencari solusi sesuai konteks yang ada. Salah satunya, upaya yang dilakukan oleh seorang relawan dengan membuat kartu kata dan menaruh dua huruf konsonan/vokal yang masih belum dikuasai oleh siswa di awal, pertengahan, dan akhir kata.



Grafik 1 Jenis Perubahan yang Dirasakan oleh Relawan
Sumber: Hasil Survei *Monitoring Lanjutan* Program RELASI NTB, 2021

Keterampilan berkomunikasi juga dianggap meningkat oleh 50% relawan, di mana mereka mampu menjalin hubungan baik dengan orang tua dari siswa dampingan dan merasa lebih percaya diri ketika menghadapi masyarakat umum. Peningkatan keterampilan tersebut pada akhirnya menimbulkan keyakinan akan kemampuan diri sendiri untuk memberikan pengajaran, termasuk bagi relawan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan guru.

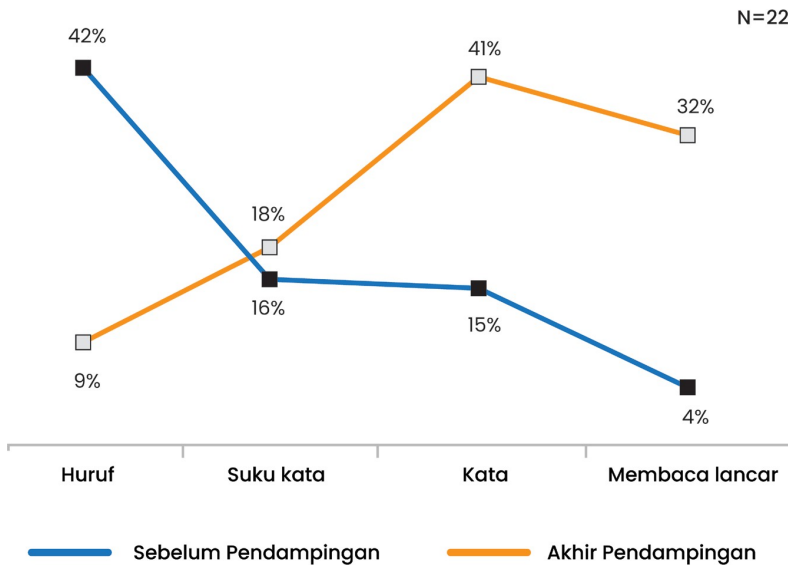
Semenjak jadi relawan, manfaat yang saya dapatkan, pertama, saya lebih berani berkomunikasi dan berbicara dengan adik-adik ataupun orang tua mereka, pun masyarakat sekitar. Yang semulanya masih kaku dan malu, sekarang ndak lagi. Jadi makin berani public speaking di depan umum. Kemudian yang kedua, saya awalnya bukan guru dan sekarang, alhamdulillah, sedang belajar bagaimana caranya menjadi guru dalam mendidik adik-adik kami untuk belajar. Jadi metode-metode guru PAUD, guru-guru SD kami pelajari step-by-step. Nah kemudian manfaat lain yang kami hadapi adalah kami sangat bersyukur dengan adanya kegiatan bimbingan ini karena kami dapatkan banyak teman, banyak keluarga baru seperti guru. Orang tua mereka juga kami anggap keluarga.

(Relawan, Laki-laki, Relawan Literasi Desa Kesik)

Perubahan pada relawan ini dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya motivasi dan keinginan mereka untuk mengatasi permasalahan pendidikan di lingkungan sekitar, selain memenuhi kewajiban mata kuliah bagi mahasiswa LPTK. Relawan seperti inilah yang cenderung melanjutkan proses pendampingan

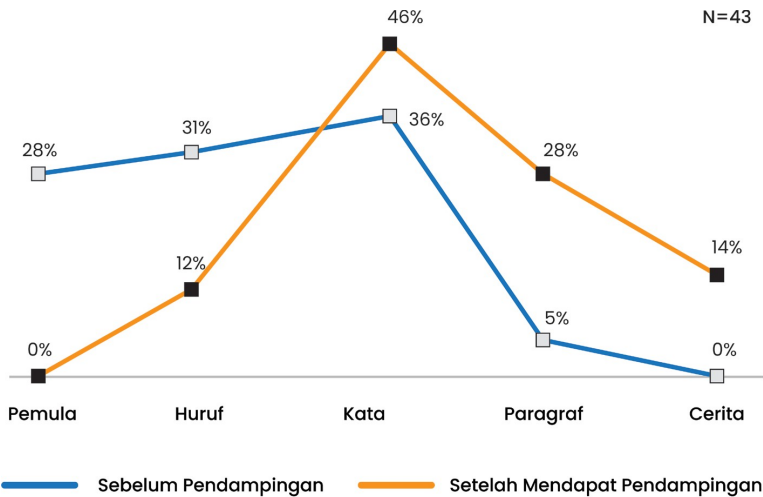
di luar jangka waktu program. Selain dorongan internal, dukungan koordinator program juga memengaruhi perubahan kapasitas relawan. Dukungan tersebut termasuk penyediaan referensi dan narasumber yang dibutuhkan, sehingga relawan berkomitmen untuk terus melanjutkan kegiatan terutama di LSM yang lebih banyak didasari oleh sifat kesukarelawan. Ada juga LSM yang telah menjalin ikatan kuat dengan anggotanya sehingga mereka memiliki kesadaran untuk menjalankan kegiatan berdasarkan komitmen terhadap siswa dampingan.

Adapun di tingkat siswa dampingan, hasil *formative assesment* yang dilakukan relawan pada tahap pertama menunjukkan adanya peningkatan kemampuan membaca siswa (Grafik 2). Sebelum pendampingan, hanya ada 4% anak yang berada di level membaca lancar. Namun sesudah pendampingan, terdapat 32% anak pada level ini, yang menunjukkan peningkatan sebesar 7 kali lipat. Sebelum pendampingan, 42% anak hanya mampu mengenal huruf, namun setelah pendampingan, hanya 9% anak yang masih berada di level tersebut, sementara sisanya meningkat ke level berikutnya. Di level suku kata dan kata, secara berurutan terdapat peningkatan jumlah anak dari 16% menjadi 18%, dan dari 15% menjadi 41% yang juga merefleksikan adanya peningkatan jumlah anak ke level yang lebih tinggi.



Grafik 2 Perubahan Jumlah Anak untuk Setiap Level Kemampuan Membaca Sebelum dan Sesudah Pendampingan pada Tahap Pertama
Sumber: Hasil Survei *Monitoring* Lanjutan Program RELASI NTB,2021

Di tahap kedua, progres yang dicapai juga menunjukkan adanya peningkatan kemampuan membaca siswa. Sebelum pendampingan, tidak ada anak yang berada di level cerita. Namun pada saat *monitoring* dilakukan, yaitu sekitar 3-8 minggu pendampingan, terdapat 14% anak di level ini. Pada kelompok level pemula (belum mengenal huruf) terjadi kemajuan dari 28% menjadi tidak ada lagi anak yang belum mengenal huruf. Jumlah anak di level kata 36% meningkat menjadi 46%, dan di level paragraf dari 5% menjadi 28%. Perubahan yang terjadi menunjukkan tren peningkatan jumlah anak yang lebih banyak di level yang lebih tinggi.



Grafik 3 Perubahan Jumlah Anak untuk Setiap Level Kemampuan Membaca Sebelum dan Sesudah Pendampingan pada Tahap Pertama
Sumber: Hasil Survei Monitoring Lanjutan Program RELASI NTB, 2021

Selain itu, perubahan kemampuan membaca dan menulis pada anak diakui juga oleh guru maupun orang tua dengan melakukan pengamatan dan tes sederhana kepada anak-anak dampungannya. Dari sini ditemukan adanya perbedaan antara anak yang mendapatkan pendampingan dan tidak, di mana peningkatan kemampuan membaca tersebut pada akhirnya meningkatkan nilai tes anak di sekolah karena adanya pemahaman yang lebih baik terhadap soal-soal yang diberikan.

Kan mulanya dia (anak) takut, tapi (sekarang) saya kasih tulisan dia ke depan, dia (mau) menulis... Alhamdulillah yang tadinya belum bisa membaca, sekarang dikit-dikit dia bisa (membaca)... (Anak) yang didampingi ini lebih aktif, sedangkan yang tidak didampingi dia kurang aktif, terus kalau nulis lama. Mulanya kan

dulu pas sebelum libur dia nulisnya cepat, setelah libur nulisnya lama terus membacanya juga kurang.

(Guru, Perempuan, Dampingan Relawan UIN Mataram)

Alhamdulillah semenjak di-sharing (didampingi) cara bacanya itu juga lebih baik, mana titik komanya itu... Menulisnya itu juga sudah berbeda. Kalau kemarin kan masih kelas satu dia diajarin, itu kan tulisannya masih nggak ada spasinya. (Setelah) diajarin (oleh relawan), alhamdulillah, lebih baik... Banyak, sih pengaruhnya itu, cara bacanya, cara tulisnya, dan kali, pengurangannya juga itu udah bisa, di rumah udah bisa.

(Orang Tua, Perempuan, Dampingan Relawan STKIP Hamzar Lombok Utara)

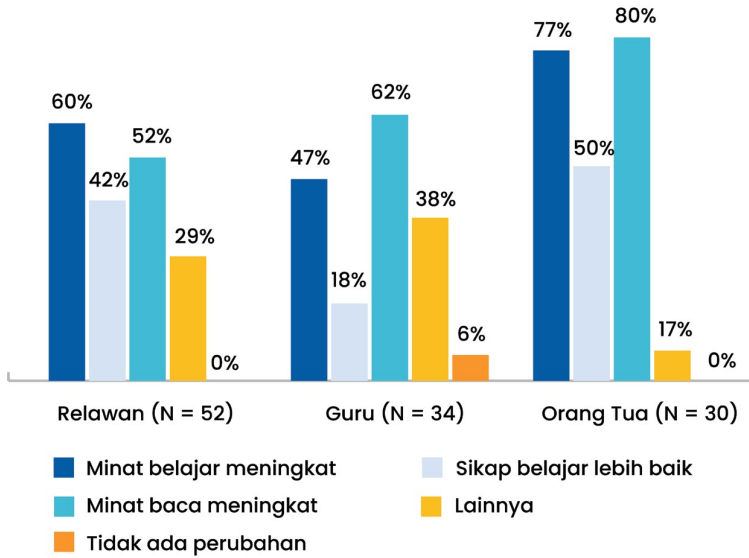
Secara umum, jumlah siswa dampingan laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, yang dapat mencerminkan bahwa persentase jumlah anak laki-laki yang belum bisa membaca secara umum lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Di samping itu, hanya 24% relawan yang mengatakan bahwa anak laki-laki lebih cepat kemajuan hasil belajarnya sedangkan 55% relawan lainnya mengatakan bahwa perempuan mengalami kemajuan hasil belajar lebih cepat dibandingkan laki-laki. Alasannya, antara lain karena anak laki-laki lebih banyak bermain, mudah terpengaruh teman atau terganggu dengan kegiatan lain, sedangkan anak perempuan lebih penurut sehingga mudah didampingi, serius, perhatian, disiplin, dan fokus.

Di luar itu, ada juga beberapa anak yang menurut relawan belum mengalami peningkatan kemampuan membaca dikarenakan beberapa faktor, di antaranya: kurangnya dukungan orang tua, keterbatasan kemampuan anak, ketidakhadiran anak, kecanduan anak terhadap gawai, dan belum dilaksanakannya pendampingan oleh relawan. Salah seorang relawan mengonfirmasi adanya keterbatasan untuk meningkatkan kemampuan membaca anak-anak di salah satu dusun yang sebenarnya menjadi target pendampingan. Lokasinya sangat jauh sehingga intensitas pendampingan minim, dan hal ini diperburuk dengan absennya orang tua karena sebagian besar menjadi pekerja migran.

Di samping kemampuan membaca, sebanyak 60% relawan, 47% guru, dan 77% orang tua mengatakan adanya peningkatan minat belajar anak yang dirasakan sangat membantu di masa pandemi karena siswa sudah lama tidak bersekolah (Grafik 4). Minat baca siswa dampingan juga meningkat setelah mereka bisa membaca dengan lebih lancar sebagaimana disampaikan oleh lebih dari 50% relawan, guru, dan orang tua. Beberapa informan menyatakan mendapati anak mereka menjadilebih sering membaca buku atau berinisiatif membuka buku untuk belajar.

Setelah selesai (pendampingan) baru dia rajin, pegang bukunya, mau diajarin.. (Sebelumnya) gak mau dia, apalagi liburinya panjang selama pandemi kan, belajar ya kadang sekali-kali... Dia (anak) sekarang kalau malam pulang ngaji suka deketin saya, (anak bilang) dengerin mamak ya saya mau baca, mau eja, gitu, dia minta didengerin... Saya lihat dia bawa buku pulang (dari relawan), (anak bilang) ajarin yang (bagian) ini, disuruh sama pak guru (relawan)

(Orang Tua, Perempuan, Dampingan Relawan Klub Baca Tapak Seribu)



Grafik 4 Perubahan pada Anak (Selain Kemampuan Membaca) menurut Relawan, Guru, dan Orang Tua
Sumber: Hasil Survei *Monitoring* lanjutan Program RELASI NTB, 2021

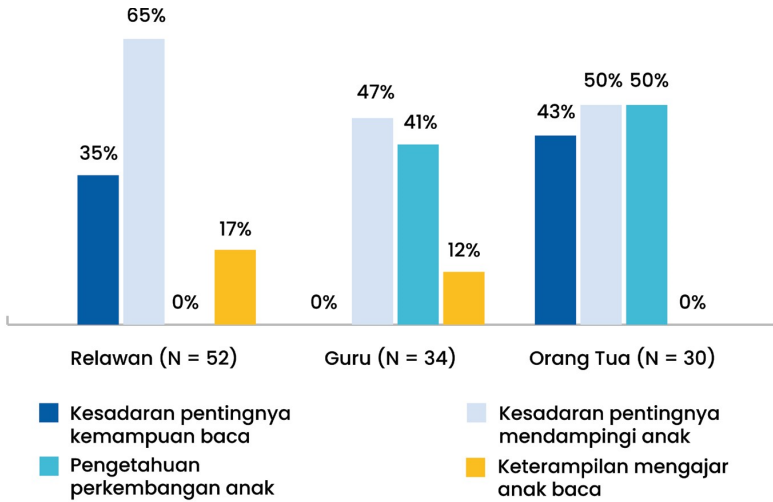
Hasil pengamatan orang tua dan guru, dan juga refleksi oleh relawan menyimpulkan bahwa anak-anak senang mengikuti pendampingan karena beberapa hal. *Pertama*, metode dan cara pembelajaran yang menyenangkan, mencakup penggunaan media digital dan media pembelajaran yang menarik. *Kedua*, pendekatan personal relawan kepada anak, di mana relawan menempatkan diri sebagai kakak dan bukan guru sehingga pendekatan yang dilakukan dapat lebih cair. Anak melaporkan kepada orang tua bahwa mereka senang diajar oleh relawan karena ramah, sabar, dan menggunakan teknik mengajar yang mudah dipahami. *Ketiga*, keberadaan sesama anak lain untuk belajar bersama, sehingga anak lebih termotivasi belajar. *Keempat*, keberadaan orang tua untuk mendukung anak belajar di rumah, dalam bentuk mendampingi

serta mengulang pembelajaran bersama anak. *Kelima*, peran serta guru untuk ikut memperhatikan kemampuan membaca anak, dalam rangka menjaga kesinambungan pembelajaran yang terjadi di sekolah.

Terkait dengan anak-anak penyandang disabilitas, pendampingan terbatas diberikan oleh relawan yang berasal dari lembaga yang memang memiliki perhatian terhadap isu disabilitas. Selain membantu mereka dengan pendampingan di aspek literasi, para relawan juga membantu anak-anak penyandang disabilitas ini untuk bisa lebih mandiri. Sejauh ini, belum ditemukan penerapan strategi pembelajaran khusus untuk anak penyandang disabilitas yang diberikan oleh relawan yang berasal dari lembaga lain. Hal ini memang merupakan salah satu tantangan yang ditemukan, yaitu relawan pada umumnya belum memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai untuk mendampingi anak penyandang disabilitas. Bentuk dukungan yang diberikan masih terbatas pada pemberian perhatian yang lebih besar dan upaya untuk meningkatkan motivasi siswa.

Program RELASI untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi

Berdasarkan kegiatan refleksi, diketahui bahwa sebagian relawan juga berupaya meningkatkan keterlibatan orang tua dalam mendukung proses belajar anak. Selain berkomunikasi dengan orang tua, ada juga relawan yang memberikan lembar kerja supaya dikerjakan anak bersama orang tua di rumah, dan ada juga yang mengundang orang tua datang saat pendampingan dilakukan, khususnya untuk siswa kelas bawah. Inisiatif tersebut menimbulkan kesadaran orang tua akan pentingnya mendampingi anak belajar, sebagaimana dinyatakan oleh relawan (65%), guru (47%), maupun orang tua sendiri (50%) (Grafik 5). Kesadaran orang tua akan pentingnya anak memiliki kemampuan membaca juga dirasakan oleh 35% relawan dan 43% orang tua, yang mulai turut hadir dalam kegiatan pendampingan, baik untuk sekadar mengantar ataupun duduk mendampingi anak selama pembelajaran berlangsung.



Grafik 5 Perubahan pada Orang Tua
Menurut Persepsi Relawan, Guru, dan Orang Tua
Sumber: Hasil Survei *Monitoring* lanjutan Program RELASI NTB, 2021

Wawancara dengan orang tua menunjukkan adanya kesadaran mereka untuk meluangkan waktu khusus mendampingi anak belajar di rumah, di mana anggapan bahwa sekolah merupakan pihak tunggal yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak mulai berkurang. Selain itu, orang tua yang aktif mendampingi anak dalam proses pendampingan bersama relawan dan berkomunikasi secara intensif dengan relawan menjadi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik tentang cara mengajar anak membaca di rumah. Hal itu termasuk kemampuan untuk mengajarkan anak dengan pendekatan yang lebih baik.

Saya dengarkan dia membaca, kadang kalau ada yang salah saya benarkan... Sebelumnya sih, ndak begitu, saya masa bodo aja dia belajar.

(Orang Tua, Perempuan, Dampingan Relawan Uma Lengge Mengajar)

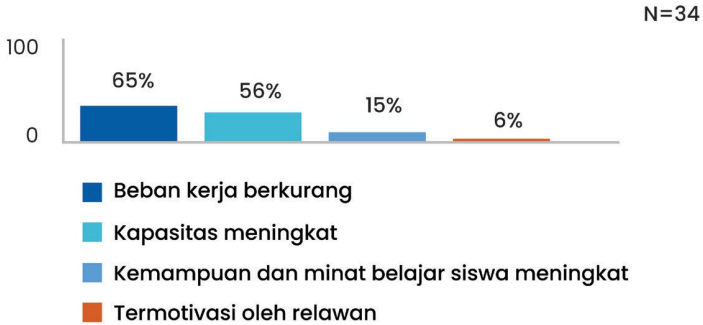
Dulu kan kalau diajarin [orang tua], kalau dibentak caranya dia (anak) nggak mau belajar... Tapi, sama Ibu (relawan) mungkin agak halus cara mengajarnya, mungkin itu yang membuatnya cepat bisa... Kalau saya udah tahu anak saya nggak mau diajarin secara keras, sekarang saya ajarin agak halus gitu. Kalau nggak mau belajar saya kasih waktu. Soalnya, saya juga jualan di sini kan banyak orang yang belanja. Dia minta diajarin, orang lagi ramai, makanya saya marah. Tapi, sekarang kan saya luangkan waktu...

(Orang Tua, Perempuan, Dampingan Relawan STKIP Hamzar Lombok Utara)

Meskipun dukungan orang tua berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran anak, namun terdapat tantangan di antaranya: kesibukan orang tua untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, misalnya berladang, berdagang, atau melaut sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk mendampingi anak belajar di rumah. Selain itu, orang tua tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang cara mendampingi anak belajar, serta ketidakhadiran orang tua, baik karena perceraian ataupun orang tua menjadi pekerja migran, yang membuat anak kemudian diasuh oleh kakek, nenek atau pihak lain dengan segala keterbatasannya.

Selain berkomunikasi dengan orang tua, relawan juga didorong untuk berkoordinasi dengan guru sepanjang proses pendampingan, mulai dari meminta izin dan informasi mengenai kemampuan awal siswa, berbagi strategi belajar yang mungkin cocok bagi anak yang didampingi, melaporkan perkembangan belajar anak secara berkala, hingga meminta saran dari guru jika dibutuhkan. Secara umum, komunikasi dengan guru dilakukan terkait dengan pelaporan hasil tes dan perkembangan kemampuan membaca anak. Sebagian relawan juga cukup intensif berdiskusi dengan guru untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi anak dan meminta bantuan guru dalam proses pendampingan, meskipun sebagian lainnya belum intensif membangun komunikasi dengan guru.

Terlepas dari itu, keberadaan program RELASI juga dirasakan bermanfaat oleh guru (Grafik 6). Sebanyak 65% guru mengatakan bahwa beban kerja mereka berkurang setelah adanya program ini. Sekolah dengan jumlah guru terbatas dan jumlah jam belajar yang berkurang selama pandemi menjadi terbantu karena relawan turun ke rumah-rumah dan membantu anak untuk tetap belajar. Peningkatan kemampuan membaca anak sebagai hasil dari pendampingan juga membantu 15% guru untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar yang lebih lancar. Guru menjadi lebih antusias dan mampu menanyakan isi bacaan atau pemahaman karena semua anak sudah bisa membaca. Lebih jauh, empat sekolah mitra Lembaga Uma Lengge Mengajar kini menggunakan hasil tes kemampuan membaca anak dari lembaga sebagai acuan dalam melakukan pendampingan siswa di sekolah. Hal ini menjadi salah satu indikasi adanya pengimbasan terkait metode pemetaan kemampuan siswa di level sekolah.



Grafik 6 Perubahan dan Manfaat yang Didapat Guru
Sumber: Hasil Survei *Monitoring Lanjutan* Program RELASI NTB, 2021

Berdasarkan hasil survei, 56% guru merasa ada peningkatan kapasitas sebagai dampak keterlibatan dalam program RELASI. Guru mendapatkan tambahan materi dan metode pembelajaran baru agar anak bisa belajar membaca dengan lebih cepat. Metode belajar interaktif dan belajar sambil bermain di luar kelas disadari cukup penting oleh beberapa guru agar anak tidak bosan dan lebih antusias belajar. Metode seperti itu sulit untuk dilakukan selama ini karena guru selalu merasa terbatas oleh penyampaian materi yang harus terpenuhi dan jam pelajaran yang terbatas, khususnya di masa pandemi.

Dari metode yang mereka (relawan) gunakan saya bisa belajar. Terus teknologi-teknologinya juga saya (sebelumnya) kurang paham, jadi sedikit pahamlah dengan apa yang mereka ajarkan ke siswa itu. Terus semangat dan cara mereka menghadapi para siswa itu, 'oh, (masalahnya) begini,' gitu... Seperti medianya dan sebagainya. Kadang mereka menghadirkan media yang belum guru-guru tahu, gitu, di sana. Jadi hal yang barulah bagi saya.

(Guru, Perempuan, Dampingan Relawan Gerakan Sadar Literasi Uma Lengge Mengajar)

Untuk mendekati orang tua, saya cari waktu yang terbaik, misalnya saya tanyakan orang tuanya di rumah jam berapa, baru saya ke sini, terus saya tanyakan kegiatan bermain anaknya apa, terus saya sudah siapkan buku kayak lembaranlah gitu, saya dapat dari adopsi relawan itu, saya kasih 1 lembar. Nah, saya di sanalah saya lihat bagaimana dibimbing nggak sama orang tuanya di rumah, kalau dibimbing insyaallah besok dia bisa membaca lembaran yang saya kasih itu.

(Guru, Laki-laki, Dampingan Relawan STKIP Hamzar Lombok Utara)

Sebagian guru berharap agar dapat berkomunikasi secara lebih intensif dengan relawan serta mendampingi siswa secara bersama, sehingga permasalahan dapat dicarikan solusinya secara lebih baik. Selain itu, guru

juga berharap dapat saling belajar bersama relawan mengenai materi dan metode pembelajaran yang diterapkan. Guru memiliki keinginan untuk dapat menerapkan materi dan metode pengajaran yang dijalankan relawan.

Perubahan di Tingkat Institusi Menjanjikan Keberlanjutan Program

Dampak program RELASI tidak hanya terjadi di tingkat siswa, orang tua, guru, maupun relawan, tetapi juga menginspirasi perubahan di tingkat institusi. Pada awalnya, program RELASI dipakai sebagai pengganti Program Praktik Lapangan (PPL) atau Kuliah Kerja Nyata (KKN). LPTK melakukan perubahan ini untuk merespons tuntutan kondisi pandemi, di mana dibutuhkan dukungan bagi keluarga dari kalangan rentan untuk bisa menjalankan peran ‘guru’ di rumah.

Dalam perjalanannya, LPTK menemukan perubahan-perubahan positif pada para mahasiswanya. Sebagai contoh, salah satu LPTK di Lombok, pada awalnya hanya mengalokasikan mahasiswa tahap akhir dan beberapa mahasiswa semester awal untuk tujuan pengimbasan. Di tahap berikutnya, melihat antusiasme mahasiswa untuk terlibat, LPTK terkait membuka kesempatan lebih luas bagi semua mahasiswa untuk mendaftar dalam program RELASI. Kesempatan ini direspons positif dan ternyata banyak mahasiswa semester awal yang ikut mendaftar. Namun, kondisi ini menimbulkan tantangan karena mahasiswa di semester awal belum memiliki pengalaman memadai mengenai prinsip dasar dalam mengajar. Hal ini yang kemudian menyebabkan LPTK memutuskan untuk mengalokasikan program hanya bagi mahasiswa tingkat akhir. Contoh ini kemudian direplikasi oleh LPTK lain. Pengalaman ini menunjukkan bahwa LPTK melakukan proses refleksi terhadap apa yang terjadi dan membuat keputusan berdasarkan pembelajaran yang diperoleh. Dengan adanya LPTK lain yang juga mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini, menunjukkan bahwa terjadi proses komunikasi dan saling belajar antar LPTK. Bisa jadi, asosiasi yang menggabungkan LPTK-LPTK ini menjadi forum yang berkontribusi pada hasil tersebut.

Kemandirian LPTK juga bisa dilihat dari perubahan yang terjadi di tahap pertama dan tahap kedua program Relasi. Bila pada tahap pertama, peran LPTK melalui para koordinator dan dosen pendamping masih bersifat terbatas, namun pada tahap kedua peran keduanya menjadi lebih besar. Dalam perkembangannya, peran INOVASI menjadi berkurang dan tidak lagi selalu harus mendampingi relawan. Koordinator program kemudian menjadi lebih

aktif dalam mengamati proses dan memastikan kualitas pendampingan yang dilakukan para relawan.

Ternyata ketika kita evaluasi, banyak (relawan) yang bingung. 'Kita masih bingung loh. Walaupun pas pelatihan itu kayak paham gitu, tapi pas penerapan bingung gitu.' Oh, ternyata butuh pendampingan lagi, saya kira. Oh, ya, nggak apa-apa dah, mungkin ada kita (koordinator). Jadinya, ayo diterapin di sini, ayo, kita yang dampingi. Jadi, kita dampingi sendiri. Kita kasih tahu lagi. Kita ceritain lagi gimana tahapan-tahapan menggunakan instrumen (pembelajaran) yang ada, yang pembelajaran sesuai level itu, kan. Nah, itu yang kita ulang lagi ke mereka. Akhirnya mereka jadi agak nyambung. Oh, jadi agak paham...

(Koordinator, Perempuan, LPTK di Lombok)

Selain itu juga ditemukan inisiatif dari LPTK untuk memberikan pendampingan ulang maupun pendampingan lanjutan sebelum relawan turun ke lapangan. Berbagai dukungan juga diberikan LPTK, seperti mencetak materi atau bahan ajar, menyiapkan dukungan dana untuk pembelian material pengajaran, dan menyediakan referensi terkait. Berbagai pendanaan ini dibiayai secara mandiri oleh LPTK tersebut. Berkurangnya peran INOVASI dan meningkatnya peran pemangku kepentingan merupakan kondisi yang dapat mendorong LPTK maupun lembaga berbasis masyarakat untuk dapat melanjutkan kegiatan secara mandiri.

Dari sekian dampak positif yang dihasilkan, program RELASI mendorong kesadaran bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab lembaga pendidikan, namun semua pihak. Di masa pandemi COVID-19, permasalahan pendidikan membutuhkan kerja sama berbagai pihak, baik itu pemerintah, sekolah, masyarakat, orang tua termasuk berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa. Kesadaran lain yang tumbuh adalah pemahaman bahwa literasi adalah fondasi penting yang harus dikuasai siswa agar siswa mampu mencerna dan menguasai pembelajaran di tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa guru memiliki kapasitas pedagogi memadai untuk mengajarkan literasi dasar pada siswa. Selain itu, program RELASI juga mendorong kesadaran pentingnya praktik pembelajaran yang terdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang disampaikan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa.

Perubahan lembaga juga tampak dalam bentuk adopsi program RELASI menjadi program dari LPTK. Di antaranya, menjadikan pendekatan RELASI sebagai bagian dari program KKN atau sebagai kegiatan relawan murni yang diusung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Juga terdapat beberapa

rancangan aksi, seperti menerapkan peningkatan kesadaran orang tua terkait kemampuan membaca anak, dan bagaimana orang tua membantu anak yang mengalami kesulitan. Sebuah gerakan berbasis masyarakat di Kabupaten Bima, misalnya, merencanakan akan melanjutkan program RELASI secara mandiri dan mengimbaskan ilmu yang diperoleh kepada relawan-relawan baru. Salah satu LPTK bahkan telah mengintegrasikan materi dari modul pembelajaran literasi yang digunakan dalam program RELASI ke dalam mata kuliah yang relevan, di antaranya yaitu Pembelajaran Tematik, Pengajaran Mikro, Bahasa Indonesia Dikdas 1 dan 2, dan Evaluasi Pembelajaran. Selain itu juga terjadi kolaborasi antar-LPTK, yaitu dalam mengembangkan aplikasi penilaian formatif berbasis Android. Saat ini aplikasi tersebut sudah mulai digunakan.

Pada tahap awal, sempat muncul tantangan terkait dengan koordinasi antara pemerintah daerah dengan LPTK dan LSM yang terlibat dalam program RELASI. Kondisi pandemi mempersulit proses koordinasi setiap pihak, baik terkait dengan keterbatasan anggaran, waktu, dan juga luasnya sebaran wilayah kegiatan. Dalam perkembangannya, koordinasi dapat lebih ditingkatkan sehingga pemerintah daerah setempat mulai lebih optimal dalam mendukung LPTK dalam menjalankan program RELASI. Di Lombok Utara, misalnya, dinas pendidikan berperan memperlancar pelaksanaan program, di antaranya melalui surat keputusan dinas pendidikan mengenai sekolah-sekolah yang menjadi dampingan relawan yang berasal dari LPTK melakukan koordinasi dengan sekolah agar pendampingan berjalan lancar, serta memberikan penghargaan kepada para relawan dalam bentuk sertifikat. Sementara di Kabupaten Dompu, dinas pendidikan bekerja sama dengan Klub Baca Tapak Seribu, sebuah Taman Bacaan Masyarakat atau TBM, untuk merencanakan perluasan peran relawan dalam membantu anak-anak yang dibawa jauh dari sekolah untuk berladang oleh orang tua mereka.

Program RELASI yang berdasarkan pada mobilisasi sumber daya lokal secara mandiri menunjukkan kemampuan dari aktor-aktor lokal untuk beradaptasi dengan tantangan pandemi COVID-19, sesuai dengan konteks lokal yang mereka hadapi. Mereka mampu mengidentifikasi masalah, mencari jalan keluar, menggalang kesepakatan dan secara bersama menerapkan solusi tersebut. Meskipun masih di tahap yang sangat awal, program RELASI bisa diperkuat apabila bisa diintegrasikan dengan sistem, program atau kebijakan yang sudah ada. Salah satu potensi yang memungkinkan adalah program

Kampus Merdeka, yaitu dengan memperhitungkan kegiatan mahasiswa di luar kampus sebagai satuan kredit semester. Dengan mekanisme ini, para mahasiswa memiliki kesempatan untuk mempraktikkan teori yang diperoleh. Para calon guru belajar mengajar, menerapkan teori dan mengadaptasinya sesuai konteks, serta mendapatkan pengalaman dari interaksi langsung dengan komunitas dan para siswa mereka. Pengintegrasian program diharapkan akan mendorong meningkatnya relevansi kualitas lulusan perguruan tinggi, termasuk bagi para calon guru, agar kapasitas para lulusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berbagai perubahan yang terjadi seperti diuraikan di atas, baik perubahan di tingkat individu maupun di tingkat lembaga, menunjukkan adanya potensi keberlanjutan. Gerakan RELASI pada dasarnya merefleksikan temuan UNESCO, yaitu bagaimana unsur masyarakat berperan dalam mengatasi krisis pembelajaran. Dalam jabaran di atas bisa dilihat bahwa dampak RELASI tidak hanya terbatas pada hasil jangka pendek, namun juga memengaruhi perubahan-perubahan di tingkat institusi, terutama LPTK, yang mana perubahan ini bisa menghasilkan perubahan jangka panjang terkait dengan kualitas calon guru. Merujuk pada tulisan Barron, pandemi ini pada ujungnya membuktikan tingkat resiliensi dan kemampuan beradaptasi dari sistem pendidikan, pengambil kebijakan, guru, siswa dan juga keluarga.⁴

Daftar Pustaka

- Alban Conto, C., Akseer, S., Dreesen, T., Kamei, A., Mizunoya, S. and Rigole, A. (2020). COVID-19: Effects of School Closures on Foundational Skills and Promising Practices for Monitoring and Mitigating Learning Loss, Innocenti Working Paper 2020-13, UNICEF Office of Research – Innocenti, Florence.
- Amalia, Mia (2021). *Hasil Monitoring Program Relawan Literasi (RELASI) Nusa Tenggara Barat*. Laporan Monitoring Program RELASI – Dokumen Internal. Jakarta: INOVASI.
- Andrabi, T., Daniels, B., Das, J. (2020). Human Capital Accumulation and Disasters: Evidence from the Pakistan Earthquake of 2005. RISE Working Paper Series. 20/039.

4 <https://blogs.worldbank.org/education/changing-role-teachers-and-technologies-amidst-covid-19-pandemic-key-findings-crossn>

- Barron, M., Cobo, C., Munoz-Najar, A. and Ciarrusta, I. S. (2021). The Changing Role of Teachers and Technologies Amidst the COVID-19 Pandemic: Key Findings from A Cross-country Study. <https://blogs.worldbank.org/education/changing-role-teachers-and-technologies-amidst-covid-19-pandemic-key-findings-crossn>
- Cooper, Harris; Nye, Barbara; Charlton, Kelly; Lindsay, James; Greathouse, Scott (1996). *The Effects of Summer Vacation on Achievement Test Scores: A Narrative and Meta-Analytic Review*
- Hanover Research (2020). *Best Practices for Learning Recovery*. <https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-education-the-lingering-effects-of-unfinished-learning>
- INOVASI. (2020). *Analisis Cepat Survei Belajar dari Rumah*.
- INOVASI. (2021). *Learning Recovery from COVID-19 Impact*. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/07/15/130756871/hasil-belajar-siswa-di-bukittinggi-meningkat-selama-pjj-ini-alasannya>
- Maldonado, J. E., & Witte, K. D. (2020). *The Effect of School Closures on Standardised Student Test Outcomes*.
- OECD (2019). PISA 2018 results: combined executive summaries volume I, II, III.
- Puspendik, Kemdikbud. (2016). Hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI)/Indonesian National Assessment Program (INAP).
- Save the Children. (2020). *The Hidden Impacts of Covid-19*. <https://www.stc.or.id/sci-id/files/15/158b1478-b431-4ace-a3d3-104ad97a1aa0.pdf>
- Solidarity of NGOs Facing the Pandemic: Education. (n.d.). Retrieved from <https://www.soroptimistinternational.org/solidarity-of-ngos-facing-the-pandemic-education/>
- Solihin, Lukman, et al. (2019). *Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi*. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Stringer, Neil & Keys, Ellie. (2020). *Learning loss during the pandemic: review of international research*. University Professors Key Roles in Boosting Teacher Training during Pandemic. (n.d.). Retrieved from <https://www.sunderland.ac.uk/more/news/story/university-professors-key-role-in-boosting-teacher-training-during-pandemic-1394>

Yarrow, N., Masood, E., & Afkar, R. (2020). *Temuan Inti: Estimasi Dampak COVID-19 pada Sistem Pembelajaran dan Pendapatan di Indonesia: Cara Mengubah Arus.*



Epilog
Belajar dari Krisis
Belajar Sepanjang Hayat

Epilog
Belajar dari Krisis
Belajar Sepanjang Hayat

~•~

Irsyad Zamjani

Saat artikel ini ditulis, Indonesia sedang mengalami gelombang ketiga penularan COVID-19 dengan varian baru bernama Omicron. Ini adalah varian ke-13 dari virus SARS-CoV-2 yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan. Kita melihat bahwa virus ini terus bermutasi sejak kemunculannya pada akhir 2019. Virus selalu berupaya menghindari perlawanan sistem imun manusia, melakukan penggandaan diri, dan menyebar ke manusia lainnya. Tubuh manusia di kemudian hari juga akan beradaptasi dengan sang virus. Jika mulanya memicu fatalitas serius, dengan vaksinasi dan proses pembentukan antibodi dalam tubuh, pada akhirnya virus dapat dengan mudah dilawan. WHO telah mengatakan bahwa COVID-19 tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Ia akan menjadi penyakit endemik dan manusia akan siap hidup berdampingan dengannya.

Kita harus belajar dari proses evolusi yang terjadi pada virus dan manusia selama pandemi. Frasa “harus belajar” perlu ditekankan mengingat harga yang telah kita bayar selama proses ini. Jutaan nyawa melayang di seluruh dunia karena infeksi COVID-19. Belum termasuk kerugian fisik dan nonfisik yang timbul karena berbagai pembatasan. Seperti halnya mutasi virus, kehidupan manusia selama pandemi juga bermutasi sebagai respons dari upaya mengatasi berbagai komplikasi yang muncul akibat pembatasan mobilitas. Mutasi ini menghasilkan cara- cara dan karakteristik baru. Dapat disebut juga “varian” baru, dengan nama-nama seperti “rapat daring”, “bekerja dari rumah”, atau

"belajar jarak jauh". Cara-cara baru ini muncul dari proses belajar manusia agar tetap bertahan di tengah krisis.

Banyak yang memperkirakan gelombang ketiga ini akan menjadi gelombang terakhir pandemi COVID-19 sebelum memasuki fase endemi. Fase saat kita dapat hidup berdampingan dengan COVID-19, seperti halnya dengan virus-virus lain yang pernah memicu wabah di masa lalu. Layaknya virus yang mungkin tetap bertahan pasca-pandemi, berbagai cara baru dalam kehidupan manusia akibat pandemi ini juga tidak akan sepenuhnya musnah. Sebagian yang telah terserap ke dalam sel-sel kebudayaan akan tetap bertahan dan tidak dapat diputararaskan kembali (*irreversible*). Berbagai perusahaan teknologi di Silicon Valley seperti Google, Facebook, dan Twitter, misalnya, telah menawarkan opsi bekerja dari rumah secara permanen kepada karyawan mereka. Hal ini menjadi "solusi menang-menang" bagi perusahaan yang dapat melakukan efisiensi gaji dan bagi para karyawan yang dapat memilih lokasi tempat tinggal yang lebih tenang dengan biaya hidup lebih murah. Hal semacam ini juga akan terjadi pada ekosistem pendidikan karena turut berevolusi di tengah pandemi. Sementara kalangan, misalnya penulis terkenal Thomas L. Friedman (2020), bahkan menganggapnya sebuah revolusi.

Evolusi Belajar di Tengah Krisis

Berbagai tulisan dalam bunga rampai ini telah menunjukkan bahwa pendidikan juga mengalami evolusi karena pandemi. Belajar jarak jauh telah menjadi normal baru untuk menghindari meluasnya penularan. Teknologi digital menjadi sarana utama. Data dari We Are Social dan Kepios (2022) menunjukkan 44,1% dari 205 juta pengguna internet di Indonesia menggunakannya untuk keperluan pendidikan. Akan tetapi, praktik baru ini, layaknya mutasi virus, juga menimbulkan komplikasi. Irmawati dkk. telah menguraikan bagaimana rutinitas belajar dari rumah yang cukup intens selama pandemi memukul kondisi psikologis dan kesehatan mental sebagian siswa. Selain itu, sebagaimana diulas oleh Arsenty dkk., perubahan cara belajar konvensional tersebut juga menimbulkan ancaman penurunan partisipasi sekolah. Hal ini utamanya dipicu oleh kesenjangan akses pada sumber daya pendukung pembelajaran jarak jauh. Yang paling terdampak oleh masalah ini adalah para pelaku pendidikan dari kelompok sosial ekonomi rendah atau tinggal di wilayah-wilayah dengan keterbatasan infrastruktur.

Untuk menghindari agar infeksi masalah tersebut tidak menjadi semakin parah, diperlukan intervensi terhadap sistem. Langkah ini ibarat vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan untuk menangkal virus. Pemerintah merilis berbagai kebijakan “darurat” seperti membuat tontonan pembelajaran melalui televisi dan media sosial, memberlakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas, menyederhanakan kurikulum, dan memberi subsidi pulsa kepada semua siswa dan guru. Cara bagaimana kebijakan-kebijakan darurat tersebut bekerja telah diulas oleh para penulis seperti Rakhmah dkk. yang menganalisis transformasi tayangan program Belajar dari Rumah dari televisi ke media sosial dan juga Solihin dkk. yang menguraikan berbagai tantangan penerapan pembelajaran tatap muka terbatas.

Selain intervensi kebijakan pemerintah, sistem pendidikan juga berhutang pada berbagai varian inisiatif yang lahir dari masyarakat. Bodrogini dkk., misalnya, mengurai inisiatif-inisiatif masyarakat di daerah terpencil dalam mendukung pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Artikel lain yang ditulis oleh Octavia dkk. juga menunjukkan penguatan modal sosial gotong royong di kalangan masyarakat sipil untuk melawan tekanan pandemi. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam komunitas RELASI (Relawan Literasi) ini berkolaborasi, bahu membahu membantu guru dan orang tua melalui penyediaan modul- modul belajar literasi dan pendampingan pembelajaran.

Di antara berbagai intervensi terhadap sistem tersebut, yang paling mengesankan adalah menguatnya peran orang tua. Berlawanan dengan anggapan dan praktik konvensional bahwa peran orang tua dalam persekolahan terbatas pada hal-hal administratif, pandemi membuktikan bahwa orang tua dapat memainkan peran yang lebih substantif dalam pembelajaran. Semakin rendah jenjang pendidikan anak, semakin penting peran orang tua. Listiawati dkk. menyajikan temuan tentang praktik-praktik kolaborasi guru dan orang tua dalam menghadapi tantangan belajar jarak jauh pada PAUD. Lebih jauh lagi, Bima juga menunjukkan bagaimana pendampingan orang tua dalam belajar anak di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Kebumen sangat membantu guru maupun siswa dalam mengurangi dampak disrupsi pembelajaran di masa pandemi.

Upaya-upaya yang dilakukan unsur-unsur dari sistem pendidikan untuk meminimalkan berbagai efek samping pembelajaran jarak jauh selama pandemi menjadi bagian dari proses evolusi belajar. Upaya-upaya ini telah membantu sistem menemukan keseimbangannya. Oleh karena itu, terlepas dari berbagai

hambatan dan keterbatasan, sebagaimana ditulis oleh Rakhmah dkk. dalam artikel lain di buku ini, para siswa dan guru tetap mampu bertahan untuk belajar dan mengajar dengan cara-cara nonkonvensional selama pandemi. Praktik-praktik tersebut semakin lama semakin menjadi praktik yang mapan. Jika sebelumnya bersifat darurat, hanya menjadi solusi sementara di saat pandemi, di masa depan saat pandemi usai praktik tersebut dapat berlanjut menjadi bagian dari kenormalan. Dari sini kita dapat membayangkan seperti apa wajah pendidikan setelah pandemi.

Pendidikan Setelah Pandemi

Setelah pandemi usai, dan meski COVID-19 tetap bertahan sebagai penyakit endemik, kita akan lebih merdeka beraktivitas. Setelah beberapa lama mengenali virus, tubuh kita akan mampu memproduksi antibodi spesifik sehingga ketika virus itu menginfeksi kembali ia lebih siap melawan. Pada fase ini, kita bebas untuk memilih apakah akan kembali kepada kebiasaan lama sebelum pandemi, menjadikan praktik-praktik selama pandemi sebagai normal baru, atau bersikap eklektik, yakni mengambil dari keduanya yang relevan dengan kebutuhan untuk melanjutkan hidup secara lebih sehat. Pilihan jalan tengah selalu ideal.

Setelah pandemi usai, sistem pendidikan akan memiliki referensi yang cukup kaya dari praktik-praktik yang muncul karena pandemi. Pembelajaran jarak jauh yang sebelumnya merupakan varian asing atau marginal dalam format pendidikan reguler, kemungkinan akan semakin mudah diserap. Kelas-kelas campuran (*hybrid*) akan bermunculan di berbagai perguruan tinggi, bahkan mungkin di sekolah-sekolah pra-pendidikan tinggi. Para pengembang platform belajar digital juga akan memikirkan pengembangan bisnisnya ke sektor pendidikan bersertifikat ini. Platform-platform tersebut telah mengalami ledakan pelanggan selama pandemi. Platform Ruangguru, misalnya, meraup 22 juta pengguna pada Desember 2020, atau meningkat 7 juta (46%) dibandingkan tahun sebelumnya (Ruangguru, 2021).

Belajar jarak jauh selama pandemi memang telah menghasilkan kehilangan belajar (*learning loss*). Hasil studi INOVASI dan Pusat Penelitian Kebijakan (2021) mendapatkan bahwa secara rata-rata terjadi kehilangan belajar yang setara dengan 4-5 bulan belajar pada siswa sekolah dasar. Namun, kehilangan belajar ini pada dasarnya bersifat segmentatif. Anak-anak dengan

sumber daya dan dukungan yang lebih baik relatif tidak begitu terdampak, bahkan mengalami peningkatan belajar. Hal ini dibuktikan dengan hasil riset Program RISE di Kota Bukittinggi di mana rata-rata siswa justru meningkat hasil belajarnya selama pandemi dibandingkan sebelumnya. Dukungan orang tua yang terlembaga diyakini sebagai sebabnya (Kemendikbud, 2021).

Pembelajaran konvensional dengan metode tatap muka akan tetap bertahan. Pembelajaran tatap muka tetap dibutuhkan, lebih-lebih dalam masa ketika karakter dan keterampilan nonteknis menjadi penentu masa depan. Interaksi langsung membantu kemampuan bersosialisasi, membentuk kepribadian, membuat peka akan keragaman, melatih kemampuan beradaptasi, dan memberi pengalaman nyata. Akan tetapi, unsur-unsur pendidikan jarak jauh akan terus mewarnai. Pemerintah baik di pusat maupun di daerah perlu menambahkan daftar atau proporsi dalam anggaran belanja infrastruktur mereka. Investasi gedung dan alat-alat praktik laboratorium tidaklah cukup. Investasi perangkat dan aplikasi teknologi digital menjadi semakin penting, bahkan masuk daftar prioritas. Bukan hanya untuk belajar mengajar, tetapi juga untuk mengelola sekolah secara lebih efektif.

Pemerintah telah menyiapkan ekosistem sekolah berbasis teknologi melalui penyediaan sejumlah platform digital seperti SIPLah untuk transaksi belanja kebutuhan sekolah, aplikasi ARKAS untuk perencanaan anggaran, aplikasi Merdeka Mengajar untuk membantu guru mengajar dan belajar, dan platform Rapor Pendidikan untuk membantu menyusun perencanaan kebijakan berbasis data. Penggunaan teknologi digital yang sangat masif di kalangan pelaku pendidikan selama pandemi tidak mungkin dihentikan. Tantangannya adalah bagaimana menyediakan infrastruktur secara merata dan memperkuat keterampilan pemanfaatan teknologi digital secara lebih kontekstual. Teknologi harus dapat memfasilitasi kemerdekaan dalam belajar. Guru dapat memfokuskan pembelajaran tatap muka terutama untuk memperdalam pemahaman, memperkuat karakter, dan melatih *soft skills*. Sementara transfer materi dan informasi dapat memanfaatkan teknologi. Mengembalikan pembelajaran yang hilang perlu dilakukan dengan meramu dua pendekatan tersebut secara proporsional.

Di samping itu, pandemi juga telah memaksa sistem pendidikan untuk memahami dengan sepenuh hati bahwa belajar tidak boleh menjadi beban. Hidup di masa krisis sudah cukup membebani, sehingga sekolah tidak boleh

menambah lagi volumenya. Apalagi, banyak anak yang tanpa pandemi pun telah hidup dalam suasana krisis: ekonomi, akses pada fasilitas, kondisi geografis, atau tingkat literasi orang tua. Beban utama dari belajar adalah materinya yang terlalu padat karena target kurikulum yang kelewat ambisius. Inilah yang ditemukan studi Pritchett dan Beatty (2015) di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia. Kurikulum selalu mendahului kecepatan belajar anak. Akibatnya, anak-anak selalu tertinggal dalam belajar, bahkan berhenti belajar. Mereka mungkin lulus sekolah atau naik kelas, namun kompetensinya belum mencapai tingkat yang seharusnya. Mereka bersekolah, tetapi tidak belajar. Beban kurikulum yang terlalu berat ini akan semakin berat jika diterapkan di tengah pandemi. Pemerintah telah bereksperimen dengan kurikulum darurat yang mengurangi kompetensi-kompetensi yang kurang esensial dalam kurikulum nasional. Hasilnya pun cukup menjanjikan. Studi menunjukkan hasil belajar pengguna kurikulum darurat relatif lebih baik dibandingkan pengguna kurikulum penuh (INOVASI & Puslitjak, 2021).

Belakangan, inisiatif penyederhanaan kurikulum terus disempurnakan dengan merancang Kurikulum Merdeka, suatu kurikulum yang menjanjikan fleksibilitas belajar, berfokus pada pengajaran materi esensial, dan memberi porsi yang cukup signifikan untuk pembelajaran berbasis proyek dalam rangka pematapan *soft skills* dan karakter. Jika kurikulum ini dapat digunakan dengan baik oleh sekolah, utamanya saat pandemi usai, siswa akan memperoleh pengalaman belajar yang berbeda dari sebelumnya. Wajah sekolah juga akan berbeda. Para peneliti telah melihatnya dalam kegiatan riset etnografi di sejumlah pelaksana Program Sekolah Penggerak yang mengujicobakan kurikulum ini sejak pertengahan 2021.

Meskipun masih dalam proses mencerna konsepnya dan penerjemahannya dalam kurikulum operasional sekolah, guru dan siswa tampak merayakan Kurikulum Merdeka, atau sebelumnya disebut kurikulum prototipe. Rupa-rupa kegiatan seperti memperbanyak aktivitas belajar di luar kelas, menata ulang layout tempat duduk di dalam kelas agar kondusif untuk melatih keterampilan berkomunikasi dan bertukar opini, serta kolaborasi lintas mata pelajaran untuk menyelesaikan berbagai proyek mulai muncul di sejumlah sekolah yang diamati (Pratiwi dkk., 2021). Perubahan lingkungan dan praktik belajar semacam ini dapat menjadi lahan subur untuk mewujudkan pemulihan belajar secara menyeluruh.

Memulihkan Belajar, Memulihkan Sekolah

Kurikulum Merdeka, bersama dengan berbagai inisiatif Merdeka Belajar lain yang sebagian besar dirilis selama pandemi, memberi bekal yang sangat penting untuk menjalankan pendidikan setelah pandemi. Memulihkan kembali apa yang hilang dalam pembelajaran selama pandemi perlu menjadi prioritas. Mungkin bukan hanya selama pandemi, tetapi juga selama masa yang panjang sebelum pandemi—saat anak-anak masuk sekolah tetapi kehilangan esensi belajar. Apa yang hilang selama ini adalah pengalaman belajar yang bermakna yang seharusnya muncul dari relasi guru dan siswa yang berkualitas, interaksi alami antarsiswa sebagai bagian dari proses pengembangan kepribadian, dan lingkungan belajar yang memupuk kemampuan belajar dan membangun karakter. Hilangnya berbagai unsur tersebut mengakibatkan hilangnya kompetensi-kompetensi yang semestinya dikuasai siswa.

Oleh karenanya, hal paling penting dilakukan untuk memulihkan belajar adalah memulihkan sekolah. Institusi ini perlu dikembalikan ke *khittah*-nya sebagai lembaga pendidikan yang dikelola oleh para pendidik. Bukan lembaga birokrasi yang patuh pada aturan para teknokrat atau lembaga bisnis yang mengikuti kemauan pemodal seperti disinyalir oleh Ivan Illich dalam *Deschooling Society* (2000). Sekolah bukan tempat di mana aturan yang kaku bisa mengalahkan inovasi untuk kepentingan kemajuan siswa. Di dalam sekolah, siswa adalah episentrum. Para pelaku pendidikan di sekolah mesti peka pada keragaman karakteristik siswa, mengerti kebutuhan belajar mereka, dan memahami perubahan-perubahan di luar sana yang dapat menentukan masa depan mereka, untuk selanjutnya menerjemahkannya dalam kurikulum dan strategi belajar yang kontekstual. Memulihkan sekolah juga berarti memulihkan ekosistem dan pelaku utamanya: kepala sekolah, guru, dan orang tua.

Kepala sekolah bukan lagi pemimpin yang mengurus administrasi manajerial belaka. Mereka adalah pemimpin pembelajaran. Sosok yang mampu mengarahkan seluruh sumber daya untuk mendukung pembelajaran bermakna, bekerja bersama guru menghasilkan praktik pembelajaran terbaik, menciptakan lingkungan sekolah yang positif, dan menginspirasi lahirnya inovasi (Hallinger, 2010; Brolund, 2016). Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran juga merupakan manajer organisasi yang kuat dan efektif, yang mampu membangun struktur organisasi untuk mendukung peningkatan

kualitas pengajaran (Horng & Loeb, 2010). Guru juga perlu memulihkan perannya sebagai fasilitator belajar. Siswa masa kini, terutama semenjak pandemi, terpapar dengan begitu banyak informasi setiap harinya dari kanal-kanal internet dalam gawai mereka. Gurulah yang membimbing dan melatih mereka untuk bersikap kritis terhadap informasi dan pengetahuan yang diperoleh. Kegiatan-kegiatan belajar mengajar bukan lagi semata transfer pengetahuan dan teori. Melatih keterampilan abad 21 dan karakter perlu dilakukan dengan memberi pengalaman nyata dan melibatkan siswa dalam proses produksi pengetahuan. Guru sendiri juga harus menjadi pembelajar sepanjang hayat demi siswanya, profesinya, dan dirinya sendiri.

Tidak kalah penting, peran orang tua juga perlu dipulihkan. Pandemi telah membuktikan mereka bisa mengambil peran lebih jauh dari sekadar urusan pendanaan atau penerimaan rapor. Orang tua dapat mengambil peran pembelajaran yang lebih substantif seperti memberi masukan saat guru melakukan asesmen pra-pembelajaran untuk mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan belajar siswanya. Orang tua juga dapat melanjutkan perannya selama pandemi dengan mendampingi anak belajar. Guru dapat berbagi strategi apa yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu belajar anak di rumah berdasarkan performa dan kebutuhan belajarnya. Orang tua juga merupakan sosok yang penting dalam pembelajaran karakter dan sekolah dapat membuat kesepakatan dengan mereka terkait peran-peran yang dapat dimainkan secara terstruktur dan terencana. Kerja sama orang tua dan sekolah dalam hal-hal yang substantif ini dapat menjadi pengubah permainan (*game changer*) dalam upaya memulihkan pembelajaran secara lebih cepat dan berkesinambungan.

Belajar dari Krisis, Belajar Sepanjang Hayat

Setiap orang pasti mengalami krisis dalam fase-fase tertentu perjalanan hidupnya. Krisis dapat dipandang sebagai anugerah agar manusia dapat berhenti sejenak, merefleksikan rutinitas mereka, dan menemukan cara-cara baru dalam menjalani hidup. Pendek kata, krisis membuat kita belajar, dan tidak ada cara membentuk mentalitas pembelajar sepanjang hayat yang lebih efektif daripada melalui tempaan krisis. Banyak hal dipertaruhkan dalam krisis, termasuk hidup. Orang akan mengingat pengalaman ini, menginternalisasikan dalam dirinya, dan menjadikannya rujukan penting dalam menjalani kehidupan berikutnya. Kita patut bersyukur diberikan pengalaman salah satu krisis besar

yang nyata dan dialami secara kolektif. Kita tidak mengalaminya sendirian, sehingga dapat belajar bersama dari krisis ini.

Kita memahami bahwa COVID-19 memiliki komplikasi dan dimensi yang lebih luas dari sekadar penularan penyakit. Selain kesehatan, ada masalah pekerjaan, ekonomi, politik, pendidikan, transportasi, lingkungan, teknologi, bahkan agama. Setiap orang atau kelompok dapat belajar dari persoalan pada setiap dimensi atau kombinasi dari berbagai dimensi tersebut sesuai pengalaman masing-masing. Sebagian dari upaya belajar dari krisis tersebut telah menampakkan hasilnya berupa teori, regulasi, teknologi, konvensi, maupun norma yang akan mengubah hidup kita di masa depan.

Aviv-Reuven & Rosenfeld (2021), misalnya, mencatat terjadinya lonjakan publikasi akademik yang luar biasa selama 6 bulan pertama tahun 2020 di mana topik COVID-19, yang dicermati dari beragam perspektif dan disiplin ilmu pengetahuan, berkontribusi lebih dari separuh dari total publikasi pada periode tersebut. Bahkan, menurut kedua penulis, jumlah publikasi akademik bertema COVID-19 pada jurnal-jurnal Scopus selama bulan Juni tahun 2020 satu setengah kali lipat lebih banyak (sekitar 350an) dari total publikasi selama bulan yang sama tahun 2016 (sekitar 200an). Pada kesempatan lain, sebanyak 8 orang konsultan arsitektur ternama menulis buku yang mengulas dan menawarkan konsep dan panduan desain arsitektur pasca-COVID 19 (Gillen dkk., 2021). Indonesia juga akan memiliki istana negara di ibu kota baru yang desainnya diklaim mengadopsi arsitektur bangunan pasca-pandemi.

Selama pandemi, sekolah-sekolah kita telah menjadikan topik COVID-19 sebagai bagian dari pembahasan atau proyek pembelajaran. Ini hal penting agar anak-anak memahami permasalahan yang dihadapi oleh dirinya dan lingkungannya. Namun, tidak kalah penting dari itu adalah bagaimana anak-anak dapat belajar mengambil peran dalam menyelesaikan masalahnya. Para guru perlu menciptakan proyek-proyek berbasis krisis dalam pembelajaran. Baik dengan membuat proyek baru atau mentransformasi krisis yang dialami langsung oleh anak-anak dalam batas-batas yang dapat diterima untuk keperluan pembelajaran. Di masa pandemi yang menyulitkan siswa belajar secara optimal, misalnya, anak-anak dapat ditantang untuk berkreasi menciptakan solusi atas masalah yang dihadapi, baik secara sendiri atau berkolaborasi. Dishita Bishen, siswa asal Filipina berusia 16 tahun dan Padmaja Krishna Singh siswa dari India berusia 15 tahun, misalnya, berkolaborasi membuat aplikasi bernama

Eduation untuk membantu anak-anak disleksia yang kesulitan belajar selama pandemi. Dua siswa perempuan asal India lainnya, Anvi Tyagi dan Saachi Gupta, keduanya 14 tahun, menciptakan platform berbagi video bernama We Help Ourselves (WHO). Lewat laman ini, anak-anak di seluruh dunia dapat mengunggah video yang menampilkan bakat dan kreativitas mereka dalam bidang memasak, koding, seni, dan pembuatan film (Tan, 2020).

Guru juga dapat merancang krisis-krisis baru dan melatih siswa mengambil pelajaran dan berinovasi untuk mengatasi masalah dalam krisis yang dialami. Misalnya, guru dapat bekerja sama dengan orang tua untuk memotong uang jajan anak selama beberapa waktu untuk melatih mereka lebih selektif dalam belanja, berempati dengan temannya yang berkekurangan, atau termotivasi melakukan praktik kewirausahaan. Selain itu, guru juga dapat mentransformasi masalah-masalah yang dialami siswa seperti kekalahan dalam pertandingan olahraga, kegagalan dalam ulangan, depresi karena masalah keluarga, hingga perundungan sebagai sumber-sumber belajar yang berharga. Fase-fase terendah dalam hidup tersebut dapat menjadi inspirasi kebangkitan dan memberi motivasi untuk menunjukkan potensi melalui karya-karya kreatif.

Jika pengalaman adalah guru terbaik, maka pengalaman terbaik adalah pengalaman melewati krisis dan kegagalan. Siapa pun yang mampu belajar darinya, memiliki modal besar untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Daftar Pustaka

- Aviv-Reuven, Shir & Rosenfeld, Ariel. 2021. Publication patterns' changes due to the COVID-19 pandemic: a longitudinal and short-term scientometric analysis. *Scientometrics*, 126: 6761–6784. <https://doi.org/10.1007/s11192-021-04059-x>
- Brolund, Liisa. 2016. Student success through instructional leadership. *BU Journal of Graduate Studies in Education*, 8(2): 42-45
- Friedman, Thomas L. 2020. After the Pandemic, a Revolution in Education and Work Awaits. *The New York Times*, 20 Oktober 2020. Diakses dari: <https://www.nytimes.com/2020/10/20/opinion/covid-education-work.html?smid>
- Gillen, Nicola, Nissen, Pippa, Park, Julia, Scott, Adam, Singha, Sumita, Taylor, Helen, Taylor, Ian, & Featherstone, Sarah. 2021. *Rethink Design Guide: Architecture for a post-pandemic world*. London: RIBA Publishing

- Hallinger, Philip. 2010. Developing instructional leadership, dalam Davies B. & Brundrett M. (eds). *Developing Successful Leadership*. Dordrecht: Springer. Hal. 61-76. https://doi.org/10.1007/978-90-481-9106-2_5
- Hornig, Eileen & Loeb, Susanna. 2010. New thinking about instructional leadership. *Kappan Magazine*, 92(3): 66-69
- Illich, Ivan. 2000. *Deschooling society*. London & New York: Marion Boyars
- INOVASI & Pusat Penelitian Kebijakan. 2021. Learning recovery: time for action. *Policy Brief*, August 2021. Jakarta: INOVASI
- INOVASI & Pusat Penelitian Kebijakan. 2021. Dampak Penyederhanaan Kurikulum terhadap Capaian Pembelajaran: Belajar dari Penerapan Kurikulum Darurat di Masa Pandemi COVID-19. *Risalah Kebijakan*, No. 29, November 2021. Jakarta: Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
- Kemendikbud. 2021. Hasil penelitian ungkap faktor penting dalam meraih capaian belajar optimal. *Kemendikbud.go.id*, 13 Juli 2021. Diakses dari: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan » Republik Indonesia (kemendikbud.go.id)
- Pratiwi, Indah, Utama, Bakti, Hijriani, Ika, Purnama, Joko, & Zamjani, Irsyad. 2021. Praktik Menjanjikan Penerapan Kurikulum Prototipe. *Risalah Kebijakan*, No. 30, November 2021. Jakarta: Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
- Pritchett, Lant & Beatty, Amanda. 2015. Slow down, you're going too fast: Matching curricula to student skill levels. *International Journal of Educational Development*, 40 (January 2015): 276-288
- Ruangguru. 2021. Ruangguru tutup tahun 2020 dengan melayani lebih dari 22 Juta pengguna di Indonesia. *Ruangguru*, 7 Januari 2021. Diakses dari: <https://www.ruangguru.com/blog/ruangguru-tutup-tahun-2020-dengan-melayani-lebih-dari-22-juta-pengguna-di-indonesia>
- Tan, Nicole. 2020. Students create innovative ideas for online learning during Covid-19. *Young Post*, 28 Juli 2020. Diakses dari: Students create innovative ideas for online learning during Covid-19 - YP | South China Morning Post (scmp.com)
- We are Social & Kepios. 2022. Digital 2022 Indonesia: the essential guide to the latest connected behaviours. Diakses dari: [https:// datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia](https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia)

Krisis pembelajaran akibat pandemi mengungkap banyak informasi penting perihal berbagai keterbatasan dalam dunia pendidikan kita. Informasi tersebut penting agar kita lebih paham apa yang perlu diperbaiki, siapa yang harus dibantu, dan ke mana agenda pembangunan pendidikan mesti diarahkan. Kesenjangan akses pada sumber dan fasilitas belajar antardaerah dan antarkelompok sosial, misalnya, menjadi sedemikian transparannya dan memantik keprihatinan publik yang meluas. Begitu pula, karakteristik kurikulum kita yang terlalu kompleks tidak lagi dianggap lumrah, sehingga perubahan terasa lebih mendesak untuk dilakukan. Di sisi lain, krisis ini juga mendorong agenda perubahan berjalan lebih cepat. Adaptasi guru untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran, keterlibatan orang tua dalam pendampingan belajar, serta menjamurnya berbagai inisiatif untuk berbagi, berinovasi, dan berkolaborasi di antara guru dan pemangku kepentingan merupakan beberapa contoh bagaimana dampak krisis telah memacu semua pihak untuk terlibat mengatasinya. Buku *Pembelajaran di Masa Pandemi: Dari Krisis Menuju Pemulihan* ini merekam berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi, sekaligus menyajikan upaya kolaborasi, adaptasi, dan inovasi yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia selama pandemi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

ISBN 978-602-244-916-4 (PDF)



9 786022 449164